



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18

Jakarta 10110

website : www.esdm.go.id



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KESDM TAHUN 2010



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KESDM TAHUN 2010



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2011

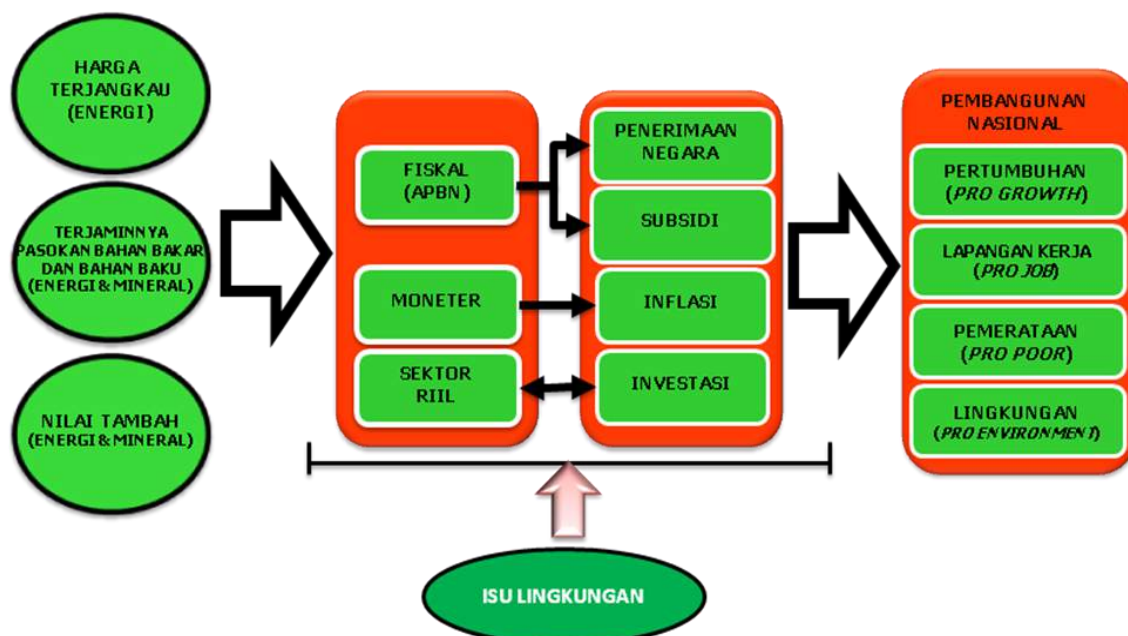
RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010

Berdasarkan Perpres 24 tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, **tugas** Kementerian ESDM adalah menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi antara lain: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral; pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ESDM; dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran tersebut meliputi berbagai aspek yang dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

PERAN SEKTOR ESDM



Gambar 0.1. Peran Sektor ESDM

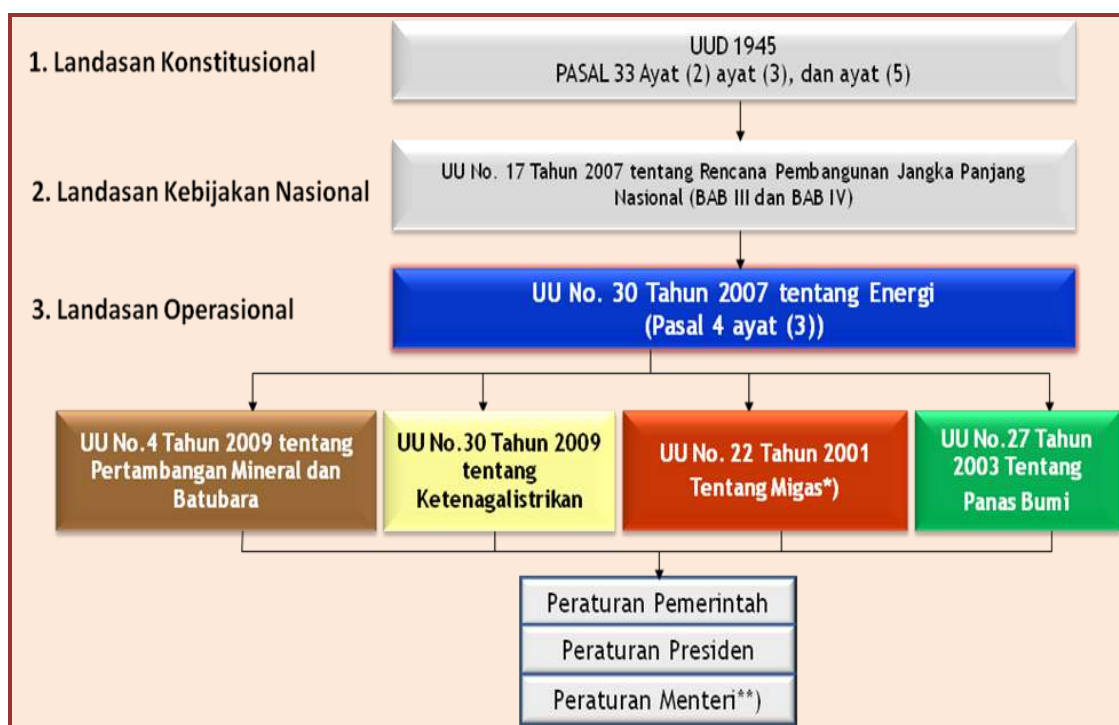
Sektor ESDM tetap menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional, baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor riil. Disamping itu sektor ESDM juga memiliki peranan penting yaitu sebagai **penjamin sumber pasokan** (energi dan minerba) yang didukung oleh **harga energi yang terjangkau** dan kemampuan **meningkatkan nilai tambah**.

Dari sisi **fiskal**, sektor ESDM berkontribusi terhadap penerimaan negara (**revenue**) tapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi **subsidi** energi. Dari **moneter**, komoditas ESDM yang bersifat **administered price** akan berperan terhadap besaran/dinamika **inflasi** nasional. Sedangkan dari **sektor riil**, secara timbal balik, sektor ESDM berperan terhadap tumbuhnya **investasi** dan di saat bersamaan juga membutuhkan **investasi** untuk berkembang.

Semua ini pada akhirnya akan menjadi landas gerak untuk **pembangunan nasional** yang dilakukan melalui **four tracks** yaitu pertumbuhan (**pro-growth**), penciptaan lapangan kerja (**pro-job**), pemerataan pembangunan dengan orientasi pengentasan kemiskinan (**pro-poor**), dan kepedulian terhadap lingkungan (**pro-environment**).

Peran Kementerian ESDM tersebut juga dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang sudah sesuai dengan hirarki. Dimulai dari landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), (3) dan (5), kemudian landasan kebijakan nasional yaitu RPJP dan landasan operasional yang terdiri dari 5 Undang-undang dan peraturan turunannya sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara.

KERANGKA LEGISLASI KESDM



Gambar 0.2. Kerangka Legislasi ESDM

Dalam implementasi pola pikir pengelolaan energi dan sumber daya mineral nasional dijabarkan menjadi 7 tujuan dan 14 sasaran strategis yang saling terkait untuk melaksanakan peran ESDM sebagai **penjamin sumber pasokan** (energi dan minerba) yang didukung oleh **harga energi yang terjangkau** dan kemampuan **meningkatkan nilai tambah**

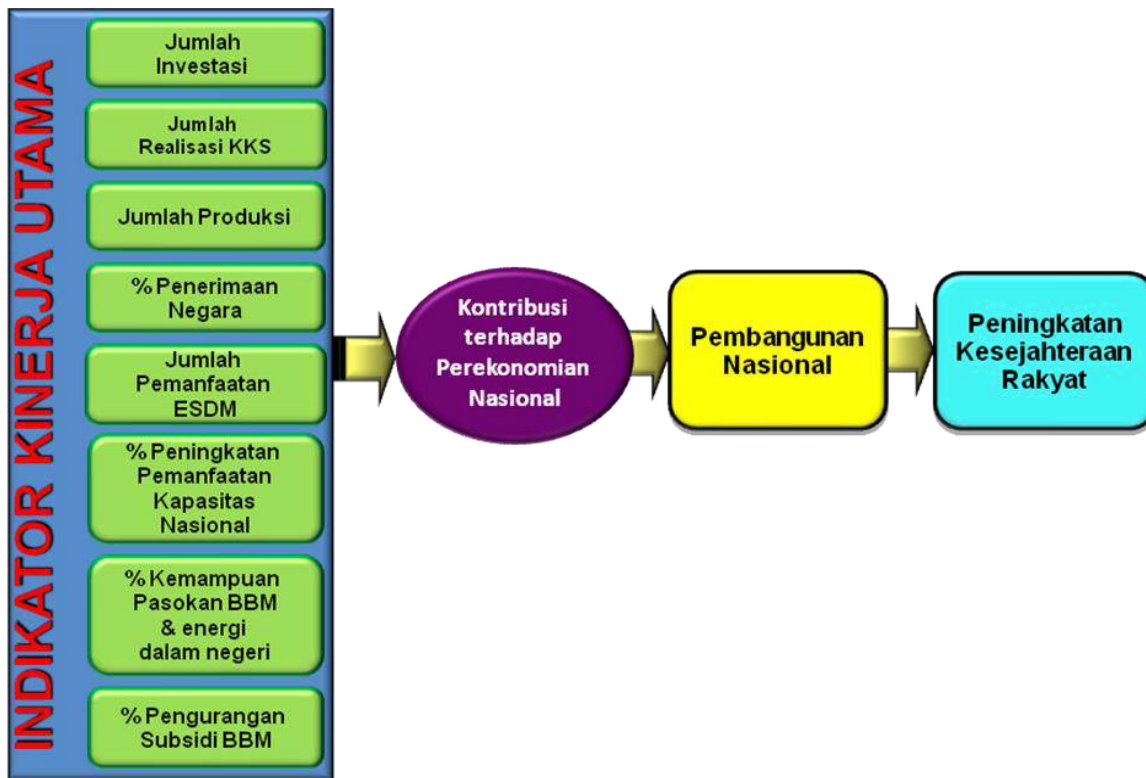
PEMETAAN TUJUAN DAN SASARAN



Gambar 0.3. Pemetaan Tujuan dan Sasaran

Perwujudan tujuan dan sasaran strategis di atas membutuhkan proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya ukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis ini dilakukan melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA



8

Gambar 0.4. Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana terlihat dalam bagan di atas, kinerja utama Sektor ESDM dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional, antara lain: penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik serta efek berantai termasuk menciptakan lapangan kerja, yang secara tidak langsung akan memperbaiki *Human Development Index* (HDI).

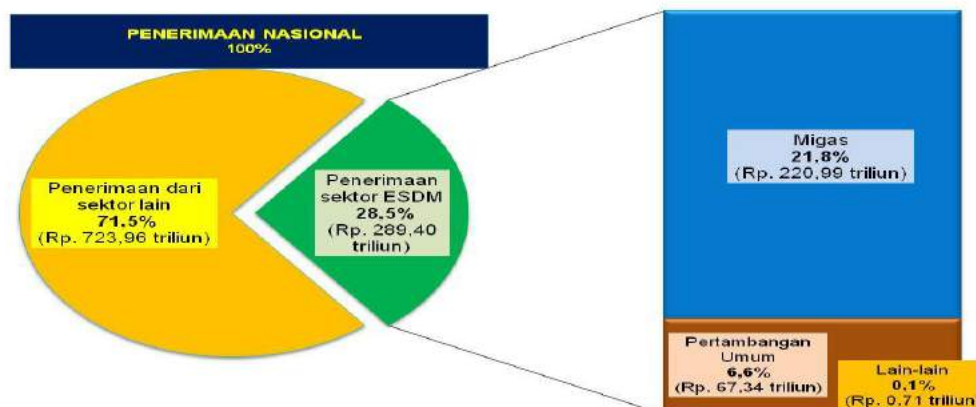
LAKIP KESDM Tahun 2010 merupakan LAKIP yang pertama di awal tahun pelaksanaan Rencana Strategis KESDM Tahun 2010-2014, setelah selesainya pelaksanaan Renstra KESDM periode sebelumnya (Tahun 2005-2009), oleh sebab itu disamping melaporkan perbandingan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2010, dalam LAKIP Tahun 2010 ini juga berisi informasi capaian kinerja yang relevan dari Renstra periode sebelumnya.

Pada Tahun 2010 ini, telah dilaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelaksanaan kebijakan ESDM. Hasil-hasil capaian strategis dari berbagai kegiatan Kementerian ESDM selama kurun waktu tersebut diuraikan, sebagai berikut:

Penggerak Utama Perekonomian Nasional

Penerimaan sektor ESDM sebesar Rp. 289.4 triliun atau 104% dari target sebesar Rp. 276,85 triliun. Kontribusi terbesar diperoleh dari penerimaan migas Rp. 220,98 triliun, diikuti dengan penerimaan pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi) sebesar Rp. 67,34 triliun, dan penerimaan lainnya (Jasa penelitian, dan pendidikan, BPH Migas) Rp. 0,71 triliun.

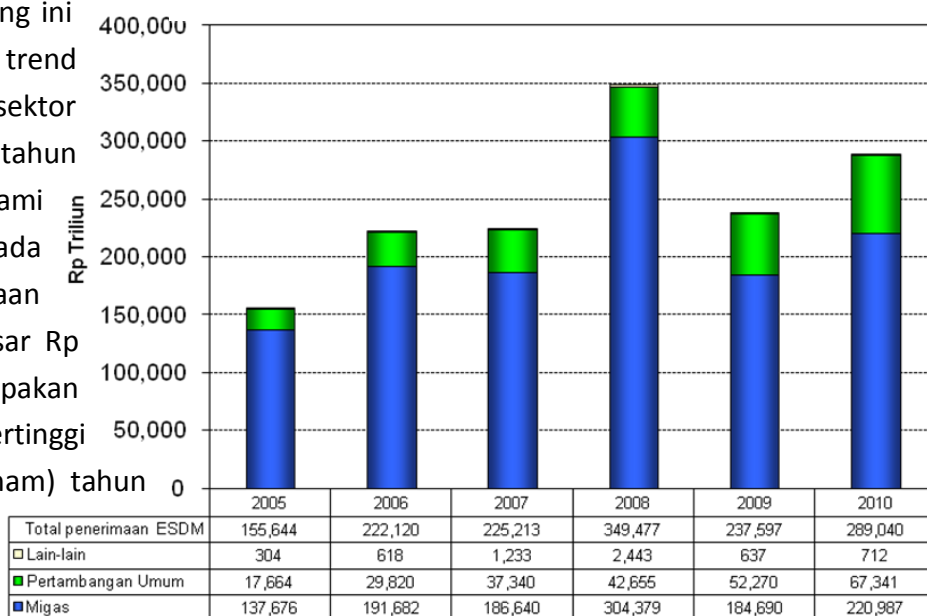
Selanjutnya peran atau kontribusi penerimaan negara sektor ESDM terhadap APBN adalah sebesar 28,4%, seperti dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 0.5. Penerimaan Nasional

Secara rinci grafik di samping ini menunjukkan bahwa trend realisasi penerimaan sektor ESDM dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2008 penerimaan negara sektor ESDM sebesar Rp 349,47 Triliun merupakan penerimaan Negara tertinggi selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, hal ini disebabkan antara lain oleh tingginya harga minyak mentah Indonesia

PENERIMAAN NEGARA SEKTOR ESDM



Grafik 0.1. Penerimaan Negara Sektor ESDM

(ICP) yang sempat mencapai US\$ 135/barel. Hal ini merupakan bukti tentang peran sektor ESDM dalam penerimaan APBN.

Perlu diinformasikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2010 telah memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 8,06 triliun. Oleh sebab itu, merujuk pada grafik sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja tersebut jauh lebih kecil

jika dibandingkan dengan total penerimaan ESDM sebesar Rp 289 Triliun. Hasil perbandingan ini merupakan bukti penting kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya melalui peningkatan penerimaan negara serta peningkatan investasi.

Peningkatan Produksi Energi Nasional

Grafik 0.2. Produksi Energi Fosil

Untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi nasional yang terus bertumbuh maka dibutuhkan adanya peningkatan produksi energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan.

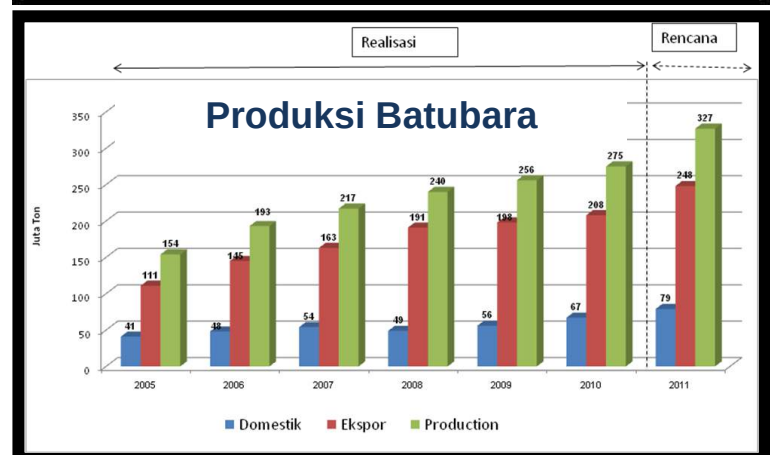
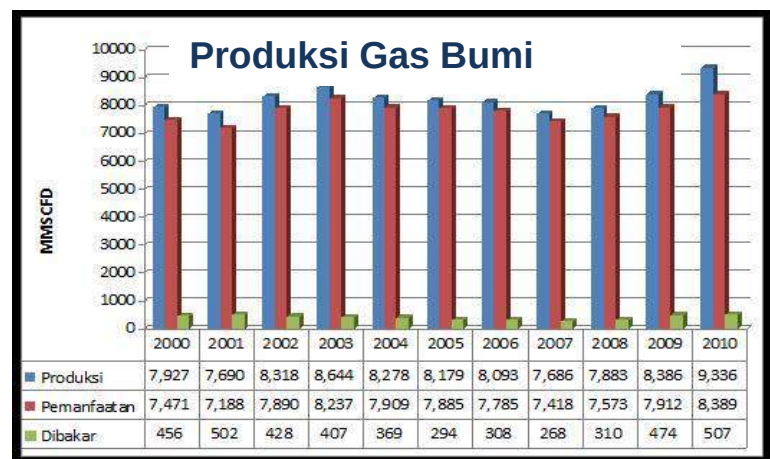
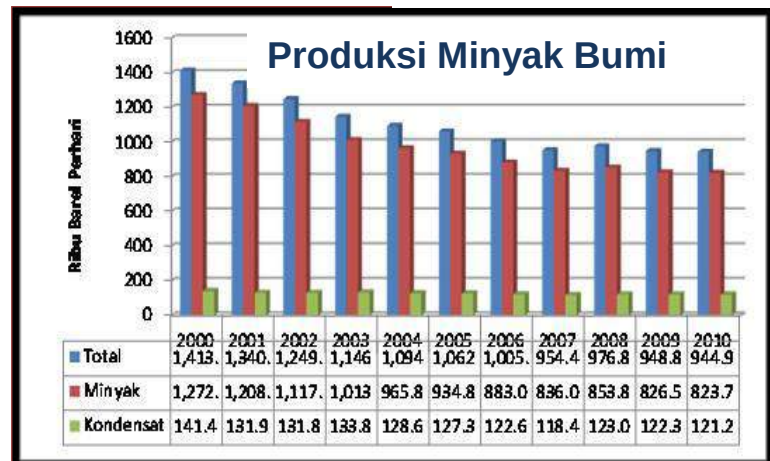
Meskipun produksi minyak bumi di tahun 2010 ini masih dibawah target yang diharapkan, namun terjadi peningkatan produksi pada komoditi gas bumi dan batubara, sehingga jika produksi energi fosil dilihat secara utuh terlihat capaian yang memuaskan dimana total realisasi produksi energi fosil sebesar 5,7 ribu barel *oil equivalen per day* (boepd) atau 102% dari target sebesar 5,6 ribu boepd. Bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2009 dimana total

produksi energi fosil mencapai 5.313 ribu BOEPD, pada tahun 2010 produksi energi fosil ini mengalami peningkatan sebesar 7,25%.

Disamping ini adalah grafik yang memperlihatkan jumlah produksi energy fosil per komoditi dalam 5 tahun terakhir.

Pembangunan Daerah

Disamping sebagai kontributor penting terhadap penerimaan nasional, sektor ESDM juga turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan *community development* (comdev) dan *corporate social responsibility* (CSR), listrik perdesaan, program Desa Mandiri Energi (DME) dan penyediaan air bersih (pemboran air tanah).

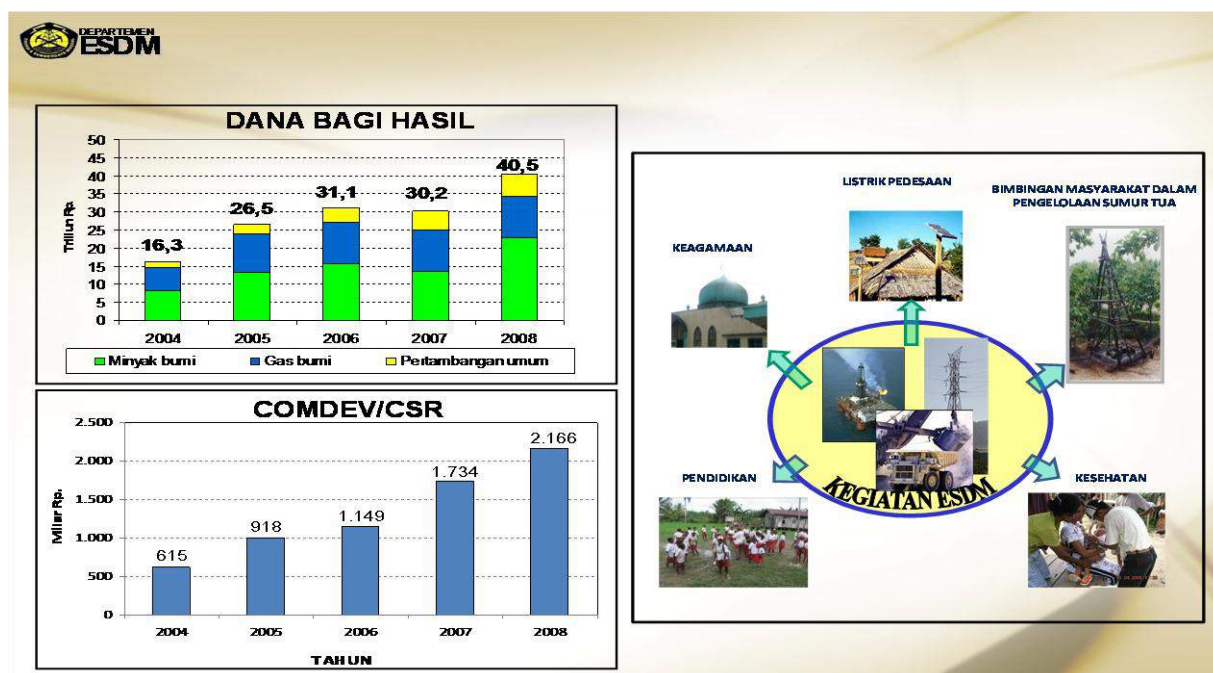


Capaian kinerja mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 0.1.
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sektor ESDM

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah dana bagi hasil sector ESDM	Rp Triliun	38.9	35.8	92.2%
	Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum	Rp Triliun	9.9	10,73	108.4%
	Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas	Rp Triliun	29	25,1	86.6%
2.	Jumlah CSR sector ESDM	Rp Miliar	1.614	1.467,5	90.9%
	Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum	Rp Miliar	1.308,2	952,2	72.8%
	Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	Rp Miliar	90.3	90.3	100%
	Jumlah CSR subsektor Migas	Rp Miliar	215.5	425	197.2%
3.	Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik	Kms/MVA	2.694/45,17	2.694/45,17	100%
4.	Jumlah desa mandiri energi (DME)	DME	50	50	100%
5.	Jumlah sumur bor daerah sulit air	Titik Bor	100	100	100%

Kontribusi Sektor ESDM dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 0.6. Kontribusi ESDM dalam Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kemampuan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Ketergantungan terhadap kebutuhan energi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, sedangkan kemampuan ketersediaan sumberdaya energi konvensional dari waktu ke waktu mengalami penurunan akibat eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan energi alternatif. Capaian kinerja usaha ini dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2.
Indikator Kinerja Pemanfaatan Energi Terbarukan

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN)	KL	2.258,7 ribu	2.563.0 ribu	113,47%
2	Kapasitas terpasang Energi Baru Terbarukan (selain PLTP dan PLTA)	KW	1.074,99	1.061,56	98,75%
3	Pangsa energi terbarukan	%	11	3,55	66,36%
4	Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik (Non BBM):	%	80,4	88	109,5%

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Pangsa Minyak Bumi	%	30	25	83.3%
	Pangsa Gas Bumi	%	24,5	26	106.1%
	Pangsa batubara	%	23,3	35	150.2%
	Pangsa panas bumi	%	2,6	2	76.9%
5	Pangsa energi baru terbarukan lainnya (tenaga air)	%	8	12	150%
6	Elastisitas Energi	%	1,64	1.8	91.1%

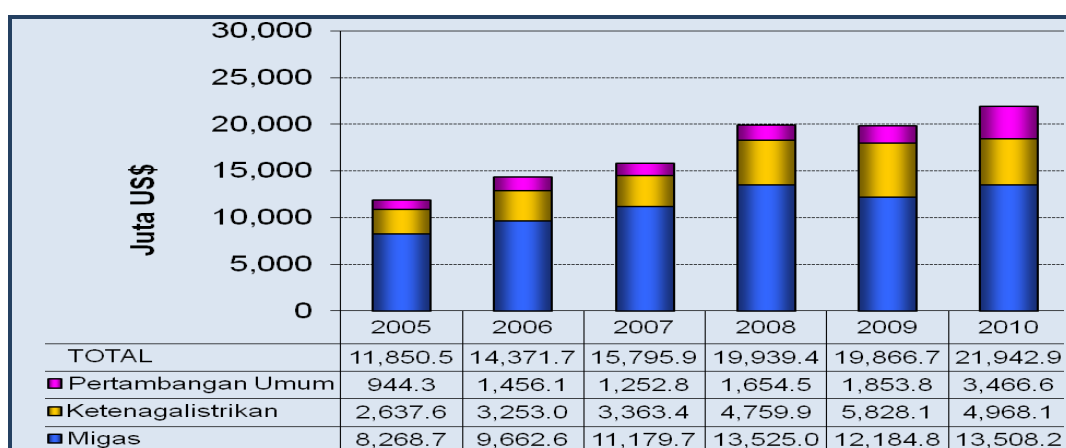
Meningkatnya Jumlah Investasi Sektor ESDM

Peningkatan jumlah produksi ESDM tidak dapat di lepaskan dari pertumbuhan jumlah investasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjamin ketersediaan energi dan sumber daya mineral secara merata dan berkesinambungan juga dibutuhkan adanya pertumbuhan jumlah investasi.

Realisasi investasi sektor ESDM pada tahun 2010 ini mencapai US\$ 21.942,8 juta, angka ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar US\$ 24.638,3 juta. Hal tersebut menjadi *lesson learned* bagi Kementerian ESDM untuk peningkatan kinerja kedepan. Namun jika dibandingkan dengan investasi tahun 2009 sebesar US\$ 19,866,7 juta (*year to date*), terdapat peningkatan investasi sebesar 10%.

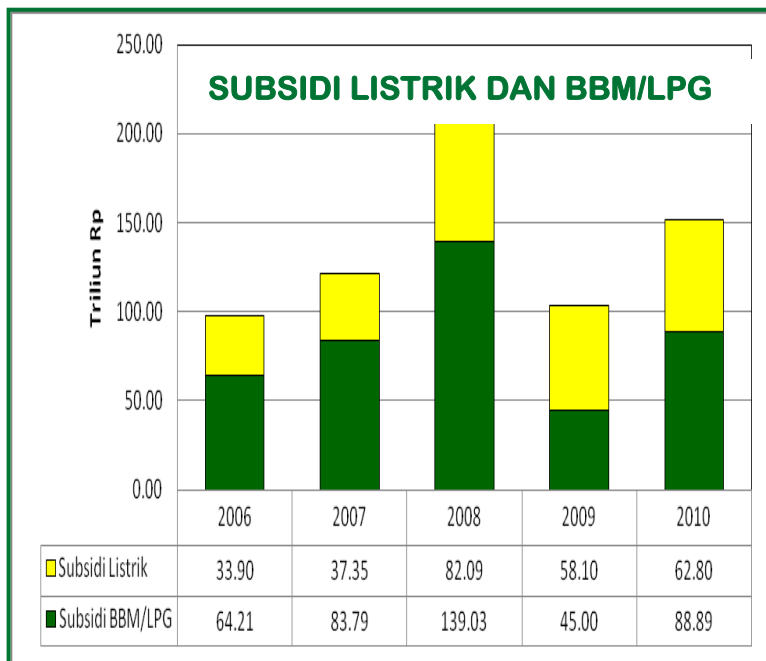
Perkembangan nilai investasi sektor energi dan sumber daya mineral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

NILAI INVESTASI SEKTOR ESDM



Grafik 0.3. Nilai Investasi Sektor ESDM

Berkurangnya Subsidi BBM Sehingga Mengurangi Beban APBN



Grafik 0.4. Subsidi Listrik dan BBM/LPG

Salah satu *outcome* akhir yang ingin dicapai oleh KESDM adalah berkurangnya subsidi BBM guna mengurangi beban APBN. Subsidi energi yang terdiri dari subsidi untuk BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari konsumsi dan harga minyak. Grafik di samping ini menunjukkan perkembangan subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir.

Jumlah subsidi BBM, BBN, dan LPG di tahun 2010 ini mencapai Rp 82,35 Triliun atau 92,6% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena realisasi subsidi BBM, BBN dan LPG yang jauh dibawah kuota akibat penguatan nilai kurs rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah subsidi di tahun 2009, pada tahun 2010 ini jumlah subsidi mengalami peningkatan yang hampir 2 kali lipat, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah konsumsi BBM akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor

Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Pemberdayaan kapasitas nasional sektor ESDM diukur dari 2 indikator kinerja yaitu penggunaan kandungan lokal (produk dalam negeri) dan penggunaan tenaga kerja lokal. Realisasi peningkatan pemberdayaan nasional di tahun 2010 ini mencapai 55,5% dari target sebesar 57,5%, atau capaian kinerja sebesar 96, 5%. Penghitungan kinerja utama ini dicapai oleh 2 indikator pendukung yaitu :

Tabel 0.3.
Indikator Kinerja Pemberdayaan kapasitas Nasional

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (Migas dan Pertambangan Umum)	%	57.5	55.5	96,5%
Jumlah tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (Migas dan Pertambangan Umum)	Orang	439.809	434.522	99%

Meningkatnya Kemampuan Pengungkapan dan Pemanfaatan Potensi ESDM

Kegiatan eskplorasi dan eksploitasi ESDM bukanlah pekerjaan yang mudah sebab umumnya potensi di sektor ini berada di dalam perut bumi. Oleh sebab itu, dituntut kemampuan penguasaan teknologi yang tinggi. Terkait dengan hal ini maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan pengungkapan dan pemanfaatan potensi ESDM guna meningkatkan jumlah produksi yang akhirnya akan menjamin ketersediaan pasokan ESDM dalam negeri secara berkesinambungan.

Selanjutnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ESDM harus didukung dengan penyediaan basis data yang baik (misalnya berupa data usulan WKP, peta geologi, data dan informasi mitigasi), produk penelitian dan pengembangan (misalnya berupa paten dan hak cipta, makalah dan pilot plant serta demo plant). Oleh sebab itu, capaian kinerja sasaran ini juga digambarkan melalui berbagai indikator kinerja sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 0.4.
Indikator Kinerja Pengungkapan dan pemanfaatan Potensi ESDM

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan	Peta	65	65	100%
2.	Jumlah usulan Paten dan Hak Cipta	Buah	6	6	100%
3.	Jumlah masukan/ rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	29	47	162.1%
4.	Pertambahan makalah Ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional dan	Makalah	109	115	105.5%

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Laporan Ilmiah				
5.	Jumlah pilot plant, demo plant atau rancangan/produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	Pilot plant	24	21	87.5

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Salah satu komitmen utama pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2004-2009 adalah perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan hal ini dapat digambarkan melalui berbagai indikator antara lain: (1) pengelolaan keuangan Negara melalui kualitas laporan keuangan; (2) penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; (3) penerapan manajemen berbasis kinerja. Secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang terkait dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik telah menunjukkan capaian kinerja yang memuaskan. Sebagai contoh opini hasil audit BPK terhadap laporan keuangan KESDM adalah **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP), sedangkan capaian kinerja lainnya adalah:

Tabel 0.5.
Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu	LHP/ MHP	160	163	101.9%
2.	Penyelesaian kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara	Rp	4.067.203.020	4.067.203.020	100%
		US\$.	7,250,000.00	7,250,000.00	100%
3.	Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil	%	100	100	100%
4.	Opini BPK terhadap LK	Opini BPK	WTP	WTP	100%
5.	Prosentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP secara tepat waktu	%	100	100	100%

Berdasarkan evaluasi internal atas LAKIP DESDM dapat disimpulkan bahwa meskipun secara umum realisasi kinerja telah sesuai dengan harapan, namun masih diperlukan komitmen dan langkah-langkah strategis melalui penajaman berbagai program dan kegiatan, sehingga hasil pembangunan sektor ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guna menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, Kementerian ESDM berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan rahmat-NYA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2010 secara tepat waktu.

LAKIP KESDM Tahun 2010 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan sekaligus juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM selama tahun anggaran 2010.

Keberhasilan LAKIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat KESDM dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Selain menyajikan segi keberhasilan pelaksanaan misi organisasi, LAKIP ini juga menguraikan pencapaian target kegiatan yang belum berhasil pada tahun anggaran 2010. Oleh karena itu, LAKIP KESDM tahun 2010 ini juga merupakan pengejawantahan prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan perwujudan nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Disamping itu penyusunan LAKIP KESDM tahun 2010 dimaksudkan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja, serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan KESDM pada tahun berikutnya.

Dengan dukungan sumber daya yang ada, termasuk anggaran KESDM dalam APBN 2010 sebesar Rp. 8.058,54 miliar, sektor energi dan sumber daya mineral makin nyata mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pembangunan nasional (*pro growth*), antara lain melalui peningkatan penerimaan negara dan secara langsung dan tidak langsung turut meningkatkan penciptaan lapangan kerja (*pro job*).

Sebagai tahun pertama pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010 – 2014 dan Rencana Strategis KESDM 2010 – 2014, selain pelaksanaan program yang mendukung pertumbuhan (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), upaya untuk turut serta mengentaskan kemiskinan (*pro poor*), juga menjadi salah satu kegiatan yang terus dilaksanakan KESDM, yaitu antara lain melalui pembentukan Desa Mandiri Energi, penyediaan air bersih, peningkatan listrik perdesaan dan melanjutkan program CSR.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor ESDM, secara umum berbagai target hasil pembangunan Sektor ESDM telah berhasil dicapai dengan baik. Bahkan untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), target dapat dilampaui secara signifikan seperti penerimaan

negara sektor energi dan sumber daya mineral realisasinya mencapai 104% dari target yang ditetapkan dalam APBN, selain itu meskipun produksi minyak bumi masih dibawah target yang diharapkan, namun terjadi peningkatan produksi pada komoditi gas bumi dan batubara, sehingga jika produksi energi fosil dilihat secara keseluruhan terlihat capaian dimana total realisasi produksi energi fosil sebesar 5,7 ribu barel *oil equivalent per day* (boepd) atau 102% dari target sebesar 5,6 ribu boepd.

Melalui laporan ini, Kementerian ESDM berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor ESDM.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP KESDM Tahun 2010 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Maret 2011
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral,

ttd
Dr. Darwin Zahedy Saleh

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR ISTILAH

i
xvii
xix

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Isu dan Kondisi Lingkungan Strategis Terkait Pengelolaan ESDM
1.2. Ringkasan Kinerja Sektor ESDM Tahun 2005-2009
1.3. Peran dan Posisi KESDM Sebagai Regulator
1.4. Tugas dan Fungsi KESDM

xxi

1
6
14
16

BAB 2 RPJM 2010 – 2014
25 2.1. Kondisi Umum
25 2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
25.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
32 2.4. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan
2.5. Strategi dan Arah Kebijakan
2.5. Program Pembangunan dan Target Tahun 2010 Sektor ESDM

25
26
28
33
37

BAB 3 PERENCANAAN STRATEGIS
3.1. Visi dan Misi
3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3.3. Indikator Kinerja Utama

42
43
53

BAB 4 RENCANA KINERJA
4.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 - Sektor ESDM
4.2. Kebijakan dan Strategi Tahun 2010 - Sektor ESDM
4.3. Rencana Kinerja Tahun 2010 - Kementerian ESDM

55
55
59
66

DAFTAR ISI

BAB 5 AKUNTABILITAS KINERJA

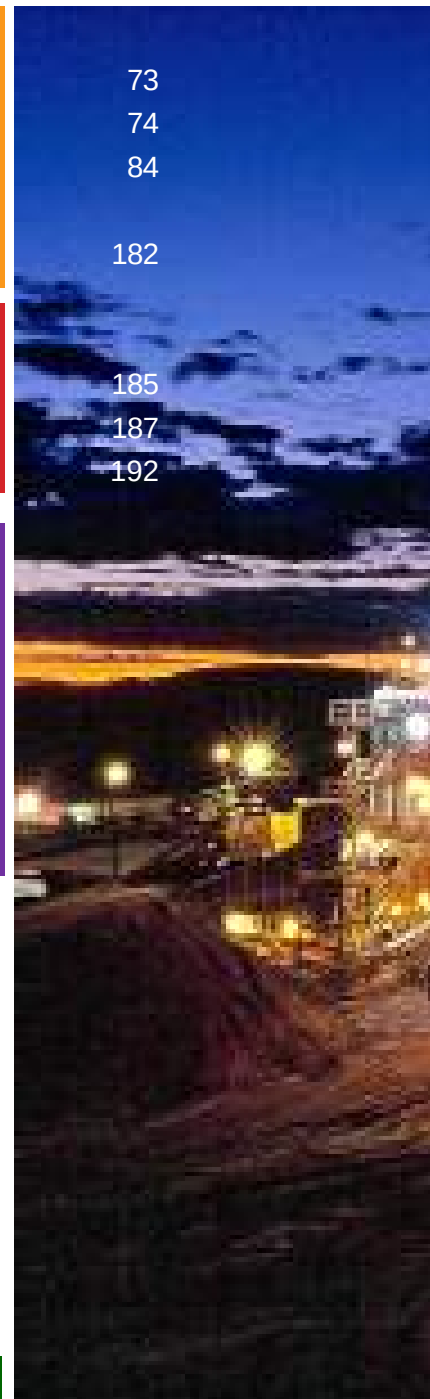
5.1. Gambaran Umum Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010	73
5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	74
5.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis	84
5.4. Capaian Kinerja Sasaran Penunjang	
5.5. Akuntabilitas Keuangan	182

BAB 6 . PENUTUP

6.1. Capaian Kinerja Utama	185
5.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	187
5.3. Komitmen Langkah Perbaikan ke Depan	192

LAMPIRAN:

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2010
2. Kegiatan Pemboran Air Tanah Tahun 2010
3. Kesepakatan Kerja Sama Sektor ESDM Tahun 2010
4. Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan Tahun 2010
5. Bantuan Hukum dan Kasus yang Dimenangkan Tahun 2010
6. Penetapan Kinerja Tahun 2011



DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.	Penggunaan Kapasitas Nasional Tahun 2005-2009
Tabel 1.3.	Kegiatan Perlindungan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung Dari Kerusakan Akibat Eksploitasi Di Sektor ESDM
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral TMT 1 Maret 2011
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral TMT 1 Maret 2011
Tabel 2.1.	Sasaran Pembnagunan Nasional Sektor ESDM
Tabel 3.1.	Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Tabel 3.2.	Target Indikator Kinerja Utama
Tabel 4.1.	Rencana Investasi Sektor ESDM
Tabel 4.2.	Tujuan 1: Terjaminnya pasokan energy dan bahan baku domestik domestik
Tabel 4.3.	Tujuan 2: Meningkatkan investasi sektor ESDM
Tabel 4.4.	Tujuan 3: Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan Negara
Tabel 4.5.	Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam Pembangunan daerah
Tabel 4.6.	Tujuan 5: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik
Tabel 4.7.	Tujuan 6: Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus Neraca perdagangan dengan mengurangi impor
Tabel 4.8.	Tujuan 7: Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan
Tabel 5.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 5.2.	Jumlah Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas dan Wilayah Kerja (WK) CBM
Tabel 5.3.	Realisasi Produksi dan Konsumsi Domestik Mineral
Tabel 5.4.	Indikator Kinerja Pemberdayaan Kapasitas Nasional
Tabel 5.5.	Produksi, Konsumsi dan Impor BBM
Tabel 5.6.	Indikator Kinerja Sasaran 1
Tabel 5.7.	Produksi Energi Fosil
Tabel 5.8.	Neraca Supply Demand Batubara Indonesia
Tabel 5.9.	Pemanfaatan Batubara Untuk Keperluan Domestik
Tabel 5.10.	Produksi Mineral
Tabel 5.11.	Indikator Kinerja Sasaran 2
Tabel 5.12.	Indikator Kinerja Sasaran 3
Tabel 5.13.	Pangsa Energi Primer
Tabel 5.14.	Indikator Kinerja Sasaran 4
Tabel 5.15.	Kapasitas Pembangkit dan Produksi Tenaga Listrik
Tabel 5.16.	Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan
Tabel 5.17.	Indikator Kinerja Sasaran 5
Tabel 5.18.	Realisasi dan Target Elastisitas Energi Tahun 2005-2010
Tabel 5.19.	Indikator Kinerja Sasaran 6
Tabel 5.20.	Data Investasi Sub Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi



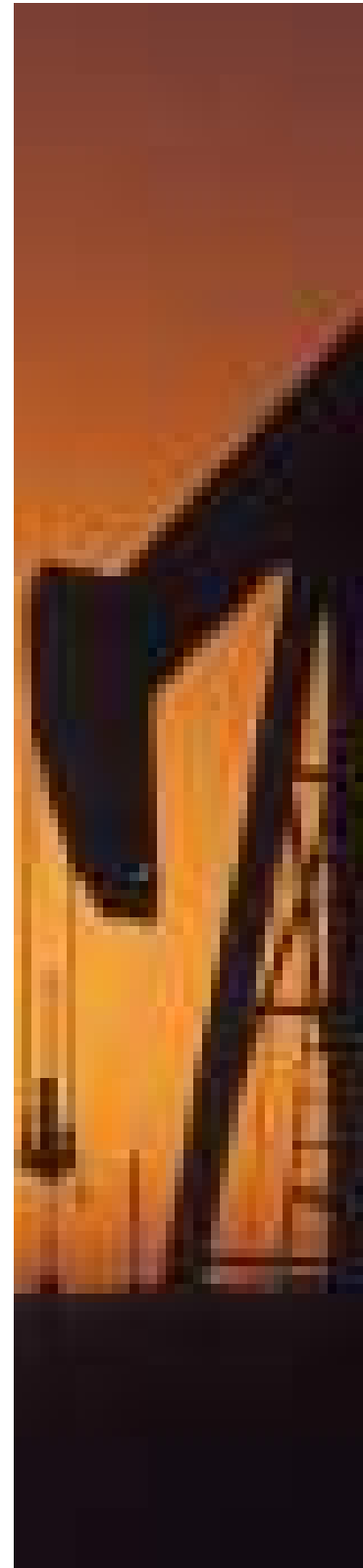
DAFTAR TABEL

Tabel 5.21. Indikator Kinerja Sasaran 7
Tabel 5.22. Realisasi Penerimaan Negara Mineral dan Batubara
Tabel 5.23. Indikator Kinerja Sasaran 8
Tabel 5.24. Dana bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara
Tabel 5.25. Dana bagi Hasil Sub Sektor Migas
Tabel 5.26. Perkembangan Penerimaan dan DBH Sub Sektor Migas
Tabel 5.27. Penggunaan Dana Comdev dan CSR Sektor ESDM
Tabel 5.28. Pembangunan Listrik Perdesaan
Tabel 5.29. Pembangunan Gardi dan Jaringan Distribusi
Tabel 5.30. Kapasitas Terpasang Energi Alternative
Tabel 5.31. Desa Mandiri Energi
Tabel 5.32. Jumlah Lokasi Pengeboran Air Tanah
Tabel 5.33. Indikator Kinerja Sasaran 9
Tabel 5.34. Perbandingan Realisasi Subsidi Energi Tahun 2009-2010
Tabel 5.35. Indikator Kinerja Sasaran 10
Tabel 5.36. Produksi, Konsumsi dan Impor BBM
Tabel 5.37. Indikator Kinerja Sasaran 11
Tabel 5.38. Tenaga Kerja Nasional dan asing Sektor ESDM
Tabel 5.39. Tenaga Kerja Sub Sektor Ketenagalistrikan
Tabel 5.40. Tenaga Kerja Sub Sektor Pertambangan Umum
Tabel 5.41. Indikator Kinerja Sasaran 12
Tabel 5.42. Rasio TKN dan TKA
Tabel 5.43. Rencana Impor Barang Operasi Migas dan Intervensi Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Impor 2006-2010
Tabel 5.44. Indikator Kinerja Sasaran 13
Tabel 5.45. Kemampuan Produksi dalam Negeri
Tabel 5.46. Indikator Kinerja Sasaran 14
Tabel 5.47. Indikator Kinerja Sasaran 1 Penunjang
Tabel 5.48. Indikator Kinerja Sasaran 2 Penunjang
Tabel 5.49. Wilayah Kerja Panas Bumi
Tabel 5.50. WUP, WPN, WIUP baru Mineral Logam
Tabel 5.51. Indikator Kinerja Sasaran 3 Penunjang
Tabel 5.52. Indikator Kinerja Sasaran 4 Penunjang
Tabel 5.53. Capaian Kinerja KESDM
Tabel 5.54. Rancangan Peraturan Per Undang-Undangan
Tabel 5.55. Rasio Berita Positif, Negatif dan Netral
Tabel 5.56. Indikator Kinerja Sasaran 5 Penunjang
Tabel 5.57. Indikator Kinerja Sasaran 6 Penunjang
Tabel 5.58. Indikator Kinerja Sasaran 7 Penunjang
Tabel 5.59. Realisasi Anggaran KESDM Per unit Eselon I
Tabel 5.60. Realisasi Anggaran KESDM Per Program



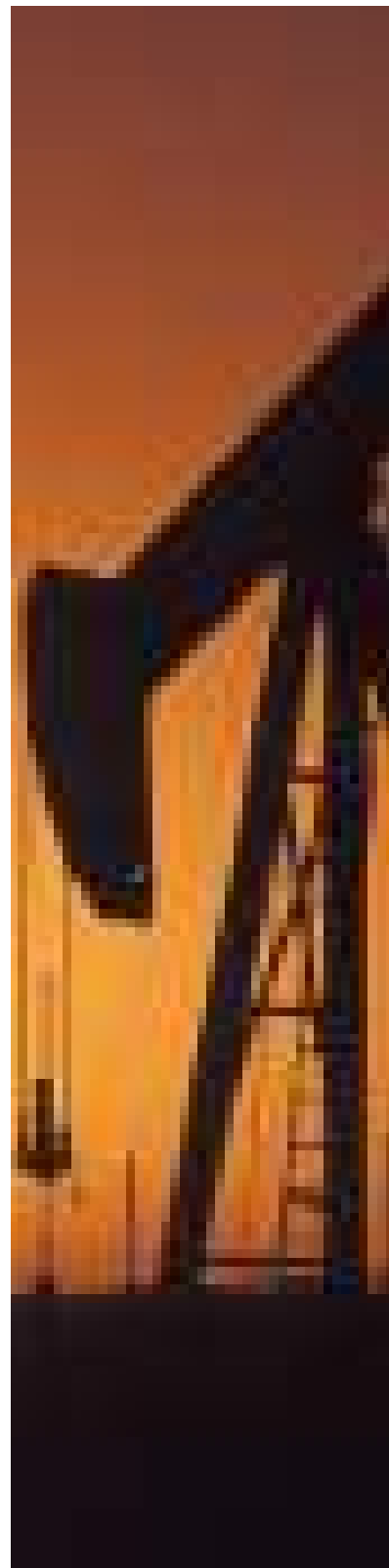
DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1. Produksi Minyak Bumi
- Grafik 1.2. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi
- Grafik 1.3. Nilai Investasi Sektor ESDM
- Grafik 1.4. Perkembangan Penerimaan Negara Sektor ESDM
- Grafik 1.5. Produksi Energi Fosil
- Grafik 1.6. Nilai Investasi Sektor ESDM
- Grafik 1.7. Subsidi Energi
- Grafik 1.8. Pangsa Energi Primer
- Grafik 5.1. Produksi, Konsumsi dan Subsidi BBM
- Grafik 5.2. Produksi dan Pemanfaatan Batubara
- Grafik 5.3. Produksi Minyak Bumi
- Grafik 5.4. Trend Produksi Migas Dunia
- Grafik 5.5. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi
- Grafik 5.6. Proyeksi Produksi dan Pemanfaatan Batubara
- Grafik 5.7. Produksi, Konsumsi dan Subsidi BBM 5 Tahun terakhir
- Grafik 5.8. Supply- Demand BBM dan Rencana Pembangunan Kilang
- Grafik 5.9. Produksi LPG Supply- Demand BBM
- Grafik 5.10. Supply- Demand LPG
- Grafik 5.11. Produksi LNG
- Grafik 5.12. Pangsa Energi Primer
- Grafik 5.13. Perkembangan Ratio Elektrifikasi
- Grafik 5.14. Total Panjang jaringan Transmisi Tenaga Listrik
- Grafik 5.15. Perbandingan Elastisitas Energi Indonesia dan Negara Lain
- Grafik 5.16. Intensitas energi dan konsumsi energi di dunia perkapita
- Grafik 5.17. Nilai Investasi Sektor ESDM
- Grafik 5.18. Investasi Sub Sektor Migas
- Grafik 5.19. Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan
- Grafik 5.20. Penerimaan Sektor ESDM
- Grafik 5.21. Penerimaan sub sektor Migas
- Grafik 5.22. Dana Bagi Hasil Sektor ESDM
- Grafik 5.23. Titik Pemboran Air Tanah
- Grafik 5.24. Masyarakat yang dapat menikmati air bersih
- Grafik 5.25. Kebijakan dan Volume BBM Bersubsidi
- Grafik 5.26. Perkembangan subsidi BBM/LPG dan Listrik (2006-2010)
- Grafik 5.27. Perkembangan Subsidi BBM
- Grafik 5.28. Perkembangan Target dan Realisasi Subsidi BBM
- Grafik 5.29. Neraca Perdagangan Sektor ESDM
- Grafik 5.30. Supply Demand BBM dan Rencana Pembangunan Kilang
- Grafik 5.31. Tenaga Kerja Nasional dan Asing sector ESDM
- Grafik 5.32. Rencana Kebutuhan Barang Impor
- Grafik 5.33. Jumlah Titik Pemboran Air Tanah
- Grafik 5.34. Jumlah Masyarakat Yang Dapat Menikmati Air Bersih



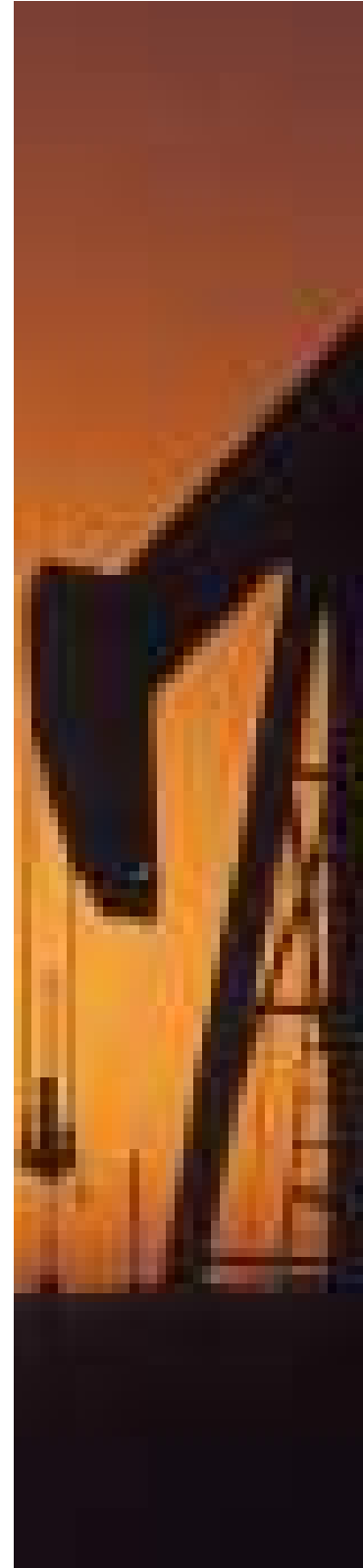
DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Peta Cadangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
- Gambar 1.2. Peta Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Mineral Indonesia
- Gambar 1.3. Penerimaan Nasional Tanun 2010
- Gambar 1.4. Bahan Baku Bahan Bakar Nabati
- Gambar 1.5. Jenis Pembangkit Energi Baru Terbarukan
- Gambar 1.6. Kegiatan pemboran endapan lumpur di Bleduk Kuwu, Purwodadi, Jateng
- Gambar 1.7. Peta Sebaran Desa Mandiri Energi
- Gambar 1.8. Pengelolaan Sub Sektor Migas
- Gambar 1.9. Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan
- Gambar 1.10. Pengelolaan Sub Sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi
- Gambar 1.11. Tugas pokok dan Fungsi KESDM
- Gambar 1.12. Struktur Organisasi Kementerian ESDM
- Gambar 1.13. Kekuatan PNS KESDM TMT Maret 2011
- Gambar 1.14. Kekuatan PNS KESDM Menurut Pendidikan
- Gambar 3.1. Isu Strategis Terkait Pengelolaan ESDM
- Gambar 3.2. Hubungan antara Tujuan Strategis
- Gambar 3.3. Pemetaan Tujuan dan sasaran
- Gambar 3.4. Indikator Kinerja Utama KESDM
- Gambar 4.1. Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral
- Gambar 4.2. Cekungan Migas Indonesia
- Gambar 4.3. Cekungan Batubara dan CBM Indonesia
- Gambar 4.4. Jalur Cepat Pengembangan BBN
- Gambar 5.1. Proses pengukuran dan monitoring kinerja
- Gambar 5.2. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2010
- Gambar 5.3. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2010
- Gambar 5.4. Peta Wilayah Kerja CBM di Indonesia
- Gambar 5.5. Pemanfaatan dan produksi gas Bumi
- Gambar 5.6. Jaringan Distribusi Gas Kota
- Gambar 5.7. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga
- Gambar 5.8. Peta Rasio Elektrifikasi Per Wilayah
- Gambar 5.9. Penerimaan Negara
- Gambar 5.10. Daerah Penghasil Migas
- Gambar 5.11. Pengelolaan Sumur Tua
- Gambar 5.12. Kegiatan CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5.13. Peta lokasi Pabrik Briket Batubara
Gambar 5.14. Desa Mandiri Energi
Gambar 5.15. Peta Sebaran Desa Mandiri Energi
Gambar 5.16. Dasar Penghitungan Subsidi Listrik
Gambar 5.17. Neraca Minyak Bumi/BBM Tahun 2010
Gambar 5.18. Neraca Gas Bumi Tahun 2010
Gambar 5.19. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi
Gambar 5.20. Neraca Miyak Bumi/BBM Tahun 2010
Gambar 5.21. Wilayah pemetaan Geologi Skala 1 : 50.000
Gambar 5.22. Dampak Letusan Gunung Merapi
tanggal 26 Oktober 2010 (kiri)
dan 3 November 2010 (kanan).
Gambar 5.23. Peta Geodinamika Gunung Bawah Laut Abang Komba
Gambar 5.24. Peta Anomali GeoMagnetik Kelautan
di Perairan Gunung Komba
Gambar 5.25. Peta Presentase Mineral Berat LP 2112, Teluk Bone
Gambar 5.26. Peta Anomali Magnet total LP 2112, Teluk Bone
Gambar 5.27. Presentase Mineral Berat LP 2113, Teluk Bone
Gambar 5.28. Peta Anomali Magnet total LP 2113, Teluk Bone
Gambar 5.29. Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut
Gambar 5.30. Karakteristik Pantai Daerah Tanjung Pontang, Banten
Gambar 5.31. Peta Kontur Kemagnetan Bumi LP. 2314,2315,2414
dan 2415 Maluku Utara



DAFTAR ISTILAH

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan
BBG	Bahan Bakar Gas
BBL	Bahan Bakar Lain
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBN	Bahan Bakar Nabati
BOEPD	Barrels of Oil Equivalent Per Day
BOPD	Barrels of Oil per Day
BP MIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPH MIGAS	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMD	Bahan Usaha Milik Daerah
BUMN	Bahan Usaha Milik Negara
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
CAR	Capital Adequacy Ratio/Rasio Kecukupan Modal
CBM	Coal Bed Methane
CNG	Compressed Natural Gas
CSR	Corporate Social Responsibility
DBH	Dana Bagi Hasil
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DME	Desa Mandiri Energi
EBT	Energi Baru Terbarukan
GDP	Gross Domestic Product
GMB	Gas Metana (Methane) Batubara
GSA	Gas Sales Agreement
GWh	Gigawatt hour
HoA	Head of Agreement
HOMC	High Octane Mogas Component
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPP	Independent Power Producers
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISO	International Organization for Standardization



DAFTAR ISTILAH

IUKU	Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KK	Kontrak Kerja
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama
KL	Kilo Liter
KP	Kuasa Pertambangan
KPK	Komisi Pemberantas Korupsi
kWh	Kilowatt Hour
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LNG	Liquefied Natural Gas
M. Ton	Metric Ton
MBCD	Thousand Barrels Per Calendar Day
MBOPD	Thousand Barrels of Oil Per Day
MBPD	Million Barrels Per Day
MHP	Mommandum Hasil Pemeriksaan
Mitan	Minyak Tanah
MK	Mahkamah Konstitusi
MMSCFD	Million Metric Standard Cubic Feet per Day
MMPA	Million Metric Tonne Per Annum
MTPA	Metric Tons Per Annum
MW	Megawatt
MWe	Megawatt electrical
NPL	Non Performace Loan
PDB	Produk Domestik Bruto
PEN	Pengolahan Energi Nasional
PETI	Pertambangan Tanpa Ijin
PKK	Pengukuran Kinerja Kegiatan
PKP2	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKUK	Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLT	Pembangkit Listrik Tenaga
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTB	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu



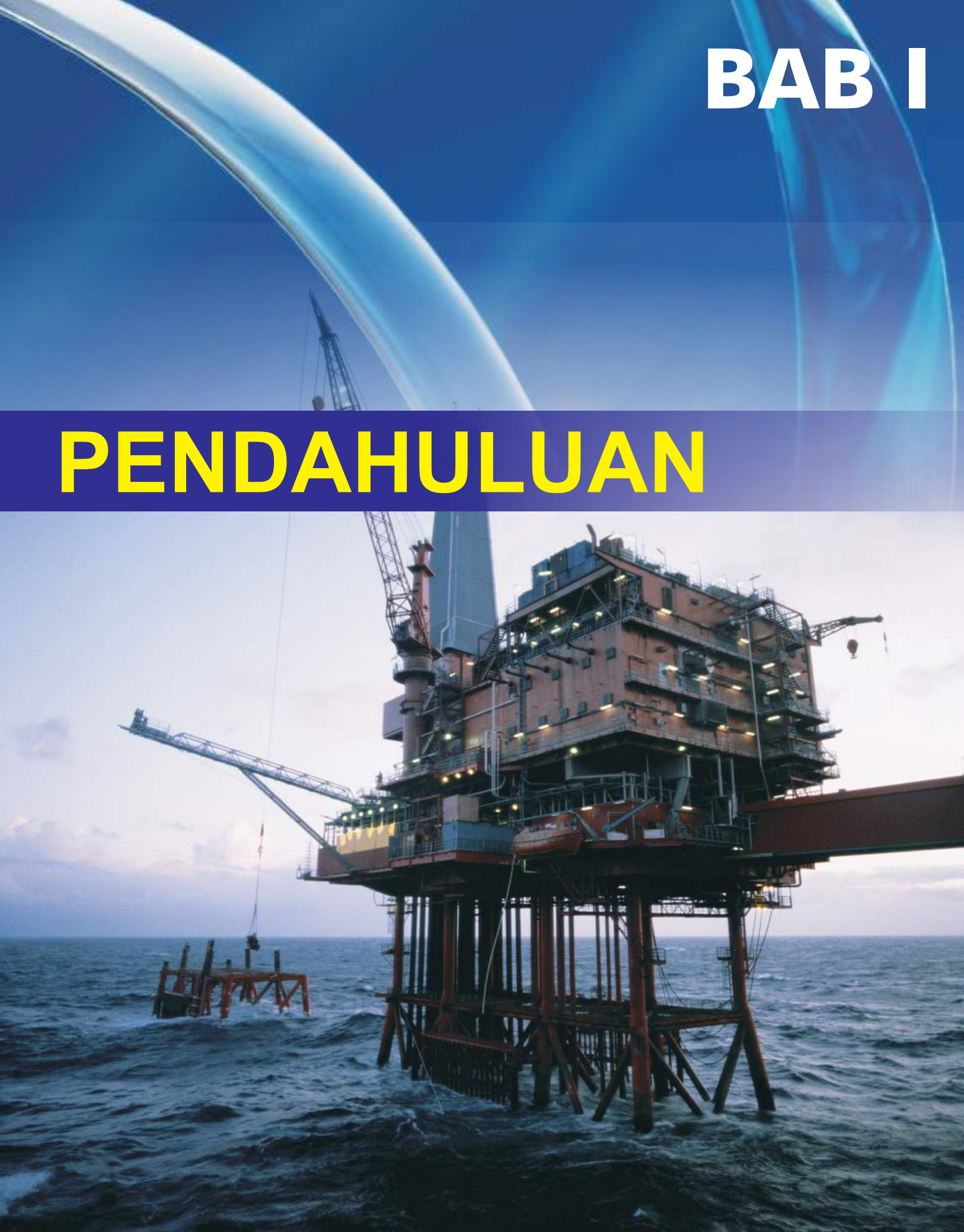
DAFTAR ISTILAH

PLTG	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap
PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POD	Plan of Development
PPS	Pengukuran Pencapaian Sasaran
PSO	Public Service Obligation
Renstra	Perencanaan Strategis
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RON	Real Octane Number
RPJM	Rencana Kerja Jangka Menengah
RPJMN	Rencana Kerja Jangka Menengah Nasional
RSNI	Revisi Standar Nasional Indonesia
SBM	Setara Barel Minyak
SDM	Sumber Daya Manusia
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
TCF	Trillion Cubic Feet
TKA	Tenaga Kerja Asing
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TOE	Tonne of Oil Equivalent
TSCF	Triliun standar cubic feet
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WKP	Wilayah Kerja Pertambangan
WP	Wilayah Pertambangan
WPN	Wilayah Pencadangan Nasional



BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Isu dan Kondisi Lingkungan Strategis terkait Pengelolaan ESDM

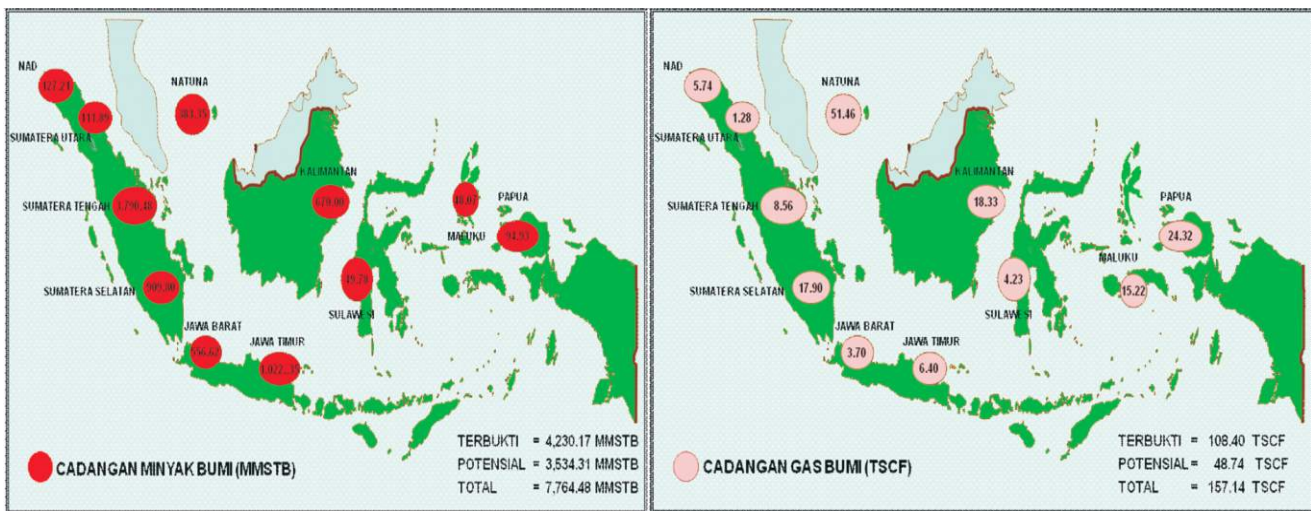
Pada era globalisasi dan perekonomian yang relatif terbuka seperti saat ini, kondisi global turut berdampak terhadap perkembangan nasional khususnya dalam bidang ekonomi. Beberapa perkembangan lingkungan global yang telah mempengaruhi kondisi nasional, antara lain: kenaikan harga minyak dunia, komoditi pangan dan tambang serta pergerakan nilai tukar rupiah. Terkait pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, kenaikan harga minyak dunia sangat dominan mempengaruhi kondisi nasional.

Dampak fluktuasi harga minyak dunia selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa aspek keamanan energi (energy security) memerlukan perhatian serius. Pengelolaan energi memerlukan paradigma baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penciptaan nilai tambah pemanfaatan energi di dalam negeri, penekanan penggunaan energi yang lebih hemat, dan pengaturan harga yang lebih mencerminkan nilai keekonomiannya, pengusahaan serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pemanfaatan sumber-sumber energi primer setempat.

Merujuk pada kondisi di atas, maka penyediaan energi berupa upaya peningkatan ketahanan energi harus terus dilakukan. Ketahanan energi dapat ditinjau dari tiga komponen utama, yaitu ketergantungan terhadap energi impor, ketergantungan terhadap energi minyak, dan efisiensi pemanfaatan energi. Dengan kata lain, ketahanan energi yang tinggi ditunjukkan dengan rendahnya ketergantungan terhadap energi impor, rendahnya pemanfaatan minyak serta pemanfaatan energi yang efisien.

Indonesia memiliki potensi energi yang beragam, baik yang berasal dari energi fosil maupun non fosil. Sumber energi fosil antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara dan Coal Bed Methane (CBM). Cadangan minyak bumi sebesar 7,76 milyar barel yang apabila diproduksi dengan tingkat produksi sebesar 0,357 miliar barel per tahun, maka potensi minyak bumi masih akan bertahan setidaknya selama 20 tahun. Gas bumi dengan cadangan sebesar 157.14 TSCF dan tingkat produksi sebesar 2,9 TSCF, maka diharapkan dapat memasok energi hingga 62 tahun ke depan. Ditinjau dari sebarannya, maka cadangan minyak bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana cadangan terbesar berada di Provinsi Riau (4,1 miliar barel) dan cadangan gas bumi terbesar berada di daerah Natuna sebesar 52,59 TCF.

Jumlah sumber daya batubara Status Tahun 2009 yang telah diketahui mencapai sebesar 104,94 miliar ton, namun secara ekonomis jumlah batubara yang dapat ditambang, baik secara terbuka maupun dengan cara bawah tanah, masih terbatas. Jumlah cadangan terbukti (*proven reserves*) saat ini baru mencapai 21,13 miliar ton, sisanya masih bersifat terindikasi. Selain itu, sebagian besar dari jumlah sumberdaya tersebut (sekitar 66,39%) tergolong batubara berperingkat sedang (*medium rank coal*) atau sub bituminus dimana jenis batubara ini memiliki nilai kalori (5100-6100 kcl/kg). Pada dasarnya ketiga jenis energi fosil tersebut mempunyai sumber daya cukup besar. Apabila sumber daya tersebut dapat ditingkatkan menjadi cadangan terbukti maka potensi energi fosil akan meningkat. Jumlah sumberdaya batubara yang telah diketahui mencapai lebih dari 90,5 miliar ton, namun secara ekonomis jumlah batubara yang dapat ditambang, baik secara terbuka maupun dengan cara bawah tanah, masih terbatas.



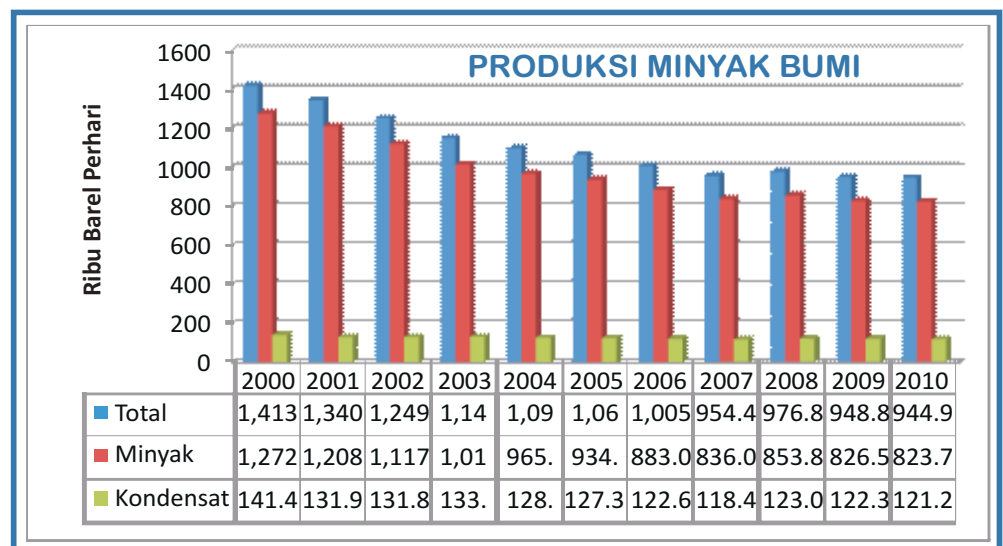
Gambar 1.1. Peta Cadangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

Di samping memiliki sumber daya fosil, Indonesia memiliki sumber energi non fosil yang relatif besar. Namun pemanfaatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Sebagai ilustrasi, sampai dengan tahun 2010 kapasitas terpasang energi non fosil seperti tenaga air baru mencapai 5,7 Giga Watt (GW) dari sumber daya sebesar 75,67 GW atau baru termanfaatkan sekitar 0,7%.

Potensi sumber daya panas bumi sebesar 28,884 GW baru termanfaatkan sebesar 1,189 GW atau sekitar 4 %. Potensi panas bumi tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun lapangan yang telah berproduksi antara lain di Sibayak, Kamojang, Lahendong, Dieng, Wayang Windu, Derajat, Salak dengan total kapasitas sebesar 1.189 MW, kapasitas lapangan dalam pengembangan sekitar 1.727 MW, sedangkan kapasitas yang akan ditenderkan sebanyak 2295 MW.

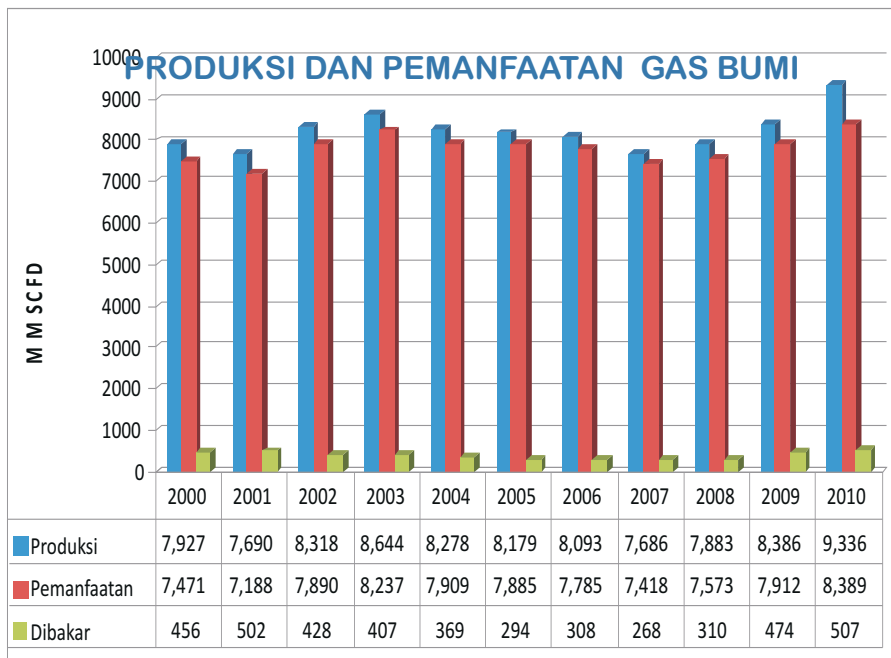
Pada awalnya Indonesia adalah salah satu negara eksportir minyak bumi. Akan tetapi sejak tahun 2004, status Indonesia berubah dari net oil exporter menjadi net oil importer. Produksi minyak sejak tahun 1995 menurun dengan decline rate sekitar 10 persen per tahun.

Namun demikian, decline rate ini dapat diturunkan menjadi sekitar 1 persen pada tahun 2006, sekitar 4 persen pada tahun 2007, dan akhirnya produksi minyak dapat meningkat sekitar 3 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2010, produksi minyak terus menurun mencapai sebesar 944.9 ribu barel per hari.



Grafik 1.1. Produksi Minyak Bumi

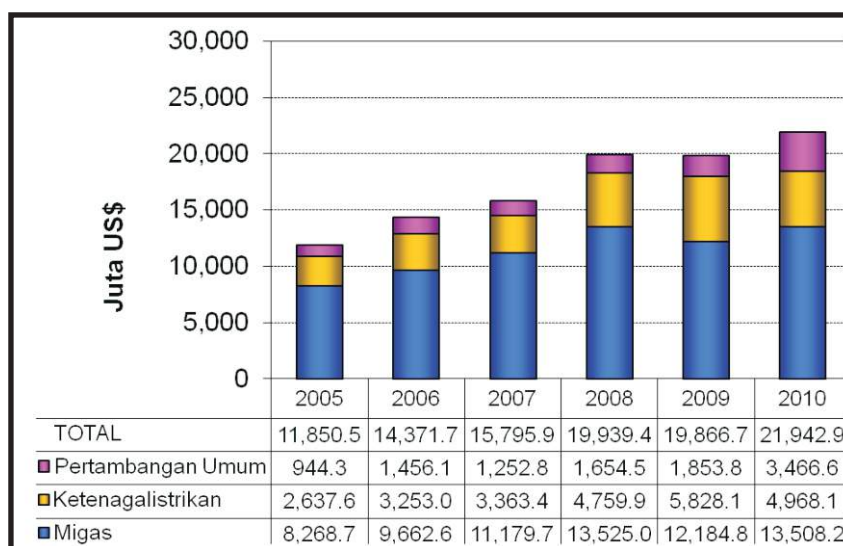
Adapun, produksi gas bumi cenderung terus meningkat, mencapai 8.38 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 9.34 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2010. Meskipun demikian, kemampuan produksi gas bumi ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat. Upaya pengembangan lapangan gas baru cenderung menemukan cadangan yang mengecil pada mayoritas temuan lapangan gas. Sementara, upaya pengembangan infrastruktur gas bumi masih sangat terbatas.



Grafik 1.2. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi

Nilai investasi minyak dan gas bumi (migas) terus mengalami kenaikan namun dengan laju pertumbuhan yang terus menurun dibandingkan dengan laju pertumbuhan investasi migas 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dalam tahun 2007, nilai investasi migas mencapai sekitar US\$11 miliar, dan dalam tahun 2008 meningkat menjadi sebesar US\$12 miliar. Pada tahun 2010, investasi migas terus bertambah mencapai US\$ 21.94 miliar. Nilai investasi di sektor hulu migas sangat dominan, rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari total investasi migas, sedangkan sisanya merupakan nilai investasi di sektor hilir migas.

NILAI INVESTASI SEKTOR ESDM



Grafik 1.3. Nilai Investasi Sektor ESDM

Peranan minyak bumi dalam penyediaan energi nasional masih sangat besar. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 39,86 persen konsumsi energi nasional di luar listrik (8,12 persen) berasal dari minyak bumi (termasuk impor), sedangkan energi dari batubara sebesar 13,31 persen; gas bumi 8,75 persen; air 2,02 persen; panas bumi 0,93 persen; dan biomasa 29,96 persen. Ketergantungan energi yang sangat besar pada minyak bumi akan cepat menguras cadangan yang ada sehingga jumlah cadangan terus mengalami penurunan. Khusus untuk pembangkitan tenaga listrik, pada tahun 2010, sebesar 38 persen menggunakan batubara; 22 persen bahan bakar minyak (BBM); 5 persen gas bumi; 12 persen tenaga air; dan hanya 3 persen panas bumi.

Selanjutnya dalam rangka diversifikasi energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan saat ini dilaksanakan oleh berbagai institusi secara sporadis dan bersifat lokal. Pengembangan energi terbarukan dalam skala besar menghadapi kendala dalam hal regulasi dan harga. Selama harga BBM mendapat subsidi, jenis energi lain akan sulit berkompetisi. Upaya diversifikasi yang belum berjalan dengan baik tersebut dapat diukur dari pangsa energi non BBM yang masih rendah dalam pemanfaatan energi nasional. Efisiensi pemanfaatan energi dapat digambarkan melalui intensitas energi yang merupakan rasio konsumsi energi final per PDB nilai konstan selama kurun waktu 2004- 2006 relatif tetap, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2004 rasio ini sebesar 0,34 SBM/juta Rp; turun menjadi 0,32 SBM/juta Rp di tahun 2005 dan 0,31 SBM/juta Rp di tahun 2006. Dengan satuan yang berbeda, intensitas energi pada tahun 2008 adalah 393 TOE/Juta US\$. Upaya efisiensi dan konservasi energi melalui perilaku dan teknologi hemat energi menjadi kunci utama efisiensi dalam pemanfaatan energi.

Pada tahun 2010 beberapa bahan galian mineral mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi bijih nikel, bauksit, dan logam timah mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,2 persen (6.6 juta ton); 31,5 persen (7.1 juta ton); dan 44 persen (78.9 ribu ton). Namun tidak demikian dengan produksi perak dan emas yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,5 persen (323 ton) dan 20 persen (111 Ton).

Penurunan produksi emas, dan perak terutama karena merosotnya produksi dari beberapa KP yang disebabkan oleh terjadinya hambatan operasi di daerah kuasa penambangan (KP) penghasil utama dan belum selesainya izin pinjam pakai lahan oleh KP baru.

Peta Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Mineral Indonesia



Gambar 1.2. Peta Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Mineral Indonesia

Sebagai upaya pengembangan sumber daya alam nasional, fungsi informasi geologi sangat penting untuk mengetahui cadangan tambang dan mineral nasional. Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kegiatan pemetaan bersistem yang meliputi seluruh wilayah nusantara seperti peta geologi skala 1:250.000; peta gaya berat dan berbagai peta lainnya.

Kedalaman peta geologi yang dimiliki untuk skala nasional masih belum mampu menggambarkan secara akurat kekayaan alam nasional. Keadaan ini akan sangat menyulitkan posisi Indonesia di dalam upaya untuk menarik investasi karena tingkat kepercayaan terhadap cadangan mineral nasional masih kurang meyakinkan para investor.

Selanjutnya, perubahan bentuk pengelolaan menjadi perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menggantikan UU Pertambangan No. 11 Tahun 1967, menjadi hal paling penting dalam perubahan aturan pertambangan. UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) juga mengakui kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan serta memperjelas desentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya.

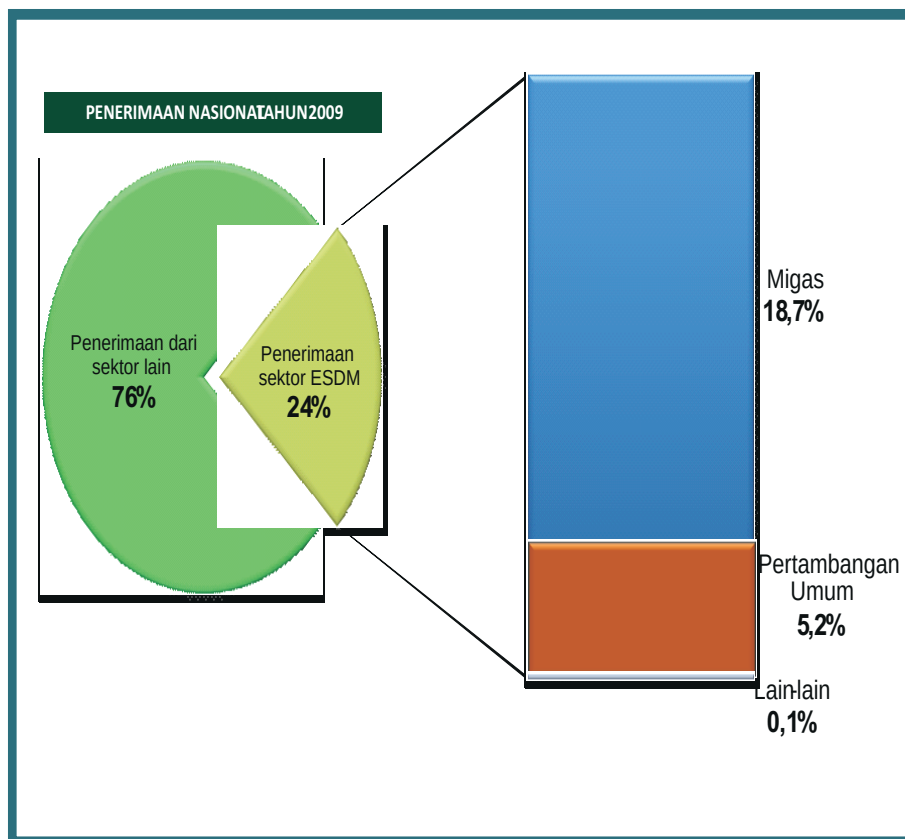
Dalam rangka mempercepat peningkatan Investasi pertambangan dan penataan ruang nasional, diperlukan peningkatan penyiapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara. Berdasarkan amanat UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa pemerintah harus menyiapkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara serta Wilayah Pencadangan Nasional (WPN). Oleh karena itu diperlukan Peningkatan kegiatan Survei dan Pemetaan Geologi, Geofisika, Geokimia dalam mendukung Promosi Wilayah Kerja Pertambangan.

Pada tahun 2010 ini upaya rehabilitasi dan konservasi pada sektor pertambangan, energi dan sumber daya mineral pencapaiannya adalah sebagai berikut: (1) tersedianya kebijakan untuk mendukung pengolahan dan pemurnian produk tambang untuk meningkatkan added value; (2) terlaksananya penerapan good mining practice pada 38 PKP2B, 14 KK dan 7 WKP; (3) berkurangnya jumlah tingkat kecelakaan tambang, dampak lingkungan atas kegiatan tambang, dan; (4) tercapainya konservasi sumber daya mineral dan batubara, lindungan lingkungan standardisasi dan optimalisasi usaha jasa pertambangan.

1.2. Ringkasan Kinerja Sektor ESDM Tahun 2005-2009

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Pada tahun 2009, sektor ESDM mencatatkan realisasi penerimaan Negara sebesar Rp 237,39 triliun atau sebesar 24% dari total penerimaan Negara.

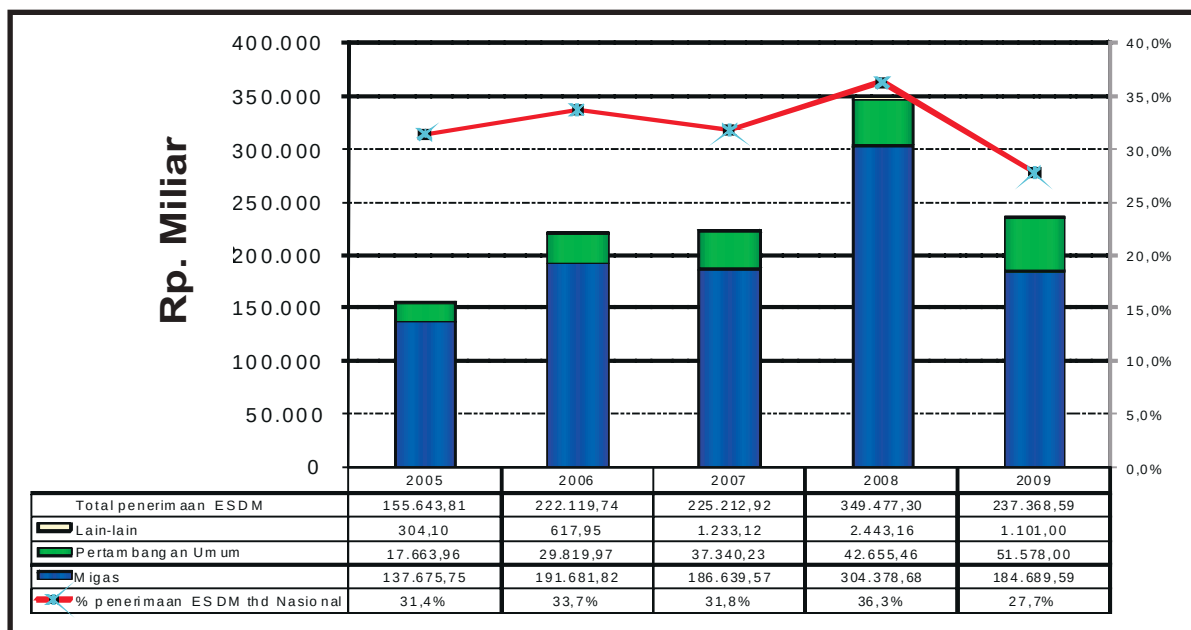
Penerimaan Negara sub sektor migas masih mencatatkan kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp 184,69 triliun atau 18.74% dari total penerimaan negara. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan Negara sub sektor migas tahun 2008 yang mencapai Rp 349,48 triliun. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya produksi (lifting) minyak bumi pada tahun 2009 dan harga rata-rata minyak dunia yang mengalami penurunan sampai dengan harga US\$ 37/barel dan pada akhir tahun 2009 meningkat menjadi US\$ 65/barel, harga tersebut jauh lebih rendah jika



Sedangkan Penerimaan Negara dari sub sektor pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar 5.2% dari total penerimaan Negara atau sebesar Rp 51.58 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 42.58 triliun pada tahun 2008 atau sebesar 21.14%. Penerimaan Negara dari sub sektor pertambangan umum terdiri dari Pajak Pertambangan Umum dan PNPB Pertambangan Umum.

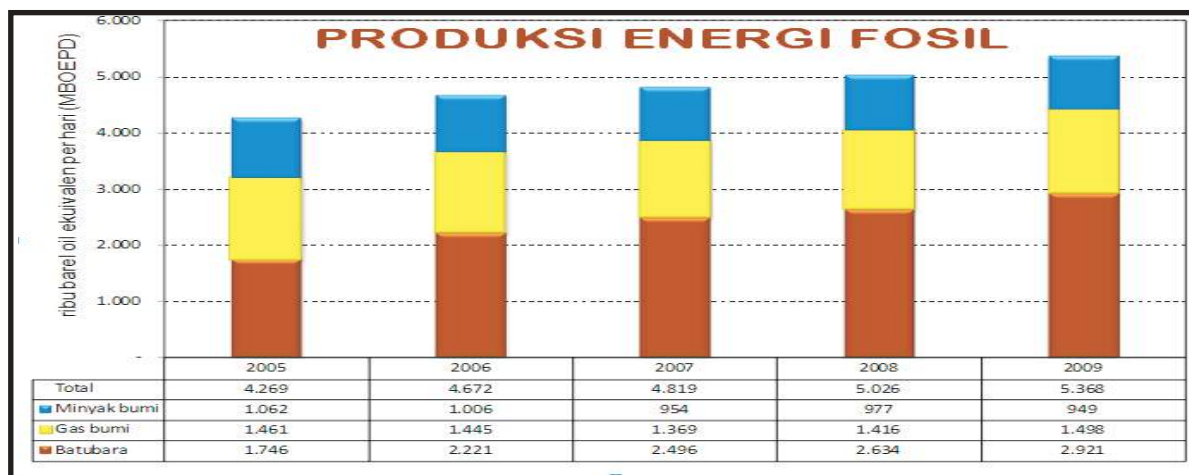
Selain penerimaan negara dari sub sektor migas dan pertambangan umum, DESDM juga menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak dari sub sektor lainnya yaitu dari hasil kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan dan hasil kegiatan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan ESDM sebesar 1.10 Triliun atau 0,1% dari total penerimaan negara. Pada tahun 2009 ini kontribusi penerimaan negara dari sektor lainnya mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar 181.82% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 2.44 triliun.

Perkembangan Penerimaan Sektor ESDM, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



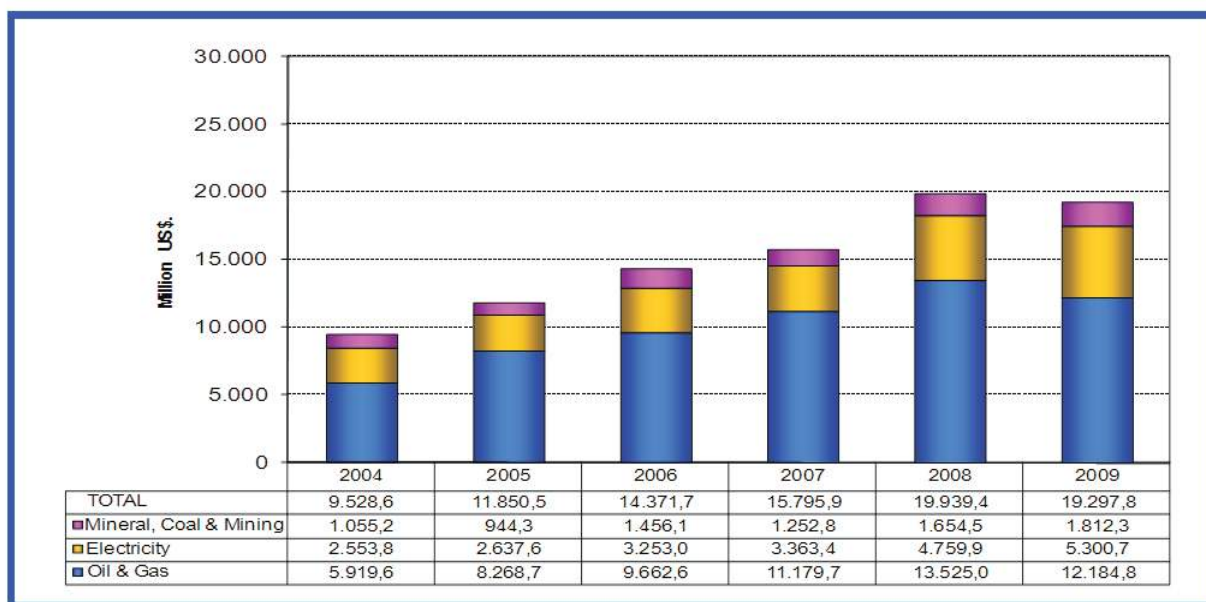
Gambar 1.4. Perkembangan Penerimaan Negara Sektor ESDM

Untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi nasional yang terus bertumbuh maka dibutuhkan adanya peningkatan produksi energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Dibawah ini adalah grafik yang memperlihatkan jumlah produksi ESDM dalam 5 tahun terakhir yang secara umum telah melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 1.5. Produksi Energi Fosil

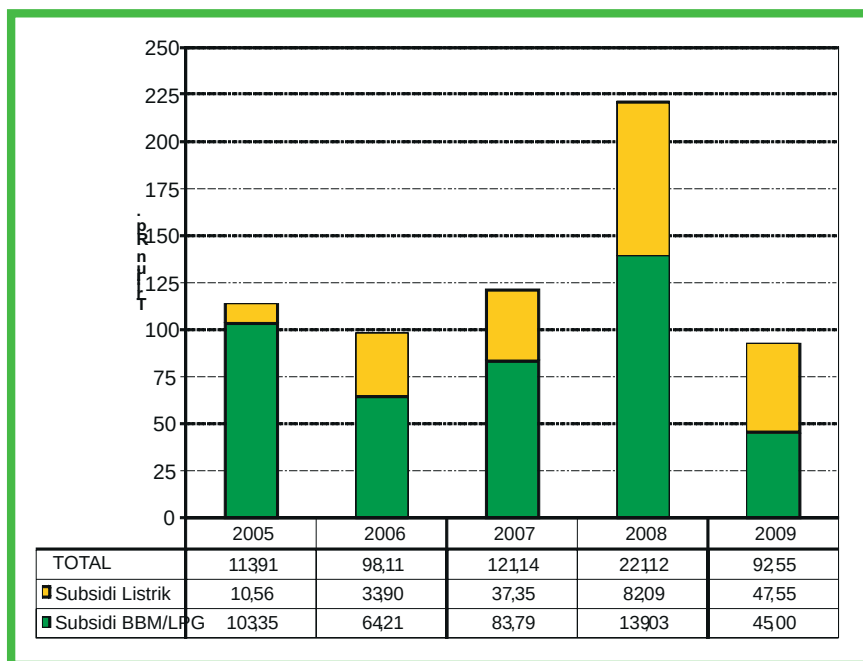
Peningkatan jumlah produksi ESDM tidak dapat di lepaskan dari pertumbuhan jumlah investasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjamin ketersediaan energi dan sumber daya mineral secara merata dan berkesinambungan juga dibutuhkan adanya pertumbuhan jumlah investasi. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009, trend kinerja peningkatan jumlah investasi sektor ESDM menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1.6. Nilai Investasi Sektor ESDM

Selanjutnya guna memperbaiki iklim investasi di sektor ESDM maka pada tahun 2009 direncanakan untuk memperbaiki sistem pelayanan investasi dalam bentuk sistem pelayanan secara elektronik (e-license) pada 3 unit utama, yaitu: Ditjen Migas, Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, dan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk menerapkan good governance melalui perbaikan kualitas pelayanan publik.

Salah satu outcome akhir yang ingin dicapai oleh KESDM adalah berkurangnya subsidi BBM guna mengurangi beban APBN. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan subsidi BBM dalam 5 tahun terakhir. Secara ringkas grafik di bawah ini menunjukkan kecenderungan penurunan subsidi BBM. Namun demikian khusus dalam tahun 2008 terdapat lonjakan subsidi yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia sebagai akibat dari invasi Amerika ke Irak. Kondisi kecenderungan penurunan subsidi tidak hanya terjadi pada BBM tetapi juga pada subsidi listrik.



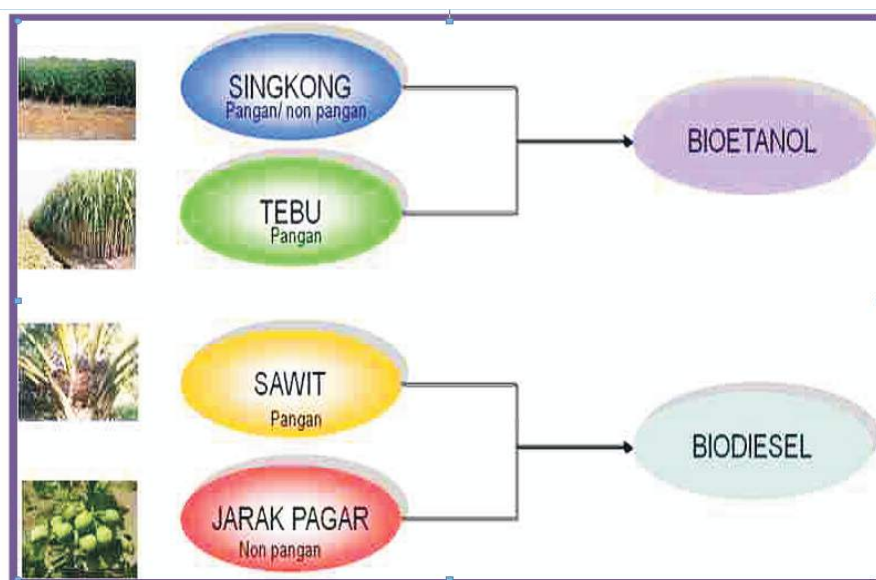
Gambar 1.7. Subsidi Energi

Ketergantungan terhadap kebutuhan energi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, sedangkan kemampuan ketersediaan sumberdaya energi konvensional dari waktu ke waktu mengalami penurunan akibat eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan energi alternatif. Capaian kinerja usaha ini selama kurun waktu tahun 2005 -2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Kemampuan Pemanfaatan Energi Alternative

No	Indikator kinerja	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah pemanfaatan Bahan Bakar Nabati	Ribu kL	122,5	470,9	1.722,2	2.558,7	2.563,0
2	Kapasitas terpasang Energi Baru Terbarukan (selain PLTP dan PLTA)	MW	5.054,1	5.056,5	5.189,6	5.353,6	5.496,4
3	Pangsa energi terbarukan	%				4,3	10
4	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik:						
	Minyak bumi	%	40	40	40	38	23
	Batubara	%	30	27	34	31	39
	Gas	%	6	9	9	8	28
	Panas Bumi	%	5	5	3	3	3
	Air	%	19	19	14	20	7
5	Elastisitas Energi	rasio	-0,03	-0,04	1,12	1,92	1,8

Produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) yang terdiri dari biodiesel, bioetanol dan bio-oil pada tahun 2009 adalah sebesar 2.563,0 ribu kiloliter. Produksi BBN selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) memperlihatkan peningkatan yang cukup besar (terutama dari biodiesel dan bio etanol) terutama yang digunakan untuk sektor transportasi.



Gambar 1.4. Bahan Baku Bahan Bakar Nabati

Pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan yang terdiri dari tenaga surya, tenaga bayu dan mikrohydro/pikohydro sebagai pengganti energi fosil untuk pembangkit tenaga listrik, setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan angka kenaikan. Di bawah ini adalah jenis pembangkit dari energy baru dan terbarukan :



Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya



Hybrid PLTB Nusa Penida, Bali



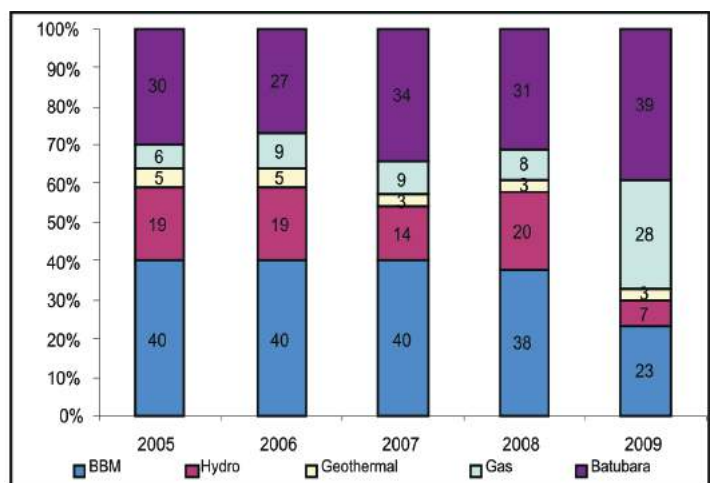
PLTA ASahan III, Sumatera Utara



PLTMH Suryalaya, Jawa Barat

Pangsa energi terbarukan yang bersumber dari air, panas bumi, surya, bayu, dan sampah juga menunjukkan peran yang semakin berarti. Dalam tahun 2009 pangsa energi baru terbarukan telah mencapai 10% dari keseluruhan pangsa energy nasional.

Selain dengan memberdayakan energi terbarukan, KESDM juga melakukan upaya untuk mengurangi pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan produk minyak bumi (BBM) dengan memberdayakan batubara, gas bumi, panas bumi dan air sebagai energy alternatif sebagai bahan baku utama untuk pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut tercermin dari prosentase indikator kinerja pada table pengukuran kinerja yang melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 112%. Capaian tersebut menandakan bahwa energi alternative telah berhasil dioptimalkan sebagai energi pengganti BBM.



Pemberdayaan kapasitas nasional diukur dari 2 indikator kinerja yaitu penggunaan kandungan lokal (produk dalam negeri) dan penggunaan tenaga kerja lokal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam 5 tahun terakhir realisasi peningkatan penggunaan kapasitas nasional terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Penggunaan Kapasitas Nasional Tahun 2005-2009

Indikator kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (US\$)	453,5 juta	652,6 juta	4,5 miliar	4,1 miliar	1,9 miliar
Jumlah tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (orang)	296.080	295.750	290.379	286.770	408.841

Salah satu tema pembangunan global adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini tentu tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam kegiatan eksploitasi ESDM sering kali mengabaikan aspek lingkungan hidup. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pembangunan global (Millenium Development Goals), KESDM menetapkan sasaran Terlindunginya kawasan konservasi dan hutan lindung dari kerusakan akibat eksploitasi di sektor ESDM, sebagai salah satu sasaran strategik. Perkembangan capaian kinerja sasaran ini dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Kegiatan Perlindungan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung Dari Kerusakan Akibat Eksploitasi Di Sektor ESDM

Indikator kinerja	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah peningkatan wilayah konservasi SDG untuk optimalisasi pemanfaatan SDA dan untuk memberikan nilai tambah ekonomi	12 Lokasi	18 lokasi	14 Lokasi	10 Lokasi	17 Lokasi
Jumlah perusahaan (KK, PKP2B, KP) yang telah melakukan reklamasi lahan pertambangan	42	44	48	51	51
Persentase luas lahan yang telah direklamasi terhadap lahan yang terganggu	39%	31%	39%	49%	49%

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan nilai tambah pertambangan telah dilakukan kegiatan peningkatan wilayah konservasi sumber daya geologi, gambar di bawah ini adalah salah satu kegiatan penyelidikan konservasi di daerah Bleduk Kuwu, Purwodadi, Jateng.



Gambar 1.6. Kegiatan pemboran endapan lumpur di Bleduk Kuwu, Purwodadi, Jateng

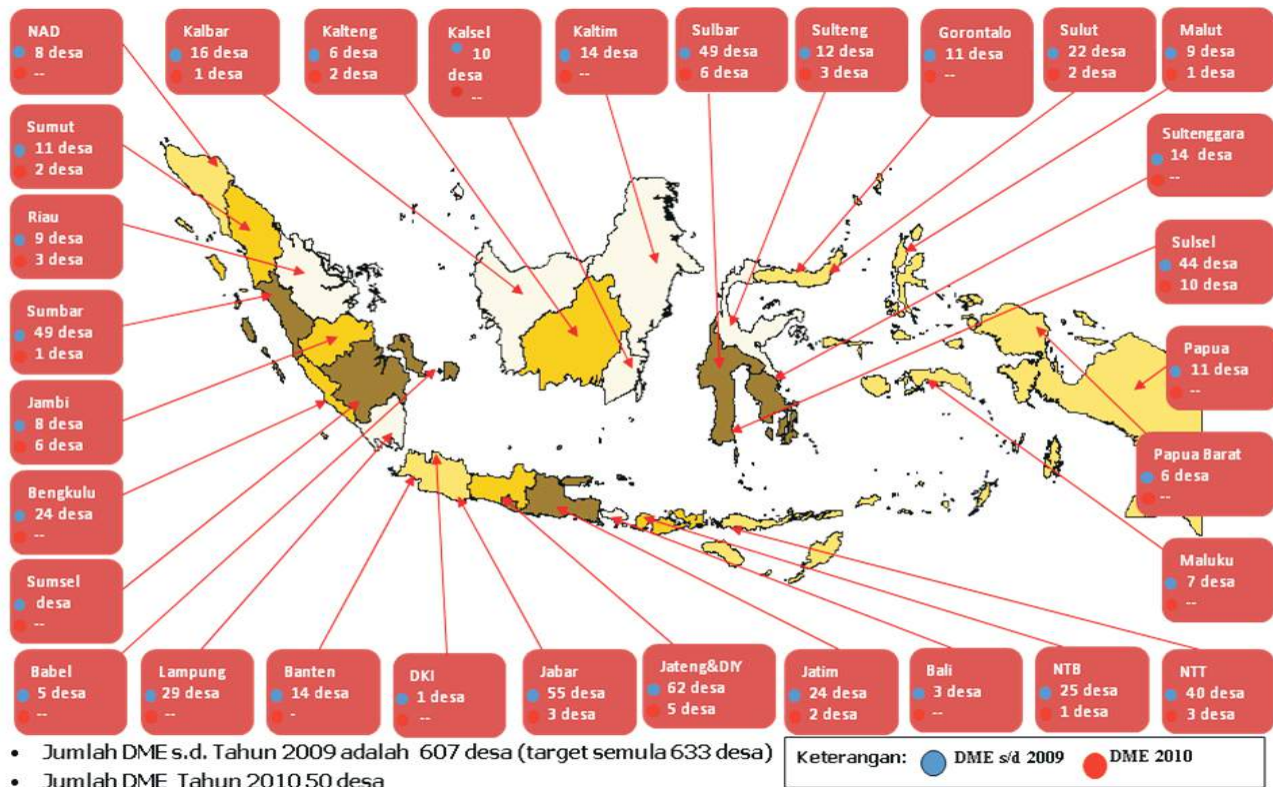
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melindungi kemiskinan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 tahun 2009, maka sebagian pembangunan sektor ESDM tetap diarahkan untuk melanjutkan pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisdas) seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro, PLT Surya/Matahari, PLT Angin dan infrastruktur pendukungnya. Program lisdas tersebut sangat membantu masyarakat desa. Selain itu, program Community Development atau CSR sektor ESDM juga berdampak positif dalam pemberdayaan masyarakat dimana totalnya pada tahun 2009 sekitar Rp. 1,5 triliun.

- Program penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sejak tahun 1995 hingga sekarang program penyediaan air bersih dilakukan setiap tahun melalui pendanaan APBN, setidaknya telah diperuntukkan bagi lebih dari satu juta jiwa.
- Kegiatan pemboran air tanah di seluruh wilayah Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terlaksana 326 titik pengeboran dan 11 penurapan mata air yang diperuntukkan bagi 723.410 jiwa.
- Program Desa Mandiri Energi (DME) merupakan program diversifikasi energi tingkat perdesaan, serta sekaligus menjadikan kegiatan penyediaan energi sebagai entry point dalam pengembangan kegiatan ekonomi perdesaan.

Pembangunan Desa Mandiri Energi mulai dilaksanakan pada tahun 2007 dan sampai tahun 2009 telah dibangun sebanyak 514 desa yang terdiri dari 348 berbasis Non BBN (Bahan Bakar Nabati) dan 166 desa berbasis BBN.

Sektor ESDM turut berkontribusi sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai. Prestasi sektor ESDM dalam membuka lapangan kerja juga cukup membanggakan, meskipun sifat dari industri ESDM adalah capital intensive bukan labour intensive. Telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,774 ribu tenaga kerja pada tahun 2009.

PETA SEBARAN DESA MANDIRI ENERGI (DME)



Gambar 1.7. Peta Sebaran Desa Mandiri Energi

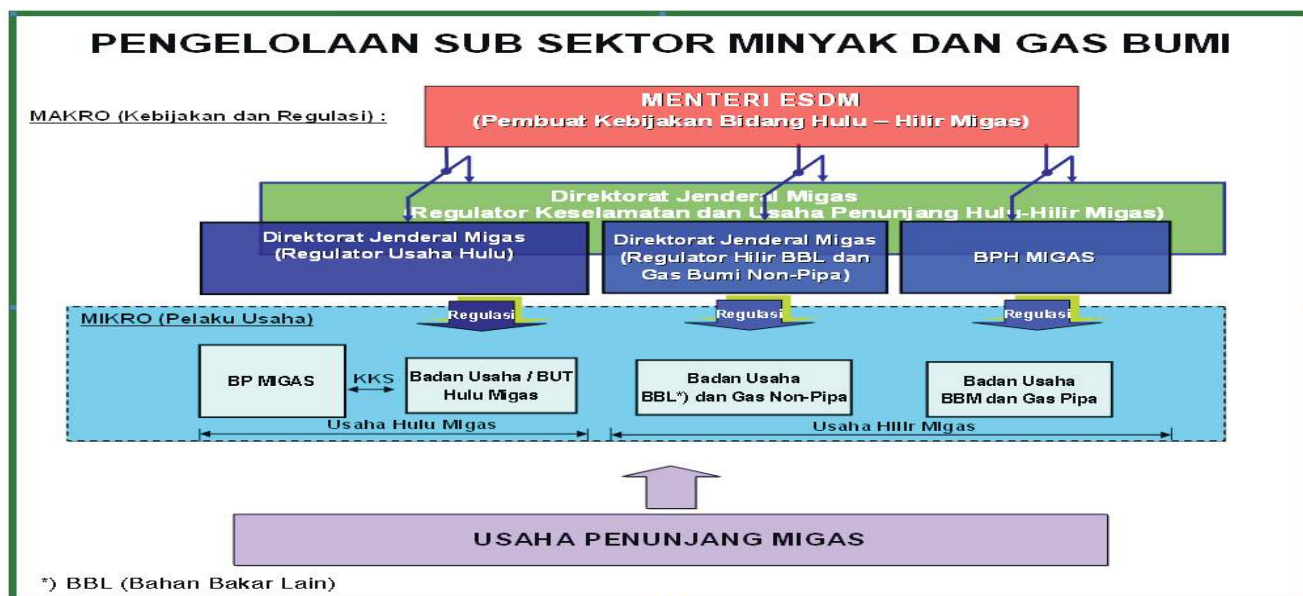
1.3. Peran dan Posisi KESDM Sebagai Regulator

1. Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pembuat kebijakan pada bidang hulu-hilir migas. Untuk regulator keselamatan dan usaha penunjang hulu-hilir migas dilakukan oleh Ditjen Migas sebagai perangkat Menteri ESDM. Disamping itu, regulator usaha hulu migas juga dilakukan oleh Ditjen Migas. Sedangkan untuk hilir migas, pelaksanaan regulasi dilakukan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas. Ditjen Migas melakukan regulasi hilir yaitu untuk bahan bakar lain (BBL) dan gas bumi non-pipa. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh BPH Migas.

Pada tingkat mikro hulu migas, terdapat pelaku usaha yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap seperti Pertamina, Chevron, Medco dan badan usaha migas lainnya yang disebut sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, terdapat BPMIGAS yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh KKKS.

Selain itu, terdapat juga badan usaha yang bergerak dalam usaha penunjang migas. Badan usaha tersebut yaitu pabrikasi peralatan dan melakukan jasa-jasa seperti konsultansi, G & G, pemboran, inspeksi teknis, litbang, dikLat dan jasa-jasa lainnya.

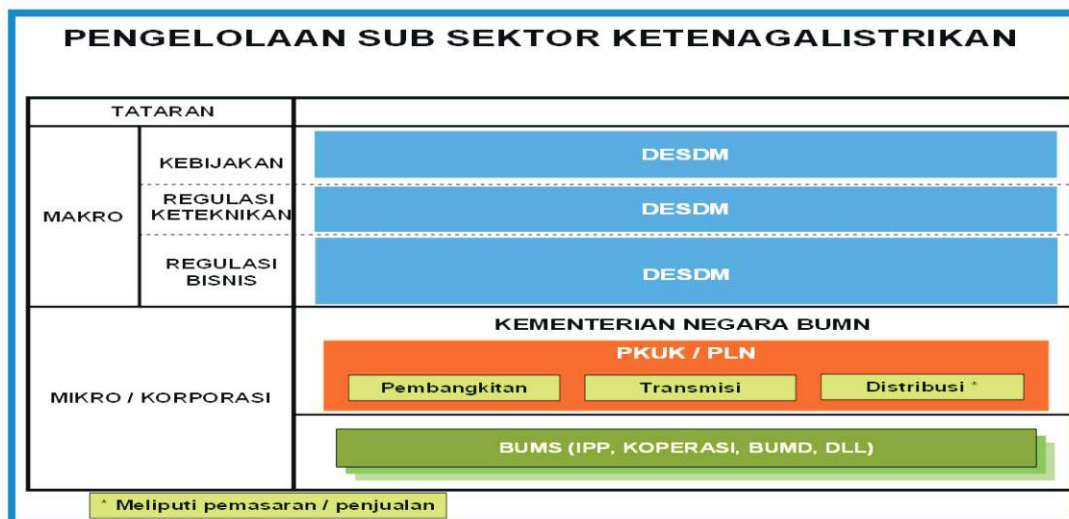


Gambar 1.8. Pengelolaan Sub Sektor Migas

2. Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan

Pada sub sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan regulasi bisnis pada tataran makro. Sedangkan pada tingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan oleh PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi termasuk pemasaran/penjualan. Terkait aspek korporasi, PLN berada di bawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PLN berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta seperti IPP, Koperasi, BUMD, dll yang dapat melakukan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PLN sebagai PKUK.



Gambar 1.9. Pengelolaan Sub Sektor Ketenagalistrikan

3. Lembaga Pengelolaan Sub Sektor Mineral, Batubara Dan Panas Bumi

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian kepemilikan sumber daya alam dikelola oleh negara yang dalam hal ini pemerintah bertindak melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia. Pemerintah cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penetapan kebijakan dan pengaturan, penetapan standar dan pedoman, pengelolaan existing kontrak pertambangan, tanggung jawab pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.



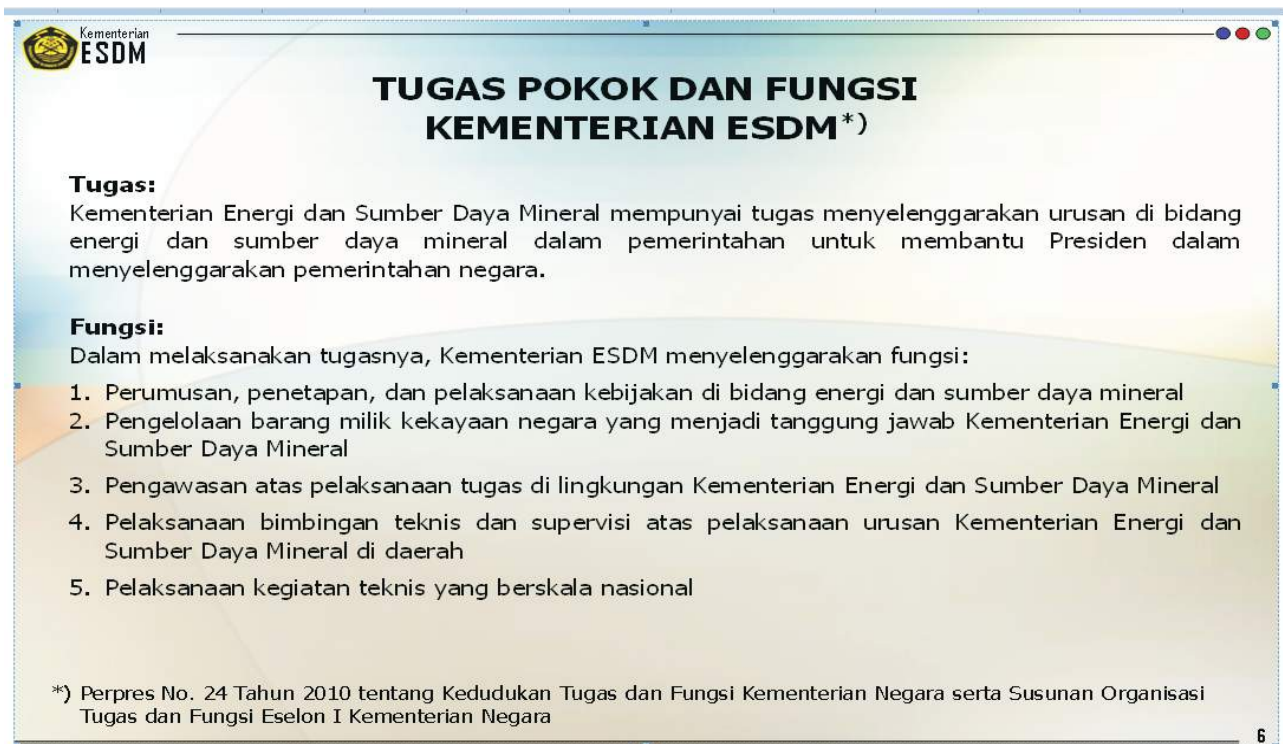
Gambar 1.10. Pengelolaan Sub Sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi untuk wilayah lintas kabupaten dan/atau berdampak regional (dekonsentrasi) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota (desentralisasi), sedangkan hak pengusahaan dilakukan oleh pelaku usaha seperti BUMN, BUMD maupun pelaku usaha lainnya.

1.4 Tugas dan Fungsi KESDM

1. Tugas dan Fungsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Surat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sesuai Peraturan Presiden



The image is a screenshot of a presentation slide. At the top left is the logo of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). The title is 'TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN ESDM*)'. Below the title, it defines the 'Tugas' (Task) and 'Fungsi' (Function) of the ministry. The 'Tugas' is to manage energy and mineral resources to assist the President. The 'Fungsi' includes five points: policy formulation, management of state assets, supervision of tasks, technical guidance and supervision, and national-scale technical activities. A footnote at the bottom refers to Presidential Regulation No. 24 of 2010. The slide is numbered 6 in the bottom right corner.

Kementerian ESDM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN ESDM*)

Tugas:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ESDM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral
2. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

*) Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

6

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidangnya;
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
7. Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
8. Penanggulangan bencana berskala nasional di bidangnya;
9. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
10. Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

11. Penyelesaian perselisihan antarprovinsi di bidangnya;
12. Pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
13. Pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
14. Pengaturan survai dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000, penyusunan peta tematis, dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi;
15. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (*grid*) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
16. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (*grid*) nasional/regional listrik dan gas bumi;
17. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan;
18. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri;
19. Pemberian izin usaha inti minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas provinsi, izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas provinsi, transmisi dan distribusi, serta izin usaha non-inti yang meliputi depot lintas provinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
20. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil dan wilayah lintas provinsi di bidangnya,
 - Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah dan mineral radio aktif, serta pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
 - Pengaturan dan penetapan standar serta norma keselamatan di bidang energi, sumber daya mineral, dan geologi.

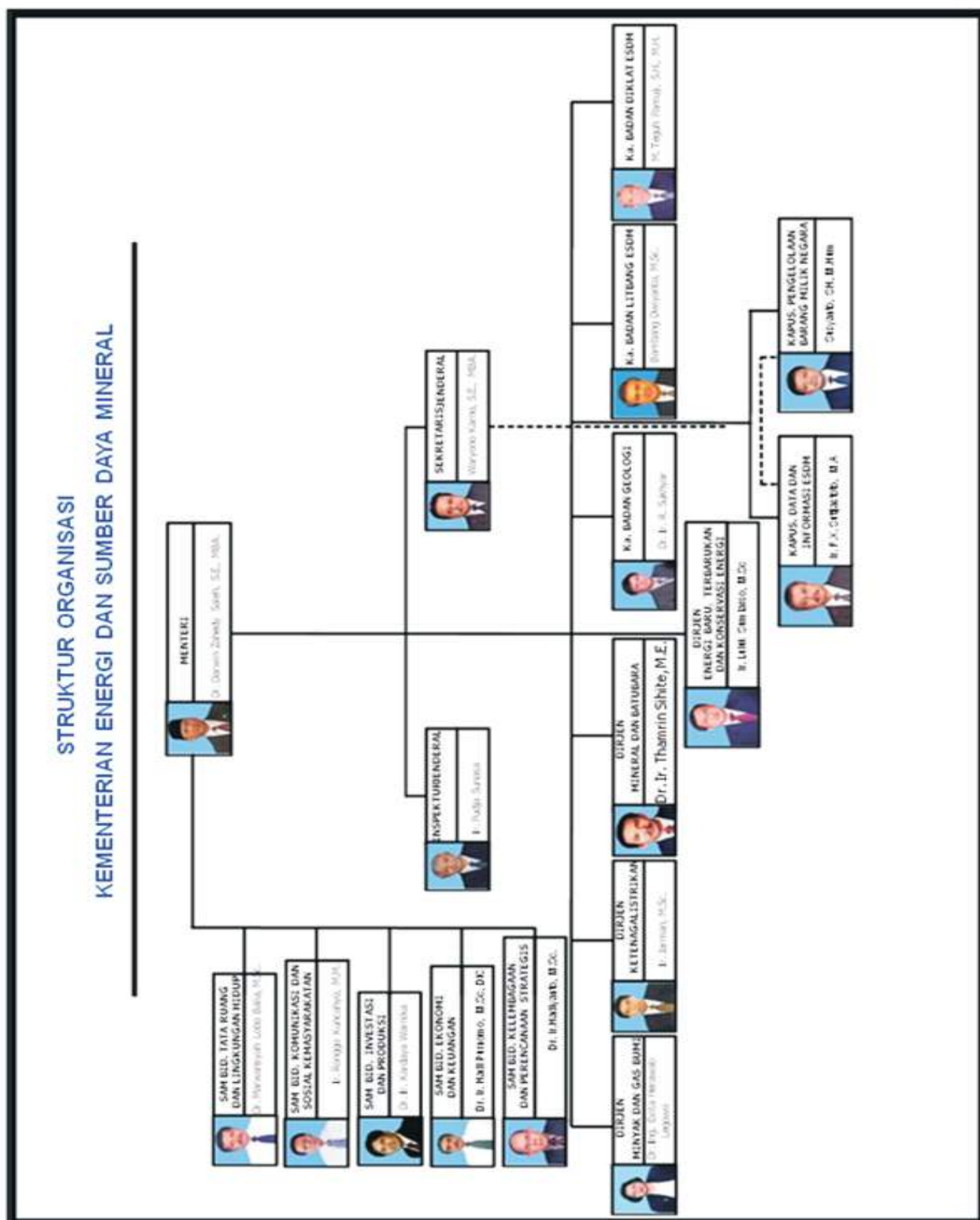
Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
5. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
6. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
7. Badan Geologi;

- 
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
 10. Badan Pelaksana Hilir Migas
 11. Dewan Energi Nasional
 12. Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
 13. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 14. Staf Ahli Menteri Bidang Informasi dan Komunikasi;
 15. Staf Ahli Menteri Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup;
 16. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Kelembagaan;
 17. Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :



Gambar 1.12. Struktur Organisasi Kementerian ESDM

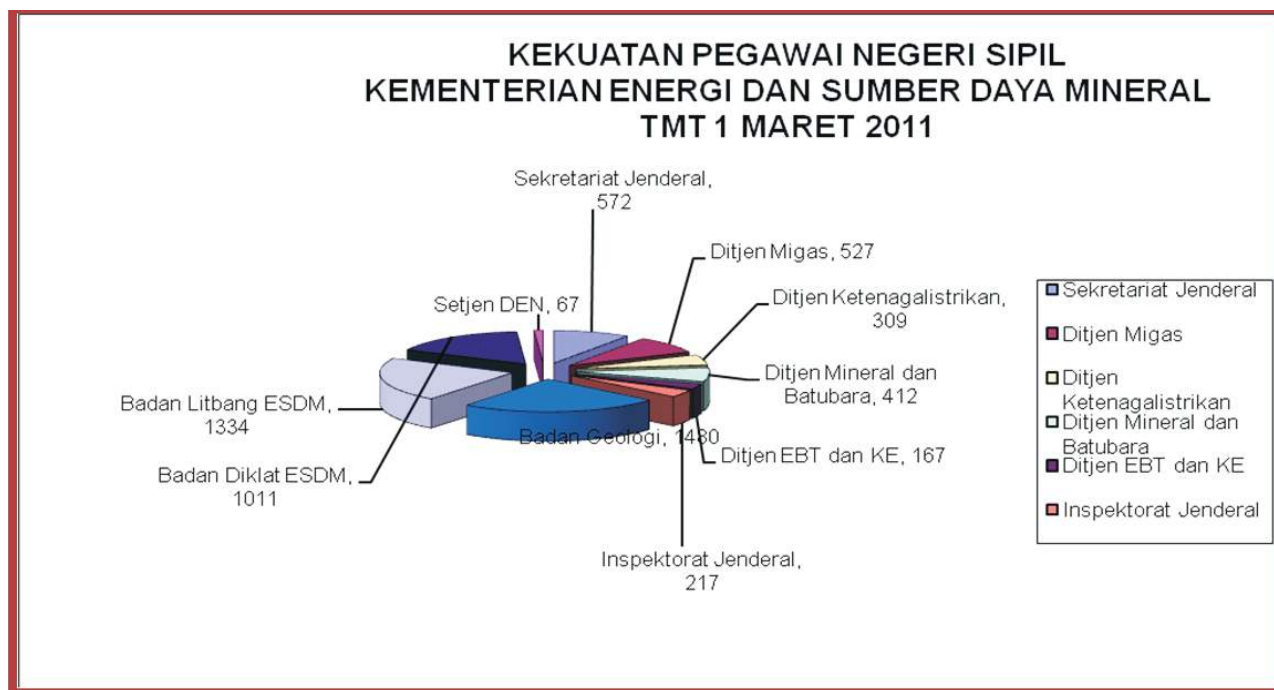
3. Sumber Daya Manusia KESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 memiliki jumlah pegawai sebanyak 6.096 pegawai yang tersebar di 11 unit Eselon I. Dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya, tahun ini terdapat penambahan jumlah pegawai sebesar 5,56% , yaitu dari 5.775 orang ditahun 2009 menjadi 6.096 orang ditahun 2010.

Penyebaran jumlah pegawai KESDM per unit Eselon I dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.4.
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TMT 1 MARET 2011

NO	UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		P	W		
1	Sekretariat Jenderal	397	175	572	Termasuk perbantuan Otorita Batam : 45 orang
2	Ditjen Migas	386	141	527	-
3	Ditjen Ketenagalistrikan	239	70	309	Termasuk perbantuan PT. PLN : 15 orang
4	Ditjen Mineral dan Batubara	320	92	412	-
5	Ditjen EBT dan KE	117	50	167	-
6	Inspektorat Jenderal	157	60	217	-
7	Badan Geologi	1237	243	1480	-
8	Badan Litbang ESDM	1026	308	1334	-
9	Badan Diklat ESDM	806	205	1011	-
10	Setjen DEN	42	25	67	-
JUMLAH TOTAL		4727	1369	6096	Termasuk CPNS angkatan 2010

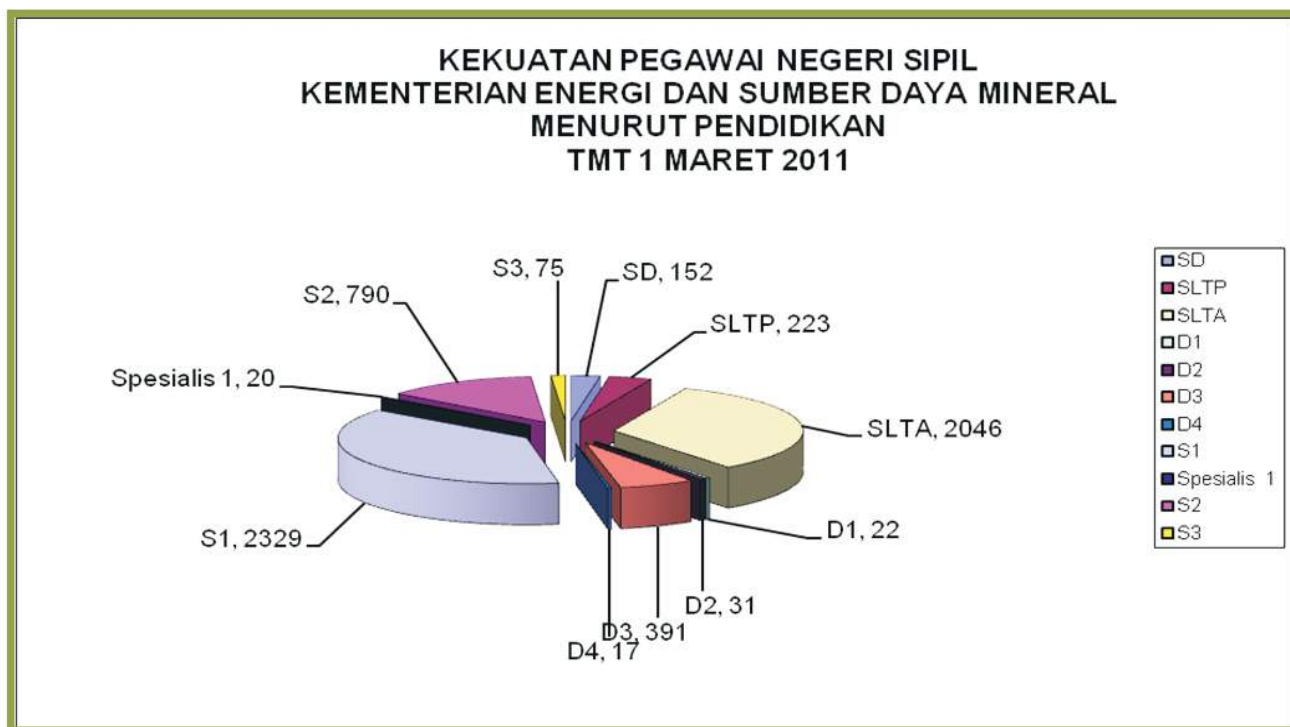


Gambar 1.13. Kekuatan PNS KESDM TMT Maret 2011

Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai KESDM dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 1.5.
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENURUT PENDIDIKAN TMT 1 MARET 2011

NO	UNIT	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	Spesi- alis 1	S2	S3	
1	Sekretariat Jenderal	21	19	194			35		234		62	7	572
2	Ditjen Migas	13	7	98	2		14	1	308		81	3	527
3	Ditjen Ketenagalistrikan	2	8	93			15		146		42	3	309
4	Ditjen Mineral dan Batubara	6	6	116	2	1	19	1	212		45	4	412
5	Ditjen EBT dan KE			23	1		3		99		37	4	167
6	Inspektorat Jenderal	3	5	55			1		108		45		217
7	Badan Geologi	48	74	689	1	1	56	5	387	19	172	28	1480
8	Badan Litbang ESDM	27	58	465			85	2	497	1	178	21	1334
9	Badan Diklat ESDM	32	46	310	16	29	161	8	294		110	5	1011
10	Setjen DEN			3			2		44		18		67
JUMLAH TOTAL		152	223	2046	22	31	391	17	2329	20	790	75	6096



Gambar 1.14. Kekuatan PNS KESDM Menurut Pendidikan



BAB II

RPJM 2010-2014



2.1. Kondisi Umum

Pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2010 merupakan tahun terakhir RPJMN 2004-2009 dan tahun pertama RPJMN 2010-2014. Berbagai upaya dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan RPJMN 2010-2014. Demikian juga, perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia yang mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Krisis ini telah menyebabkan perekonomian Amerika mengalami resesi yang dalam dan telah menjalar ke negara maju lainnya, serta berimbas pula ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak krisis global mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2008 adalah minus 3,6 persen jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2008 (q-t-q) dan meningkat 5,2 persen (y-o-y). Sementara itu, pada triwulan sebelumnya ekonomi tumbuh cukup tinggi, yaitu 6,2 persen pada triwulan I; 6,4 persen pada triwulan II; dan 6,4 persen pada triwulan III (y-o-y). Krisis global yang berdampak pada turunnya permintaan dunia, menurunnya harga minyak dan komoditas menyebabkan ekspor barang dan jasa tumbuh negatif 5,5 persen pada triwulan IV 2008 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dampak global juga mendorong pembalikan aliran modal dari Indonesia ke luar negeri sehingga investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 0,8 persen pada triwulan IV jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Penurunan pertumbuhan ekonomi berlanjut sampai dengan triwulan II tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2009 adalah 4,5 persen dan pada triwulan II pertumbuhan menurun menjadi 4,1 persen. Sejak triwulan III tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,2 persen dan pada triwulan IV meningkat menjadi 5,4 persen yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sejalan dengan membaiknya ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2009 sebesar 4,5 persen (y-o-y). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran masyarakat yang masing-masing tumbuh 15,7 persen dan 4,9 persen. Sementara itu ekspor masih tumbuh negatif, yaitu -9,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor pertanian yang meningkat sebesar 4,1 persen; dan sektor tersier, yaitu sektor listrik, gas, dan air; serta pengangkutan dan telekomunikasi yang masing-masing tumbuh 13,8 persen dan 15,5 persen. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 2,1 persen.

Rendahnya inflasi pada tahun 2009 terutama disumbangkan oleh harga kelompok barang dan jasa yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah (administered prices). Penurunan harga komoditas global terutama harga BBM telah mendorong Pemerintah untuk menurunkan harga BBM dalam negeri yang kemudian diikuti oleh penurunan tarif angkutan. Pada tahun 2009, Pemerintah menurunkan harga BBM dan tarif angkutan masing-masing sebesar 14,1 persen dan 12,1 persen. Selain oleh faktor-faktor tersebut, rendahnya inflasi tahun 2009 juga didukung oleh penurunan inflasi bahan pokok yang harganya mudah bergejolak, khususnya pangan (volatile food) yang cenderung menurun. Di samping itu, menguatnya nilai tukar rupiah, melambatnya permintaan domestik dan membaiknya ekspektasi inflasi juga berkontribusi pada rendahnya laju inflasi pada tahun 2009. Seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi dunia dan domestik, tekanan inflasi pada tahun-tahun mendatang diperkirakan cenderung meningkat. Inflasi tahun 2010 diperkirakan 5,3 persen sesuai asumsi APBN-P 2010.

Terkait dengan infrastruktur, kemajuan dalam pembangunan ketenagalistrikan hingga tahun 2009 ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 66,30 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 94 %. Pencapaian ini diantaranya merupakan hasil pembangunan listrik perdesaan yang memanfaatkan energi baru terbarukan; (2) penambahan kapasitas panas bumi sebesar 127 MW yang berasal dari PLTP Lahendong III (10MW) dan PLTP Wayang Windu II (117 MW); (3) pembangunan jaringan transmisi dan juga pembangunan pembangkit listrik baik oleh PT. PLN, independent power producers (IPP), maupun pembangkit terintegrasi, sehingga kapasitas pembangkit meningkat menjadi 33.430 MW dimana sebesar 84 persen atau sebesar 28.234 MW berasal dari pembangkit PT. PLN; (4) pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga di kota Palembang dan Surabaya. Hingga saat ini ketergantungan pada energi konvensional/BBM masih besar. Komposisi bauran energi masih terdiri dari BBM 48 persen, batubara sebesar 30 persen, gas bumi sebesar 19 persen, panas bumi sebesar 1 persen, dan tenaga air sebesar 2 persen. Selain itu, telah diterbitkan beberapa regulasi yaitu: (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui PT. PLN tetapi juga oleh pemerintah daerah; (2) Permen KESDM No. 31 tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari Pembangkit yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik; (3) Permen KESDM No. 32 tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Penyempurnaan regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta Pemerintah Daerah, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan dalam penyediaan tenaga listrik, serta untuk mendorong upaya diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi alternatif selain minyak. Hal tersebut dilakukan mengingat peran koperasi, swasta, dan pemda masih terbatas, bahkan tingkat keberhasilan independent power producers (IPP) sampai saat ini hanya sekitar 13 persen dari seluruh IPP yang saat ini telah mendapat ijin.

Adapun perkiraan pencapaian pembangunan energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2010 adalah: (1) melanjutkan upaya pembangunan transmisi ruas Kalimantan-Jawa Tengah dan trans-Jawa, serta beberapa wilayah distribusi yang dekat dengan ruas transmisi I. eksisting (diantaranya Jakarta, Banten, Cepu, Palembang, dan Surabaya); (2) pengembangan jaringan gas kota termasuk pengelolaan dan aspek hukum pascakontruksi jaringan gas; (3) pemanfaatan potensi energi lokal yaitu EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan capacity building guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); (4) tersusunnya rumusan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; (5) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi sekitar 95,59 persen yang merupakan hasil dari penambahan pembangunan pembangkit skala kecil dan menengah yang menggunakan energi baru terbarukan (PLTS, PLTMH, dan PLT Bayu) dan berikut pembangunan jaringan transmisi dan distribusi; (6) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 70,4 persen melalui pembangunan jaringan transmisi 500kV, 275 kV, 175kV, dan 150kV beserta Gardu Induk serta jaringan distribusi; (7) meningkatnya kapasitas pembangkit seiring dengan selesainya pembangunan pembangkit listrik dari program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I; dan (8) tersusunnya turunan dari peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan serta fasilitasi terhadap pembangunan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh swasta.

2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan 2010-2014 adalah :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA,
DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”**

dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan visi ini juga telah ditetapkan 3 (tiga) misi yang harus diemban yakni:

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV: Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V: Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Sebagai penjabaran dari RPJMN 2010-2014, dan dengan memperhatikan realisasi pembangunan tahun 2009 dan perkiraan capaian tahun 2010, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi tahun 2010 maka pembangunan tahun 2010 akan dilaksanakan dengan tema:

**“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
OLEH PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH”**

2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Sektor ESDM

2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional. Secara khusus pembangunan di bidang energi menempati urutan ke-8, yaitu pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;
2. Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dandiikuti oleh BUMN lainnya;
3. Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;
4. Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap;
5. Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya; dan
6. Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

2.3.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Oleh sebab itu Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.



Pengalaman selama periode 2004-2009 menjadi modal utama dalam menyusun agenda dan strategi pembangunan ini. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi capaian tersebut. Faktor eksogen, dapat mempermudah pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi neto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat.

2.4. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Sektor ESDM

2.4.1. Permasalahan

Untuk periode RPJMN 2010-2014 pembangunan energi dan ketenagalistrikan diperkirakan masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Bauran energi (energy mix) belum optimal. Ketergantungan akan energi fosil/konvensional berdasarkan kondisi bauran energi tahun 2008 masih tinggi. Selain itu komposisi energi final di Indonesia pada tahun 2008 ditandai dengan ketergantungan yang masih besar terhadap bahan bakar fosil (terutama minyak bumi) sebesar 47,1 persen dari total bauran energi. Hal ini selain mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan juga biaya penyediaan energi sangat menjadi mahal karena penyediaan energi (terutama minyak bumi) saat ini tidak hanya terkait pasokan dan permintaan namun telah menjadi komoditas untuk motif transaksi dan berspekulasi.

Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik baik skala besar maupun skala kecil dan menengah juga masih rendah. Pemanfaatan panas bumi baru sebesar 1.052 MW dari total potensi sebesar 27 GW atau baru sebesar 3,9 persen. Untuk mikrohidro, pemanfaatannya baru sebesar 17,2 persen dari total potensi sebesar 500 MW, dan biomassa hanya sebesar 0,8 persen dari total potensi yang ada sebesar 49,81 GW. Proporsi bauran energi primer untuk pembangkit listrik juga masih belum sehat. Penggunaan BBM untuk pembangkit listrik sampai saat ini masih cukup besar (34 persen). Namun, biaya operasi pembangkit BBM tersebut mencapai 79 persen dari total biaya operasi total pembangkit. Di sisi lain, pangsa energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik masih sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan batubara dan gas bumi sebagai sumber energi pembangkit listrik masih terkendala oleh terbatasnya pasokan akibat struktur pasarnya yang liberal dan oleh adanya kontrak-kontrak jangka panjang.

Pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan). Kapasitas sarana dan prasarana minyak dan gas bumi perkembangannya sangat terbatas. Kapasitas kilang minyak bumi pada periode 2004-2009 tidak mengalami penambahan. Akibatnya, Indonesia selain mengimpor minyak mentah juga harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi untuk sarana dan prasarana gas bumi di antaranya pilihan melakukan ekspor atau memenuhi kebutuhan domestik serta pilihan cara distribusi antara pembangunan pipa transmisi atau terminal. Selain itu, kapasitas sarana prasarana gas bumi berupa fasilitas LNG Receiving Terminal masih belum memadai, sehingga pemanfaatan LNG untuk konsumsi dalam negeri masih terbatas, sedangkan kapasitas jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga (gas kota) masih terbatas.

Pada sisi penyediaan tenaga listrik tampak bahwa kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai saat ini masih belum mampu mencukupi kebutuhan. Pertumbuhan kapasitas pembangkit tidak seimbang dengan pertumbuhan beban, yang sampai dengan tahun 2008 hanya bertambah sebesar 4.838 MW sejak 2004. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi yang diperkirakan baru mencapai 65,1 persen, atau dengan kata lain, terdapat sekitar 36 juta¹⁰ rumah tangga Indonesia masih membutuhkan tenaga listrik. Selain itu, tingkat keandalan pembangkit masih rendah dengan cadangan daya (reserve margin) berkisar 25 persen sedangkan minimum yang diharapkan adalah sebesar 35-40 persen.

Kondisi sistem transmisi interkoneksi masih belum andal. Sampai saat ini, keandalan sistem transmisi dan distribusi masih rendah dengan tingkat susut (losses) masih di atas 10 persen. Perkembangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di luar sistem Jawa-Madura-Bali, sistem transmisi interkoneksi baru mencakup sebagian dari sistem Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk sistem Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua belum dimiliki sistem transmisi interkoneksi.

Teknologi dan pendanaan didominasi asing. Pendanaan untuk prasarana energi merupakan permasalahan tersendiri yang perlu dicermati mengingat padat modal sehingga memerlukan dukungan pendanaan yang besar, tetapi, di sisi lain kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Sebagai contoh, negara (pemerintah) mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan energi listrik terutama di daerah terpencil dan perdesaan, namun dalam kenyataannya negara tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun sarana penyediaan tenaga listrik yang berupa pembangkit, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Dana pemerintah baik APBN maupun APBD serta dana BUMN yang disalurkan ke PT. PLN (Persero), tidak mencukupi untuk membangun seluruh sarana penyediaan tenaga listrik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu diupayakan sumber pendanaan lain baik pinjaman maupun hibah dari luar negeri serta partisipasi swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Keadaan ini menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana yang ada sangat tergantung pada ketersediaan dana pinjaman ataupun investasi dari luar/dalam negeri. Akibatnya rencana pembangunan sarana dan prasarana tidak mendapatkan kepastian investasi jangka panjang atau menjadi tidak efisien karena menggunakan dana yang lebih mahal. Pada sisi teknologi, sampai saat ini masih Indonesia tergantung dengan teknologi asing mengingat prasarana energi merupakan padat teknologi. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada investasi dan teknologi luar negeri (asing) yang akhirnya menurunkan penggunaan komponen lokal baik sumber daya manusia (jasa) maupun barang. Selain itu, pada sisi pasokan peran BUMN masih mendominasi pasar energi nasional. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh terhadap pengembangan prasarana energi termasuk di perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap energi listrik terutama di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau. Rendahnya pemanfaatan EBT juga diakibatkan oleh belum berjalannya kebijakan energy pricing dan adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga harga EBT belum dapat bersaing sepenuhnya dengan harga energi konvensional.

Regulasi masih perlu disempurnakan diikuti dengan konsistensi kebijakan. Permasalahan penting lainnya yaitu belum adanya penyempurnaan regulasi yang disesuaikan dengan dinamika sektor sekaligus sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pembebasan tanah (land acquisition), pemukiman kembali (resettlement), serta permasalahan kehutanan yang terkait dengan klasifikasi hutan dan pemanfaatan lahannya, yang pada umumnya memerlukan waktu yang sangat lama dan penuh ketidakpastian.

Kebijakan harga (pricing policy) masih belum tepat. Harga energi saat ini belum sesuai dengan keekonomiannya. Kebijakan harga energi yang masih membutuhkan subsidi mengakibatkan harga energi menjadi murah sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dalam pemanfaatan energi. Mengingat masih sangat tergantungnya energi terhadap sumber energi fosil, kondisi penyediaan energi nasional menjadi sangat rentan terhadap kondisi harga energi global dan membebani anggaran belanja negara. Selain itu, kondisi harga energi global saat ini sudah tidak sepenuhnya mencerminkan aspek pasokan permintaan namun terkait pula dengan aspek spekulasi.

Efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan data mengenai konsumsi energi di Indonesia, intensitas dan elastisitas energi saat ini masih tinggi tapi di sisi lain konsumsi energi per kapita yang rendah menunjukkan pemakaian energi tidak produktif dan boros. Namun, hal ini harus dicermati lebih jauh mengingat tingkat produktivitas juga terkait dengan penciptaan nilai tambah yang berdimensi multisektor.

Konservasi energi yang belum berkembang di tanah air dipengaruhi oleh pandangan bahwa Indonesia dikaruniai sumberdaya energi berlimpah sehingga menggunakan energi secara hemat bukanlah sebuah keharusan, dan pemahaman mengenai konservasi energi sebagai tindakan praktis juga belum berkembang di masyarakat karena masih langkanya penyebaran informasi atau kampanye mengenai teknik-teknik konservasi energi. Pelaksanaan konservasi energi sesungguhnya memberikan keuntungan. Sebagai contoh, industri-industri dapat menurunkan biaya produksi bila penggunaan energi secara hemat terus dipraktekkan. Selain menekan biaya, konservasi energi berarti meningkatkan kapasitas pelayanan dan akses terhadap energi, yang didalamnya energi yang dihemat (BBM, listrik, dstnya) dapat diperluas pemanfaatannya untuk masyarakat lain, termasuk kaum dhuafa. Melalui konservasi, dampak negatif terhadap lingkungan diturunkan, bahkan kini melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanisme/CDM), pengurangan polusi dapat dijual ke pasar emisi dunia, dan dengan lingkungan yang bersih maka kualitas kehidupan akan meningkat.

Parsitipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi kurang. Sejauh ini hampir sebagian besar kebijakan pemenuhan kebutuhan energi nasional masih dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, sudah selayaknya pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam parsitipasi pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun, terlihat bahwa pemerintah daerah belum siap secara penuh untuk berperan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kebijakan termasuk peraturan daerah yang menghambat, serta masih rendahnya alokasi APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana energi.

2.4.2.Sasaran Pembangunan Nasional Sektor ESDM

Tabel 2.1.
Sasaran Pembangunan Nasional Sektor ESDM

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014
a.	Tercapainya komposisi bauran energi yang sehat dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baru terbarukan (EBT)	• Persentase pemanfaatan minyak bumi dalam bauran energi nasional sebesar 38,33 persen • Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 16,1 persen • Pengembangan produksi dan pemanfaatan bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati, batubara dicairkan, GTL (Gas To Liquid), DME (dimethyl eter) dan lain-lain • Peningkatan pemanfaatan EBT untuk pembangkit tenaga listrik (PLTMH, PLTS, PLT Bayu, PLT Biomassa)
b.	Penurunan elastisitas energi	Elastisitas energi menjadi sebesar 1,48
c.	Pemanfaatan potensi pendanaan domestik dan skema pendanaannya	Termanfaatkannya potensi pendanaan dalam negeri baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari non perbankan nasional guna mendukung pengembangan energi batu terbarukan serta konservasi dan efisiensi energi
d.	Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi	Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi
e.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor	• Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 80.000 sambungan rumah di 20 kota • Tercapainya pembangunan 21 buah SPBG di 3 kota • Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan penambahan 30.500 MW • Terintegrasinya sistem di Sulawesi dan sistem di Kalimantan • Berkurangnya susut jaringan menjadi di bawah 10,0 persen • Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Ketenagalistrikan • Meningkatnya penerapan standarisasi teknis bidang ketenagalistrikan yang disertifikasi SNI dan/atau diperlakukan wajib

No	Sasaran	Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014
f.	Peningkatan jangkauan Pelayanan ketenagalistrikan	• Rasio elektrifikasi meningkat dari 67,2 persen di tahun 2010 menjadi 80,0 persen di tahun 2014 • Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 persen di tahun 2010 menjadi 98,9 persen di tahun 2014
g.	Tercapainya bauran energi (<i>energy mix</i>) primer untuk penyediaan tenaga listrik	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik pada tahun 2014 menjadi : • Batubara sebesar 64 persen • BBM sebesar 2 persen • Panas bumi sebesar 10 persen • Gas bumi sebesar 18 persen, • Hidro sebesar 6 persen
h.	Peningkatan efektifitas subsidi pemerintah	Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak menerima (<i>benefeciaries</i>)
i.	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi	• Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan ketenagalistrikan dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional • Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan yang ada

2.5.Strategi Dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan sasaran di atas, pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin baik keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, maupun dunia usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Infrastruktur dasar merupakan sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah karena tidak memiliki aspek komersial, sedangkan infrastruktur yang memiliki nilai komersial diharapkan dibiayai melalui partisipasi pihak swasta ataupun masyarakat melalui mekanisme unbundling maupun dual track strategy.

Penyediaan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, seperti air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, listrik serta informasi dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan; serta pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air, seperti pembangunan Banjir Kanal Jakarta dan penanganan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengatasi bencana alam banjir di berbagai daerah. Kebijakan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan terkait dengan fokus **Dukungan peningkatan daya saing sektor riil** dalam lima tahun ke depan diarahkan pada hal hal berikut

1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kebijakan ini diperlukan untuk menyediakan dukungan terhadap energi dan ketenagalistrikan yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Strategi yang dilakukan antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik, dengan melakukan kaji ulang terhadap proyek percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW, fasilitasi proyek pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap II khususnya untuk pembangkit yang memanfaatkan EBT, fasilitasi pembangunan pembangkit Independent Power Producer (IPP) termasuk penyelesaian permasalahan IPP eksisting, alokasi energi primer (batubara dan gas bumi) untuk pembangkit listrik (domestic market obligation/DMO), pengembangan skema baru untuk pengadaan tanah bagi sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan.
 - b. Membangun tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan;
 - c. Meningkatkan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan;
 - d. Melanjutkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), melalui (i) fasilitasi kaji ulang pembangunan PLTN; dan fasilitasi sosialisasi tentang PLTN;
 - e. meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi skala besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi dengan: fasilitasi updating database sumber panas bumi, fasilitasi pemanfaatan gas bumi skala kecil, pengalokasi APBN dan dukungan pendanaan murah yang tepat untuk mengurangi risiko pengembangan panas bumi, dan fasilitasi untuk mengakomodasi pengembangan panas bumi dalam penggunaan lahan kehutanan.
 - f. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti coal bed methane (CBM), dimethyl eter (DME) dan lain-lain;
 - g. Pemanfaatan potensi pendanaan domestik baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk pengembangan skema pendanaannya.

3. Pengurangan subsidi secara bertahap dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan EBT. Strategi yang dilakukan adalah dengan : (i) fasilitasi kebijakan subsidi; (ii) pemberian subsidi listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga; (iii) penurunan jumlah subsidi BBM.

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat. Strategi yang dilakukan adalah:

a. meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi hilir maupun hulu, melalui : (i) fasilitasi pembentukan manajer energi; (ii) fasilitasi audit energi; (iii) sosialisasi program efisiensi dan konservasi energi; (iv) repowering dan rehabilitasi serta re-konfigurasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (v) pengembangan pendanaan dan mendorong peran perbankan bagi pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi untuk industri dan bangunan; (vi) penyusunan standarisasi peralatan dan pemberian label hemat energi.

b. restrukturisasi dan penerapan good governance pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan;

c. penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien sekaligus ramah lingkungan untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan;

d. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta

e. menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

konservasi energi; (iv) repowering dan rehabilitasi serta re-konfigurasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (v) pengembangan pendanaan dan mendorong peran perbankan bagi pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi untuk industri dan bangunan; (vi) penyusunan standarisasi peralatan dan pemberian label hemat energi.

b. restrukturisasi dan penerapan good governance pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan;

c. penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien sekaligus ramah lingkungan untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan;

d. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta

e. menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

5. Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Strategi yang dilakukan adalah:
- a. Penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan;
 - b. mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik (seperti *clean coal teknologi*, pemakaian FGD, dan *carbon capture storage/CCS*); serta
 - c. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dalam rangka meningkatkan KPS, adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.

konservasi energi; (iv) repowering dan rehabilitasi serta re-konfigurasi sarana dan prasarana ketenagalistrikan; (v) pengembangan pendanaan dan mendorong peran perbankan bagi pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi untuk industri dan bangunan; (vi) penyusunan standarisasi peralatan dan pemberian label hemat energi.

- b. restrukturisasi dan penerapan good governance pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan;
- c. penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien sekaligus ramah lingkungan untuk sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan;
- d. penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta
- e. menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.

5. Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan;
- b. mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pembangkit listrik (seperti *clean coal technology*, pemakaian FGD, dan *carbon capture storage/CCS*); serta
- c. penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional dalam rangka meningkatkan KPS, adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya untuk pembangkit tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, strategi yang akan diterapkan adalah sebagai berikut: (1) memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; (2) meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; (3) memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; (4) mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan baik secara terintegrasi maupun secara terpisah.

2.6. Program Pembangunan dan Target Tahun 2010 Sektor ESDM

2.6.1 Program Pembangunan Sektor ESDM

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, maka telah ditetapkan program KESDM yang meliputi sub-sektor migas, ketenagalistrikan dan pertambangan yang dilaksanakan oleh unit KESDM, dengan perincian sebagai berikut:

1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Program tersebut bertujuan mewujudkan

pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor migas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Melalui pengaturan dan pembinaan tersebut KESDM mendorong pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam minyak, gas bumi dan gas metana batubara agar berjalan secara efisien, handal dan berkelanjutan.

2) PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal. Program ini dilaksanakan oleh BPH Migas

3) PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Program tersebut bertujuan untuk

*) diisi target selama 5 tahun (akumulatif), kecuali target tidak bisa diakumulasikan, maka diisi target pada tahun 2014

menyediakan tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar serta meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan penerapan konservasi energi.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Dalam pengaturan dan pembinaan tersebut KESDM akan mendorong dan ikut melaksanakan pembangunan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan serta konservasi energi.

4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH

Program tersebut bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang profesional.

Sesuai tugas dan fungsinya KESDM akan melakukan pengaturan dan pembinaan di sub sektor mineral, batubara dan panas bumi serta air tanah yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. KESDM melaksanakan pembinaan, pengaturan (?) dan pelayanan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi yang profesional.

5) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

Program tersebut bertujuan untuk Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

KESDM mempunyai tugas antara lain melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi yang dilaksanakan oleh Badan Geologi. Identifikasi, survei, penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi potensi aspek geologi yaitu aspek sains geologi (geo-science), sumber daya geologi (geo-resources), lingkungan geologi (geo-environment), dan kebencanaan atau bahaya geologi (geo-hazards) merupakan kegiatan hulu dan dasar dari pengelolaan sumber daya energi dan mineral, pengelolaan lingkungan, serta sebagian besar dari mitigasi bencana alam. Pengungkapan potensi geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat mengandung arti bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang berada di bawah permukaan tanah perlu diungkapkan dalam bentuk data dan informasi sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan investasi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi.

6) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL

Program tersebut bertujuan untuk pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional.

Dalam pengelolaan energi nasional telah dibentuk Dewan Energi Nasional dengan tugas: a) merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, b) menetapkan rencana umum energi nasional, c) menetapkan langkah- langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, d). mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektoral. Untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN maka dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi DEN dan fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

7) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di KESDM.

Untuk mendukung visi dan misi KESDM, diperlukan tata kelola pemerintahan KESDM yang baik, tTerdwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:

- Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya
- Opini BPK terhadap laporan keuangan KESDM yaitu WTP
- Penyelesaian terhadap rancangan perundang undangan yang telah ditargetkan
- Adanya perencanaan KESDM yang sinergis
- Tersedianya layanan data dan informasi yang handal
- Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar

8) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR KESDM

Program tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM

9) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan. Untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan kelembagaan dan aparatur yang bersih, akuntabel dan transparan. Terwujudnya KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan ditandai dengan menurunkan praktek KKN, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundangan untuk mewujudkan good governance dan clean government, peningkatan kinerja aparatur KESDM yang dititikberatkan pada jenis pengawasan Kinerja (3E), pengawasan terhadap pelayan publik, pemberdayaan kegiatan partnering dan konseling dan implementasi sistem AKIP serta peningkatan dan pemberdayaan pengendalian internal unit/satuan kerja.

10) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral.

Tujuan terwujudnya peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral antara lain tersedianya teknologi, data dan informasi, hasil kajian kebijakan sektor ESDM untuk menunjang pemerintah, swasta dan industri serta meningkatnya PNBPN melalui pelayanan jasa riset dan teknologi, konsultasi dan bantuan tenaga ahli.

11) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia sektor ESDM yang profesional, berdayasaing tinggi dan bermoral.

Selaras dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di KESDM, maka sumber daya manusia juga menjadi fokus yang sangat penting dan karena SDM dipandang sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas kementerian. Pewujudan kualitas SDM yang mumpuni di kaitkan dengan peningkatan penguasaan kompetensi teknis maupun non-teknis. Karena itu kriteria profesional, berdayasaing dan bermoral melibatkan bukan hanya penguasaan aspek teknis ke ESDM an tetapi juga aspek kematangan emosi dan spiritual.



BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS



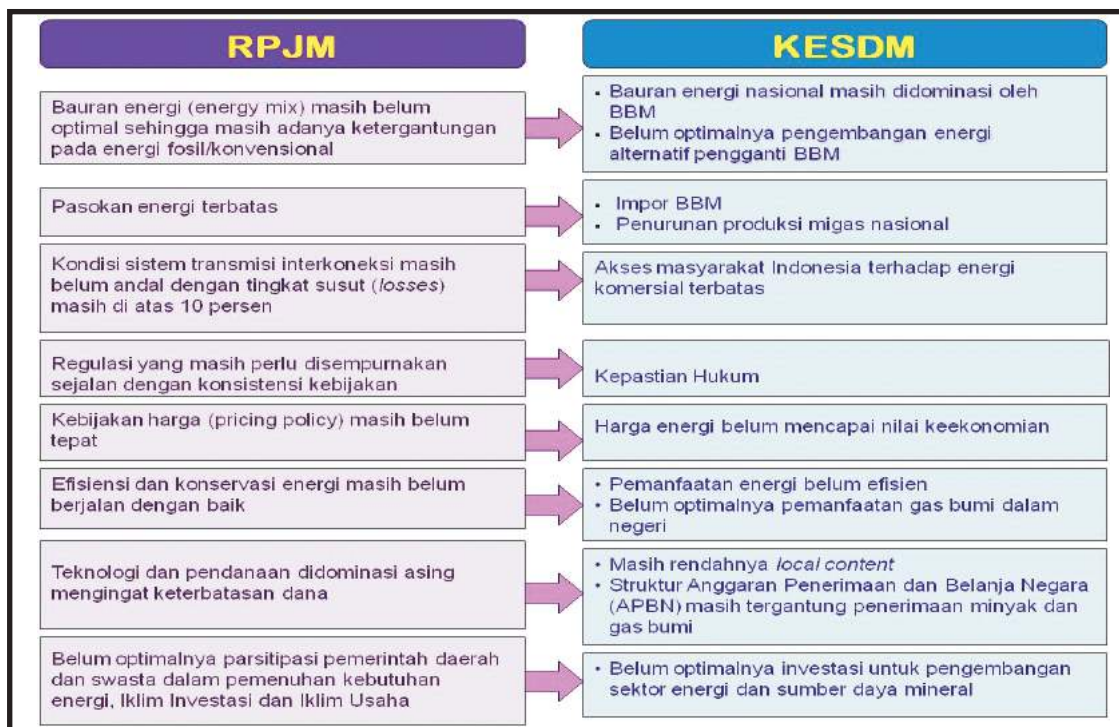
Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sejak pembangunan nasional dirancang dan dilaksanakan secara terprogram dan sistematis, mulai dari Pelita I sampai sekarang, serta potensinya yang cukup besar dalam mendukung program pembangunan di masa-masa mendatang.

Sementara itu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Mengingat Renstra merupakan salah satu subsistem dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan terkait dengan sistem lainnya seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka penyusunan Renstra ke depan perlu dilaksanakan secara akurat, realistis, dan mengikuti acuan-acuan yang telah ditentukan.

Bertolak dari kondisi ini, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai pemegang "hak" pengelolaan sektor ESDM berdasarkan undang-undang, dituntut untuk merumuskan kebijakan dan program, serta mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaannya, sehingga sektor ESDM benar-benar mampu menjadi motor penggerak (prime mover) bagi sektor riil dalam kerangka tatanan ekonomi nasional.

ISU STRATEGIS TERKAIT PENGELOLAAN ESDM



3.1. Visi Dan Misi

Pernyataan Visi :

"Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

Penjelasan ringkas tentang makna dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut:

Ketahanan dan kemandirian energi – merupakan keinginan untuk menciptakan keamanan ketersediaan pasokan energi (energy security) guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang didasarkan pada berbagai sumber energi yang berasal dari dalam negeri dan tidak bergantung pada impor.

Peningkatan nilai tambah energi dan mineral – mengandung makna bahwa berbagai sumber energi (termasuk energi alternatif dan terbarukan) harus memberi nilai tambah, baik dalam pemanfaatan maupun dalam memberi kontribusi ekonomi (khususnya finansial) yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berwawasan lingkungan – bahwa seeluh proses pengelolaan energi, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, transportasi sampai pada penggunaannya harus memperhatikan aspek lingkungan guna mendukung terciptanya pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development).

Selanjutnya pernyataan Misi KESDM sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi KESDM adalah:

Pernyataan Misi :

1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi, mineral dan informasi geologi.
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM;
8. Meningkatkan kualitas SDM sektor ESDM;
9. Melaksanakan **good governance**.

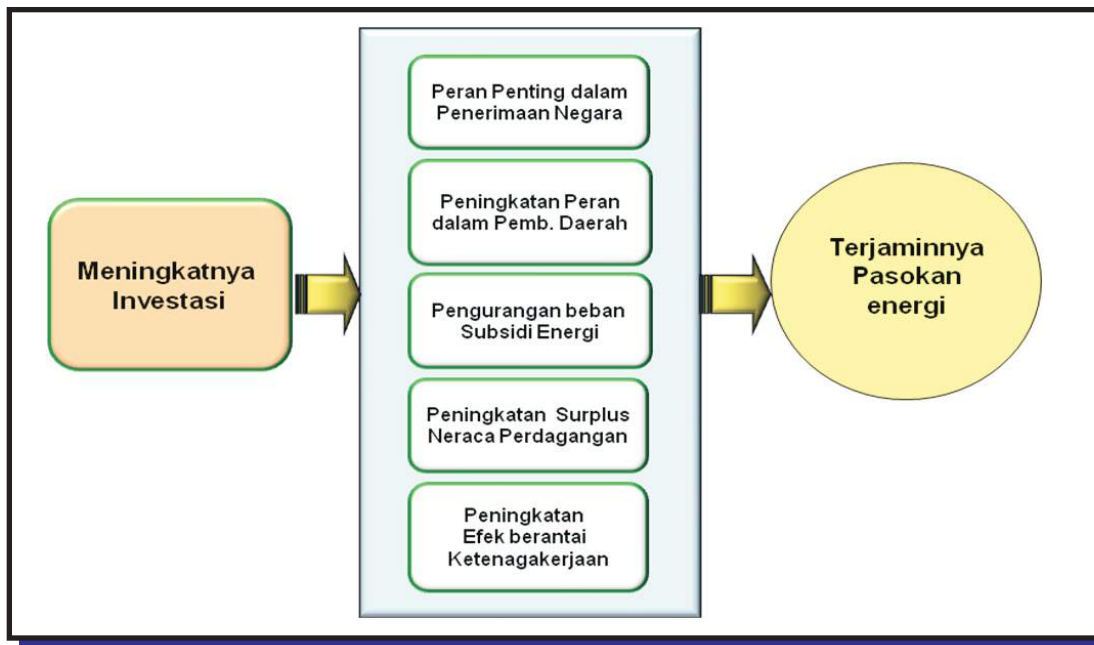
3.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

3.1.1. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014):

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara
4. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah
5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik
6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor
7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

HUBUNGAN ANTARA TUJUAN STRATEGIS



Gambar 3.2. Hubungan antara Tujuan Strategis

Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan KESDM dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan pernyataan visi KESDM dalam Renstra 2010 – 2014. Adapun uraian terhadap makna yang terkandung dalam setiap tujuan beserta indikator untuk mengukur kinerja selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara. Kecenderungan produksi minyak bumi, sebagai energi tidak terbarukan, cenderung menurun setiap tahunnya. Mulai tahun 2007, produksi minyak sudah dibawah level 1 juta barel per hari. Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok Cepu, maka dalam jangka pendek akan ada peningkatan produksi minyak Indonesia, meskipun akan menurun kembali karena *natural decline rate* yang cukup tinggi sekitar 12% per tahun. Mengantisipasi situasi menurunnya produksi minyak bumi, maka ke depan, penyediaan energi difokuskan pada gas dan batubara yang produksinya relatif meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2010 produksi minyak bumi berada pada angka 965 juta barel per hari. Sementara untuk batubara di tahun 2010 ini produksinya akan meningkat dari setara dengan 2875 juta barel minyak bumi.

Sebagai salah satu cara efektif untuk memastikan kesinambungan pasokan adalah konservasi konsumsi sumber energi fosil melalui program konversi minyak tanah ke LPG. Dengan demikian volume minyak tanah bersubsidi tiap tahunnya dikurangi secara signifikan. Selain itu, pengawasan peruntukan minyak tanah sudah semakin baik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Untuk jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, minyak tanah tetap dijual namun dengan harga pada tingkat keekonomian.

Permintaan energi listrik terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan sekitar 9% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain pembangunan infrastruktur energi dan mineral termasuk pembangkit listrik dengan program 10.000 MW tahap I, 10.000 MW tahap II dan IPP (*Independent Power Producer*) atau Produsen Listrik Mandiri.

Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan energi domestik, diversifikasi energi merupakan program prioritas, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) atau energi alternatif non-BBM. Pembangkit listrik EBT terdiri dari PLTP, PLTS, PLTB, PLTMH & Pikohidro, dimana kapasitas terpasangnya ditingkatkan terus setiap tahunnya. Pengembangan sumber-sumber energi dalam rangka diversifikasi energi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010 kapasitas terpasang pembangkit EBT diperkirakan sekitar 1210 MW. Rencana penambahan kapasitas terpasang EBT terbesar adalah dari sumber energi panas bumi, yaitu direncanakan 140 MW. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya porsi pembangkit panas bumi pada program 10.000 MW tahap II, yaitu 48%.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Energi No. 30/2007, Pemerintah berkewajiban meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN). Sejalan dengan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Road Map Pengembangan BBN, Pemerintah telah menetapkan kewajiban minimal pemanfaatan biofuel secara bertahap sampai dengan tahun 2025. Kewajiban ini diatur dalam Permen ESDM No. 32/2008 tertanggal 26 September 2008. BBN yang diatur meliputi biodiesel, bioethanol dan bio oil; sedangkan sektornya meliputi rumah tangga, transportasi PSO dan non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik.

Untuk tahun 2010, rencana kapasitas produksi BBN adalah sebesar 2.774 ribu KL, terdiri dari bio-diesel sebesar 2.521,5 ribu KL, bio-etanol sebesar 212,5 ribu KL dan bio-oil sebesar 40 ribu KL. Pengembangan kapasitas produksi yang konstan menunjukkan fokus Pemerintah dalam pengembangan energi alternatif, untuk lingkungan yang lebih baik danantisipasi terhadap semakin mahal dan langkanya sumber energi habis pakai di masa yang akan datang.

Sektor ESDM memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyediaan energi terutama pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik dimanfaatkan untuk industri pupuk, kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel dan industri lainnya.

Saat ini kebijakan alokasi gas lebih mengutamakan pasokan domestik, dimana cadangan besar dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Selain itu, kebijakan DMO gas juga diberlakukan (25% dari bagian KKKS/PSC untuk domestik, sisanya dapat dipergunakan untuk domestik maupun ekspor). Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan.

Terkait dengan gas bumi untuk domestik, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) tahun 2002 – 2008 pasca diterbitkannya UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik berjalan sangat baik. Meskipun saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor gas tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan gas bumi. Pertimbangannya adalah harga gas bumi domestik umumnya lebih rendah dibandingkan harga untuk ekspor.

Disamping gas bumi, bahan mineral juga berperan penting sebagai pemasok bahan baku industri. Bahan mineral tersebut antara lain tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, granit, intan dan besi. Produksi mineral dari tahun ke tahun sesuai dengan harapan. Peranan pengelolaan bahan mineral, lebih dominan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan adanya UU Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana kegiatan usaha pertambangan dapat di desentralisasikan, sehingga ijin usaha pertambangan atau Kuasa Pertambangan (KP) dapat dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur. Dengan demikian, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sangat penting dalam rangka pengelolaan, pengawasan pertambangan di daerah agar penerimaan negara dari pertambangan umum dapat dioptimalkan.

Tujuan strategis lainnya dalam pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan domestik adalah peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi, dimana tingkat elastisitas energi perlu diturunkan terus. Pada tahun 2010 direncanakan bahwa elastisitas energi berada pada angka 1.64.

2. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

Sektor ESDM selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor ESDM. Pada tahun 2005 hingga 2008 terjadi peningkatan investasi sekitar 67% dari US\$ 11,9 miliar menjadi US\$ 19,9 miliar, di tahun 2009 sempat terjadi penurunan investasi sebesar 3.32% dari tahun 2009 yang disebabkan karena adanya penundaan rencana kegiatan investasi di berbagai perusahaan yang antara lain akibat tumpang-tindih dan kendala izin AMDAL yang diterbitkan daerah. Namun demikian pada tahun 2010 ditargetkan total investasi sebesar US\$ 28.063 juta. Sedangkan untuk sub sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, total investasinya yang ditargetkan pada tahun 2010 adalah US\$ 10.146 juta. Dan untuk sub sektor pertambangan umum, target investasi pada tahun 2010 adalah US\$ 2.502 juta. Dengan total investasi pada tahun 2010 sebesar US\$ 15.4105 juta, migas masih tetap pemegang proporsi terbesar investasi dengan porsi sekitar 55%.

3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM setiap tahunnya memberikan kontribusi diatas 30% terhadap penerimaan nasional.

Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil terbesar, yakni dengan porsi penerimaan 18.7% pada tahun 2009. Pada tahun 80an, komoditi migas merupakan sumber utama bagi penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga minyak. Sejak pertengahan tahun 90an produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis pakai, mulai menurun.

Namun demikian, seiring dengan optimisme dan kerja keras, meskipun produksi minyak nasional relatif menurun, realisasi penerimaan migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan proporsi produksi migas yang selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi lainnya di sektor ESDM, maka realisasi total penerimaan sektor ESDM juga selalu lebih tinggi dari targetnya. Penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk dividen dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari perusahaan sektor ESDM terdiri dari PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati.

Jenis-jenis penerimaan yang terangkum dalam Indikator tujuan dari penerimaan negara sektor ESDM berasal dari sub-sektor minyak dan gas, PNPB dari pertambangan umum, kegiatan jasa penelitian dan pengembangan, dari kegiatan di Badan Diklat dan dari BPH Migas. Di tahun 2010 ini ditargetkan penerimaan Negara mencapai Rp 218 Triliun dengan komposisi penerimaan dari sub sektor Migas sebesar Rp 159,75 Triliun, sub sektor pertambangan umum Rp 57,139 Triliun, dari sub sektor penunjang sebesar Rp 0,64 Triliun.

4. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Di samping berperan penting terhadap penerimaan negara, sektor ESDM juga turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan pengembangan masyarakat atau *community development* (comdev) yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang sering disebut *corporate social responsibility* (CSR), listrik perdesaan, dan penyediaan air bersih.

Pada tahun 2010 Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ESDM adalah sebesar Rp.38,3 triliun yang terdiri dari minyak bumi Rp.19,2 triliun, gas bumi Rp.12,2 triliun dan pertambangan umum Rp.7,0 triliun. Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lides), melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB), gardu distribusi (GD), jaringan tegangan menengah (JTM) dan jaringan tegangan rendah (JTR). Program Listrik Perdesaan beragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program ini dari tahun ke tahun cenderung terus ditingkatkan baik dari segi volume maupun intensitasnya, sebagai salah satu wujud nyata dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

Pengembangan Masyarakat atau *Community Development* (Comdev) sektor ESDM dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat yaitu: **Ekonomi** berupa peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, dan pembangunan/perbaikan sarana ibadah; **Pendidikan dan Kebudayaan** yaitu kelompok usaha, pelatihan dan perencanaan; **Kesehatan** meliputi kesehatan terpadu dan air bersih; **Lingkungan** yaitu penanaman bakau, reklamasi dan lainnya yaitu kegiatan sosial, penyuluhan dan pembangunan sarana olah raga.

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan non-BBN. DME berbasis BBN menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa, sawit singkong dan tebu. Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi setempat yaitu mikrohidro, angin, surya dan biomassa. Sampai dengan tahun 2009, jumlah desa dengan sumber energi mandiri direncanakan ditingkatkan menjadi 2000, dimana 1000 desa direncanakan berbasis BBN dan 1000 berbasis non-BBN.

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN dari tahun anggaran 1995/1996. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

5. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Subsidi energi yang terdiri dari BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari konsumsi dan harga minyak. Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN. Akan sangat bermanfaat dan berdampak ekonomi positif jika anggaran subsidi tersebut dipergunakan untuk pembangunan sektor lain yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, perawatan/pembangunan infrastruktur, jalan, transportasi dan bantuan sosial. Pergeseran subsidi energi menjadi subsidi langsung atau untuk anggaran sektor lain, memiliki dampak politik dan sosial yang lebih tinggi, Sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Penurunan subsidi BBM, LPG dan BBN pada tahun 2010 direncanakan menurun sampai dengan 68,7 trilyun. Subsidi listrik juga diturunkan menjadi sebesar 37,8 trilyun. Dengan penurunan subsidi ini, maka akan tersedia lebih banyak dana untuk pembangunan sektor lain yang lebih memerlukan.

6. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk dalam negeri dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Terkait Neraca atau balance minyak mentah Indonesia, saat ini ekspor sebesar 399 ribu bph (61%) masih lebih besar dari impor sebesar 254 ribu bph (39%), atau ekspor lebih besar dari impor (net exporter). Namun, jika impor BBM sebesar 418 ribu barel/hari juga diperhitungkan, maka balance minyak berubah menjadi ekspor 399 ribu bph (37%) dan impor 672 bph (77%), sehingga impor lebih besar daripada ekspor (net importer). Dengan produksi minyak sebesar 976 ribu bph saat ini, sementara konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bph, maka impor BBM tetap diperlukan. Konsumsi terbesar terjadi pada sektor transportasi (56%) dan diikuti oleh pembangkit listrik (18%), industri (13,5%) dan rumah tangga (12,5%).

Sehubungan dengan resesi ekonomi global, dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ini diproyeksikan masih positif, yaitu 5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh dominasi konsumsi domestik, belanja pemerintah yang lebih tinggi, investasi yang relatif konstan dan pendapatan bersih ekspor (ekspor dikurangi impor) yang masih positif.

Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu positif. Dalam proyeksi tahun 2010, nilai ekspor dirancang sebesar 135 juta barrel. Angka ini adalah setelah memperhitungkan upaya peningkatan produksi dan optimasi lapangan yang ada, serta pembukaan wilayah kerja yang baru.

Sementara itu nilai impor komoditi migas dan pertambangan umum diusahakan tidak meningkat. Kalaupun ada peningkatan angkanya tidak besar yang selaras dengan upaya konservasi dan menjadikan neraca yang positif atau surplus. Pada tahun 2010 nilai impor BBM sebesar 42,25 juta kilo liter, sedangkan impor minyak mentah untuk diolah sebesar 90,04 juta barel dan diupayakan penurunan nilai impor pertambangan umum sebesar 903 untuk masing-masing.

7. Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (Multiplier Effect). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (Community Development), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sektor ESDM memberikan dampak backward linkage dan forward linkage. Keberadaan industri ESDM membentuk backward linkage, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri ESDM tersebut. Contoh dari industri tersebut antara lain industri material dan peralatan di Batam seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, adanya industri ESDM juga menghidupkan forward linkage dimana industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri lainnya tumbuh dan berkembang karena keberadaan dan operasi industri ESDM.

Kebutuhan sektor ESDM terhadap tenaga kerja terdidik dan terampil banyak sekali membuka lapangan kerja, meskipun sifat dari industri ESDM adalah capital intensive atau memerlukan modal besar untuk beroperasi, bukan labour intensive atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya upaya peningkatan ketrampilan sumber daya manusia sektor sangat didukung melalui kerjasama yang intens antara pemerintah dan industri.

Salah satu upaya nyata adalah Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional. Berdasarkan data yang terkumpul, telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dalam kurun waktu 3-4 tahun yaitu dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,7 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung

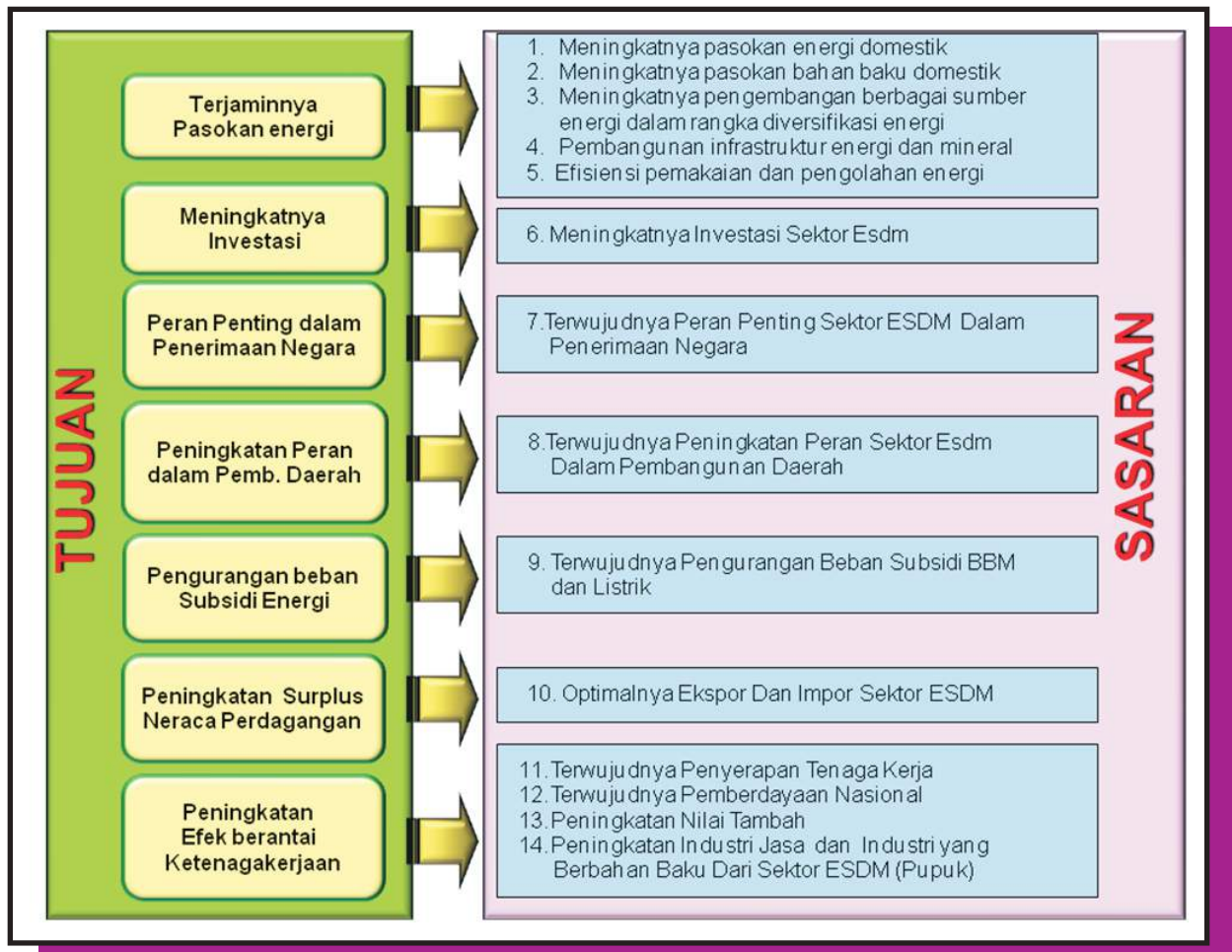
yang terlibat dalam kegiatan pendukung. Namun demikian, akibat dampak resesi global, pada tahun 2010 diperkirakan terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja langsung menjadi sekitar 1,6 juta tenaga kerja.

KESDM juga berupaya terus membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional melalui langkah-langkah utama, yaitu, Keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi; pengendalian impor barang operasi migas yang bertujuan untuk pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); penyusunan dan menerbitkan ADP (Appreciation of Domestic Product) List, yang memuat perusahaan/pabrik yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha Migas; mewajibkan minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan barang dan jasa dan penyiapan kebijakan untuk Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi pada industri migas.

3.1.1. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis KESDM pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

PEMETAAN TUJUAN DAN SASARAN



Gambar 3.3. Pemetaan Tujuan dan sasaran

Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran strategis tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Indikator Sasaran Dan Target Kinerja

Sasaran	Indikator	Target 2010
1. Meningkatnya pasokan energi domestik	• Produksi minyak bumi (MBOPD)	965
	• Produksi gas bumi (MBOEPD)	1.593
	• Produksi CBM (MBOEPD)	-
	• Produksi batubara (MBOEPD)	2875
	• Produksi BBM (juta KL)	39,9
	• Produksi LPG (juta Ton)	1,98
	• Produksi LNG (MMTPA)	24,12
	• Rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton)	75
2. Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik	• Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	100
3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi:	• Pangsa gas bumi (%)	24,5
	• Pangsa CBM (%)	-
	• Pangsa batubara (%)	23,3
	• Pangsa panas bumi (%)	2,6
	• Pangsa energi baru terbarukan lainnya (%)	3,0
4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral	• Fasilitas produksi minyak bumi (BOPD)	60.000
	• Fasilitas produksi gas bumi (MMSCFD)	1.020
	• Jaringan pipa gas kota (RT)	12.000
	• PLTP (MW)	70
	• pembangkit listrik (MW)	8.689
	• Rasio elektrifikasi	68,9%
5. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi	• Elastisitas Energi	1,64
	• Penurunan Emisi CO ₂ (%)	5.4
6. Meningkatnya investasi sektor ESDM	• Jumlah investasi sector ESDM	28.063
	- Jumlah Investasi sub sektor migas (US\$ juta)	15.415
	- Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US\$ juta)	10.146
	- Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (US\$ juta)	2.502

Sasaran	Indikator	Target 2010
	- Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi (US\$ juta)	10.146
	- Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (US\$ juta)	2.502
7. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	• Jumlah penerimaan Negara Zsektor ESDM	175,475
	- Jumlah penerimaan negara sub sektor migas (Triliun Rupiah)	159,75
	- Jumlah PNB dari subsektor pertambangan umum (Triliun Rupiah)	15,09
	- Jumlah PNB dari Badan Litbang (Triliun Rupiah)	0,048
	- Jumlah PNB dari Badan Diklat (Triliun Rupiah)	0,154
	- Jumlah PNB dari BPH Migas (Triliun Rupiah)	0,433
8. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	• Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum (Milliar Rupiah)	8.231
	• Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas (Milliar Rupiah)	16.082
	• Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum (Milliar Rupiah)	705
	• Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi (Milliar Rupiah)	94
	• Jumlah CSR subsektor Migas (Milliar Rupiah)	380
	• Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik (MVA)	33278/ 2340
	• Jumlah desa mandiri energi (desa)	50
	• Jumlah sumur bor daerah sulit air	100
9. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	• Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN (Trilyun Rupiah)	68,7
	• Jumlah subsidi Listrik (Trilyun Rupiah)	37,8
10. Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor	• Jumlah ekspor minyak mentah (juta barel)	135
	• Jumlah nilai ekspor natural gas (BBTU)	354.632,5
	• Jumlah nilai impor BBM (juta KL)	27,08
	• Jumlah impor crude oil (juta barel)	90,04

Sasaran	Indikator	Target 2010
	Jumlah impor pertambangan umum (Juta US\$)	903
11. Terwujudnya penverapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	411.898
	Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	1.787.000
	Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	121.680
12. Terwujudnya pemberdayaan nasional	Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1
	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55
	Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor Migas	30
	Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%
13. Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	60 %
14. Peningkatan industri jasa dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk.	Jumlah industri jasa penunjang Migas (perusahaan)	1270
	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan (perusahaan)	650
	Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum (perusahaan)	600
	Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk	100

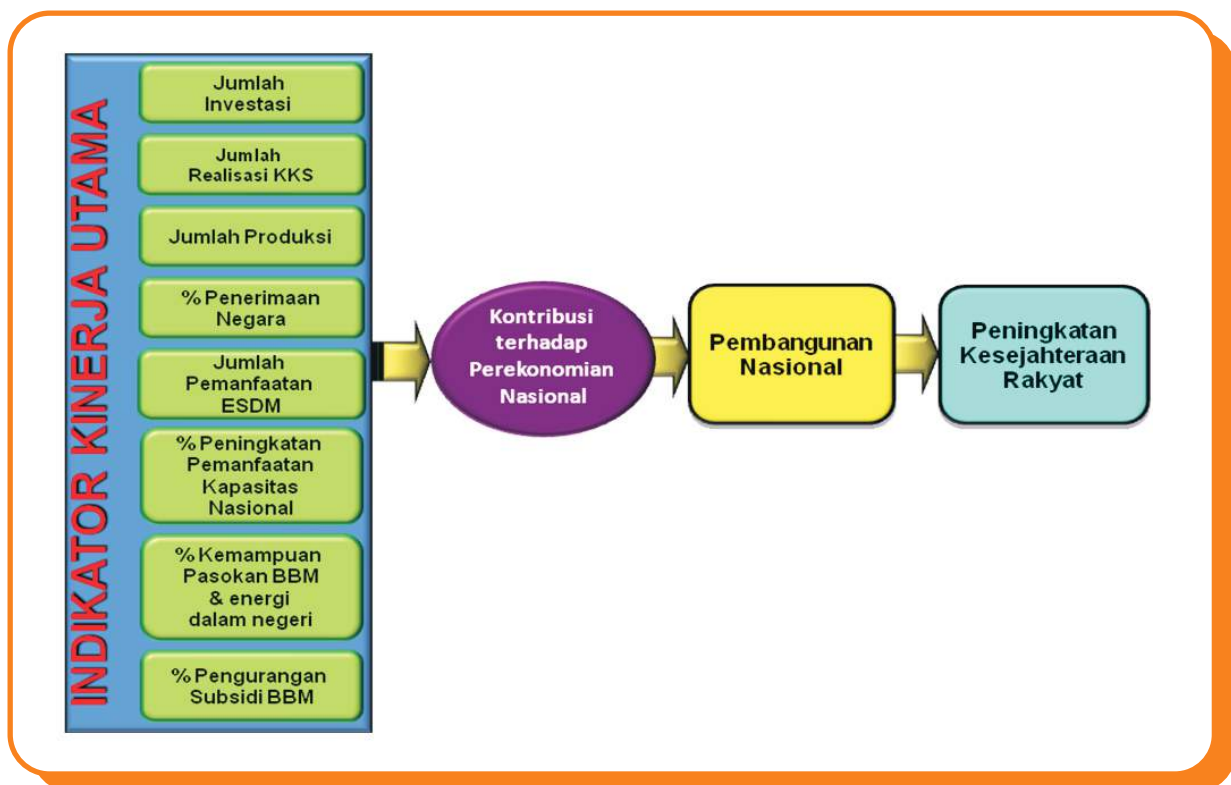
3.3. Indikator Kinerja Utama

Sebagai konsekuensi dari penerapan sistem AKIP, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagai salah satu dari instansi pemerintah tidak akan lepas dari proses penetapan indikator kinerja. Proses ini merupakan bagian yang penting bagi setiap instansi pemerintah karena indikator kinerja merupakan komponen utama Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Selain itu juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri KESDM No. 12 Tahun 2009 merupakan acuan kinerja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh KESDM beserta masing-masing unit utama di lingkungan KESDM untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN ESDM



Gambar 3.4. Indikator Kinerja Utama KESDM

Selanjutnya target kinerja tahun 2010 dari Indikator kinerja utama (IKU) KESDM, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Target Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	TARGET
1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	% Rp Milyar	100 276.849,9
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	US\$ Juta	24.638,3
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditanda tangani	KKS: • KKS Migas • WK CBM • WK Panas Bumi	38 25 10 3
4.	Jumlah produksi:		
	• Minyak bumi	MBOPD	965
	• Gas bumi	MBOEPD	1.503
	• Batubara	Juta Ton	254
	• Mineral		
	o Tembaga	Ton	930,000
	o Emas	Ton	107
	o Perak	Ton	355
	o Timah	Ton	90,000
	o Nikel Matte	Ton	77,000
	o Ferronikel	Ton	15,000
	o Bijih Nikel	Ton	6,200,000
	o Bauksit	Ton	7,500,000
	• Listrik	GWh	164.489,94
5.	Jumlah Subsidi BBM dan Listrik	Rp Triliun	144,00
6.	Prosentase pemanfaatan produk sektor ESDM:		
	a. Prosentase hasil lifting minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak	%	73.8
	b. Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik	%	50
	c. Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik		
	o Mineral	%	11,85
	o Batubara	%	17.9
	d. Elastisitas Energi	%	1,65
7.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	100
8.	Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri	%	64.11

BAB IV

RENCANA KINERJA



4.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 - Sektor ESDM

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2009. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan nasional tahun 2010 (Rencana Kerja Pemerintah 2010) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Presiden Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, maka Pemerintah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2009 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2010.

Terkait dengan penugasan dari RPJM kepada KESDM, terdapat 2 bidang yang harus dikelola yang merupakan sasaran pembangunan. Kedua bidang tersebut adalah:

A. Bidang Sarana dan Prasarana

1. Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung **peningkatan daya saing sektor riil** adalah:
 - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan: peningkatan kapasitas pembangkit listrik; pembangunan tambahan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dan ketenagalistrikan; peningkatan jumlah gardu transmisi ketenagalistrikan; melanjutkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN); fasilitasi peningkatan pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi skala besar dan kecil termasuk penyempurnaan regulasi terkait panas bumi; fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi serta energi alternatif seperti coal bed methane (CBM), dimethyl eter (DME) dan lain-lain; serta pemanfaatan potensi pendanaan domestik baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, termasuk pengembangan skema pendanaannya.
 - Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis menuju nilai keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan: fasilitasi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan penyesuaian tarif (BBM dan listrik) yang wajar sekaligus mendorong pemakaian energi yang lebih hemat dan mendorong sistem bisnis yang lebih sehat; pelaksanaan tarif regional dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi geografis setempat serta disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diterima; fasilitasi penetapan tarif regional bersama pemerintah daerah.
 - Subsidi secara bertahap akan dikurangi dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini dilakukan dengan: fasilitasi kebijakan subsidi; pemberian subsidi listrik kepada pelanggan golongan rumah tangga dan penurunan jumlah subsidi BBM.

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan *good governance* pengelolaan korporat. Hal ini dilakukan dengan: meningkatkan program efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi hilir maupun hulu; Restrukturisasi dan penerapan *good governance* pengelolaan BUMN bidang energi dan ketenagalistrikan; penggunaan teknologi yang lebih mutakhir dan efisien; penelitian dan pengembangan teknologi energi dan ketenagalistrikan yang efisien dan ramah lingkungan; serta menyusun dan menyempurnakan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dilakukan dengan: penggunaan energi baru terbarukan dan membuat inovasi dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan; mendorong pembangunan pembangkit listrik selain pembangkit berbahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP); serta penetapan regulasi dan fasilitasi kebijakan yang memperkecil dampak terhadap lingkungan serta mengakomodasi program terkait mitigasi dalam konteks perubahan iklim.

2. Fokus prioritas yang terkait dengan Sektor ESDM dalam mendukung **Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)** adalah:

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam pembangunan prasarana ketenagalistrikan nasional adalah meningkatkan diversifikasi dalam pemanfaatan energi non-minyak khususnya dalam pembangkitan tenaga listrik, yang dikaitkan dengan penurunan tarif dan perubahan iklim (*climate change*).

Hal ini dilakukan dengan memberi kepastian hukum yang adil kepada badan usaha dalam penyediaan tenaga listrik sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru; meningkatkan kualitas standar dan prosedur penyiapan proyek yang dapat diterima semua pihak; memberi kepastian yang adil dalam kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama proyek dan perjanjian jual beli energi atau tenaga listrik dengan memperhatikan pengelolaan resiko yang adil dan tepat serta mengikutsertakan pemerintah daerah; serta mendorong usaha penyediaan ketenagalistrikan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi atau secara terpisah.

B. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait dengan upaya pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber energi di Indonesia. Sasaran pembangunan bidang ini yaitu:

1. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: Diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda; Meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan meningkatnya produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.

- Arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian energi adalah:

Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan daya tarik

- **Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan** melalui peningkatan *produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi* yang diarahkan untuk Menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani; penerapan insentif-disinsentif secara tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi) energi primer, pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem jaringan transmisi dan dsitribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan industri); promosi budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hemat energi sejak dini; penguatan kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan konservasi energi; Peningkatan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi, pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi; serta penambahan pasokan energi melalui pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi energi dengan mutu yang memadai
- **Peningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, serta energi bersih**, dengan mengarahkan kepada stakeholder dan masyarakat agar mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala menengah dan besar; mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan kelistrikan nasional; mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamannya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; dan mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua, Maluku, dan sebagainya.

2. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan beberapa hal, yakni: peningkatan produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; mewujudkan penambangan yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan; meningkatkan peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam pengusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; memperluas kegiatan pengusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia; penyediaan pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam.

Arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan ketahanan dan kemandirian energi adalah:

- **Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara**, yaitu dengan memberikan insentif fiskal (*fiscal regime*) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi pertambangan mineral dan batubara; Memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (*licensing regime*) pengusahaan pertambangan; Memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin dalam pengusahaan pertambangan; Mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; Meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan; Menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; Mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final; Meningkatkan produksi batubara serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) terutama sebagai bahan bakar pembangkit

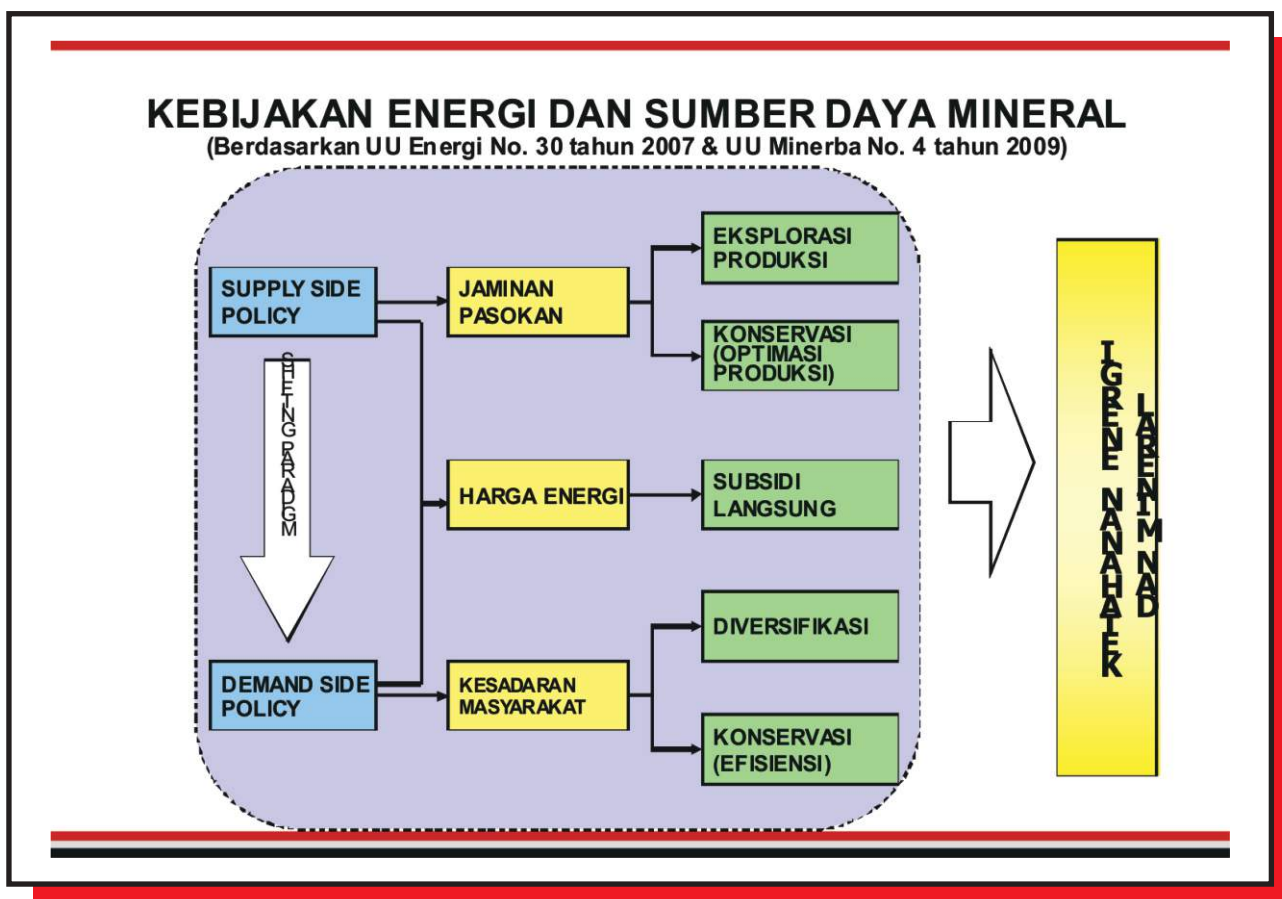
tenaga listrik; Mendorong berkembangnya industri *oil synthetic* dan *clean-coal technology*, serta industri peningkatan mutu batubara (*upgraded brown coal*), pencairan batubara (*coal liquefaction*) dan gasifikasi batubara (*coal gasification*); Meningkatkan produksi uap panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan Mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik;

- **Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi.** Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: Mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan *best mining practices* dan menerapkan mekanisme *depletion premium*; meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan Mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

4.2. Kebijakan dan Strategi Tahun 2010 - Sektor ESDM

Seperti halnya Rencana Kerja Pemerintah yang pada tahun 2010 ini adalah merupakan tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah, begitu pula rencana kerja Kementerian ESDM juga merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis KESDM Tahun 2010-2014.

Gambar 4.1. Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan Pengelolaan Energi dan sumber daya mineral nasional mempunyai landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Landasan kebijakan nasional yaitu UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV), landasan operasional UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 4 ayat (3), UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan pemerintah , Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).



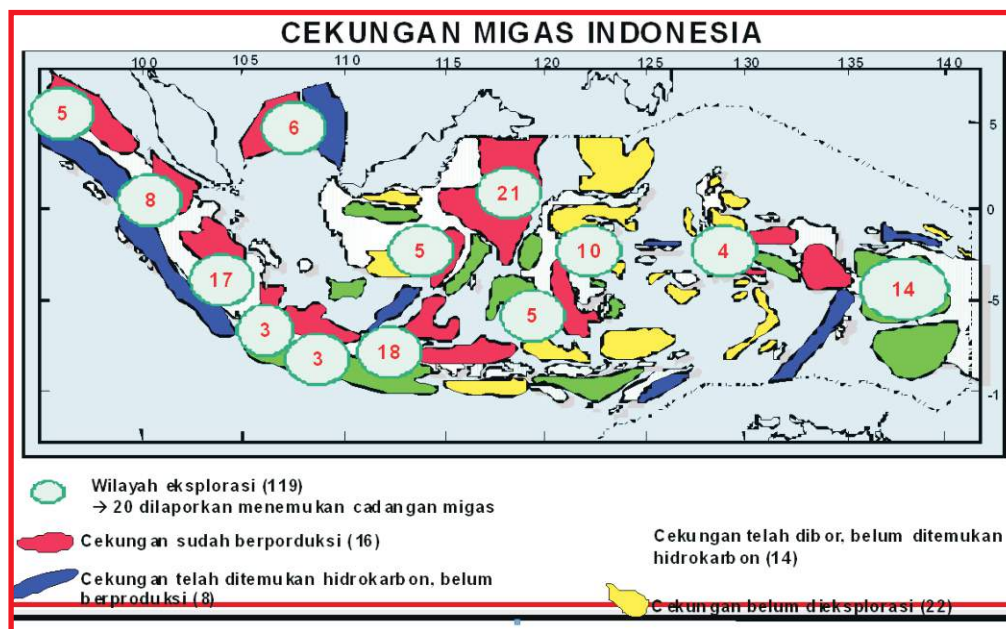
Gambar 4.1. Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan UU No. 30 tahun /2007 tentang Energi dan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia. Kebijakan utama Sektor ESDM adalah sebagai berikut:

a. Menjamin keamanan pasokan energi

Untuk menjamin pasokan energi, maka upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional terus di tingkatkan sehingga mampu mengimbangi perkembangan permintaan energi di dalam negeri. Hal ini dilakukan mengingat masih sangat besarnya potensi energi yang terkandung di bumi Indonesia ini. Dalam rangka meningkatkan produksi, telah dilakukan maka eksplorasi telah dilakukan di 107 wilayah kerja migas.

Dari jumlah tersebut dilaporkan 19 lokasi temuan yang sedang dievaluasi potensi cadangan migasnya. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada tambahan temuan lagi.



Gambar 4.2. Cekungan Migas Indonesia



Gambar 4.3. Cekungan Batubara dan CBM Indonesia

Produksi dari lapangan baru juga dimaksudkan untuk mengkompensasi penurunan alamiah produksi lapangan existing.

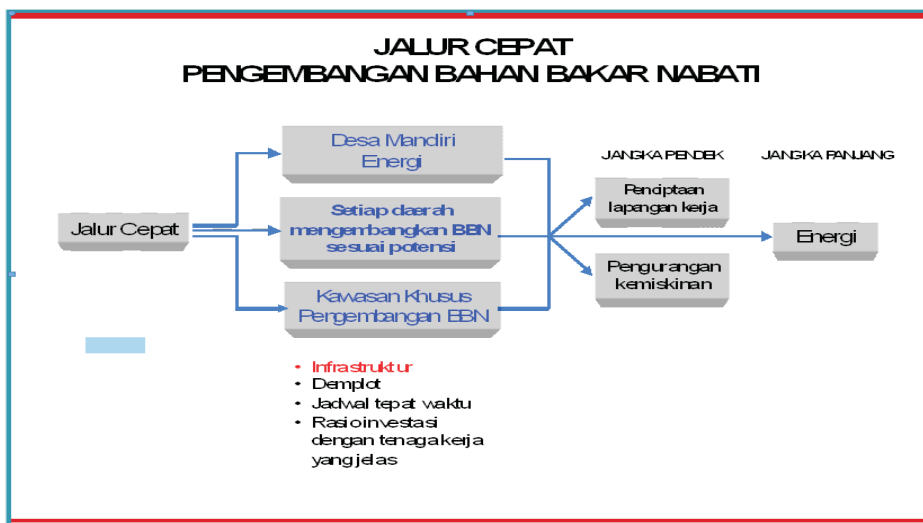
Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan konservasi atau optimalisasi produksi. Hal ini dilakukan mengingat masa keemasan minyak bumi yang sudah akan berlalu.

b. Melakukan pengaturan harga energi

Kebijakan kedua yaitu dengan mengarahkan harga energi untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga diharapkan subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme pada subsidi harga energi namun dilakukan melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk melaksanakan itu telah dilakukan pengurangan subsidi BBM secara bertahap melalui pengurangan volume BBM yang disubsidi. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG.

Namun demikian jangkauan konversi minyak tanah ke LPG yang belum sampai ke seluruh pelosok Indonesia, maka tetap disediakan minyak tanah bersubsidi sebanyak 100.000 KL.

Diharapkan dengan dilakukan pengurangan subsidi BBM dan listrik maka akan dapat terhindarkan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan dan penyimpangan penggunaan BBM, pemborosan penggunaan BBM, mempercepat pengembangan energi alternatif dan meningkatkan efisiensi energi serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi beban subsidi pada keuangan Negara sehingga dapat mengurangi menambah alokasi untuk pengembangan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.



Gambar 4.4. Jalur Cepat Pengembangan BBN

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Kebijakan ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi energi dan konservasi energi. Diversifikasi energi menjadi langkah penting dalam penyediaan energi untuk masyarakat. Diversifikasi energi direncanakan di seluruh sektor pemakai, baik di rumah tangga, komersial, transportasi, industri maupun pembangkit listrik. Diharapkan dengan adanya diversifikasi energi maka sasaran bauran energi primer nasional dapat tercapai. Berbagai bahan bakar dari jenis LPG, gas kota, batubara, briket batubara, biofuel, panas bumi, biomassa, solar cell, Coal bed Methane, *biogenic gas* akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di sektor transportasi akan dikembangkan substitusi BBM dengan LPG, BBG, coal gasification, coal liquefaction, bioethanol, biodiesel, solar cell, CBM, Fuel Cell, dan *oil Shale*, demikian juga di sektor industri dan pembangkit akan dilakukan substitusi BBM dengan energi alternatif lain. Untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati diharapkan akan dapat dilaksanakan jalur cepat pengembangan BBN melalui program Desa Mandiri Energi, Kawasan khusus pengembangan BBN dan setiap daerah mengembangkan BBN sesuai potensi. Dengan jalur cepat pengembangan BBN tersebut diharapkan pada jangka pendek akan bermanfaat untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan, sedangkan jangka panjang diharapkan BBN dapat menjadi alternatif energi yang dapat diandalkan.

Disamping kebijakan utama, terdapat kebijakan lainnya untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah:

a. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO)

Untuk mengupayakan keamanan pasokan minyak dan gas bumi serta batubara dalam negeri telah ditetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO). Untuk sub sektor migas, sesuai Undang Undang nomor 22 Tahun 2001 pasal 22 ayat 1, badan usaha atau badan usaha tetap wajib menyerahkan 25 % bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2008 produksi minyak sebesar 357,50 juta barel atau 62,3 % dari produksi dipasok untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan gas bumi dari sebesar 7,883 bscfd atau 47,8 % dipasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan DMO batubara.

Kebijakan DMO batubara merupakan kebijakan bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi. Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO batubara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Kemudian berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 5 ayat 2 s.d. 5, Pemerintah untuk kepentingan nasional wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor. Selanjutnya berwenang menetapkan produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Untuk Peningkatan Local Content

Di sub sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 22 Tahun 2001, yaitu mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional, menciptakan lapangan kerja, untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, maka telah didukung dengan berbagai peraturan pelaksanaan dalam upaya mencapai sasaran Peningkatan Kapasitas Migas Nasional pada tahun 2025, diantaranya adalah:

- Operatorship 50% oleh perusahaan nasional.
- Penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91%
- Penggunaan sumber daya manusia (SDM) Nasional sebesar 99%

c. Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan

Kebijakan peningkatan nilai tambah terbagi menjadi peningkatan *local content* dan peningkatan nilai tambah pertambangan. Upaya optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan barang dan peralatan produk dalam negeri (*local content*) untuk mendukung usaha pertambangan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak, hal ini akan sejalan dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 dan direktif Presiden. Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan kandungan lokal di dalam kegiatan pertambangan, karena hal ini akan dapat mendorong perekonomian nasional. Di dalam kegiatan ini, khususnya di dalam sektor pertambangan yang ditekankan adalah pembelian di dalam negeri (*local expenditure*) terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertambangan.

d. Kebijakan Peningkatan Investasi

Dalam rangka peningkatan daya saing investasi di sub sektor migas antara lain, dilakukan:

- **Geological Prospekt**, untuk peningkatan investasi migas, yaitu dengan Meningkatkan kegiatan survei G&G dan survei umum di wilayah terbuka untuk mendorong pembukaan wilayah kerja baru; Peningkatan kualitas dan transparansi di dalam mengakses data dan informasi dipada kegiatan usaha migas untuk mendukung penawaran Wilayah Kerja Migas; Penerbitan Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas; Menerbitkan Permen ESDM No. 036 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
- **Infrastruktur migas**. Sesuai UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memberikan peluang yang terbuka bagi swasta untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas; Menyusun Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; Menerbitkan peraturan-peraturan percepatan penyediaan infrastruktur seperti Perpres No. 42 Tahun 2005 dan Perpres No. 67 Tahun 2005.
- **Regulatory Framework**. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran Pasal 31 UU 22 tahun 2001 tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 177, 178, dan 179. Sehingga sejalan dengan investasi di kegiatan Hulu Migas yang memerlukan kepastian investasi jangka panjang ; Permen ESDM No. 008 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal ; Menerbitkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Di sub sektor kelistrikan tenaga listrik, kebijakan investasi diprioritaskan untuk mendorong peningkatan peran swasta, peningkatan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri, serta pemanfaatan *renewable energy* dan energi setempat. Untuk itu Pemerintah terus berusaha menyempurnakan produk-produk regulasi yang mendorong investasi.

Pada sub sector Mineral, Batubara dan Panas Bumi sesuai dengan Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa (pasal 2), namun juga mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan mineral dan batubara. Pada intinya UU Minerba mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi baik di sisi hulu maupun hilir. Beberapa peluang investasi dalam UU Minerba diantaranya: Peningkatan investasi terhadap existing KK, PKP2B dan IUP (dulu KP) baik dari sisi proses penambangan ataupun terhadap adanya kewajiban pengolahan; Peningkatan investasi terhadap IUP baru (melalui pelelangan) ataupun IUPK; Peningkatan investasi terhadap upaya nilai tambah pertambangan (*local content*, *local expenditure*, dan pengolahan); dan Peningkatan investasi terhadap berkembangnya usaha jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi dan mineral serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa **strategi** di Sektor ESDM, antara lain:

1. **Sub sektor Migas.** Untuk pemenuhan kebutuhan migas dan mineral serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa strategi di sub sektor migas antara lain: Mempertahankan Pproduksi Mmigas; Pengaturan penggunaan Domestik Market Obligation (DMO) Minyak Bumi; dan Pengembangan cadangan strategis minyak bumi.

Pemerintah akan melakukan pengaturan mengenai cadangan strategis minyak bumi yang meliputi lokasi, pembiayaan, pengelolaan, jumlah dan sumber minyak bumi. Cadangan strategis ini meliputi cadangan minyak mentah untuk pasokan kilang dan cadangan penyangga BBM yang akan memanfaatkan tangki minyak yang ada sesuai dengan rencana pengembangan infrastruktur migas dan mendorong peran swasta untuk berpartisipasi.

2. **Sub sektor Ketenagalistrikan.** Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik; Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik; Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru; Fasilitasi penyelenggaraan investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga listrik; Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan diversifikasi energy; Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan konservasi energi; Mendorong pelaksanaan diversifikasi energy; Penyusunan peraturan perundangan di bidang listrik dan pemanfaatan energi sebagai tindak lanjut UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 tahun; dan Peningkatan SDM Nasional dalam Kkegiatan Usaha Kketenagalistrikan dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

3. **Sub sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi** Untuk menjamin keamanan pasokan mineral, batubara dan panas bumi serta mencapai sasaran yang diinginkan maka diambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut: Menjamin keamanan pasokan batubara melalui Pengendalian Produksi dan Ekspor; Meningkatkan Nilai Tambah Pertambangan dengan mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir; memberikan kemudahan bagi investor terutama dalam mekanisme dan perizinan pendirian fasilitas pengolahan peleburan/pemurnian, masalah penggunaan lahan untuk fasilitas pengolahan, fasilitas fiscal, serta dengan peran pemerintah melengkapi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengolahan seperti jalan dan pelabuhan; Penyusunan kajian Master plan pendirian fasilitas pengolahan mineral utama; Peningkatan Kualitas Dan Kontinuitas Peralatan Produksi Dalam Negeri; Meningkatkan investasi pertambangan; Pengembangan Panas Bumi; Peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan di bidang mineral dan batubara.

4. **Investasi.** Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan. KESDM telah menargetkan masuknya investasi di bidang migas, listrik dan pertambangan

Sasaran investasi tahun 2010 dari tiap bidang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Investasi Sektor ESDM Tahun 2010

Subsektor	Investasi (Juta US\$)
Migas	15.415
Listrik	10.146
Pertambangan Umum	2.502
Total (juta US\$)	28.063
Total (Rp Triliun)	280,63

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta dalam rangka pembiayaan pembangunan sektor ESDM. Intervensi anggaran pemerintah pusat merupakan stimulus yang digunakan untuk penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pengumpulan data, survei serta pemetaan yang menjadi tugas pokok pemerintah, di samping itu dilakukan untuk pembangunan sebagian kecil kelistrikan antara lain pembangunan pembangkit skala kecil, sebagian transmisi dan distribusi dan pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

4.3. Rencana Kinerja Tahun 2010 - Kementerian ESDM

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra KESDM Tahun 2010-2014, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKP Tahun 2010 yang merupakan rencana operasional dari RPJM Tahun 2010-2014. Selanjutnya, dalam rencana kinerja ini menjabarkan berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja KESDM Tahun 2010 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2010.

Secara ringkas, Ggambaran keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target KESDM dalam tahun 2010, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Tujuan 1: Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik	Produksi Minyak Bumi	965 MBOPD
	Produksi Gas Bumi	1.593 MBOEPD
	Produksi Batubara	2875 MBOEPD
	Produksi BBM	39,9 Juta KL
	Produksi LPG	1,98 Juta Ton
	Produksi LNG	24,12 MMTPA
	Rencana Pasokan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri	75 Juta Ton
2. Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Pupuk Dan Petrokimia	100%
3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa Gas Bumi	24,5 %
	Pangsa Batubara	23,3%
	Pangsa Panas Bumi	2,6%
	Pangsa Energi Baru Terbarukan Lainnya	3,0%

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral	Jaringan Pipa Gas Kota	12.000 RT
	Rasio Elektrifikasi	68,9%
	Pembangkit Listrik	8.689 MW
	PLTP	70 MW
5. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi	Elastisitas Energi	1,64
	Penurunan Emisi CO ₂	5,4%

Tabel 4.3.
Tujuan 2: Meningkatnya investasi sektor ESDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik	Jumlah Investasi sub sektor migas	15.415 US\$ juta
	Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi	10.146 US\$ juta
	Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum	2.502 US\$ juta
	Total Investasi	28.063 US\$ Juta

Tabel 4.4

Tujuan 3: Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	Jumlah penerimaan negara sub sektor migas	159,75 Triliun Rupiah
	Jumlah PNBP dari subsektor pertambangan umum	15,09 Triliun Rupiah
	Jumlah PNBP dari Badan Litbang	0,048 Triliun Rupiah
	Jumlah PNBP dari Badan Diklat	0,154 Triliun Rupiah
	Jumlah PNBP dari BPH Migas	0,433 Triliun Rupiah
	Total Penerimaan Negara Sektor ESDM	175,475 Triliun Rupiah

Tabel 4.5.

Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
8. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum	8.231 Milliar Rupiah
	Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas	16.082 Milliar Rupiah
	Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum	705 Milliar Rupiah

	Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	94 Milliar Rupiah
	Jumlah CSR subsektor Migas	380 Milliar Rupiah
	Jumlah jaringan distribusi listrik dan gardu distribusi listrik	33278 kms/ 2340 MVA
	Jumlah desa mandiri energi	50 Desa
	Jumlah sumur bor daerah sulit air	100 Unit

Tabel 4.6.

Tujuan 5 : Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN)	68,7 Trilyun Rupiah
	Jumlah subsidi Listrik	37,8 Trilyun Rupiah

Tabel 4.7.

Tujuan 6:Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10. Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor	Jumlah ekspor minyak mentah	135 juta barel
	Jumlah nilai ekspor natural gas	354.632,5 BBTU
	Jumlah nilai impor BBM	27,08 juta KL
	Jumlah impor crude oil	90,04 juta barel
	Jumlah impor pertambangan umum	903 Juta US\$

Tabel 4.8.
Tujuan 7: Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
11. Terwujudnya peningkatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	411.898 Orang
	Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	1.787.000 Orang
	Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	121.680 Orang
12. Terwujudnya pemberdayaan nasional	Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	1
	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	55%
	Persentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional sub sektor Migas	30%
	Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan	60%
13. Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	60 %

14. Peningkatan industri jasa (<i>backward linkage</i>) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (<i>forward linkage</i>):		
Peningkatan industri jasa penunjang	Jumlah industri jasa penunjang Migas	1270 perusahaan
	Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	650 Perusahaan
	Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum	600 Perusahaan
Terpenuhinya bahan baku industri pupuk	Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk	100 %



BAB V

AKUNTABILITAS KINERJA



5.1. Gambaran Umum Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010

Secara umum pengukuran capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tahun 2010 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun demikian untuk beberapa indikator kinerja sasaran dan kegiatan juga dilakukan perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya maupun dengan standar yang lazim.

Secara ringkas sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sebagian kecil sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2010 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, KESDM telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

Pada dasarnya proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Selanjutnya informasi kinerja dari unit-unit kerja tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama dan Inspektorat Jenderal untuk dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara khusus Biro Perencanaan dan kerjasama menghimpun informasi kinerja tersebut sebagai satu kesatuan sebagai bahan utama untuk penyusunan LAKIP KESDM, sedangkan oleh Inspektorat Jenderal KESDM data kinerja tersebut dievaluasi untuk memberi rekomendasi perbaikan bagi setiap unit kerja yang terkait. Melalui proses ini diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.



Gambar 5.1. Proses pengukuran dan monitoring kinerja

5.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kementerian ESDM, telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2009, tanggal 14 Juli 2009. Pada tahun 2010 ini, Capaian Kinerja Utama Kementerian ESDM terhadap target yang telah ditetapkan di awal Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	% Rp Milyar	100 276.849,9	104 288.523,8	104% 104%
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	US\$ Juta	24.638,3	21.942,8	89%
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditanda tangani	KKS: • KKS Migas • WK CBM • WK Panas Bumi	38 25 10 3	27 21 3 3	71.05%
4.	Jumlah produksi :				102.2%
	• Minyak bumi	MBOPD	965	945	97.9%
	• Gas bumi	MBOEPD	1.503	1.590	106%
	• Batubara	Juta Ton	254	270	102%
	• Mineral				102%
	○ Tembaga	Ton	930,000	989,953	106%
	○ Emas	Ton	107	111	104%
	○ Perak	Ton	355	323	91%
	○ Timah	Ton	90,000	78,965	88%
	○ Nikel Matte	Ton	77,000	78,336	102%
	○ Ferronikel	Ton	15,000	17,970	120%
	○ Bijih Nikel	Ton	6,200,000	6,561,404	106%
	○ Bauksit	Ton	7,500,000	7,148,124	95%

No.	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	• Listrik	GWh	164.489,94	163.127,31	99.17%
5.	Jumlah Subsidi BBM dan Listrik	Rp Triliun	144,00	143,92	100%
6.	Prosentase pemanfaatan produk sektor ESDM :				89,12%
	a. Prosentase hasil lifting minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak	%	73.8	74.6	101.8%
	b. Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik	%	50	50.3	100.6%
	c. Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik				64.4%
	Mineral	%	11,85	20	169%
	Batubara	%	17.9	24.4	136.3%
	d. Elastisitas Energi	%	1,65	1,84	89,7%
7.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	%	100	97.7	97.7%
8.	Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri	%	64.11	68.22	106.4%

1. Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN

Realisasi penerimaan negara Sektor ESDM tahun 2010 sebesar Rp 288.52 triliun ini lebih besar dari rencana atau target yang ditetapkan pada APBN tahun 2010 yaitu sebesar Rp 276,85 triliun atau capaian kinerjanya sebesar 104%. Angka penerimaan negara ini cukup memuaskan, karena disamping melampaui target yang ditetapkan juga mengalami peningkatan dari penerimaan negara tahun 2009 yang cukup signifikan yaitu dari Rp 238,2 Triliun di tahun 2009 menjadi sebesar Rp 288,5 Triliun di tahun 2010 atau sebesar Rp 50,3 Triliun atau 21,22%.

Kontribusi terbesar masih dari penerimaan migas sekitar Rp. 220 triliun, disusul dengan penerimaan sub sektor pertambangan umum (mineral dan batubara dan panas bumi) sebesar Rp. 67,3 triliun, dan kemudian penerimaan lainnya (Balitbang, Badiklat, BPH Migas) Rp. 711,99 miliar.

2. Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi investasi sektor ESDM pada tahun 2010 ini mencapai US\$ 21.942,8 juta atau 89,00 % dari target yang diharapkan yaitu sebesar US\$ 24.638,3 juta. Secara khusus, nilai investasi di bawah target ini terjadi pada sektor migas dan listrik. Beberapa hal yang menjadi factor penyebab kondisi tersebut adalah:

- Beberapa proyek pengangkutan dan penyimpanan minyak dan gas bumi masih dalam tahap perencanaan (contoh, pembangunan jaringan pipa oleh PGN (Persero) di Duri, Dumai dan Medan yang ditargetkan sebesar 541 juta USD sampai tahun 2011).
- Pembangunan jaringan pipa gas Cepu-Tambak Lorok (Semarang) dan belum terealisasinya pembangunan kilang hasil olahan di Cilegon dan Tangerang.
- Beberapa proyek yang mengalami penjadwalan ulang karena adanya beberapa permasalahan antara lain kendala dalam perizinan yang meliputi: lahan, UKL/UPL dan ROW.
- Sejumlah proyek akibat *financial closing* juga menyebabkan rendahnya capaian investasi sub sektor ketenagalistrikan tahun ini.

Hal tersebut di atas menjadi *lesson learned* bagi Kementerian ESDM untuk peningkatan kinerja kedepan. Namun jika dibandingkan dengan investasi tahun 2009 sebesar US\$ 19,866,7 juta (*year to date*), secara keseluruhan terdapat peningkatan investasi sebesar 10%.

3. Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor (KKS) Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditandatangani.

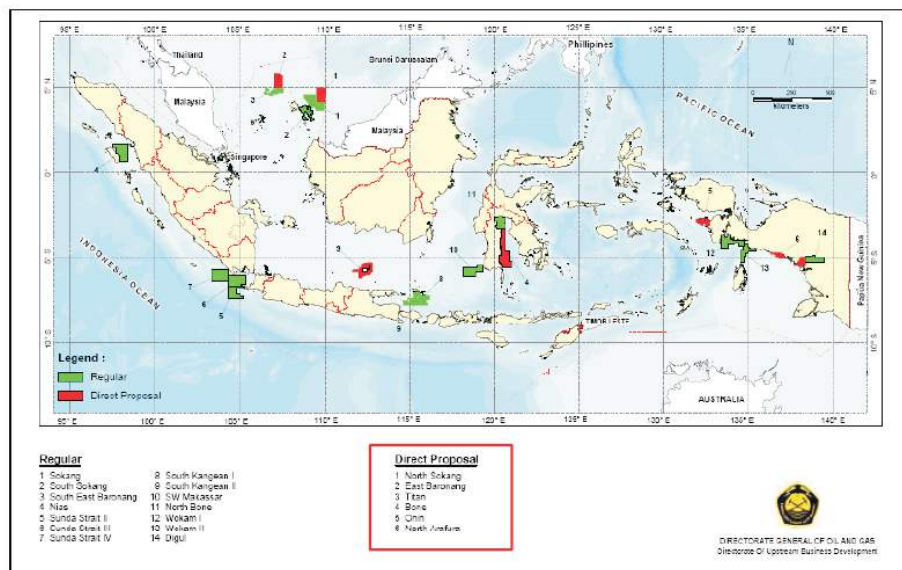
Peningkatan eksplorasi dan produksi migas juga dapat diukur dengan jumlah Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas yang ditandatangani. Pada tahun 2010 jumlah KKS yang telah ditandatangani sebanyak 21 KKS dari target 25 KKS. Demikian juga untuk penawaran wilayah kerja CBM (WK CBM) yang ditetapkan sebagai pemenang dan ditandatangani sebanyak 3 buah WK CBM dari target sebanyak 10 WK CBM. Namun untuk wilayah kerja panas bumi realisasi kinerja dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Secara rinci jumlah KKS dan WK CBM pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Jumlah Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas dan Wilayah Kerja (WK) CBM

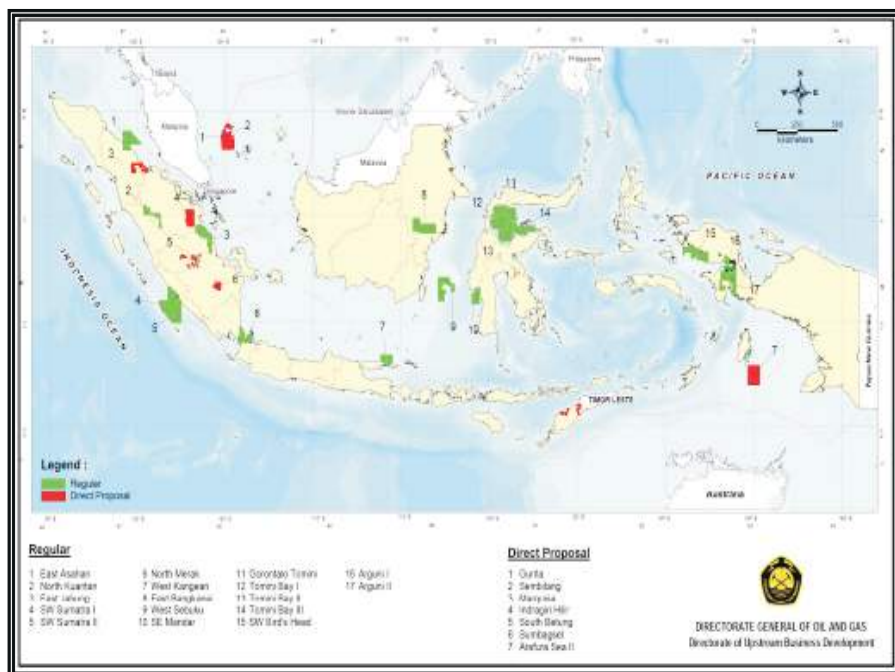
No	KKS	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontrak Kerjasama Migas yang telah ditandatangani	KKS	25	21	84 %
2	Jumlah Wilayah Kerja CBM Yang Telah ditandatangani	WK CBM	10	3	30%
3.	Jumlah Wilayah Kerja panas bumi Yang Telah ditandatangani	WK Panas Bumi	3	3	100%

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja Sama Migas dibagi menjadi dua yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Pada Tahun 2010 penawaran wilayah kerja migas dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- Pada tahap Pertama periode 12 Juli 2010 – 8 Nopember 2010, ditawarkan 20 Wilayah Kerja melalui 2 kegiatan yaitu: (1) Lelang Reguler sebanyak 14 Wilayah Kerja yaitu : Sokang, South Sokang, South East Baronang, Nias, Sunda Strait II, Sunda Strait III, Sunda Strait IV, South Kangean I, South Kangean II, SW Makassar, North Bone, Wokam I, wokam II, Digul; (2) Penawaran Langsung sebanyak 6 Wilayah Kerja yaitu : North Sokang, East Baronang, Titan, Bone, Onin, North Arafura.



Gambar 5.2. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2010

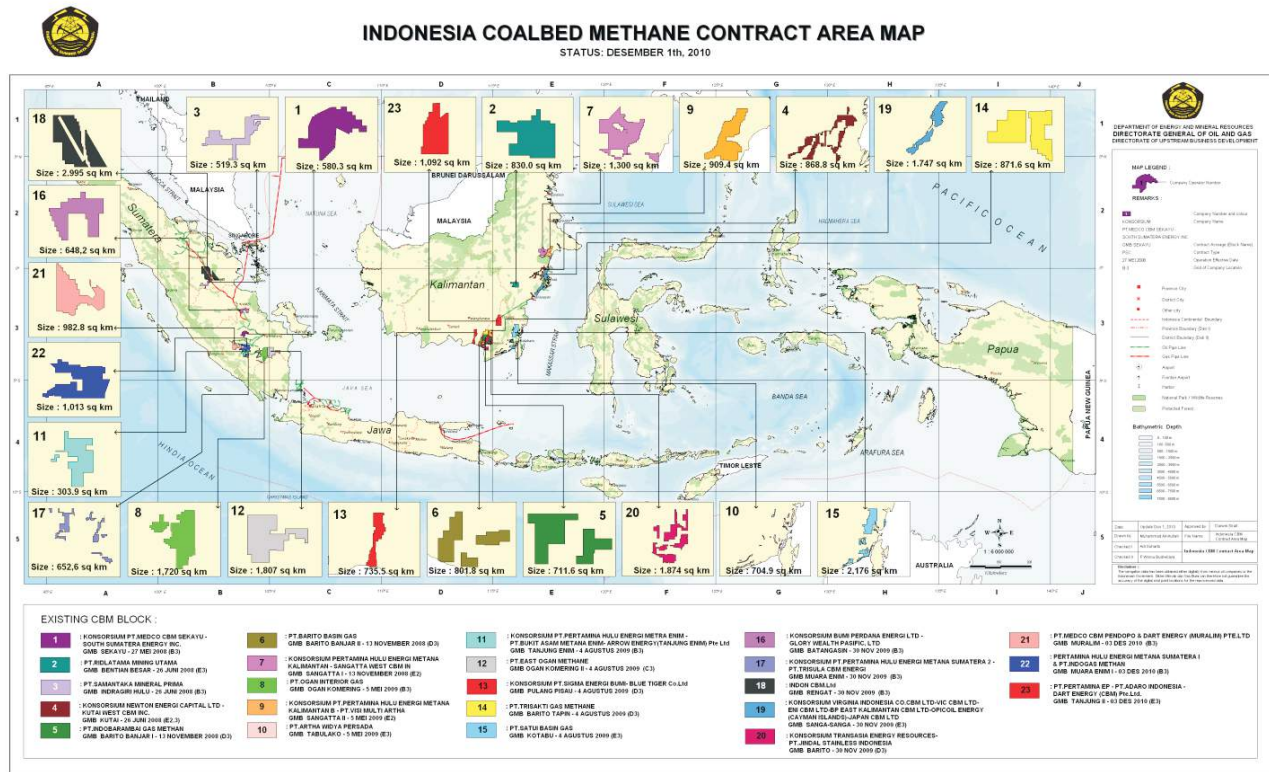


Gambar 5.3. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2010

- Tahap kedua periode 10 Desember 2010 – 25 April 2011, ditawarkan 24 Wilayah Kerja, juga melalui 2 kegiatan yaitu : (1) Lelang Reguler sebanyak 17 Wilayah Kerja yaitu : East Asahan, North Kuantan, East Jabung, SW Sumatra I, SW Sumatra II, North Merak, West Kangean, East Bangkanai, West Sekuku, SE Mandar, Gorontalo Tomini, Tomini Bay I, Tomini Bay II, Tomini Bay III, SW Bird's Head, Arguni I, dan Arguni II; dan (2) Penawaran Langsung sebanyak 7 Wilayah Kerja yaitu : Gurita, Sembilang, Marquisa, Indragiri Hilir, South Betung, Sumbagsel, dan Arafura Sea II.

Sedangkan untuk Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (WK CBM) sampai dengan tahun 2010 terdapat 23 Wilayah Kerja CBM. Pada tahun 2010 ini WK CBM yang berhasil ditandatangani sebanyak 3 Wilayah Kerja dari 10 WK CBM yang ditargetkan. Tiga WK CBM tersebut adalah: CBM Muralim, CBM Muara Enim I, dan CBM Tanjung II yang kontraknya semua ditandatangani pada tanggal 03 Desember 2010.

PETA WILAYAH KERJA CBM DI INDONESIA



Gambar 5.4. Peta Wilayah Kerja CBM di Indonesia

Tidak tercapainya KKS Migas dan WK CBM sesuai target antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Wilayah Kerja yang ditawarkan berada di marginal, laut dalam/frontier yang mempunyai prospek bervariasi dari rendah s.d tinggi, resikonya juga tinggi dan memerlukan investasi yang besar, disamping itu juga pengaruh psikologi dari hasil pemboran laut dalam yang baru, tidak menunjukkan hasil yang bagus (*dry hole*).
- Dampak krisis ekonomi global di Eropa dan USA menyebabkan perusahaan melakukan konsolidasi sehingga menurunkan minat investasi.
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama lebih banyak fokus pada kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja Baru yang sudah dimiliki.

4. Jumlah produksi

- **Minyak Bumi**

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2010 sebesar 945 Ribu BPH, mengalami penurunan sebesar 3,8 Ribu BPH dibandingkan produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2009 sebesar 948,8 Ribu BPH atau sebesar 4%.

- **Gas Bumi**

Bila produksi minyak bumi masih dibawah target yang diharapkan, namun terjadi peningkatan produksi pada komoditi gas bumi. Produksi gas bumi pada tahun 2010 adalah sebesar 1,590 MBOPD, mengalami kenaikan sebesar 170 MBOPD (10.7%) dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 1.420 MBOPD.

Di tahun 2010 ini juga produksi gas bumi dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dari target sebesar 1503 MBOPD, terealisasi sebesar 1.590 MBOPD, dengan demikian capaian kinerja dalam produksi gas bumi mencapai 106%.

- **Batubara**

Pada tahun 2010 realisasi produksi batubara mencapai 275 juta ton yang melebihi dari target sebelumnya yaitu sebesar 254 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena terdapat KP/IUP yang baru terinventarisir sehingga menambah data produksi dan juga adanya perubahan RKAB terkait rencana produksi dari Perusahaan PKP2B.

- **Mineral**

Secara umum produksi mineral pada tahun 2010 telah melebihi target dari rencana sebelumnya, hanya beberapa mineral saja yang tidak mencapai target sebelumnya seperti perak, timah dan bijih besi. Produksi perak tidak mencapai target karena merupakan mineral ikutan yang sulit dikontrol kadarnya. Produksi timah tidak mencapai target karena banyaknya unit penambangan kecil yang tidak beroperasi terkait adanya permen usaha jasa penunjang.

Pencapaian produksi tembaga pada tahun 2010 mencapai 989,953 ton atau sebesar 106% dari target produksi 930,000 ton. Untuk produksi emas mencapai 111 ton atau 104% dari target produksinya sebesar 107 ton, sedangkan produksi perak mencapai 323 ton atau 91% dari target produksi 355 ton.

Pencapaian produksi bijih nikel pada tahun 2010 sebesar 6,561,404 ton atau 106% dari target 6,200,000 ton, karena adanya penambahan kp baru. Produksi feronikel sebesar 17,970 ton atau 120% dari target 15,000 ton. Produksi nikel matte mencapai 78,336 ton atau 103% dari target produksi yang sebesar 77,000 ton. Ketiga mineral ini mengalami pencapaian yang melebihi target karena pada tahun 2009 mengalami kenaikan harga.

Sedangkan produksi timah dan bauksit masih di bawah target yaitu produksi timah sebesar 78,965 ton atau 88% dari target sebesar 90,000 ton dan bauksit 7,148,124 atau 95% dari target sebesar 7,500,000 ton.

- **Listrik**

Jumlah produksi tenaga listrik di tahun 2010 sebesar 163.127,31 GWh lebih rendah sebesar 0,83% dari target yang telah ditetapkan sebesar 164.489,94 GWh. Dan bila dibandingkan dengan produksi tenaga listrik di tahun 2009 yang sebesar 147.358,68 GWh, di tahun 2010 ini meningkat sebesar 10,7%. Produksi tenaga listrik ini berasal dari PT PLN yaitu sebesar 124.897.45 GWh dan *Independent Power Producer* (IPP) sebesar 38.229,86 GWh.

Pada listrik perdesaan, realisasi pemasangan gardu induk mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari 76,17 MVA di tahun 2009, menjadi 45,17 MVA di tahun 2010 atau menurun sebesar 40,70%. Dan realisasi pada jaringan distribusi juga mengalami penurunan sebesar 42,96 dari 4.723 Kms pada tahun 2009 menjadi 2.694 di tahun 2010.

5. Prosentase Pengurangan volume Subsidi BBM

Pada tahun 2010 realisasi subsidi energi adalah sebesar Rp. 143,9 triliun atau hampir mendekati kuota sebesar Rp. 144 triliun. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, di tahun 2010 ini, jumlah subsidi energi mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 40%. Kenaikan angka subsidi ini menunjukkan bahwa konsumsi energi bersubsidi mengalami kenaikan yang juga berarti membebani anggaran belanja negara.

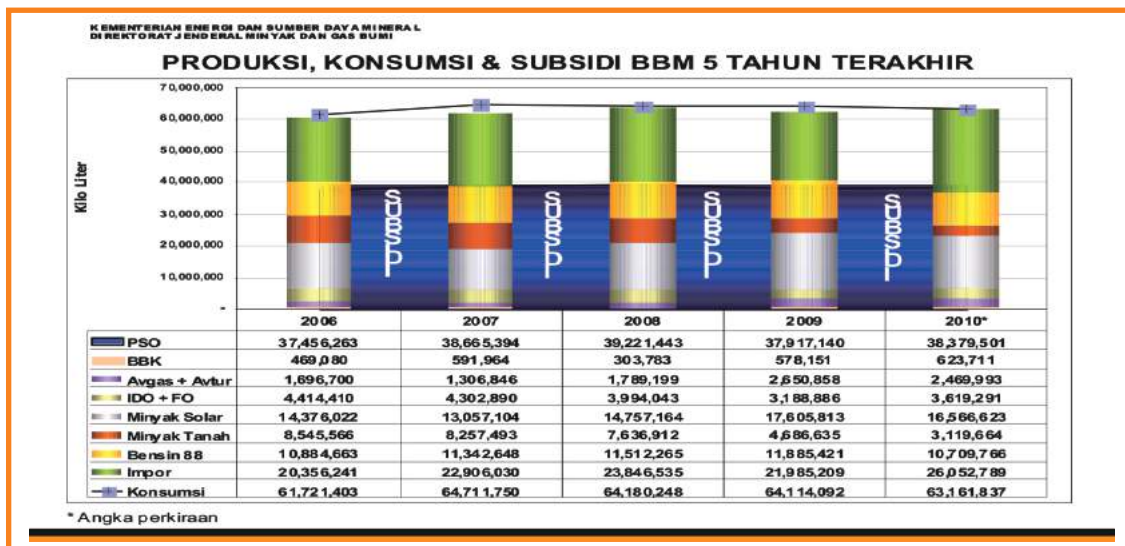
Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM antara lain adalah:

- Pengalihan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung melalui revitalisasi Program Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pengurangan Volume (Q) BBM tertentu, dengan cara : Menghemat pemakaian BBM; Mengembangkan energi pengganti (alternatif) BBM (BBG dan Bahan Bakar Lain); Subsidi BBM hanya untuk target konsumen dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Distribusi Tertutup
- Pemilihan Harga Patokan BBM yang tepat dengan cara : Menekan biaya distribusi BBM; dan Menghitung harga keekonomian penyediaan BBM

6. Prosentase pemanfaatan produk sektor ESDM :

- Prosentase hasil lifting minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak.

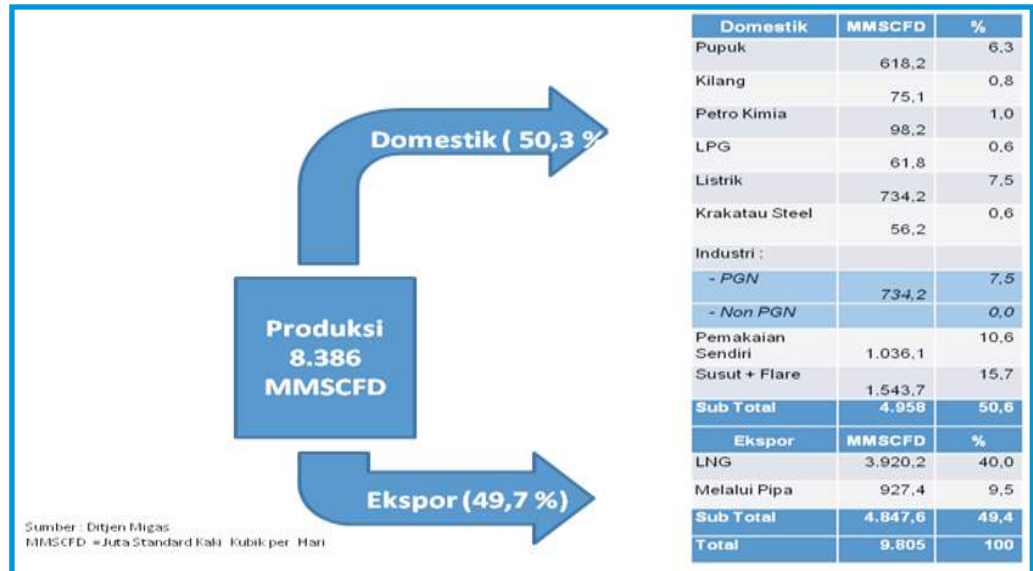
Pada tahun 2010, produksi minyak mentah mencapai 55.37 juta kiloliter, sebanyak 41,33 juta kiloliter (terdiri dari produksi kilang Pertamina, kilang Pusklat Migas, kilang TPPI dan kilang TWU) atau sebesar 74.6% diolah menjadi BBM. Di satu sisi, capaian kinerja pada tahun 2010 ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 101.08%. Di sisi yang lain, konsumsi BBM mencapai 63.16 juta kiloliter yang artinya sebesar 35% atau 21,83 juta kiloliter bersumber dari impor BBM. Berikut merupakan grafik produksi BBM per jenis selama 5 tahun terakhir:



Grafik 5.1. Produksi, Konsumsi dan Subsidi BBM

- **Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik**

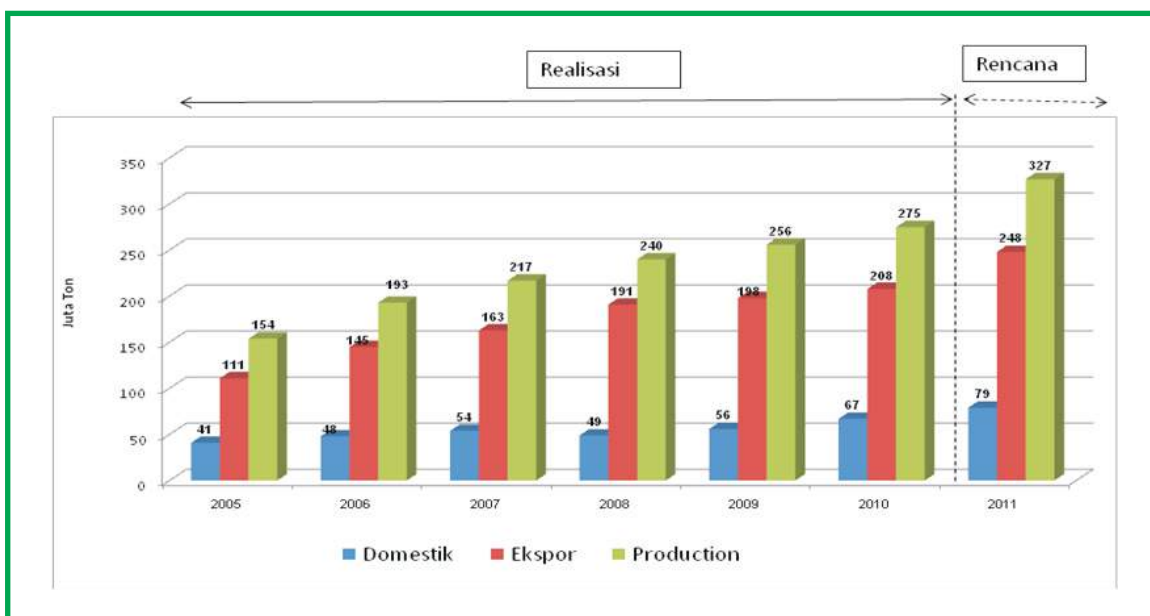
Pada tahun 2010, pemanfaatan gas untuk domestik mencapai 50,3%, dari total produksi sebesar 8.386 MMSCFD atau melebihi target sebesar 0,6%. Dengan demikian sisa produksi sebanyak 49,7% digunakan untuk tujuan ekspor. Ilustrasi pemanfaatan dan produksi gas bumi tahun 2010 dapat dilihat pada gambar di samping ini.



Gambar 5.5. Pemanfaatan dan produksi gas Bumi

- **Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik.**

Pemanfaatan batubara untuk domestik pada tahun 2010 ini mencapai 24,4% dari total produksi atau sebanyak 67 Juta Ton dari total produksi 275 Juta ton, dan sisanya sebesar 208 Juta Ton untuk diekspor. Bila dibandingkan dengan target pemanfaatan batubara untuk domestik yang sebesar 64,96 Juta Ton atau 17,9%, maka capaian kinerjanya mencapai 136,3%.



Grafik 5.2. Produksi dan Pemanfaatan Batubara

Pada tahun 2010, produksi mineral tidak direncanakan untuk kebutuhan domestik melainkan hanya sebagai komoditi ekspor saja. Namun dalam kenyataan terdapat pemanfaatan mineral untuk kebutuhan dalam negeri. Guna memudahkan proses pengukuran kinerja, maka target kebutuhan dalam negeri disamakan dengan realisasi pemanfaatan mineral dalam negeri. Secara rinci peningkatan kebutuhan domestik dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 5.3.
Realisasi Produksi dan Konsumsi Domestik Mineral Tahun 2010

No.	Komoditi	Unit	Realisasi 2010	
			Produksi	Domestik
1	Tembaga	Ton	989,953	227,811
2	Emas	Ton	111	22,053
3	Perak	Ton	323	62,803
4	Timah	Ton	78,965	0
5	Nikel Matte	Ton	78,336	0
6	Ferronikel	Ton	17,970	0
7	Bijih Nikel	Ton	6,561,404	0
9	Bauksit	Ton	7,148,124	0

7. Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional

Secara keseluruhan realisasi persentase peningkatan pemberdayaan nasional adalah 97,7%. Perlu diketahui, bahwa pemberdayaan kapasitas nasional sektor ESDM diukur dari 2 indikator kinerja yaitu: penggunaan kandungan lokal (produk dalam negeri) dan penggunaan tenaga kerja lokal. Selanjutnya realisasi penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM di tahun 2010 ini mencapai 55,5% dari target sebesar 57,5%, atau capaian kinerja sebesar 96,5%. Sedangkan realisasi penggunaan tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM adalah 434.522 orang dibandingkan target sebanyak 439.809 orang atau 99% dari target yang ditetapkan. Tabel pengukuran kinerja dari 2 indikator pendukung ini adalah:

Tabel 5.4.
Indikator Kinerja Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (Migas dan Pertambangan Umum)	%	57.5	55.5	96,5%
2. Jumlah tenaga kerja lokal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sektor ESDM (Migas dan Pertambangan Umum)	Orang	439.809	434.522	99%

8. Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri

Pada tahun 2010 realisasi pemenuhan BBM dalam negeri mencapai 106% dari jumlah yang ditargetkan, yaitu dari 64,11% yang ditargetkan tercapai sebesar 68,22%. Penghitungan realisasi pencapaian target adalah sebagai berikut:

Produksi BBM dalam negeri tahun 2010 mencapai 43,5 Juta KL, sedangkan konsumsi BBM sebesar 66,6 Juta KL, kelebihan konsumsi dipenuhi dari impor sebesar 23,2 Juta KL. Perlu diketahui bahwa dasar penetapan target kinerja di atas adalah realisasi kemampuan pasokan BBM dalam negeri tahun 2009 sebesar 64,11% dari kebutuhan domestik.

Tabel 5.5.
PRODUKSI, KONSUMSI, IMPOR BBM
(Kilo Liter)

Tahun	Konsumsi	Produksi Dalam Negeri	Impor
2005	62,059,433.10	40,652,695.00	25,221,428.06
2006	57,464,081.09	38,220,661.00	19,243,420.09
2007	63,838,500.00	39,513,674.00	24,324,826.00
2008	60,226,132.90	40,453,924.00	24,324,826.00
2009	64,070,640.00	43,144,431.22	20,926,208.78
2010	66,633,465.60	43,457,820.22	23,175,645.38

5.3. Capaian Kinerja Tujuan Strategis

Tujuan I: Terjaminnya Pasokan Energi Dan Bahan Baku Domestik

Dalam menjamin penyediaan energi domestik, telah dilakukan optimasi produksi energi fosil yaitu minyak bumi, gas bumi dan batubara. Produksi minyak bumi, sebagai energi tidak terbarukan, cenderung menurun dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2007, produksi minyak berada di bawah level 1 juta barel per hari. Namun, dengan adanya temuan cadangan baru seperti Blok Cepu, maka dalam jangka pendek akan terjadi kenaikan produksi minyak Indonesia yang tidak akan bertahan lama karena terjadi *natural decline rate* yang cukup tinggi sekitar 12% per tahun.

Sebagaimana diketahui, sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Selanjutnya, terkait pasokan bahan baku domestik, sektor ESDM memberikan kontribusi utamanya pada pasokan gas dan bahan mineral. Pemakaian gas domestik dimanfaatkan untuk industri pupuk, kilang petrokimia, kondensasi, LPG, PGN, PLN, Krakatau steel, industri lainnya. Selanjutnya pasca diterbitkan UU Migas Nomor 22 tahun 2001, alokasi gas bumi domestik mencapai 63,5%, sedangkan alokasi gas bumi ekspor sebesar 36,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran

Sasaran 1. Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.6.
Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Produksi minyak bumi	MBOPD	965	945	98%
2.	Produksi gas bumi	MBOEPD	1.503	1.590	106%
3.	Produksi CBM	MBOEPD	0	0	-
4.	Produksi batubara	Juta Ton	254	270	102%
5.	Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	Juta Ton	75	84	89%
6.	Produksi mineral				
	• Tembaga	Ton	930,000	989,953	106
	• Emas	Ton	107	111	104
	• Perak	Ton	355	323	91
	• Timah	Ton	90,000	78,965	88
	• Nikel Matte	Ton	77,000	78,336	102
	• Ferronikel	Ton	15,000	17,970	120
	• Bijih Nikel	Ton	6,200,000	6,561,404	106
	• Bauksit	Ton	7,500,000	7,148,124	95
7.	Produksi BBM	Juta KL	36.5	38.4	105%
8.	Produksi LPG	Juta Ton	2	2.44	92%
9.	Produksi LNG	Juta Ton	24,12	24,10	99.9%

Pada tahun 2010 ini, produksi energi fosil yang terdiri dari **minyak bumi, gas bumi dan batubara** secara total mencapai 5.698 ribu BOEPD (*Barrel Oil Equivalent Per Day*) dibanding target 5,573 ribu BOEPD atau 102%. Demikian juga jika dibandingkan dengan dengan realisasi tahun 2009 yaitu 5.313 ribu BOEPD terdapat kenaikan sebesar 7,25%. Secara rinci capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7.
PRODUKSI ENERGI FOSIL

No.	Uraian	Satuan	2009	2010		
				Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Minyak Bumi	ribu BOPD	949	965	945	98
2.	Gas Bumi	MMSCFD	7,951	8,415	8,900	106
		ribu BOEPD	1,420	1,503	1,590	
3.	Batubara	juta Ton	256	270	275	102
		ribu BOEPD	2,944	3,105	3,163	
TOTAL		ribu BOEPD	5,313	5,573	5,698	102

Penjelasan atas capaian kinerja produksi energi fosil adalah sebagai berikut:

1. Produksi Minyak Bumi

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2010 sebesar 945 ribu bph (BOPD), mengalami penurunan sebesar 3,8 ribu bph dibandingkan produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2009 sebesar 948,8 ribu bph. Penurunan produksi tersebut disebabkan antara lain:

- Kehilangan peluang produksi karena *unplanned shutdown* :

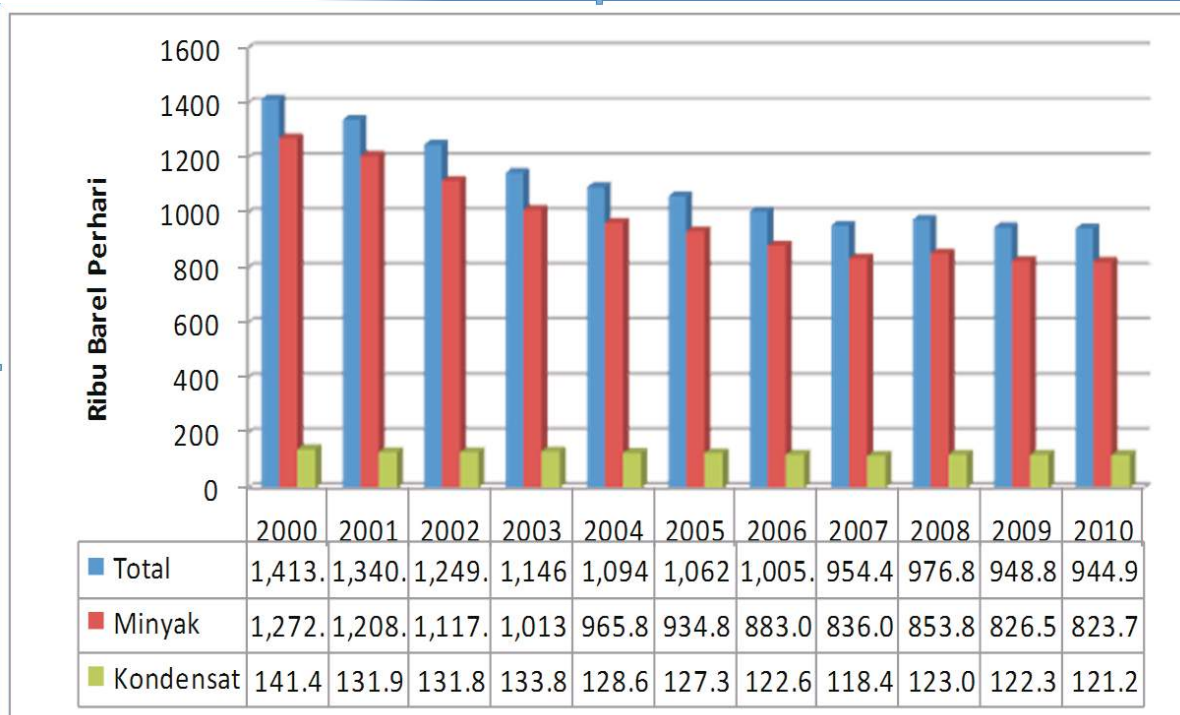
Kebocoran pipa gas TGI (5,4 MBOPD); Masalah peralatan (kilang LNG Tangguh, FPSO Belanak, FSO Madura Jaya); Kejadian alam (gangguan petir di CPI, gelombang laut di lapangan Sepanjang-KEI); dan Kecelakaan (KE-40 tertabrak kapal kontainer, tenggelamnya LPG SBM di COPI, terbakarnya FSO Gagasan Perak).

- Kehilangan produksi karena kendala lain :

Keterlambatan proyek (Pagerungan Utara-KEI, Sungai Kenawang-JOBP Talisman Jambi Merang); Faktor offtaker (kilang TWU, pengambilan gas PLN); Kendala subsurface (Pertamina EP, Seleraya, Hess Pangkah) dan Perpanjangan planned shutdown (CNOOC); serta Kendala keterlambatan pemberian ijin lokasi, faktor keamanan dan pemblokiran jalan/lokasi, pencurian peralatan.

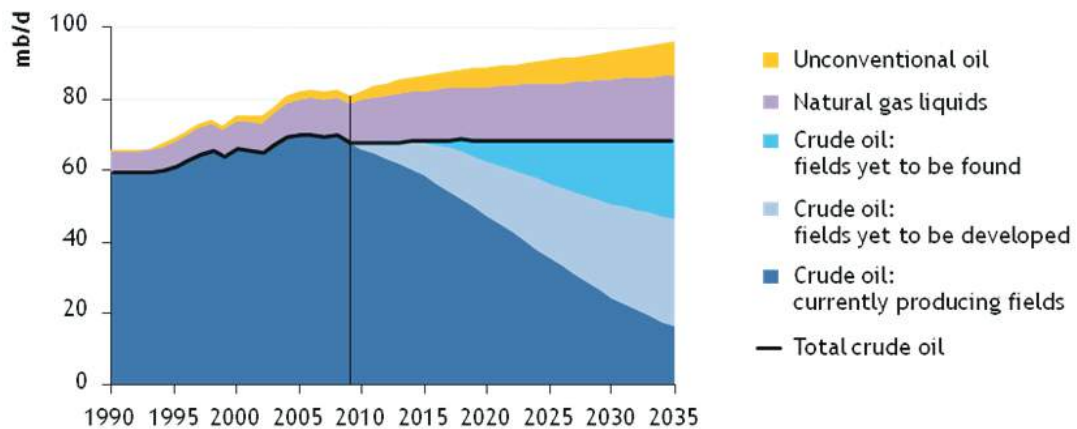
Perbandingan produksi minyak bumi dan kondensat sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2010 terlihat pada grafik di bawah ini :

PRODUKSI MINYAK BUMI



Grafik 5.3. Produksi Minyak Bumi

TREND PRODUKSI MIGAS DUNIA



Global oil production reaches 96 mb/d in 2035 on the back of rising output of natural gas liquids & unconventional oil, as crude oil production plateaus

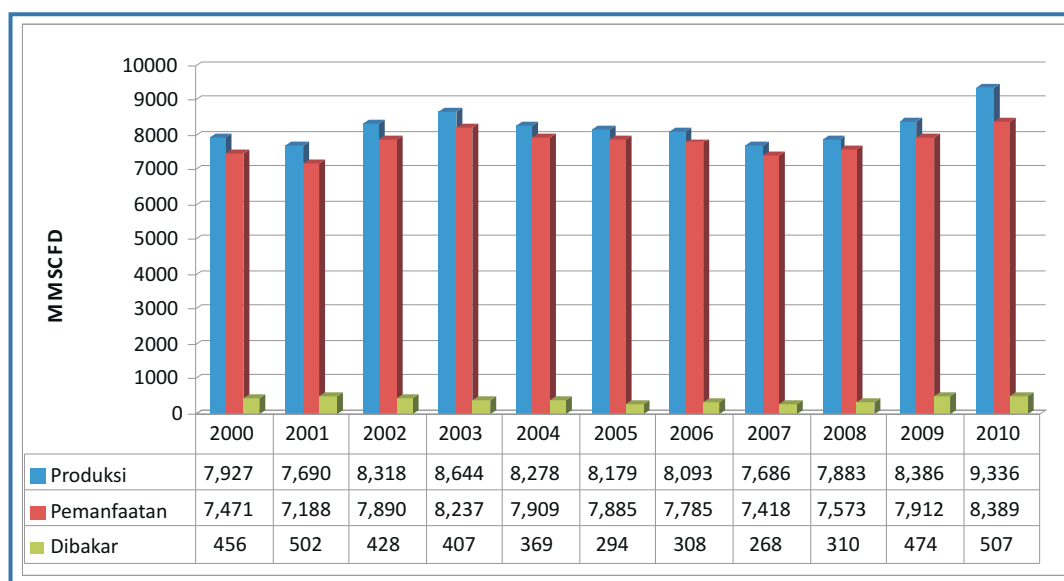
Grafik 5.4. Trend Produksi Migas Dunia

2. Produksi Gas Bumi

Produksi gas bumi pada tahun 2010 adalah sebesar 1,590 MBOPD, mengalami kenaikan sebesar 170 MBOPD (10.7%) dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 1.420 MBOPD. Di tahun 2010 ini juga produksi gas bumi dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dari target sebesar 1.503 MBOPD terealisasi sebesar 1.590 MBOPD, dengan demikian capaian kinerja dalam produksi gas bumi mencapai 106%.

Perbandingan produksi dan pemanfaatan gas bumi sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2010 terlihat pada grafik di bawah ini :

PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI



Grafik 5.5. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi

Kenaikan produksi tersebut antara lain berasal dari :

- Optimasi produksi lapangan gas Vorwatta (BP Berau) yang menyuplai gas ke Kilang LNG Tangguh.
- Optimasi produksi lapangan gas Suban dan Sumpal (ConocoPhillips Grisik) yang dialirkan ke Singapura, PGN SSWJ dan PT Chevron Pacific Indonesia.
- Optimasi produksi lapangan-lapangan gas Kodeco Energy.
- Optimasi produksi lapangan gas Oyong (Santos Sampang) yang disalurkan ke PLTG Grati.
- Optimasi produksi lapangan Singa (Medco E&P Lematang) yang dialirkan ke PGN SSWJ.

3. CBM

Sampai pada tahun 2010 ini. Coal Bed Methane belum berproduksi, direncanakan baru mulai produksi di tahun 2012.

4. Produksi Batubara dan Pasokan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri

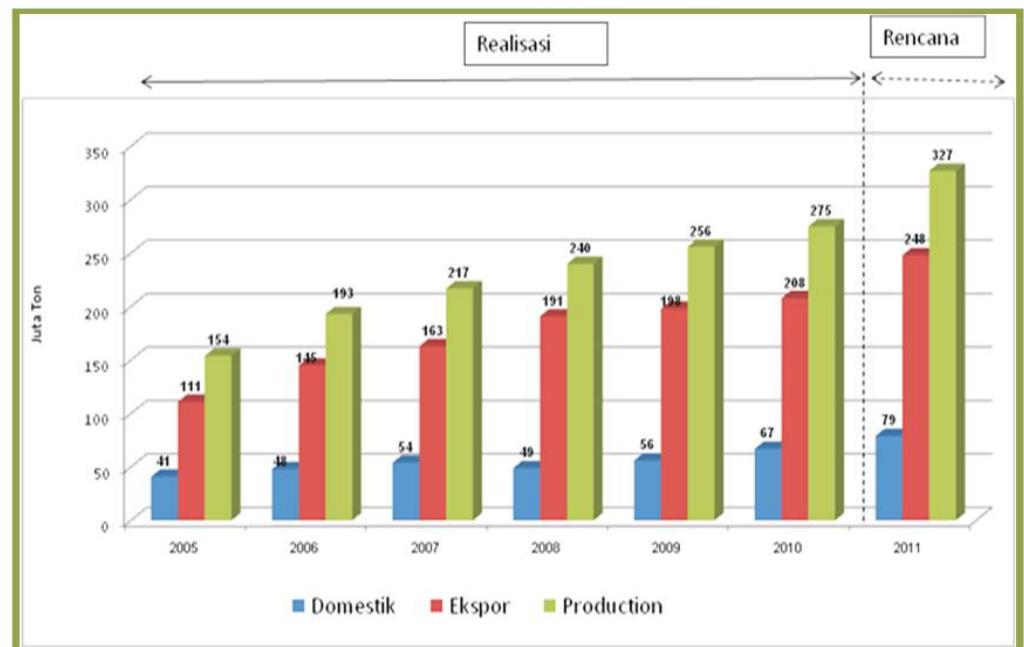
Secara keseluruhan produksi batubara dalam tahun 2010 adalah 270 Ton yang melampaui target sebesar 254 Ton atau dengan nilai capaian sebesar 102%,. Secara rinci hal tersebut dapat dilihat dari tabel neraca *supply-demand* batubara di bawah ini.

Tabel 5.8
NERACA SUPPLY - DEMAND BATUBARA INDONESIA

Supply / Demand	Realisasi (Juta Ton)			
	2007	2008	2009	2010
Demand	54	69	56	84
Supply/Produksi	217	229	254	270
Ekspor	163	160	198	186

Sebagaimana terlihat dari tabel di atas, jumlah produksi batubara tahun 2010 sebesar 270 juta ton. Dari jumlah produksi tersebut, jumlah pemanfaatan dalam negeri adalah sebesar 84 juta ton (30% dari total produksi). Jumlah angka pemanfaatan ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75 juta ton atau dengan capaian kinerja sebesar 112%.

Pemanfaatan batubara untuk domestik sebagai energi alternatif pengganti BBM diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar pembangkit. (Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW). Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah.



Grafik 5.6. Proyeksi Produksi dan Pemanfaatan Batubara

Hasil pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik selain digunakan untuk kebutuhan listrik, juga digunakan untuk pabrik semen, usaha tekstil, kertas, dan briket. Secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5.9.
Pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik

NO	PERUSAHAAN	TONASE (JUTA TON)	%	GCV
I	PLTU			
	PLN	45.1	69.4	4.000 - 5.100
	IPP	9.1	14	4.000 - 5.100
	PT FREEPORT INDONESIA	0.78	1	5.650 - 6.150
	PT NEWMONT NUSA TENGGARA	0.52	0.8	5,900
II	METALURGI			
	PT INCO	0.16	0.2	≥ 6.000
	PT ANTAM	0.15	0.2	≥ 6.000
III	SEMEN, PUPUK DAN TEKSTIL			
	SEMEN	7.6	11.7	4.000 - 6.200
	TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	1.2	1.8	5.000 - 6.500
	PUPUK	0.35	0.5	4.000 - 5.000
TOTAL		64.96		

5. Produksi Mineral

Indonesia telah lama dikenal dunia sebagai negara penghasil timah, nikel, bauksit, tembaga, emas dan perak. Produksi Mineral di Indonesia dikelola oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Freeport Indonesia yang menghasilkan tembaga, emas dan perak; PT Antam, Tbk yang menghasilkan bijih nikel, emas dan perak; PT Timah, Tbk menghasilkan timah; dan PT. Inco, Tbk menghasilkan nikel mate.

Realisasi produksi mineral Indonesia relatif baik, meskipun terdapat beberapa komoditi mineral yang dibawah target karena terdapat penambangan kecil yang tidak beroperasi dan pengaruh cuaca ekstrim. Pencapaian produksi tembaga pada tahun 2010 mencapai 989,953 ton atau sebesar 106% dari target produksi 930,000 Ton. Untuk produksi emas mencapai 111 Ton atau 104% dari target produksinya sebesar 107 Ton, sedangkan produksi perak mencapai 323 Ton atau 91% dari target produksi 355 Ton.

Pencapaian produksi bijih nikel pada tahun 2010 sebesar 6,561,404 ton atau 106% dari target 6,200,000 ton, karena adanya penambahan KP baru. Produksi feronikel sebesar 17,970 Ton atau 120% dari target 15,000 ton. Produksi Nikel Matte mencapai 78,336 Ton atau 103% dari target produksi yang sebesar 77,000 Ton. Ketiga mineral ini mengalami pencapaian yang melebihi target karena pada tahun 2009 mengalami kenaikan harga.

Sedangkan produksi timah dan bauksit masih di bawah target yaitu produksi Timah sebesar 78,965 Ton atau 88% dari target sebesar 90,000 Ton dan Bauksit 7,148,124 atau 95% dari target sebesar 7,500,000 Ton.

Di bawah ini table perbandingan produksi mineral pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel 5.10
PRODUKSI MINERAL (Ton)

No.	Jenis Mineral	2009	2010			Rasio 2009 -2010
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Tembaga	999,260	930,000	989,953	106	99
2	Emas	129	107	111	104	86
3	Perak	328	355	323	91	98
4	Timah	60,475	90,000	78,965	88	131
5	Nikel Matte	68,228	77,000	78,336	102	115
6	Ferronikel	12,550	15,000	17,970	120	143
7	Bijih Nikel	6,099,673	6,200,000	6,561,404	106	108
8	Bauksit	5,424,113	7,500,000	7,148,124	95	132

6. Produksi BBM

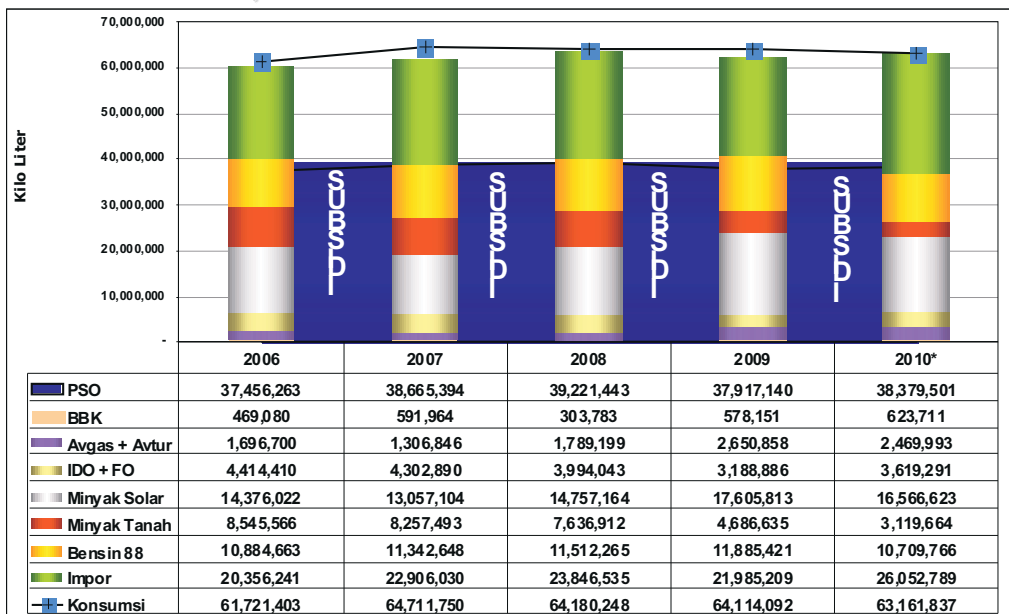
Sampai dengan akhir tahun 2010, produksi BBM telah mencapai 41,33 Juta KL (terdiri dari produksi kilang Pertamina, kilang Pusdiklat Migas, kilang TPPI dan kilang TWU). Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 39,8 Juta KL atau mencapai 103,6%.

Di bawah ini adalah grafik perkembangan produksi, konsumsi dan subsidi BBM per jenis selama 5 tahun terakhir:



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

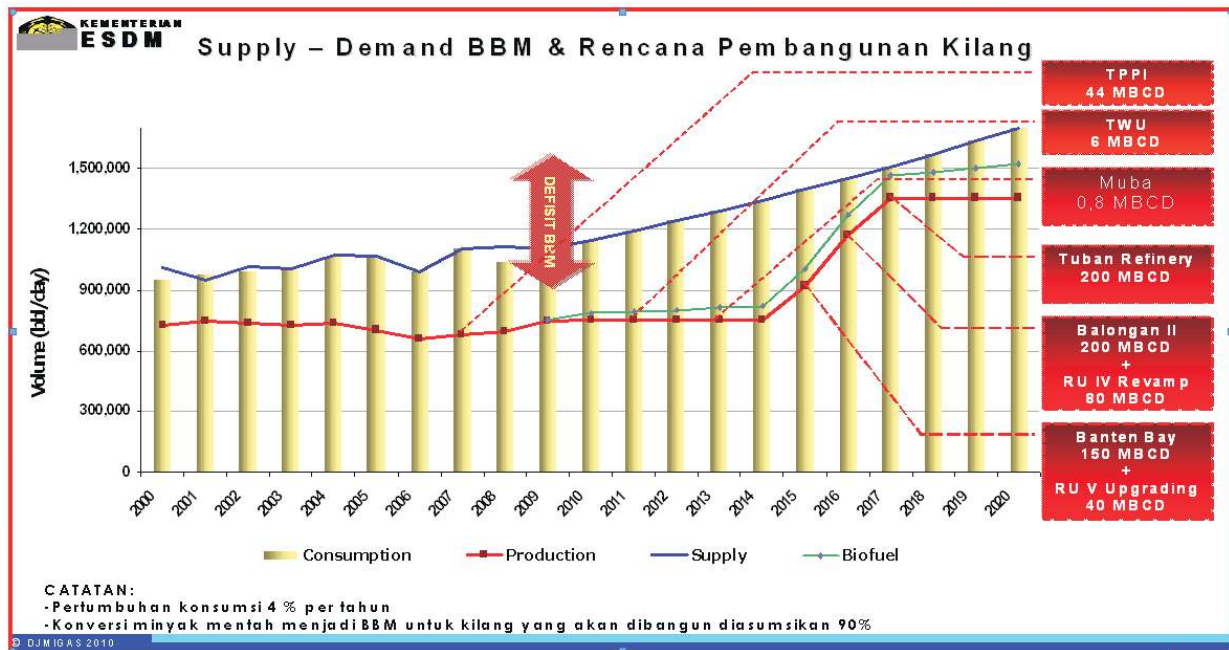
PRODUKSI, KONSUMSI & SUBSIDI BBM 5 TAHUN TERAKHIR



* Angka perkiraan

Kebutuhan BBM dan Rencana Pembangunan Kilang Minyak Baru

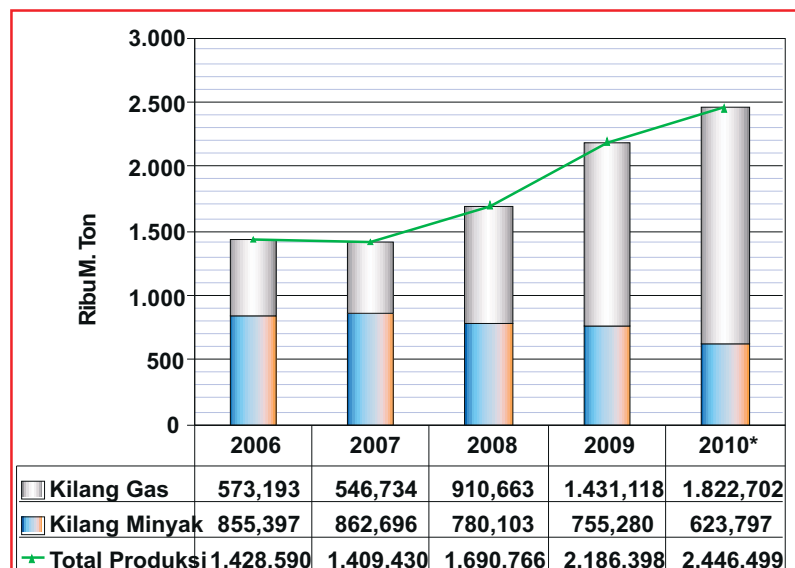
Kebutuhan BBM dalam negeri saat ini sekitar 37% dipenuhi dari impor. Dengan meningkatnya kebutuhan BBM dari tahun ke tahun, ketergantungan Indonesia pada impor BBM diperkirakan akan semakin meningkat. Melihat kondisi yang ada, pemerintah telah mendorong adanya pembangunan kilang minyak baru untuk meningkatkan kehandalan penyediaan BBM dari dalam negeri.



Grafik 5.8. Supply- Demand BBM dan Rencana Penbangunan Kilang

PRODUKSI LPG

Produksi LPG tahun 2010 adalah sebesar 2,44 juta ton. Meningkat sebesar 15,09 % dibanding tahun 2009 sebesar 2,12 juta ton. Peningkatan ini dikarenakan bulan Mei 2010 kilang Pangkalan Brandan mulai beroperasi kembali dan bulan September 2010 kilang Tuban (PT Tuban LPG Indonesia) mulai beroperasi. Grafik disamping adalah profil produksi LPG dalam negeri selama lima tahun terakhir.

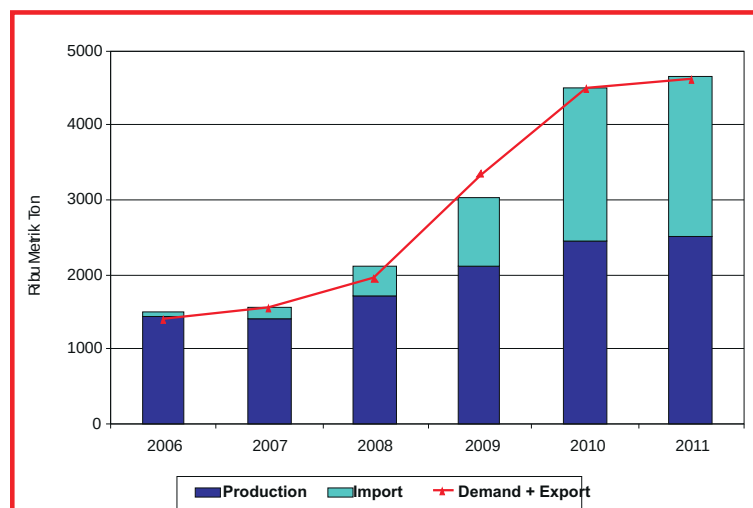


* = produksi tahun 2010 adalah angka estimasi

Grafik 5.9.. Produksi LPG Supply- Demand BBM

Dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG, konsumsi LPG nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 4,62 juta ton per tahun. Oleh sebab itu, Indonesia masih membutuhkan sumber-sumber pasokan LPG baru baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan saat ini adalah dengan mencari sumber-sumber baru pasokan bahan baku gas bumi yang potensial seperti pemanfaatan lapangan gas marginal sebagai bahan baku LPG maupun melalui upaya pemanfaatan alternatif bahan bakar baru pengganti/pencampur LPG yaitu *dimethyl ether* (DME), untuk mengurangi konsumsi LPG.

SUPPLY DEMAND LPG

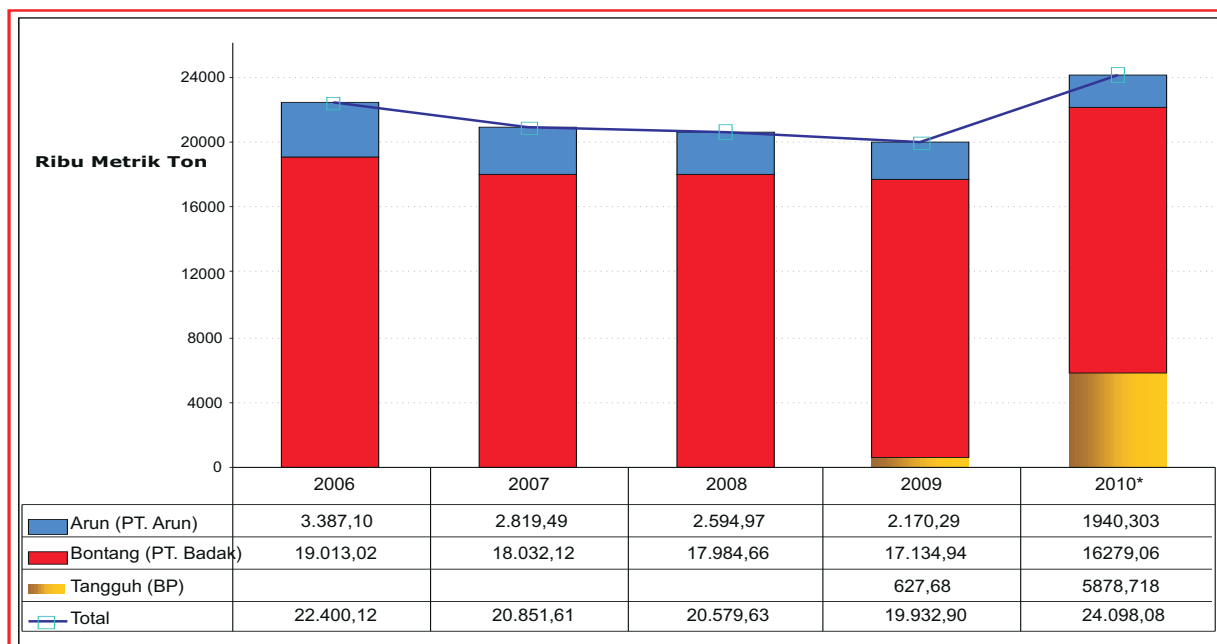


Grafik 5.10.. Supply- Demand LPG

8. Produksi LNG

Dengan beroperasinya kilang LNG BPTangguh, produksi LNG dalam negeri saat ini dipenuhi oleh 3 kilang LNG yaitu kilang PT Arun, PT Badak dan BP Tangguh. Produksi LNG tahun 2010 adalah sebesar 24,10 juta ton, angka ini sedikit dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 24,12 juta ton atau sebesar 99,9%. Namun demikian keseluruhan produksi LNG tahun 2010 ini mengalami kenaikan sekitar 20,92% dari tahun sebelumnya sebesar 19,93 juta ton. Di bawah ini adalah grafik produksi LNG lima tahun terakhir.

PRODUKSI LNG



* = produksi 2010 adalah angka estimasi

Grafik 5.11. Produksi LNG

Sasaran 2. Meningkatkan kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.11.
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	%	100	100	100%

Sebagaimana yang terlihat dalam tabel pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa target kinerja dari sasaran ini dapat tercapai 100%. Penjelasan tentang capaian kinerja ini dapat dilihat pada paragraf berikut ini.

Isu penting dalam rencana pengembangan pabrik pupuk adalah jaminan ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku dalam periode yang panjang. Bahan baku pabrik pupuk urea yang paling efisien selama ini adalah gas bumi. Sebagai alternatif pertama bahan baku diupayakan akan menggunakan gas bumi dengan jaminan pasokan paling tidak selama 20 tahun. Untuk itu perlu diadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengupayakan sumber-sumber gas yang diprioritaskan sebagai bahan baku pupuk.

Pemanfaatan gas bumi sangat tergantung pada tersedianya infrastruktur gas bumi yang dapat digunakan untuk mengalirkan gas bumi dari lapangan kepada konsumen gas bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi dengan pasar (konsumen). Sejauh ini perkembangan jaringan pipa gas di Indonesia bersifat *piecemeal*, suatu jalur pipa baru dibangun apabila terjadi transaksi pengiriman gas ke konsumen besar, yang kemudian diikuti oleh terbentuknya pasar di daerah yang dilewati jalur pipa.

Untuk pemanfaatan gas bumi Indonesia yang optimal dibutuhkan suatu jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang terpadu yang menghubungkan multi produsen dan multi konsumen. Namun, untuk membangun jaringan pipa gas terpadu tersebut diperlukan dana yang sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki Pemerintah sangat terbatas. Karena itu Pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi pada mulut tambang, dalam hal ini industri yang merupakan konsumen gas bumi dibangun disekitar lokasi cadangan gas bumi. Pembangunan industri dekat dengan sumber gas bumi akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mengalirkan gas bumi, sehingga dapat menekan harga gas bumi yang harus dibeli oleh konsumen.

Permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pupuk adalah sebagai berikut:

- Umur pabrik yang tua sudah di atas 30 tahun, dimana pada saat ini pemakaian gas buminya 25% lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru yang hemat energi.
- Penggantian peralatan dalam jumlah besar akan menyebabkan membesarnya biaya investasi dan operasional; peralatan yang tidak diganti, memiliki potensi yang besar terjadi kerusakan secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan turunnya *on stream days* yang meningkatkan biaya pemeliharaan dan menurunkan keandalan pabrik.

- c. Suku cadang peralatan sulit diperoleh di pasaran dan jika bisa dipenuhi oleh *vendor* maka harganya akan sangat mahal.
- d. Sebagian besar pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku gas bumi belum mendapatkan alokasi jumlah gas yang cukup dalam jangka panjang.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri ke depan, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab terhadap tersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi industri pupuk urea.

Berdasarkan surat Menteri ESDM kepada Menteri perindustrian Nomor: 1418/15/MEM.M/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Pupuk, bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan program revitalisasi industri pupuk tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Kementerian perindustrian dan instansi terkait untuk perencanaan alokasi gas bumi, baik untuk revitalisasi pabrik pupuk maupun pabrik pupuk yang sedang berjalan. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diinventarisasi potensi cadangan gas bumi yang direncanakan sebagai alternatif pasokan gas bumi dalam rangka revitalisasi.

Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan pasokan gas untuk industri pupuk dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 2 Tentang Revitalisasi Pupuk dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Alokasi Gas Bumi Untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (Pkt-5), Satu (1) Proyek Pabrik Pupuk Di Donggi Senoro, dan Satu (1) Proyek Pabrik Pupuk Di Tangguh. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah memberikan jaminan pasokan untuk industri pupuk.

Adapun alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT)-5, pabrik pupuk di Tangguh dan pabrik pupuk di Donggi Senoro adalah:

a. PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) – 5

Telah disetujui alokasi gas sebanyak 80 MMSCFD dari Lapangan KKKS Mahakam Total dan Inpex dan Lapangan Sebuku KKKS Pearl terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021.

b. Pabrik Pupuk di Tangguh

Untuk pengembangan pabrik pupuk dengan gas dari lapangan Tangguh telah diselesaikan Pre-FS oleh Tim Interdep pada April 2009. Dari hasil Pre-FS, terdapat cadangan uncommitted (2P *risked*) sebesar 2,9 TCF, yang tingkat kepastiannya sangat tergantung pada hasil uji produksi dan pemboran yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2014.

c. Pabrik Pupuk di Donggi Senoro

Kemampuan pasokan gas bumi dari lapangan Donggi Senoro sebesar 415 MMSCFD (2014-2027), dengan alokasi gas untuk domestik sebesar 115 MMSCFD (28% terhadap total produksi) yaitu untuk Panca Amara Utama (PAU) sebesar 55 MMSCFD dan 60 MMSFD untuk PLN.

Untuk mengamankan produksi pupuk nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010, kami telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk pasokan gas Pupuk Sriwijaya (Pusri IB, III dan IV), yang kontrak gasnya berakhir pada tahun 2012 akan dialokasikan gas dari Pertamina EP sebesar 166 MMSCFD (dengan asumsi 1 MMSCFD=1000 BBTUD) selama 5 (lima) tahun. Saat ini kedua perusahaan sedang melakukan negosiasi Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).
2. Untuk Pupuk Kalimantan V (PKT V) sudah ditandatangani PJBG untuk pasokan gas sebesar 80 MMSCFD kurun waktu 2012-2021 dari Wilayah Kerja Mahakam dan Wilayah Sebuku.

3. Untuk pasokan gas ke Pupuk Kujang I (PKC I) yang dipasok dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) dimana mulai tahun 2012 kontraknya akan mengalami penurunan hingga tahun 2016, saat ini sedang dilakukan pembahasan PJBG antara PKC dengan PHE ONWJ untuk penambahan volume gas sebesar 28-38 MMSCFD mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk mencukupi kebutuhan pabrik PKCI.
4. Untuk pasokan gas ke Pupuk Kujang IB yang dipasok dari Pertamina EP dimana kontraknya akan berakhir pada 2011, saat ini sudah ada MoU antara PKC dengan Pertamina EP dengan volume sebesar 39 MMSCFD untuk jangka waktu 2012-2016. Negosiasi PJBG sedang dilaksanakan oleh kedua perusahaan tersebut.
5. Untuk pasokan gas PT Petrokimia Gresik, sudah ditandatangani MoU antara Mobil Cepu Limited dengan PT Petrokimia Gresik untuk kebutuhan 1 (satu) *plant* (± 85 MMSCFD) yang saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk perpanjangan masa berlaku MoU tersebut.
6. Untuk pasokan gas Pupuk Iskandar Muda tahun 2011-2012 akan dipasok dari *cargo* LNG *drop* sebesar 60 MMSCFD. Permintaan gas sebesar 110 MMSCFD tidak dapat dipenuhi seluruhnya karena kandungan C_3 dan C_4 yang terdapat dalam Blok Arun diperlukan untuk produksi LNG yang tidak dapat dipenuhi dari gas di Lapangan NSO yang kandungan C_3 dan C_4 nya rendah. Sedangkan untuk tahun 2013 dan selanjutnya akan dipasok dari Medco Blok A.

Kebijakan Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Gas Bumi diprioritaskan untuk peningkatan produksi, kebutuhan bahan baku pupuk, penyediaan tenaga listrik dan sektor industri lainnya. Dikarenakan sebagian besar pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku gas bumi belum mendapatkan alokasi jumlah gas yang cukup dalam jangka panjang, disarankan pembangunan pabrik pupuk yang baru diarahkan mendekati sumber Gas Bumi yang besar.

Terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk, Kementerian Perindustrian akan melakukan *review* atas *roadmap* pengembangan industri pupuk nasional, disesuaikan dengan kemampuan penyediaan gas yang ada, sehingga dapat menggambarkan posisi terakhir dan kondisi realitas atas kemampuan industri pupuk nasional dalam penyediaan pupuk jangka menengah/panjang.

Sebagai tindak lanjut keputusan diatas juga dikeluarkan kebijakan berikut:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri ESDM No.19/2010 tentang pemanfaatan gas bumi untuk transportasi.

Sasaran 3. Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.12..
Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik:	%	80,4	88	109,5
	Pangsa Minyak Bumi	%	30	25	83.3
	Pangsa Gas Bumi	%	24,5	26	106.1
	Pangsa batubara	%	23,3	35	103
	Pangsa panas bumi	%	2,6	2	76.9
2.	Pangsa energi baru terbarukan lainnya	%	8	12	150

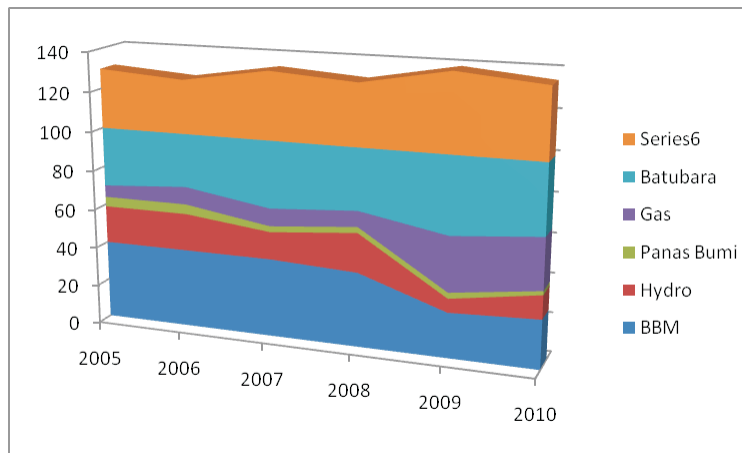
1. Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik

Selain dengan memberdayakan energi terbarukan, KESDM juga melakukan upaya untuk mengurangi pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan produk minyak bumi (BBM) dengan memberdayakan batubara, gas bumi, panas bumi dan air sebagai energi alternatif bahan baku utama untuk pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut tercermin dari prosentase indikator kinerja pada tabel pengukuran kinerja yang melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 109,5%. Capaian tersebut menandakan bahwa energi alternatif telah berhasil dioptimalkan sebagai energi pengganti BBM. Tabel dan Grafik di atas menjelaskan tentang realisasi pengurangan ketergantungan terhadap produk minyak bumi dengan mengoptimalkan energi primer lainnya sebagai alternatif selama 6 tahun terakhir.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pengurangan ketergantungan pembangkit terhadap produk minyak bumi (BBM) telah tercapai sepenuhnya di tahun 2010 ini. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi yang terdapat dalam tabel indikator kinerja, dimana ketergantungan terhadap produk minyak bumi (BBM) untuk pembangkit telah berkurang dari 38% pada tahun 2008 menjadi hanya 23% pada tahun 2009 dan penggunaan batubara meningkat dari 31% pada tahun 2008 menjadi 39% pada tahun 2009 seiring dengan keberhasilan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW, namun demikian menginjak tahun 2010, ketergantungan terhadap minyak bumi kembali meningkat menjadi 25%, dan terhadap energy primer lainnya justru cenderung menurun.

Tabel 5.13
PANGSA ENERGI PRIMER

No.	Energi Primer	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	BBM	40	40	40	38	23	25
2	Hydro	19	19	14	20	7	12
3	Geothermal	5	5	3	3	3	2
4	Gas	6	9	9	8	28	26
5	Batubara	30	27	34	31	39	35
	Jumlah	100	100	100	100	100	100



Grafik 5.12. Pangsa Energi Primer

2. Pangsa energi terbarukan lainnya (Hydro)

Energi terbarukan yang bersumber dari air juga menunjukkan peran yang semakin berarti. Dalam tahun 2010 pangsa energi baru terbarukan telah mencapai 12% dari keseluruhan pangsa energi nasional, dibandingkan dengan tahun 2009 (pangsa 7%). Pada tahun 2010 pemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit tenaga listrik menunjukkan kemajuan yang cukup tinggi, peningkatan mencapai 71,4%, demikian pula bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada awal tahun anggaran 2010 yang sebesar 8%, maka capaian kinerja mencapai 150%.

Sasaran 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.14.
Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jaringan pipa gas kota	RT	12.000	13.166	109.7%
2.	Rasio elektrifikasi	%	67.2	67.15	99.9%
3.	Kapasitas Pembangkit listrik	MW	1150.15	786.85	68.4%
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)	MW	1261	1189	94%

Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas, bahwa dari 4 indikator kinerja yang ada, hanya 1 indikator yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Penjelasan tentang capaian kinerja masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaringan pipa gas kota

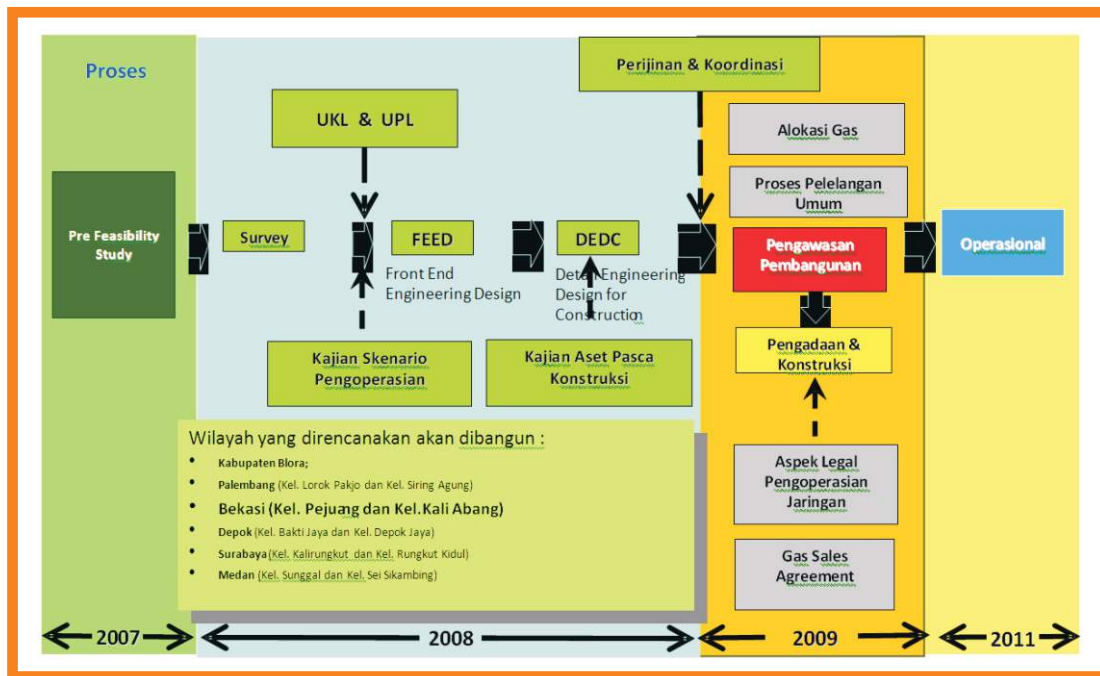
Perencanaan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan melalui kegiatan studi kelayakan (*feasibility study*) dan kegiatan *Front End Engineering Design* (FEED) serta *Detail Engineering Design for Construction* (DEDC). Kegiatan *feasibility study* dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dalam mengurangi beban subsidi pemerintah. Selanjutnya, FEED dan DEDC adalah perencanaan secara detail teknis pembangunan jaringan distribusi gas bumi meliputi jenis penggunaan pipa, diameter, desain/pola aliran pipa, dsb.

Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2009 ditetapkan di 2 (dua) wilayah yaitu di Palembang dan Surabaya. Sedangkan pada tahun 2009 telah dilaksanakan penyusunan FEED dan DEDC di Kota Tarakan, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan 4 wilayah tersebut didasarkan atas ketersediaan alokasi pasokan gas, infrastruktur pendukung dan kesiapan dukungan dari pemerintah daerah. Implementasi konstruksi jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Dari pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tersebut di atas, pada tahun 2010 ini, terealisasi sebanyak 13.166 Rumah Tangga yang telah dialiri gas kota. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 12.000 Rumah tangga atau capaian kinerja sebesar 109,97%.

Skema pembangunan jaringan distribusi gas bumi tersebut adalah sebagai berikut:

JARINGAN DISTRIBUSI GAS KOTA



Gambar 5.6. Jaringan Distribusi Gas Kota Primer Produksi LNG

PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

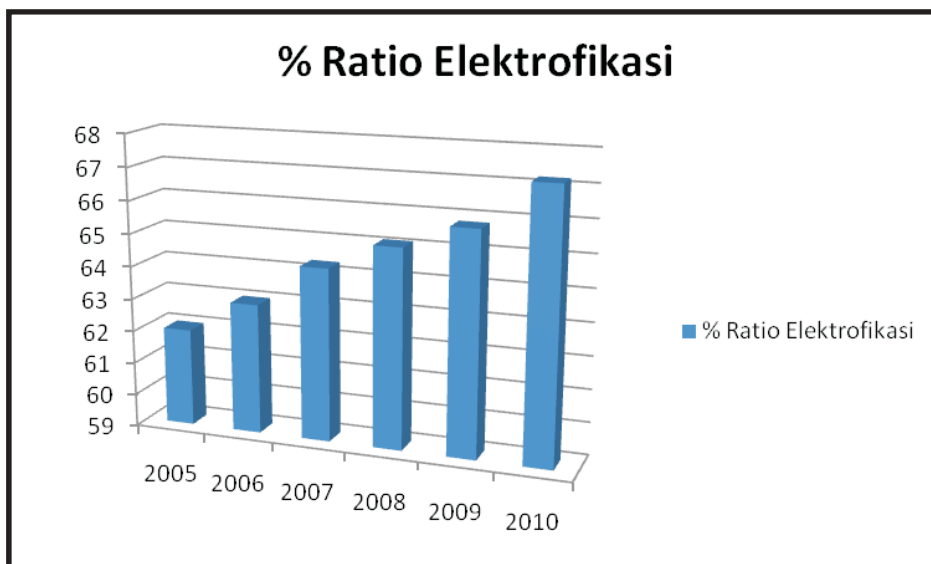
Nama Kegiatan	TAHUN						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FEED dan DEDC Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga	1) Kabupaten Blora; 2) Palembang (Kel. Lorok Pakjo dan Kel. Siring Agung) 3) Bekasi (Kel. Pejuang dan Kel. Kali Abang) 4) Depok (Kel. Bakti Jaya dan Kel. Depok Jaya) 5) Surabaya (Kel. Kalirungkut dan Kel. Rungkut Kidul) 6) Medan (Kel. Sunggal dan Kel. Sei Sikambing)	• Tarakan, Kaltim • Sidoarjo, Jatim	• Rmh Susun Jabodetabek • Bontang, Kaltim • Sengkang Sulsei • Semarang, Jateng	• Bangkalan, Madura • Balikpapan, Kaltim • Provinsi Jambi	• Sorong, Papua • Pekanbaru, Riau • Subang, Jabar • Lhokseumawe	• Samarinda, Kaltim • Muara Enim • Lampung • Prabumulih	• Cilegon • Tenggaraong Kaltim
Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi utk Rumah Tangga (Tahap Konstruksi)		1. Kota Palembang; 2. Kota Surabaya.	1. Bekasi; 2. Depok; 3. Tarakan, Kaltim; 4. Sidoarjo, Jatim	1. Rmh Susun, Apartemen bersubsidi Jabodetabek 2. Semarang, Jateng 3. Bontang, Kaltim 4. Sengkang, Sulsei	1. Bangkalan, Madura 2. Balikpapan/ Kal-Tim. 3. Provinsi Jambi 4. Blora	1. Sorong, Papua 2. Pekanbaru, Riau 3. Subang, Jabar 4. Lhokseumawe	1. Samarinda, Kaltim 2. Muara Enim 3. Lampung 4. Prabumulih



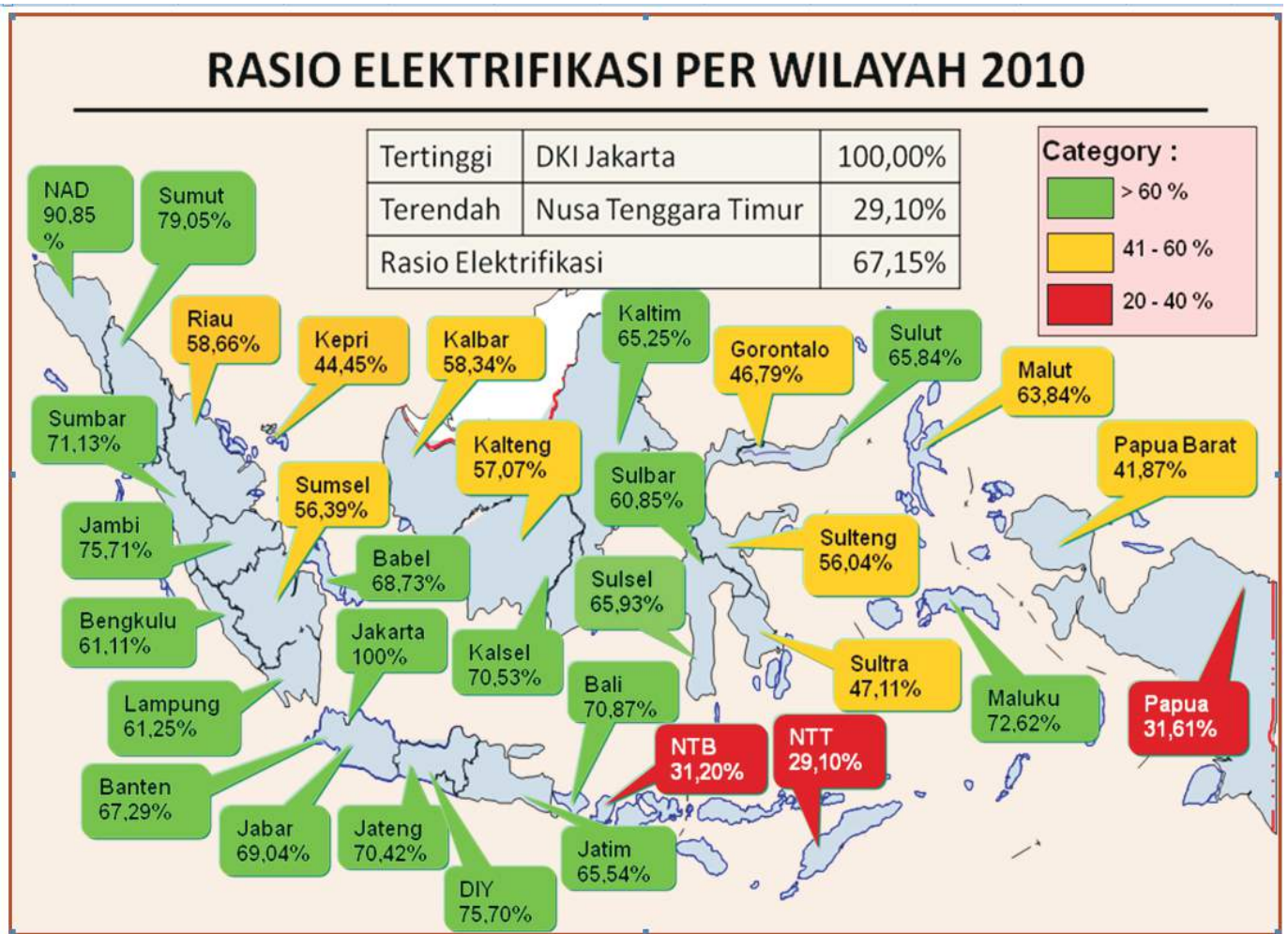
Gambar 5.7. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga

2. Rasio elektrifikasi

Terkait dengan pasokan listrik, realisasi rasio elektrifikasi pada tahun 2010 mencapai sebesar 67,15%, dimana terjadi peningkatan sekitar 1,8% dibandingkan tahun 2009 sebesar 65,34%. Peningkatan ratio elektrifikasi ini didukung oleh penambahan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW yang antara lain berasal dari PLTU Labuan 600 MW dan pembangkit mini hidro sebesar 5,35 MW. Pencapaian ratio elektrifikasi sebesar 67.15%, dilakukan melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana, pembangunan induk pembangkit dan jaringan, serta pembangunan listrik perdesaan.



Grafik 5.13. Perkembangan Ratio Elektrifikasi



Gambar 5.8. Rasio Elektrifikasi Per Wilayah

3. Kapasitas Pembangkit listrik

Pada tahun 2010 ini kapasitas listrik terealisasi sebesar 68,41% dari targetnya, yaitu dari target sebesar 1150,15 MW terealisasi sebesar 786,85 MW. Realisasi kapasitas pembangkit sebesar 786,85 MW antara lain berasal dari PLTU Labuan sebesar 600 MW, pembangkit mini hidro (PLTM) sebesar 5,35 MW, PLTG Task force sebesar 105 MW, dan Private Power Utilities (PPU) sebesar 76,50 MW. Secara rinci perbandingan kapasitas pembangkit, produksi tenaga listrik tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15.
Kapasitas Pembangkit dan Produksi Tenaga Listrik

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2009	2010		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
Rasio Elektrifikasi	%	65,79	67,20	67,15	99,93
Tambahan Kapasitas Pembangkit	MW	159,41	1.150,15	786,85	68,41
a. PLN	MW	34,81	1.073,65	710,35	66,16
b. Independent Power Producers (IPP)	MW	110,00	0,00	0,00	-
c. Private Power Utilities (PPU)	MW	14,60	76,5	76,5	100
Tambahan Transmisi	kms	0	1.102	330	30
Tambahan GI	kms	0	90	90	100
Produksi Listrik	GWh	147.358,68	164.489,94	163.127,31	99
Listrik Perdesaan					
a. Gardu Distribusi	MVA	76,17	45,17	45,17	100
b. Jaringan Distribusi	Kms	4.723	2.694,00	2.694,00	100

Jumlah penjualan tenaga listrik pada tahun 2010 sebesar 133.114 GWh, ini mengalami kenaikan sebesar 4,46% dari penjualan tenaga listrik sebesar 127.428 GWh di tahun 2009. Sementara jumlah total produksi listrik pada tahun 2010 sebesar 163.127,31 GWh walaupun kurang dari target yang ditetapkan sebesar 164.489,94 GWh atau dengan kata lain persentase capaian sebesar 99%.

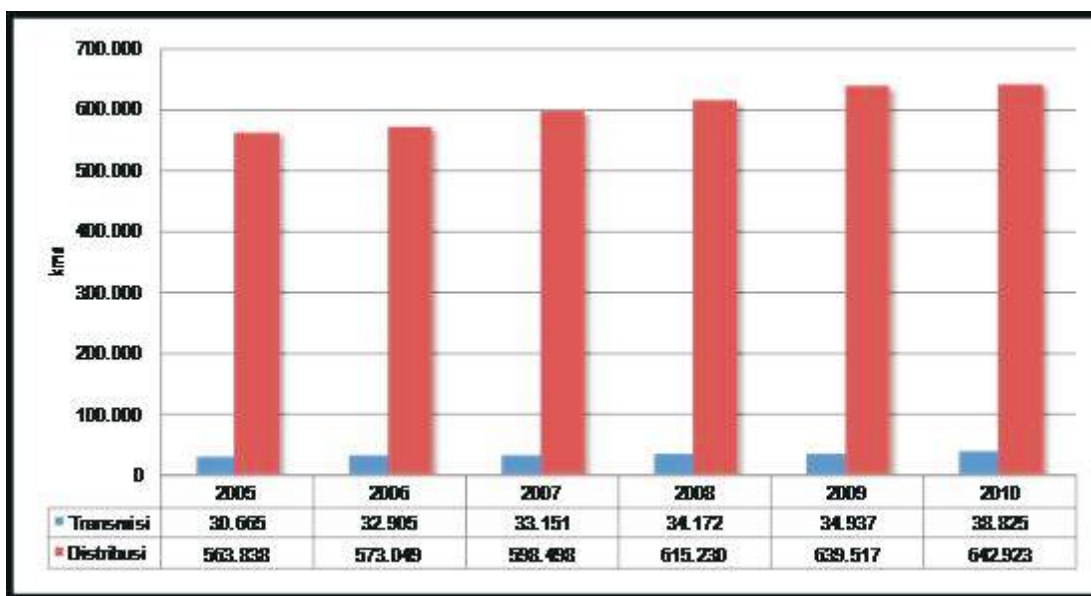
Pada listrik perdesaan, realisasi pemasangan gardu induk mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu dari 76,17 MVA di tahun 2009, menjadi 45,17 MVA di tahun 2010 atau menurun sebesar 40,70%. Dan realisasi pada jaringan distribusi juga mengalami penurunan sebesar 42,96% dari 4.723 Kms pada tahun 2009 menjadi 2.694 Kms di tahun 2010.

Total kapasitas terpasang tenaga listrik tahun 2010 sebesar 786,85 MW dengan target sebesar 1.150,15 MW. Tidak tercapainya target kapasitas pembangkit karena adanya perubahan jadwal selesainya pembangkit 10.000 MW. Kapasitas terpasang tenaga listrik ini berasal dari PLN sebesar 710,35 MW, PPU sebesar 76,5 MW, sedangkan dari IPP belum ada penambahan pembangkit

Kapasitas terpasang tenaga listrik ini berasal dari PLN sebesar 25.526 MW, IPP sebesar 5.739 MW, dan *Private Public Utility* (PPU) sebesar 846 MW. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik, karena adanya penambahan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW yang antara lain berasal dari PLTU Labuan 600 MW dan pembangkit mini hidro sebesar 5,35 MW.

Sampai dengan akhir tahun 2010, total panjang jaringan transmisi tenaga listrik yang telah dibangun oleh PT PLN (Persero) adalah sepanjang 38.825 kms yang terdiri atas SUTET 500 kV sepanjang 5.099 kms, SUTET 275 kV sepanjang 1.027 kms, SUTT 150 kV sepanjang 27.810 kms, dan SUTT 70 kV sepanjang 4.888 kms.

Total panjang jaringan transmisi tenaga listrik tersebut mengalami penambahan sebesar 7.879 kms sejak tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 25,46% selama periode 5 tahun, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.14. Total Panjang jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Secara lengkap perkembangan pembangunan di bidang ketenagalistrikan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.16.
Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan

Uraian	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rasio Elektrifikasi	%	62.09	63	64.34	65.1	65.79	67.15
Jumlah Desa Berlistrik	Desa	53.546	54.136	65.816	66.039	70.511	70.822
Jumlah KK Berlistrik	Ribu	32.175	33.118	35.630	36.230	37.950	39.696
Total Kapasitas Terpasang	MW	26.091	28.422	29.705	30.526	30.940	31.111
PLN	MW	22.346	24.675	24.925	25.451	25.751	25.526
IPP	MW	3.222	3.222	3.984	1.159	4.269	5.739
PPU	MW	523	526	796	916	920	846
Produksi Listrik	GWh	101.282	104.469	111.241	118.047	120.457	168.665,2 1
PLN	GWh	26.088	28.640	31.199	31.389.66	35.015	124.897,4 5
IPP	GWh	127.370	133.108	142.441	149.437	155.472	43.767,76

4. Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP)

Jumlah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi pada tahun ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu dari target sebesar 1261 MW terealisasi sebesar 1.189 MW atau capaian kinerja sebesar 94,3%. Hal ini disebabkan karena mundurnya target *Commercial Operation Date* (COD) dari beberapa proyek panas bumi sebagai berikut:

- PLTP Kamojang Unit 5

Rencana pembangunan PLTP Kamojang Unit 5 terhambat karena lokasinya berada dalam kawasan hutan konservasi, akibatnya pihak lender (JBIC) membatalkan loan. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan MoU kolaborasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) - BKSDA Jawa Barat tentang Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang yang menyatakan PGE diberikan izin melaksanakan optimalisasi kegiatan pemanfaatan energi panas bumi dimana WKP berada di dalam Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Saat ini sedang menunggu pendapat hukum dari Kementerian Kehutanan, sedangkan komitmen pendanaan dari pihak JBIC sedang dibahas ulang.

- PLTP Lahendong Unit 4

Terhambatnya penyelesaian pembangunan PLTP Lahendong Unit 4 disebabkan proses pembebasan lahan untuk fasilitas produksi yang berbelarut-larut sehingga proses tender untuk konstruksi fasilitas uap menjadi terhambat. Akibatnya rencana COD pada tahun 2010 mundur menjadi September 2011.

- PLTP Ulumbu

Terkendalanya proyek PLTP Ulumbu dikarenakan terjadinya longsor di lahan tempat PLTP akan dibangun. Saat ini telah dilakukan re-design pondasi dan proses pekerjaan masih berjalan. COD yang sebelumnya dijadwalkan pada Desember 2010 mundur, dan diperkirakan selesai pada Agustus 2011.

Sasaran 5. Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.17.
Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Elastisitas Energi	%	1,6	1.64	88.9%
2.	Penurunan emisi CO ₂	%	5,4	7 (*)	70,3%

*Berdasarkan angka estimasi

1. Elastisitas Energi

Pemanfaatan energi secara optimal dapat diukur dengan elastisitas energi. Elastisitas energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi (umumnya dinyatakan dalam GDP atau *Gross Domestic Product*). Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, target elastisitas energi Indonesia pada tahun 2025 adalah lebih kecil dari 1, atau dengan kata lain nilai pertumbuhan konsumsi energi diharapkan tidak akan melebihi nilai pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tujuan strategis dalam penyediaan pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan domestik adalah peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi, dimana tingkat elastisitas energi perlu diturunkan terus. Pada tahun 2010 elastisitas energi Indonesia berada pada angka 1,64, dimana ditahun 2014 direncanakan bahwa elastisitas energi berada pada angka 1,48.

Adapun perkembangan elastisitas energi dan target pencapaian sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

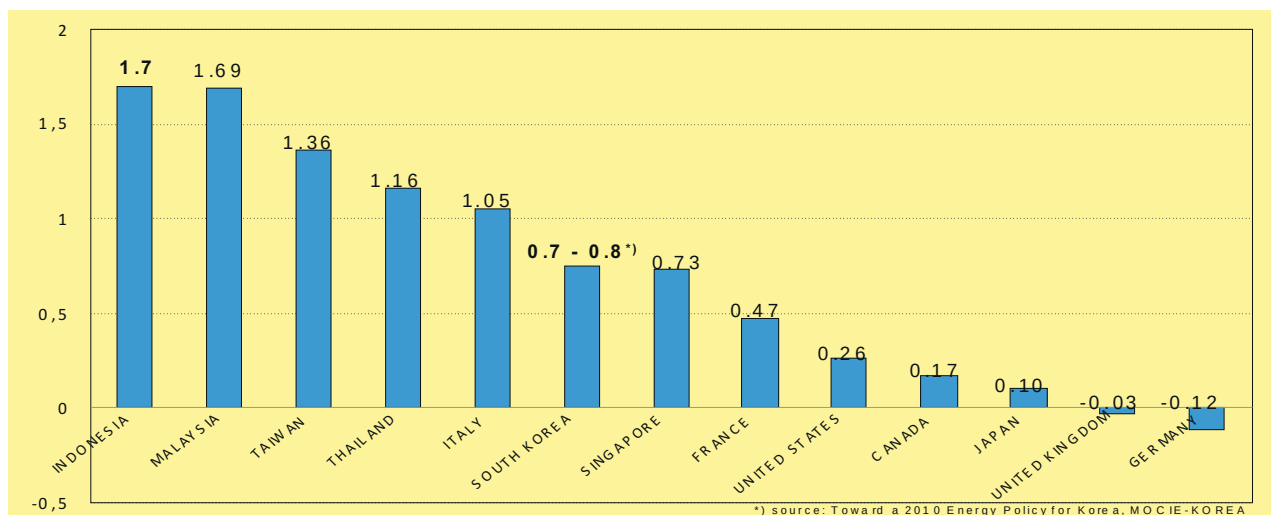
Table 5.18
Realisasi dan Target Elastisitas Energi Tahun 2005-2010

Indikator kinerja	2007	2008	2009	2010	2014
Realisasi Elastisitas Energi	1,12	1,92	1,8	1,8	-
Target Elastisitas Energi	1,72	1,68	1,64	1,64	1,48

Sumber: *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2009*, KESDM

Salah satu indeks yang biasa digunakan untuk mengukur kebutuhan energi terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara adalah Elastisitas Energi, yaitu pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) tertentu. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara produktif. Elastisitas energi di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 1,8. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, maka konsumsi energi Indonesia harus naik rata-rata 1,8%. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 6%, maka diperlukan tambahan penyediaan energi sebesar 11%. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Thailand angka elastisitasnya 1,16, Singapura 1,1. Di negara-negara maju elastisitas ekonomi berkisar antara 0,1% hingga 0,6%. Di Jerman bahkan untuk kurun waktu 1998-2003 angka elastisitasnya -0,12%, artinya kenaikan perkonomian justru menurunkan kebutuhan akan energi.

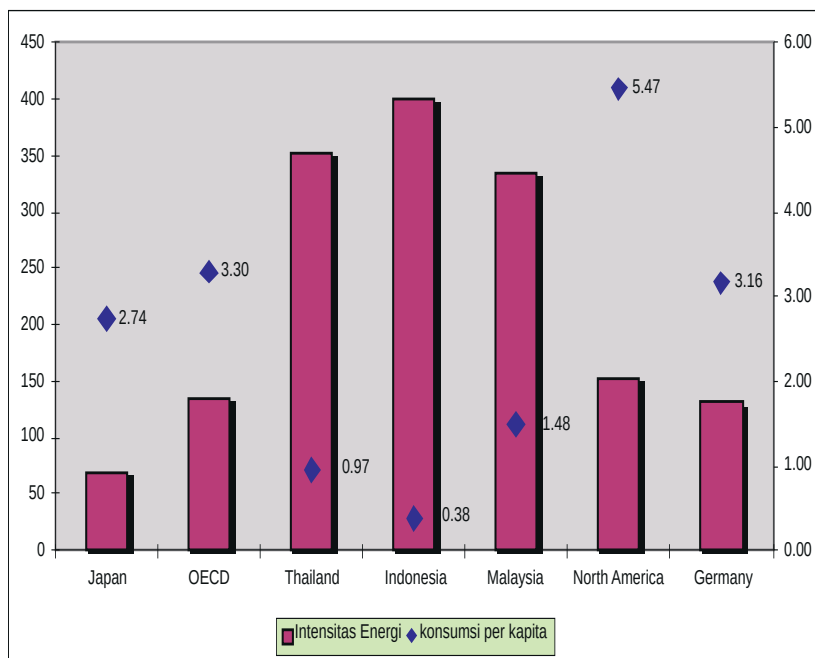
PERBANDINGAN ELASTISITAS ENERGI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN



Grafik 5.15 Perbandingan Elastisitas Energi Indonesia dan Negara Lain

Angka elastisitas di Indonesia masih >1 yang mengindikasikan pemanfaatan energi belum efisien, hal ini ditandai dengan intensitas energi yang tinggi. Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi berbagai hambatan antara lain: budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

Intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan *gross domestic product (GDP)* atau produk domestik bruto. Semakin efisien suatu negara, maka intensitasnya akan semakin kecil. Intensitas energi Indonesia sebesar 401 TOE (*ton-oil-equivalent*) per 1 juta dolar AS. Artinya untuk menghasilkan nilai tambah (GDP) 1 juta dolar AS, Indonesia membutuhkan energi 401 TOE. Sebagai perbandingan, intensitas energi Malaysia 335 TOE/juta dolar AS, dan intensitas energi rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) hanya 136 TOE/juta dolar AS. Intensitas energi dan konsumsi energi per kapita dapat dilihat pada Gambar 5.20.



Grafik 5.16 . Intensitas energi dan konsumsi energi di dunia perkapita

Dalam rangka menurunkan elastisitas energi Kementerian ESDM melakukan kegiatan konservasi energi, sebagai berikut:

a. Gerakan penghematan energi, antara lain melalui:

- Pemberian layanan audit energi kepada industri dan gedung dengan pendanaan APBN melalui Program Kemitraan Konservasi Energi
- Perumusan standar kompetensi manager dan auditor energi di industri dan gedung
- Perumusan prosedur uji untuk labelisasi tingkat hemat energi pada peralatan pemmanfaat energi listrik di rumah tangga
- Sosialisasi hemat energi antara lain dengan menyelenggarakan seminar/workshop, talkshow dan penyebaran brosur/leaflet
- Penyelenggaraan lomba gedung hemat energi dan manajemen energi tingkat nasional serta berpartisipasi dalam *ASEAN Energy Award*
- Penerapan advance teknologi, al. smart building
- Pengaturan Jam Operasi Pusat Pertokoan termasuk Mall

b. Menurunkan susut jaringan dari 11,2% (2008) menjadi 9,95% (2009), serta peningkatan kegiatan penertiban pencurian tenaga listrik (P2TL).

- c. Pengendalian pertumbuhan beban (terutama beban puncak), melalui program penghematan pada pelanggan Industri dan Bisnis di Jawa dan Bali.
- d. Penerapan tarif non subsidi untuk pelanggan mampu (6600 VA keatas).
- e. Sambungan baru dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan ketersediaan daya cadangan;
- f. Program penghematan BBM dengan sistem distribusi tertutup (kartu kendali untuk minyak tanah)
- g. Kampanye pengurangan penggunaan BBM tertentu untuk masyarakat mampu

2. Penurunan emisi CO₂

Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yaitu BBM, gas bumi dan batubara akan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut emisi gas rumah kaca (karbon dioksida (CO₂) di atmosfer akan mengalami peningkatan. Situasi ini menjadi perhatian dunia semenjak dampak dari perubahan emisi gas rumah kaca khususnya CO₂ menjadi pemicu utama kenaikan temperatur bumi yang menyebabkan perubahan iklim global.

Emisi gas rumah kaca dari sektor energi diperkirakan akan meningkat sekitar 7% dari tahun 2006 hingga tahun 2025 sejalan dengan kenaikan konsumsi energi khususnya dari bahan bakar minyak bumi. Penggunaan energi yang bersumber pada energi baru, peningkatan efisiensi energi dan pengembangan teknologi yang bersih terutama dalam menangkap dan penyimpanan karbon akan mengurangi efek gas rumah kaca.

Beberapa potensi program yang bisa mengurangi efek gas rumah kaca antara lain:

- Pengembangan program percepatan pembangkit listrik 10000 MW tahap II yang sebagian besar berasal dari energi baru terbarukan (panas bumi dan tenaga air).
- Penggantian bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati (untuk sektor transportasi)
- Penggantian bahan bakar minyak menjadi CNG (untuk sektor transportasi) seperti penggunaan pada bus
- Pengembangan gas kota
- Promosi lampu hemat energi
- Program konversi minyak tanah ke LPG
- Pengembangan DME dengan menggunakan energi baru terbarukan yang potensial (angin, cahaya matahari, air, dan lain-lain).
- Pengurangan pembakaran gas di *flare stack*.

Tujuan II : Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

Peningkatan jumlah produksi ESDM tidak dapat di lepaskan dari pertumbuhan jumlah investasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjamin ketersediaan energi dan sumber daya mineral secara merata dan berkesinambungan juga dibutuhkan adanya pertumbuhan jumlah investasi.

Kementerian ESDM selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor ESDM. Nilai Investasi sektor ESDM sejak tahun 2005 hingga 2008 terus meningkat sekitar 67% dari US\$ 11,9 miliar menjadi US\$ 19,9 miliar. Sumbangan terbesar investasi sektor ESDM, berasal dari investasi migas dengan porsi sekitar 70% tiap tahunnya. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan akibat penundaan rencana kegiatan investasi di berbagai perusahaan yang antara lain disebabkan oleh akibat tumpang-tindih birokrasi (khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan kendala izin AMDAL yang diterbitkan daerah.

Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral, disebabkan antara lain oleh tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan; lamanya pemberian izin pinjam pakai wilayah hutan; alokasi tanah adat/tanah ulayat, dan belum dicapainya nilai keekonomian harga uap/listrik dalam pengembangan panas bumi.

Di sub sektor ketenagalistrikan, keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil. Penambahan kapasitas pembangkit ini diakibatkan antara lain oleh keterbatasan kemampuan pendanaan ketenagalistrikan baik dari Pemerintah, BUMN, maupun swasta dan rendahnya ketertarikan investor untuk berinvestasi. Keterbatasan pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur dan eksploitasi potensi sektor energi dan sumber daya mineral selama ini diatasi dengan mengoptimalkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi sector ESDM, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 6. Meningkatnya investasi sektor ESDM

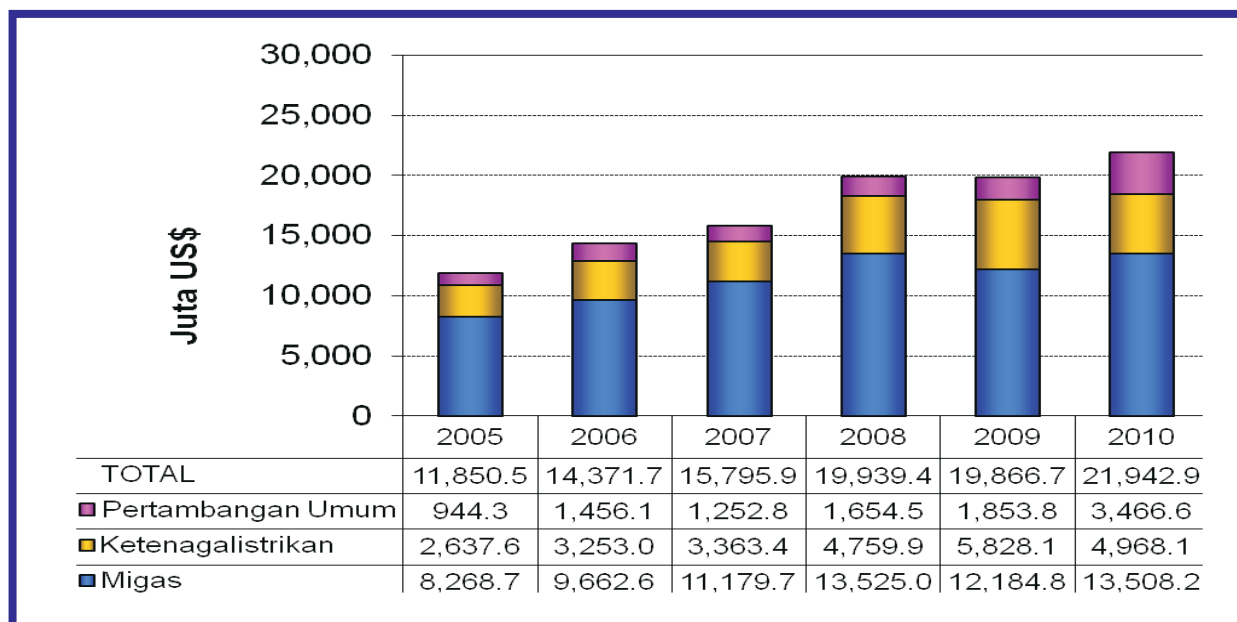
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.19.
Indikator Kinerja Sasaran 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Investasi Sektor ESDM :	US\$ Juta	24.638,3	21.942,8	89%
	• Jumlah Investasi sub sektor migas	US\$ Juta	13.784,8	13.508,2	98%
	• Jumlah Investasi bidang ketenagalistrikan	US\$ Juta	8.733,8	4.968,1	57%
	• Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi)	US\$ Juta	2.502,2	3.467,9	138,6%

Realisasi investasi sektor ESDM pada tahun 2010 ini mencapai US\$ 21.942,8 juta, angka ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar US\$ 24.638,3 juta. Hal tersebut menjadi *lesson learned* bagi Kementerian ESDM untuk peningkatan kinerja kedepan. Namun jika dibandingkan dengan investasi tahun 2009 sebesar US\$ 19,866,7 juta (*year to date*), terdapat peningkatan investasi sebesar 10%.

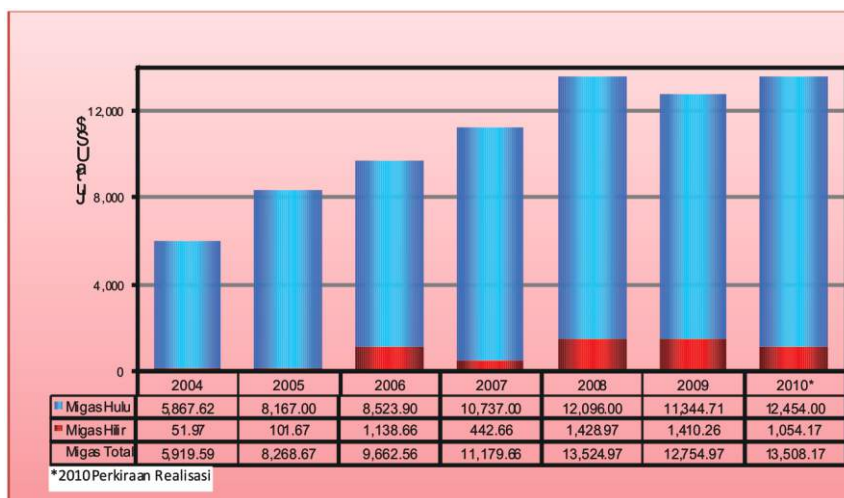
Perkembangan nilai investasi sektor energi dan sumber daya mineral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.17. Nilai Investasi Sektor ESDM

● Investasi sub sektor migas

Nilai investasi pada kegiatan sub sektor migas selama tahun 2004 – 2008 terus meningkat. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan akibat turunnya komitmen investasi dan masalah teknis antara lain : efisiensi pengadaan, penundaan kegiatan pemboran dan penundaan proyek karena belum ada persetujuan selain itu ada kekhawatiran investor terkait kepastian *cost recovery*. Secara eksternal penurunan ini sebagai imbas kelesuan perekonomian dunia saat itu akibat krisis ekonomi negara-negara maju. Pada tahun 2010, realisasi investasi sub sektor migas mencapai US\$ 13,5 miliar, angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar US\$ 13,7 miliar atau sebesar 2%, meskipun tidak mencapai target sebesar, namun investasi sub sektor migas pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10,45% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang sebesar US\$ 19.885,7 Juta.



Grafik 5.18. Investasi Sub Sektor Migas

Tidak tercapainya target investasi sub sektor migas disebabkan karena beberapa proyek hilir yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan seperti :

- Beberapa proyek pengangkutan dan penyimpanan minyak dan gas bumi masih dalam tahap perencanaan (contoh, pembangunan jaringan pipa oleh PGN (Persero) di Duri, Dumai dan Medan yang ditargetkan sebesar 541 juta USD sampai tahun 2011).
- Pembangunan jaringan pipa gas Cepu-Tambak Lorok (Semarang) dan belum terealisasinya pembangunan kilang hasil olahan di Cilegon dan Tangerang.
- Adanya perubahan calon investor dan lokasi untuk pembangunan kilang minyak Banten sehingga dilakukan perencanaan kembali terkait penyelesaian konsep bisnis dengan mitra kerja dan suplai *Utilitas*.

• Investasi sub sektor ketenagalistrikan

Nilai investasi sub sektor ketenagalistrikan pada tahun 2010 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2009, penurunan mencapai 15%, yaitu dari US 5.828,1 Juta di tahun 2009, menjadi US\$ 4.968,1 Juta di tahun 2010. Angka ini juga jauh dari angka yang ditargetkan yaitu sebesar US\$ 8.733,8 Juta, atau capaian kinerja hanya mencapai 57%.

Rendahnya capaian investasi sub sektor ketenagalistrikan ini, disebabkan karena adanya beberapa proyek yang mengalami penjadwalan ulang karena adanya kendala dalam perizinan yang meliputi: lahan, UKL/UPL dan ROW. Hal lain yang menyebabkan rendahnya capaian investasi sub sektor ketenagalistrikan tahun ini adalah tertundanya beberapa proyek akibat *financial closing*.

Perkembangan investasi sub sektor ketenagalistrikan sejak 2004 – 2010, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5.19. Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan

- **Investasi sub sektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi)**

Nilai realisasi investasi pada sub sektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi) pada tahun 2010 mencapai US\$ 3.467,9 Juta, angka ini melampaui dari nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar US\$ 2.502,2 Juta atau mencapai 138,6% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009, nilai investasi sector pertambangan umum tahun ini juga mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai 87% dari US\$ 1853,8 juta (tahun 2009) menjadi US\$ 3.466,6 juta (tahun 2010). Kontribusi investasi berasal dari investasi perusahaan Kontrak Karya (KK) sebesar 46%, perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) 24%, pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 28% dan IUP BUMN sebesar 2%.

Meningkatnya nilai investasi pada sector pertambangan umum ini disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Pengusahaan Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Batubara) melakukan peningkatan tahap kegiatan dari FS (*feasibility study*) ke Konstruksi dan dari Konstruksi ke Produksi.

Tabel 5.20
Data Investasi Sub Sektor Mineral, Batubara Dan Panas Bumi
Tahun 2005-2010

Jenis Investasi (US\$ Juta)	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kontrak Karya	506	778	728	888,0	754,18	1.479
Pkp2b	239	275	294	381,0	769,87	764
Kp Bumh	135	72	158	165,6	61,76	38,3
Usaha Jasa						904,82
Panas Bumi	65	330	172	220	267,98	280.6
TOTAL	945	1.456	1.352	1.655	1.853,79	3.467,9

Untuk meningkatkan investasi dibidang panas bumi, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelelangan WKP di daerah; Evaluasi Pemanfaatan dan Penerapan Kapasitas Lokal (*Local Content*) pada Pengusahaan Panas bumi; Koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka Persiapan *World Geothermal Congress* yang akan dilaksanakan pada bulan April 2010 di Bali; dan Penyusunan prosedur transaksi dan strategi penanganan lapangan eksisting dengan bantuan dana Hibah dari World bank.

Tujuan III: Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan negara

Pada tahun 2008 tercatat sekitar Rp. 349,5 triliun atau 36,3% kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan migas Rp. 304,4 triliun (31,6%), pertambangan umum Rp. 42,7 triliun (4,4%) dan lain-lain Rp. 2,4 triliun (0,3%). Sedangkan Pada tahun 2009, sektor ESDM mencatatkan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 237,37 triliun atau sebesar 24% dari total penerimaan negara (APBN).

Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil terbesar, yakni dengan porsi penerimaan. Pada tahun 2008, komoditi migas merupakan sumber utama bagi penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga minyak. Sejak pertengahan tahun 2008 produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis pakai, mulai menurun.

Namun demikian, seiring dengan optimisme dan kerja keras, meskipun produksi minyak nasional relatif menurun, realisasi penerimaan migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan proporsi produksi migas yang selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi lainnya di sektor ESDM, maka realisasi total penerimaan sektor ESDM juga selalu lebih tinggi dari targetnya.

Penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk dividen dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari perusahaan sektor ESDM terdiri dari PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati.

Jenis-jenis penerimaan yang terangkum dalam Indikator tujuan dari penerimaan negara sektor ESDM berasal dari sub-sektor minyak dan gas, PNPB dari pertambangan umum, kegiatan jasa penelitian dan pengembangan, dari kegiatan di Badan Diklat dan dari BPH Migas.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi sector ESDM, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 7. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

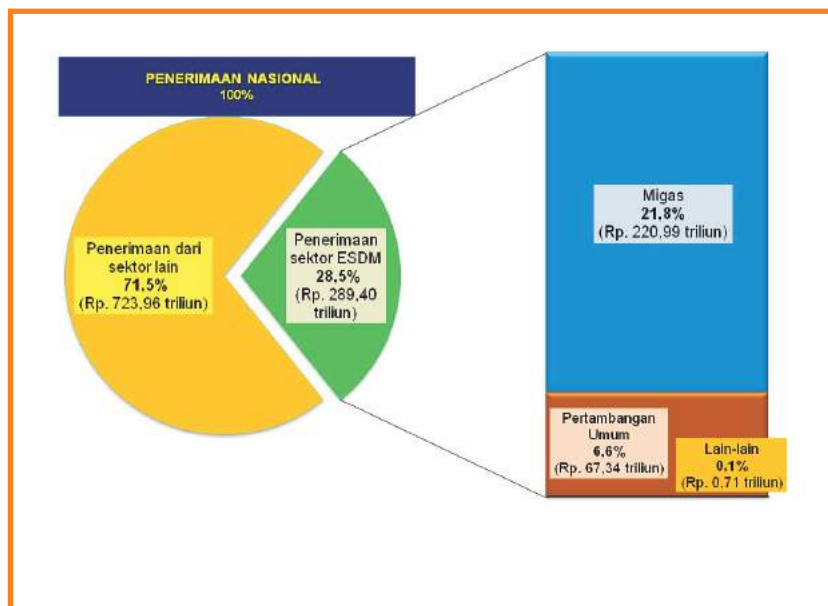
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.21.
Indikator Kinerja Sasaran 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Total Penerimaan Negara Sektor ESDM	Rp Triliun	276,85	289,40	104%
	• Jumlah penerimaan negara sub sektor migas	Rp Triliun	215,02	220,99	103%
	• Jumlah PNB dari subsektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi)	Rp Triliun	61,44	66,83	109%
	• Jumlah Penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)	Rp Triliun	629,6	711,9	113%

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka realisasi penerimaan negara Sektor ESDM tahun 2010 sebesar Rp 289,04 triliun ini lebih besar dari rencana atau target yang ditetapkan pada APBN tahun 2010 yaitu sebesar Rp 276,85 triliun atau capaian kinerjanya sebesar 104%. Angka penerimaan negara ini cukup memuaskan, karena disamping melampaui target yang ditetapkan juga mengalami peningkatan dari penerimaan negara tahun 2009 yang cukup signifikan yaitu dari Rp 238,2 Triliun di tahun 2009 menjadi sebesar Rp 288,5 Triliun di tahun 2010 atau sebesar 21,22%. Gambar 5.9. Penerimaan Negara

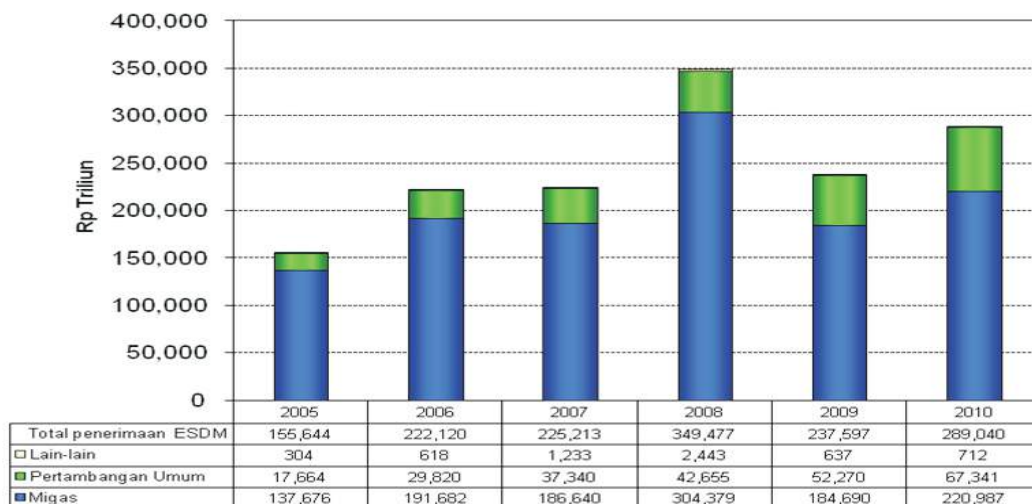
Kontribusi terbesar masih dari penerimaan migas sekitar Rp. 220 triliun, disusul dengan penerimaan sub sektor pertambangan umum (mineral dan batubara dan panas bumi) sebesar Rp. 67,3 triliun, dan kemudian penerimaan lainnya (Balitbang, Badiklat, BPH Migas) Rp. 711,99 miliar. Selanjutnya peran atau kontribusi penerimaan Negara Tahun 2010 sektor ESDM terhadap APBN dapat digambarkan dalam gambar 5.24 disamping.



Gambar 5.9. Penerimaan Negara

Secara rinci, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa trend realisasi penerimaan sektor ESDM dalam 6 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Hal ini merupakan bukti tentang peran sektor ESDM dalam penerimaan APBN.

PENERIMAAN SEKTOR ESDM

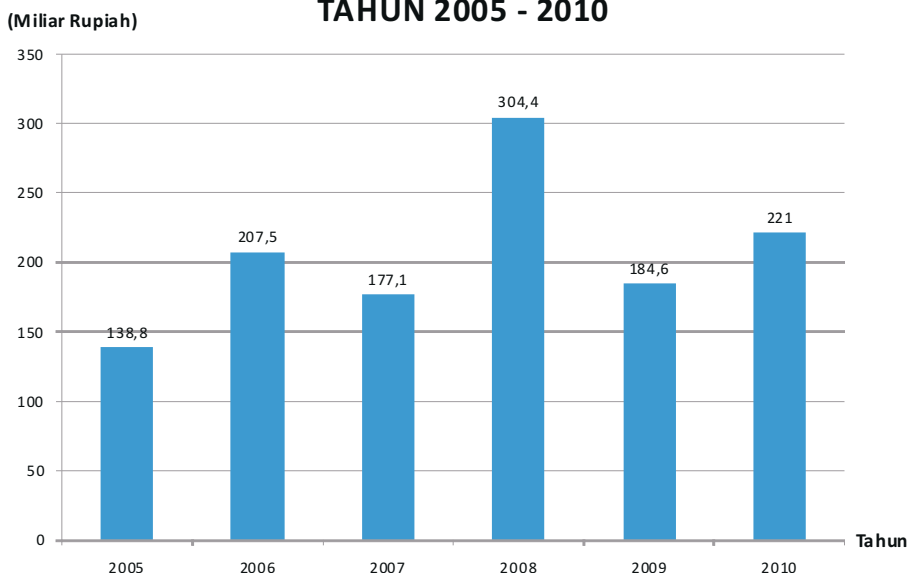


● Penerimaan negara sub sector migas

Sejalan dengan perkembangan lifting minyak mentah dan harga minyak mentah Indonesia Harga rata-rata minyak mentah Indonesia tahun 2010 yang mengalami kenaikan di tahun 2010 ini (harga minyak mentah sebesar US\$ 79,40/ barel; dan lifting minyak mentah sebesar 954 ribu BOPD), maka akan berdampak pada penerimaan negara dari minyak dan gas bumi yang juga mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2010 ini jika dibandingkan tahun 2009.

Realisasi penerimaan negara sub sector migas pada tahun 2010 mencapai Rp. 220,99 triliun, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 36,39 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai Rp. 184,60 triliun atau naik sebesar 19,7%. Grafik 5.21. Penerimaan sub sektor Migas Demikian juga bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka realisasi penerimaan Negara sub sector migas pada tahun 2010 dapat melebihi targetnya, yaitu dari target sebesar Rp 215,02 Triliun, terealisasi sebesar Rp. 220,99 triliun atau 103%.

REALISASI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2005 - 2010



Grafik 5.21. Penerimaan sub sektor Migas

- **Penerimaan Negara Sub Sektor Pertambangan Umum (Mineral Batubara dan Panas Bumi)**

Salah satu peran penting bagi pembangunan nasional, sub sektor mineral batubara dan panas bumi memberikan kontribusi sumbangan penerimaan negara langsung yang terdiri dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Penerimaan Negara dari sub sektor mineral, batubara dan panas bumi pada TA 2010 mencapai Rp 66,83 Trilyun. Angka ini melebihi target APBN-P 2010 yaitu sebesar Rp 61.44 Trilyun, dengan demikian capaian kinerja mencapai 109%.

Selain mencapai target yang telah ditetapkan, penerimaan Negara sub sektor pertambangan umum tahun 2010 juga mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari sebesar Rp 52,82 Triliun pada tahun 2009 dan sebesar Rp 67,34 Triliun di tahun 2010, atau peningkatan mencapai 24,5%. Jika dibandingkan dengan total penerimaan Negara sector ESDM, sub sektor pertambangan umum ini memberikan kontribusi sebesar 23% dari total penerimaan sektor ESDM yang sebesar 286 triliun rupiah.

Secara rinci penerimaan Negara sub sector pertambangan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.22.
REALISASI PENERIMAAN NEGARA MINERBA
TAHUN 2010

URAIAN	JUMLAH
Pajak	48,04
Bukan Pajak	18,79
- Deadrent	0,16
- Royalti	13,74
- Penjualan Hasil Tambang	4,88
JUMLAH	66,83

Pencapaian penerimaan negara yang melebihi target ini merupakan kontribusi dari inventarisasi Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan kewajiban keuangan KP berupa royalti dan iuran tetap (deadrent) yang harus dibayar kepada Pemerintah dan beberapa KP yang membayarkan kewajibannya (royalti dan iuran tetap) pada tahun-tahun sebelumnya namun baru disetorkan tahun 2010 sehingga dihitung menjadi PNBP pada tahun 2010.

- **Penerimaan Negara Sub Sector Lainnya**

Selain penerimaan negara dari sub sektor migas dan pertambangan umum, KESDM juga menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak dari sub sektor lainnya yaitu dari hasil kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan dan hasil kegiatan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan ESDM serta dari Badan Pelaksana Hilir Migas (BPH Migas) yang pada tahun 2010 ini terealisasi sebesar 711,9 Miliar dari target sebesar Rp 629,6 Miliar atau 113%. Seperti halnya sub sector migas dan pertambangan umum, penerimaan Negara dari sector lainnya pada tahun 2010 ini juga mengalami peningkatan penerimaan bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari Rp 636,63 Miliar di tahun 2009 meningkat menjadi Rp 711,99 Miliar pada tahun 2010 atau sebesar 21%.

Tujuan IV: Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Disamping sebagai kontributor penting terhadap penerimaan nasional, sektor ESDM juga turut mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan *community development* (comdev) dan *corporate social responsibility* (CSR), listrik perdesaan, program Desa Mandiri Energi (DME) dan penyediaan air bersih (pemboran air tanah).

Melalui program penyediaan listrik perdesaan telah dibangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah.

Program penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN. Sejak tahun 1995 hingga sekarang setidaknya telah diperuntukkan bagi lebih dari satu juta jiwa.

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan program nasional sebagai terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Program DME dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi energi setempat. Program DME terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan DME berbasis non-BBN. DME berbasis BBN antara lain berbasis jarak pagar, kelapa sawit, singkong shorgum, tebu, dan nyamplung. Sedangkan DME berbasis non-BBN antara lain berbasis mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya dan biomassa. Sampai dengan tahun 2009 direncanakan terdapat 2000 DME, meliputi 1000 DME berbasis BBN dan 1000 DME berbasis non-BBN.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 8. Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.23.
Indikator Kinerja sasaran 8

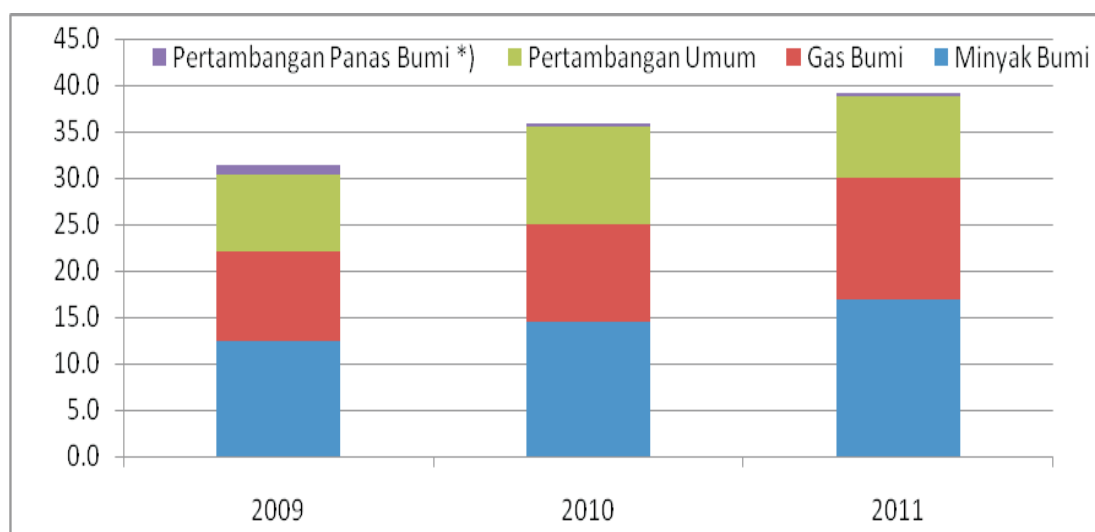
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah dana bagi hasil sector ESDM	Rp Triliun	38.9	35.8	92.2%
	• Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum	Rp Triliun	9.9	10,73	108.4%
	• Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas	Rp Triliun	29	25,1	86.6%
2.	Jumlah CSR sector ESDM	Rp Miliar	1.614	1.467,5	90.9%

	• Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum	Rp Miliar	1.308,2	952,2	72.8%
	• Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	Rp Miliar	90.3	90.3	100%
	• Jumlah CSR subsektor Migas	Rp Miliar	215.5	425	197.2%
3.	Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik	Kms/MVA	2.694/45,17	2.694/45,17	100%
4.	Jumlah desa mandiri energi (DME)	DME	50	50	100%
5.	Jumlah sumur bor daerah sulit air	Titik Bor	100	100	100%

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2010, Dana Bagi Hasil (DBH) sector ESDM yang diserahkan adalah sebesar Rp 35,8 Triliun atau 92,2% dari target sebesar Rp 38,9 Triliun. Meskipun tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan DBH sector ESDM tahun 2009, realisasi DBH tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 13,9%, yaitu dari Rp 31,5 Triliun (2009) menjadi Rp 35,8 Triliun (2010). Dana Bagi Hasil Sector ESDM ini terdiri dari DBH minyak bumi Rp. 14.6 Triliun, gas bumi Rp.10,5 Triliun dan pertambangan umum Rp.10.53 Triliun serta dari pertambangan panas bumi sebesar Rp.0,20 Triliun. Perbandingan DBH tahun 2009 dan tahun 2010 serta rencana 2011, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

DANA BAGI HASIL TAHUN 2009 - 2010



Grafik 5.22. Dana Bagi Hasil Sektor ESDM

Besarnya DBH sektor ESDM selaras dengan penerimaan sektor ESDM. Kenaikan DBH dari tahun 2005 sampai dengan 2009 menunjukkan kenaikan sampai 53% yang merupakan peningkatan peran sektor ESDM dalam mendukung pembangunan daerah.

- **Dana Bagi Hasil sub sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi**

Pada sub sector Mineral, Batubara dan Panas Bumi, realisasi DBH di tahun 2010 ini mencapai Rp 10,73 Triliun dari target sebesar Rp 9,9 Triliun atau capaian kinerja sebesar 108,4%. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, realisasi DBH sub sector minerba pabum tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 15,4%.

Secara rinci DBH sub sector Minerba pabum, tahun dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.24.
Dana Bagi hasil Sub Sector Mineral Batubara

Sub Sektor	2009	2010	
		Rencana	Realisasi
Pertambangan umum (mineral dan Batubara)	8.2	9.7	10.53
Pertambangan Panas Bumi	1.1	0.2	0.20
TOTAL	9.3	9.9	10.73

- **Dana bagi hasil sub sektor Minyak dan Gas Bumi**

Sesuai amanat undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU No. 33/2004), daerah memperoleh dana bagi hasil sumber daya alam dari minyak dan gas bumi dengan rumusan sbb:

Minyak Bumi

- o penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan dibagi dengan imbalan: 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah.
- o bagian daerah adalah sebesar 15% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 3% untuk provinsi yang bersangkutan; 6% (enam persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; adapun sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Gas Bumi

- o Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan dibagi dengan imbalan: 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah

- o Bagian daerah adalah sebesar 30% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 6% untuk provinsi yang bersangkutan; 12% untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; adapun sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
- o Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri ESDM 60 hari sebelum tahun anggaran berjalan, berdasarkan asumsi APBN untuk tahun berikutnya dengan memuat rincian lifting per daerah penghasil.
- o Perhitungan realisasi dana bagi hasil SDA Migas dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Perhitungan dilakukan oleh KESDM dengan melibatkan BP Migas, Kemkeu, daerah penghasil (dinas energi dan dinas pendapatan), dan kontraktor kontrak kerjasama.
- o Penyaluran DBH SDA Migas dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan.

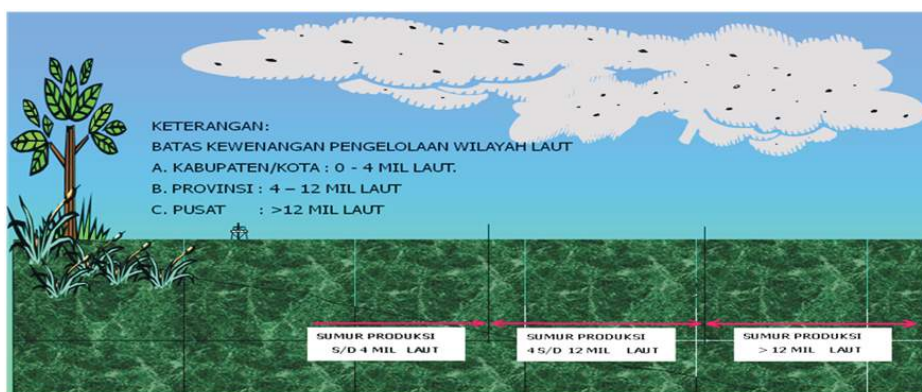
Pada tahun 2010, realisasi Dana Bagi hasil Sub Sector Migas sebesar Rp 25,1 Triliun, dimana angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29 Triliun, atau mencapai 86,6%. Namun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2009, realisasi penerimaan DBH tahun 2010 masih lebih tinggi atau mengalami peningkatan sebesar 13,06%.

Perbandingan DBH Sub sector Migas Tahun 2009 dan 2010 serta rencana 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.25.
Dana Bagi Hasil Sub Sektor Migas

Komoditi	2009	2010		Rencana 2011
		Rencana	Realisasi	
Minyak bumi	12.4	17.1	14.6	17.0
Gas bumi	9.8	11.9	10.5	13.1
TOTAL	22.2	29.0	25.1	30.1

DAERAH PENGHASIL MIGAS



Gambar 5.10. Daerah Penghasil Migas

sedangkan perkembangan Penerimaan dan DBH Sub sector Migas sejak Tahun 2004 sampai dengan 2009, secara rinci seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.26.
PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAN DBH SDA MIGAS
2004-2009

Dalam Rp. Juta

TAHUN	PPH			PNBP			DANA BAGI HASIL		
	MINYAK BUMI	GAS BUMI	MIGAS	MINYAK BUMI	GAS BUMI	MIGAS	MINYAK BUMI	GAS BUMI	MIGAS
2004	8,041,040.00	14,905,570.00	22,946,610.00	58,956,288.39	20,425,552.29	79,381,840.68	8,122,970.00	7,640,268.52	15,763,238.52
2005	10,972,290.00	24,003,700.00	34,975,990.00	84,855,823.39	30,172,210.58	115,028,033.97	13,197,750.00	10,596,800.00	23,794,550.00
2006	14,619,040.00	28,518,370.00	43,137,410.00	104,570,253.35	30,877,441.01	135,447,694.36	15,792,836.31	10,425,308.62	26,218,144.93
2007	16,289,860.00	27,257,830.00	43,547,690.00	92,226,989.91	33,430,185.28	125,657,175.19	13,721,089.03	11,226,345.57	24,947,434.59
2008	29,634,966.00	47,383,950.00	77,018,916.00	176,472,768.66	60,721,643.31	237,194,411.97	24,561,710.00	18,128,400.00	42,690,110.00
2009	18,360,480.07	31,683,194.17	50,043,674.24	83,230,202.04	34,190,174.55	117,420,376.59	12,737,100.00	10,214,620.00	22,951,720.00

2. Corporate Social Responsibility (CSR) Sektor ESDM

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, CSR juga merupakan salah satu kewajiban bagi organisasi khususnya perusahaan. Perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Secara umum, CSR dilakukan antara lain berdasarkan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, disamping UU lainnya seperti UU sektoral. Untuk sektor ESDM dasar hukum sektoral antara lain UU Migas, UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pelaksananya.

Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain kewajiban CSR, terdapat kewajiban lainnya yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Di dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa besarnya Program Kemitram (PK) yaitu max 2% dari penyisihan laba setelah pajak. Sedangkan besarnya program Bina Lingkungan (BL) yaitu BL max 2% dari penyisihan laba setelah pajak.

Perbedaan PKBL dan CSR, yaitu: PKBL mengacu pada Permen BUMN No. 05 tahun 2001 dan CSR mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana besarnya tidak secara spesifik disebutkan pada UU tersebut. Terkait dengan sumber dananya, PKBL bersumber dari profit sedangkan CSR bersumber dari operational budget. Sedangkan dari sisi pelaporan, PKBL dilaporkan kepada Menteri BUMN sedangkan CSR dilaporkan ke Presiden Director dan CEO.

Pengembangan Masyarakat atau *Community Development* (Comdev) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sektor ESDM yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat sebagai berikut:

Comdev dan CSR sektor ESDM pada tahun 2010 menggunakan dana sebesar Rp1.5 triliun yang merupakan peningkatan 12% dari dana yang dipergunakan tahun 2009 sebesar Rp. 1,3 triliun. Dana Comdev dan CSR ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan perhatian yang berkelanjutan terhadap pengembangan kehidupan masyarakat.

Secara rinci, table di bawah ini memperlihatkan perbandingan penggunaan dana Comdev dan CSR pada tahun 2009 dan 2010.

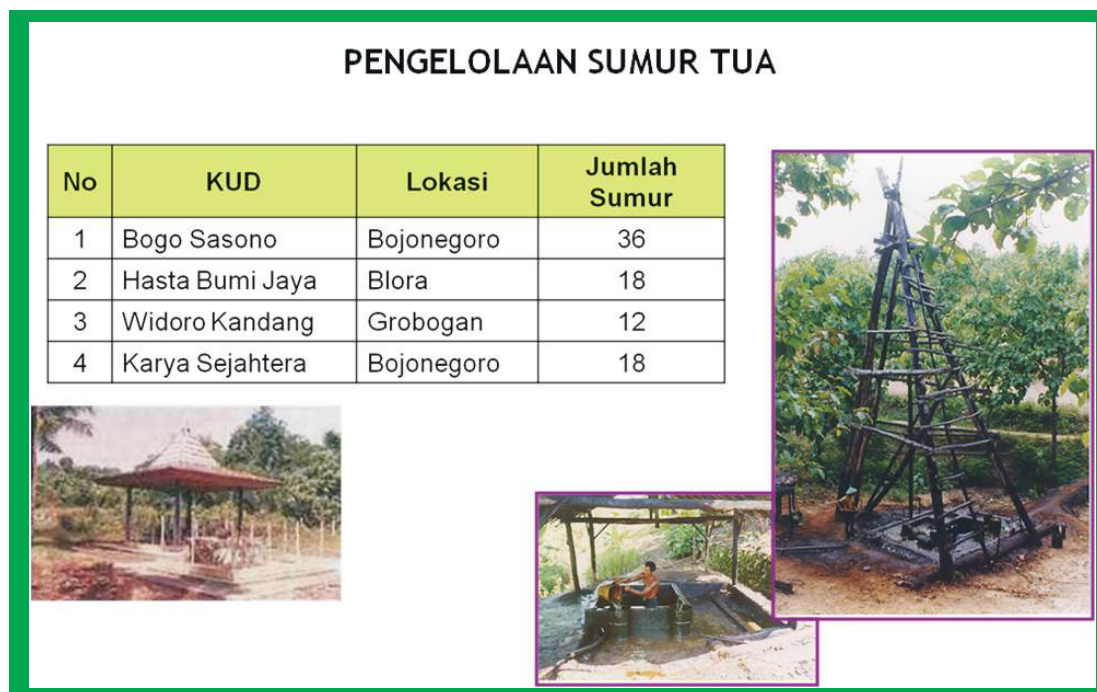
Tabel 5.27
Penggunaan Dana Comcev dan CSR Sektor ESDM

No.	Perusahaan	2009 (Rp Miliar)	2010 (Rp Miliar)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perusahaan Migas	215.5	215.5	425.0	197.2
2.	Perusahaan Listrik	94.0	90.3	90.3	100
3.	Perusahaan Pertambangan Umum	1,002.4	1,308.2	952.2	72.8
TOTAL		1,311.9	1,614	1,467.5	90.9

- **Corporate Social Responsibility (CSR) Subsektor Minyak dan Gas Bumi**

Realisasi CSR subsektor Migas pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 425 Milyar, angka ini meningkat cukup drastis dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009 sebesar Rp 215 Milyar atau meningkat sebesar 98%.

Dana CSR sebesar Rp 425 Milyar ini digunakan untuk kerjasama PT Pertamina dengan KUD dalam pengelolaan sumur tua; Program Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga, transportasi dan usaha kecil; Pengembangan industri penunjang migas dalam negeri; dan Bagi hasil daerah penghasil minyak dan gas bumi. Gambar 5.11. Pengelolaan Sumur Tua



Gambar 5.11. Pengelolaan Sumur Tua

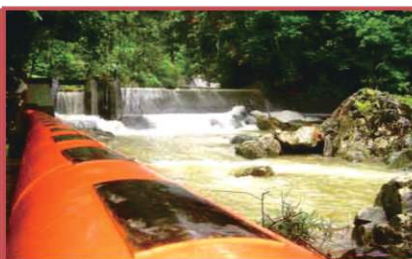
- **Corporate Social Responsibility (CSR) Sub Sektor Kelistrikan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)**

Penggunaan dana CSR di Sub Sektor Kelistrikan dan pengembangan EBT pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 90,3 Milyar, dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009 Dana CSR untuk Sub Sektor kelistrikan mengalami sedikit penurunan sebesar 4% yaitu dari Rp 94 Milyar ditahun 2009 menjadi Rp 90,3 Milyar di tahun 2010.

Dana CSR ini digunakan untuk pembangunan Listrik Pedesaan (PLTS, PLTB, PLTMH); Memberikan kesempatan kepada UKM untuk pembangkitan energi terbarukan dengan kapasitas 1 MW (Skala kecil) dan 1-10 MW (Skala menengah); membangun Desa Mandiri Energi (DME); dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati; serta Pengembangan Biomassa.

Tabel 5.28.
Pembangunan Listrik Pedesaan

No	Jenis Pembangkit	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009
1	PLTMH	kW	314	714	269	1.909	1.178
2	PLTS	kWp	1.690	1.550	2.029	1.864	3.872
3	PLTS Terpusat	kWp	0	-	102	240	-
4	PLTB	kW	80	160	735	202	-
5	Gardu Distribusi	Unit/kVA	828 / 23.025	1.093/ 141.515	938/ 46.607	863/ 45.220	1.355/ 69.820
6	Jaringan Tegangan Menengah	kms	1.150	1.279	1.249	1.100	2.388
7	Jaringan Tegangan Rendah	kms	1.470	1.640	1.475	1.325	2.570



Gambar 5.12. Kegiatan CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan

- **Corporate Social Responsibility (CSR) Sub Sektor Mineral dan batubara dan air tanah**

Pada tahun 2010 ini, realisasi penggunaan dana CSR pada sub sector mineral, batubara, dan air tanah adalah sebesar Rp 952 Milyar atau hanya 72,8% bila dibandingkan dengan target sebesar 1.308,2 Milyar. Realisasi tahun 2010 ini juga lebih rendah dari realisasi di tahun 2009 sebesar Rp 1.002,4 Milyar, atau terjadi penurunan sebesar 5%. Dana CSR ini digunakan untuk kegiatan bagi hasil daerah penghasil pertambangan umum; Pengelolaan air tanah; dan Pengembangan briket batubara dan mineral.

PETA LOKASI PABRIK BRIKET BATUBARA



Nama/Lokasi Pabrik	Kap. Produksi	Nama/Lokasi Pabrik	Ren. Kap. Produksi
<u>Pabrik Briket yang Produksi</u>		<u>Pabrik Briket belum Produksi</u>	
1.. PTBA Tanjung Enim (Hashimoto)	12.000 ton/tahun	1. Solok, Sumatera Barat	1.500 ton/tahun
2. PTBA Tarahan Lampung	8.000 ton/tahun	2. Pangkal Pinang, Bangka Belitung	1.500 ton/tahun
3. PD. Bengkulu Mandiri, Bengkulu	1.500 ton/tahun	3. Bantul, Jawa Tengah	1.500 ton/tahun
4. PUSKUDINDO, Bengkulu	300 ton/tahun	4. Lumajang, Jawa Timur	1.500 ton/tahun
5. Kop. Purna Praja Wibawa Mukti, Garut	1.500 ton/tahun	5. Pasir, Kalimantan Timur	1.500 ton/tahun
6. Bio Coal Tekmira, Cirebon	10.000 ton/tahun	6. Banjarbaru, Kalimantan Selatan	1.500 ton/tahun
7. CV. Sinar Teknik Utama, Tegal	1.500 ton/tahun	7. Takalar, Sulawesi Selatan	1.500 ton/tahun
8. PTBA, Gresik Jatim	70.000 ton/tahun		

3. Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik.

Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lises), yaitu melalui pembangunan Gardu Distribusi dan Jaringan Distribusi. Pada tahun 2010, realisasi pembangunan gardu distribusi tercapai sesuai dengan target yaitu 45,17 MVA atau 100%. Namun angka ini mengalami penurunan cukup drastis bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009, yaitu mencapai 40%.

Demikian pula dengan pembangunan jaringan distribusi, di tahun 2010 realisasi mencapai target, yaitu sebesar 2.694 Kms atau 100%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 mengalami penurunan yaitu dari 4.723 Kms di tahun 2009 menjadi 2.694 Kms di tahun 2010 atau menurun sebesar 43%.

Secara rinci target dan realisasi pembangunan gardu dan jaringan distribusi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.29.
Pembangunan Gardu Dan Jaringan Distribusi

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2009	2010		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Gardu Distribusi	MVA	76,17	45,17	45,17	100%
2. Jaringan Distribusi	Kms	4.723	2.694,00	2.694,00	100%

Program Listrik Perdesaan beragam jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Program ini dari tahun ke tahun cenderung terus ditingkatkan baik dari segi volume maupun intensitasnya, sebagai salah satu wujud nyata dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

Melalui program penyediaan listrik perdesaan juga telah dibangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah.

Rincian kenaikan penggunaan energi baru dan terbarukan perjenis untuk Listrik Perdesaan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 5.30.
KAPASITAS TERPASANG ENERGI ALTERNATIF

URAIAN	SATUAN	2008	2009	2010
a. Panas Bumi	MW	1.052,0	1.189,0	1.130
b. Tenaga Air	MW	4.200,0	4.200,0	3.696
c. PLTS	MW	14,1	18,3	0
d. PLT Bayu	MW	1,4	1,4	1,06
e. PLTMH & Pikohydro	kW	86,1	87,8	379

4. Desa Mandiri Energi

Desa Mandiri Energi (DME) merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan non-BBN. DME berbasis BBN menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa sawit, singkong dan tebu. Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi setempat yaitu mikrohidro, angin, surya dan biomassa. Pemenuhan kebutuhan sumber energi mandiri bagi desa-desa di Nusantara terus ditingkatkan agar program ini memberikan manfaat langsung berupa kemandirian energi melalui pemberdayaan potensi daerah.

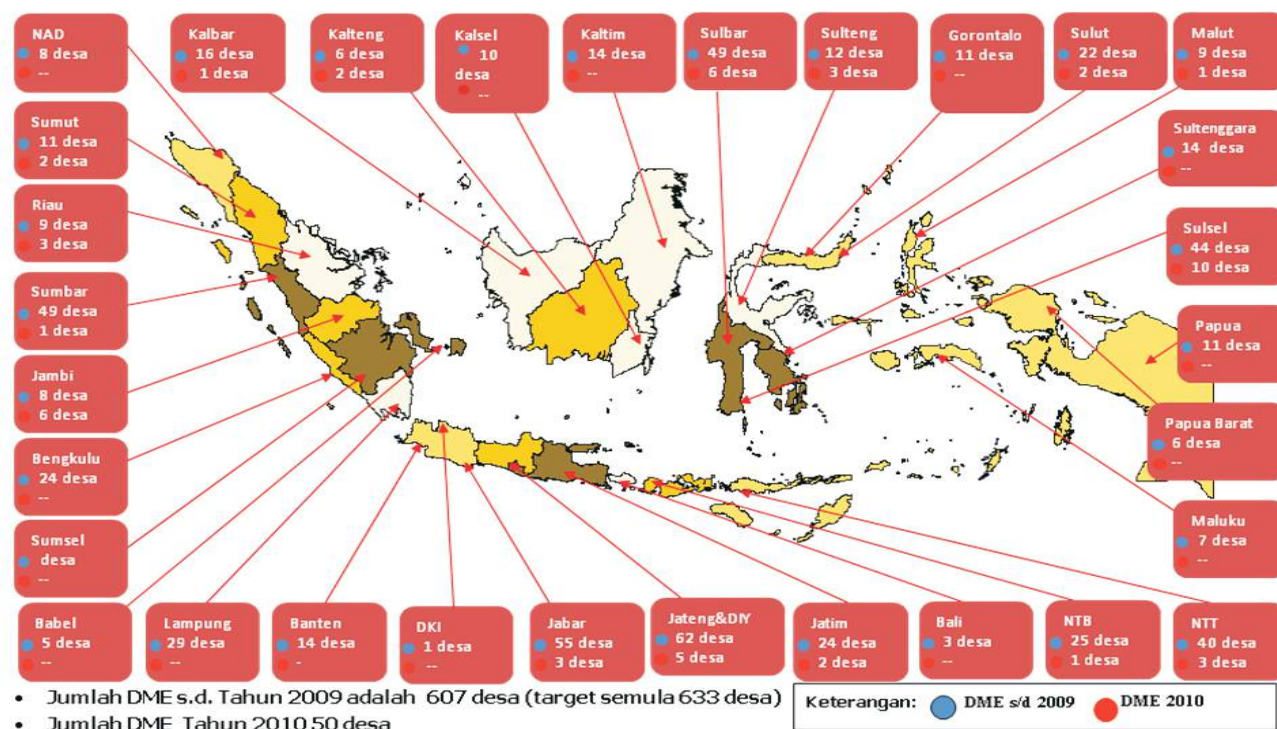


Gambar 5.14. Desa Mandiri Energi

Sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2010, sebanyak 50 DME telah berhasil diwujudkan dengan memanfaatkan potensi daerah, sehingga sampai dengan tahun 2010 ini, total seluruh desa dengan sumber energi mandiri telah terwujud sebanyak 633 desa, dimana sebanyak 396 desa adalah DME berbasis Non-BBN dan 237 desa berbasis BBN.

**Table 5.31
Desa Mandiri Energi**

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2009	2010				KUMULATIF SAMPAI DENGAN 2010
			RENCANA	REALISASI	CAPAIAN	RASIO 2010 TERHADAP 2009	
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/3	8
a.	Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN	62	34	34	100%	55%	396
b.	Desa Mandiri Energi berbasis BBN	28	16	16	100%	57%	237
TOTAL		90	50	50	100%	56%	633



Gambar 5.15. Peta Sebaran Desa Mandiri Energi

5. Jumlah sumur bor daerah sulit air.

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan air tanah di daerah sangat sulit air diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air minum dan air baku penduduk di desa tertinggal atau desa miskin. Hal ini diharapkan akan memicu rangkaian dampak positif, secara sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kegiatan penyediaan air bersih tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN dari tahun anggaran 1995/1996. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini.

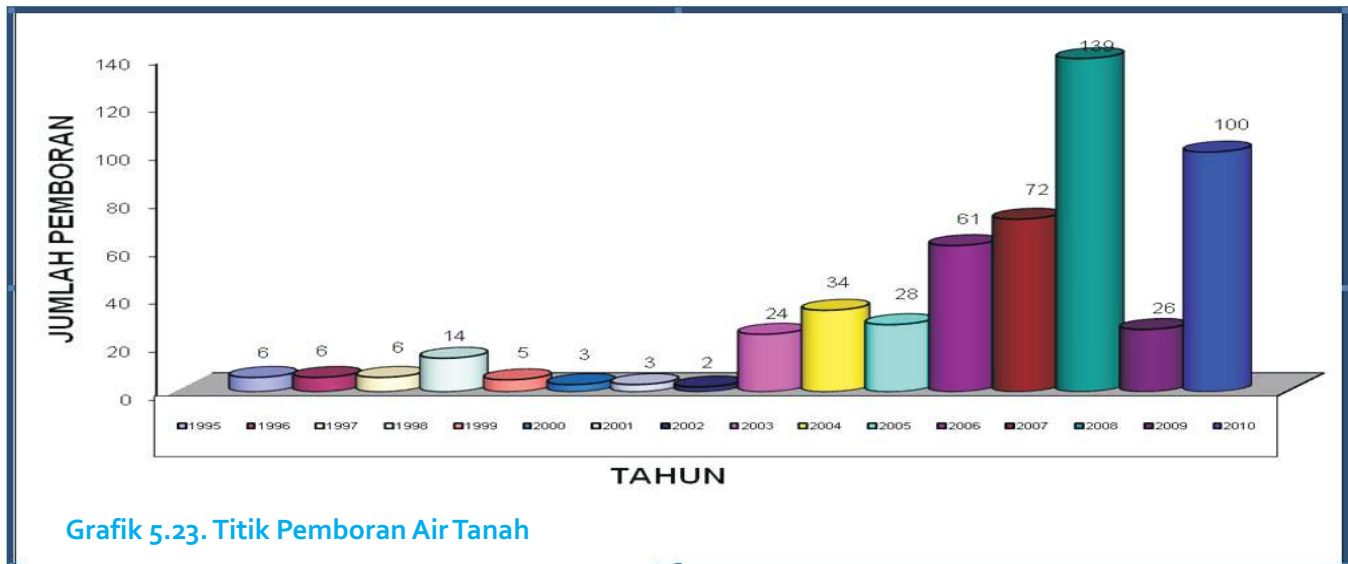
Pada tahun 2010 Kementerian ESDM berhasil melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 100 titik bor yang diperuntukan bagi 216.000 jiwa telah berhasil diwujudkan, seperti yang terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 5.32
Jumlah Lokasi Pengeboran Air Tanah

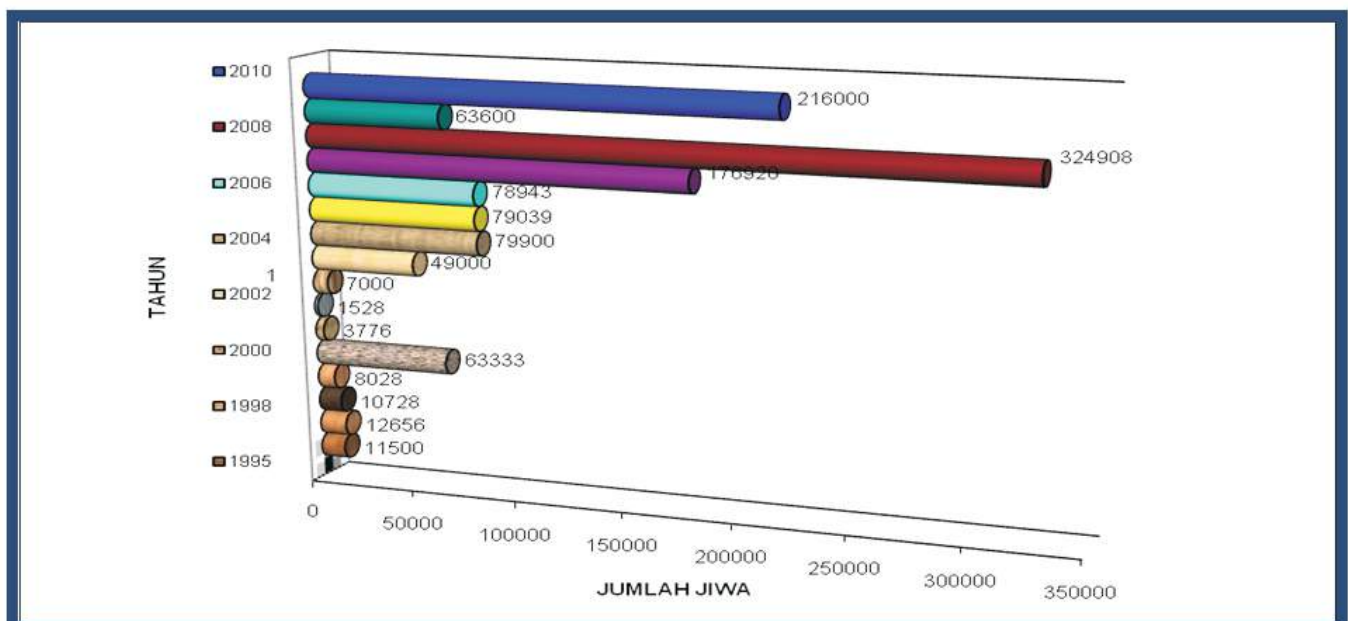
Uraian	Satuan	2009	2010		
			Rencana	Realisasi	Kumulatif s.d. 2010
Jumlah lokasi	Lokasi	26	100	100	533
Jumlah peruntukan	Jiwa	62,800	216,000	216,000	1,167,113

Perkembangan jumlah titik bor sejak tahun 1995 hingga tahun 2010, terlihat pada grafik dibawah ini.

JUMLAH TITIK PEMBORAN AIR TANAH



JUMLAH MASYARAKAT YANG DAPAT MENIKMATI AIR BERSIH



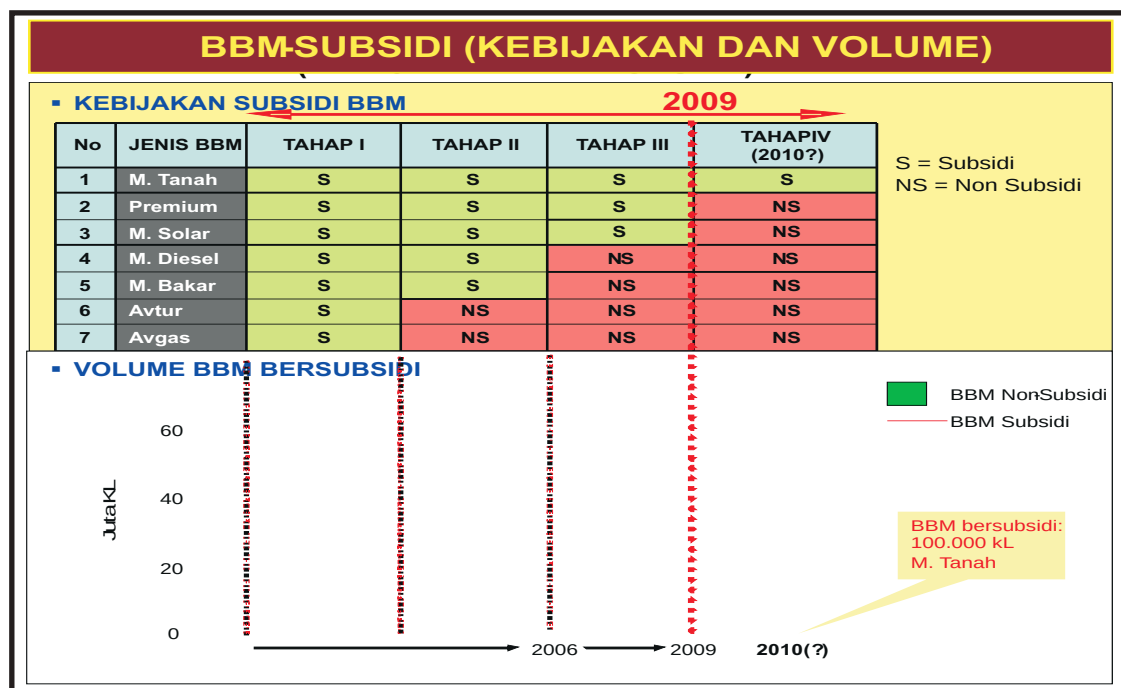
Tujuan V : Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Subsidi energi yang terdiri dari subsidi untuk BBM/LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian. Besarnya subsidi BBM/LPG bervariasi tiap tahunnya, tergantung dari kuantitas konsumsi dan fluktuasi harga minyak. Adapun subsidi untuk LPG dimulai saat diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007.

Terkait dengan subsidi LPG, sampai dengan bulan Juli 2010 telah dibagikan sebanyak 45,6 juta paket perdana kepada rumah tangga dan usaha mikro. Sampai dengan akhir 2010, telah diprogramkan untuk membagikan sebanyak 52,9 juta paket perdana. Sedangkan untuk tahun 2011 direncanakan akan didistribusikan sebanyak 3,82 juta paket perdana.

Kebijakan subsidi BBM dilaksanakan secara bertahap, dimana saat ini jumlah dan jenis BBM yang disubsidi semakin sedikit yaitu minyak tanah, bensin, premium, dan solar. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG. Selain itu, pengawasan peruntukan minyak tanah terus membaik dengan adanya kartu kendali minyak tanah. Adapun dalam rangka jaminan pasokan BBM, untuk wilayah yang telah dilakukan konversi minyak tanah ke LPG, minyak tanah tetap dijual dengan harga keekonomian. Grafik 5.25. Kebijakan dan Volume BBM bersubsidi. Di sub sektor ketenaga-listrikan, dilaksanakan pengelompokan pelanggan dimana untuk pelanggan kelompok Sosial (S-1 sampai dengan S-3), Rumah Tangga (R-1 dan R-2), Bisnis (B-1 sampai dengan B-3), Industri (I-1 sampai dengan I-4), Pemerintah (P-1 dan P-2), berlaku harga jual di bawah harga Biaya Pokok Produksi (BPP), artinya hampir seluruh pelanggan listrik masih mendapatkan subsidi.

Dalam rangka mengurangi beban subsidi BBM dan Listrik, ditetapkan 1 (satu) sasaran dalam tahun 2010, yaitu sebagai berikut:



Grafik 5.25. Kebijakan dan Volume BBM bersubsidi

Sasaran 9. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.33.
Indikator Sasaran 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah subsidi BBM dan LPG	Rp Triliun	88,89	82,35	107,4%
2.	Jumlah subsidi Listrik	Rp Triliun	55,11	62,81	86.0%

Salah satu hasil akhir yang ingin dicapai oleh Kementerian ESDM adalah berkurangnya subsidi BBM dan listrik guna mengurangi beban APBN. Secara rinci, tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi subsidi energi tahun 2009 dengan tahun 2010.

Tabel 5.34.
Perbandingan Realisasi Subsidi Energy Tahun 2009-2010

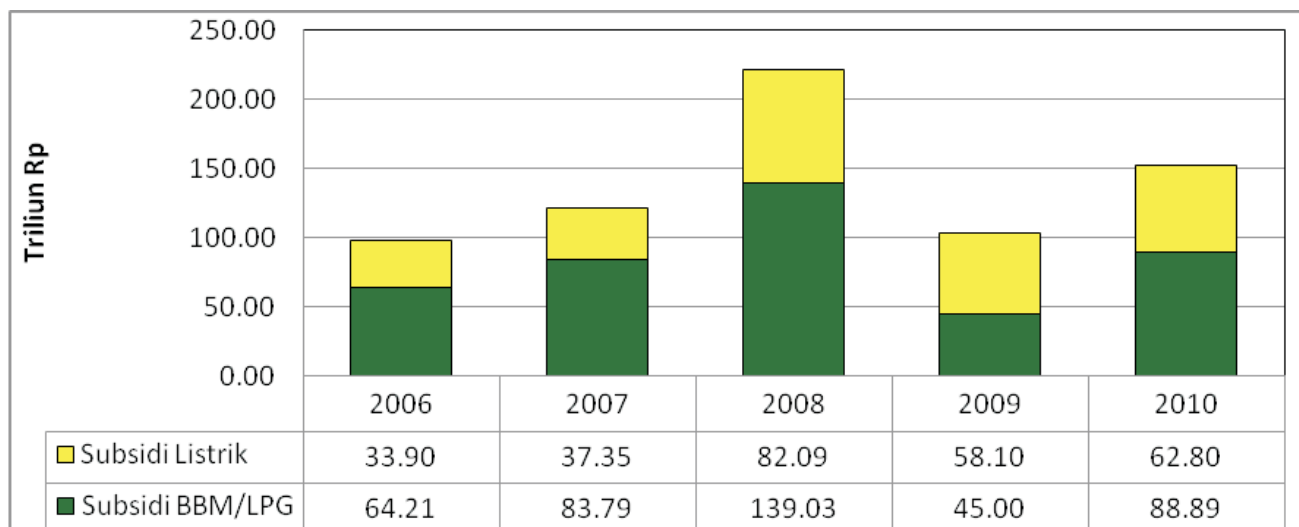
No	Uraian	2009 (Rp Triliun)	2010 (Rp Triliun)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Subsidi BBM, BBN, & LPG	45,00	88,89	82,35	107,4
2.	Subsidi Listrik:	58,10	55,11	62,81	86,0
	a. Hutang subsidi	4,41	4,00	4,00	100,0
	b. Subsidi tahun berjalan	53,72	51,11	58,81	79,0
TOTAL		103,10	144,00	145,16	99,2

Pada tahun 2010 realisasi subsidi energi sebesar Rp. 145,16 triliun atau melebihi kuota sebesar Rp. 144 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, di tahun 2010 ini, jumlah subsidi energi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 40%.

Perkembangan subsidi BBM/LPG dan Listrik pada lima tahun terakhir seperti grafik dibawah ini.

Pada tahun 2010 realisasi subsidi energi sebesar Rp. 145,16 triliun atau melebihi kuota sebesar Rp. 144 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, di tahun 2010 ini, jumlah subsidi energi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 40%.

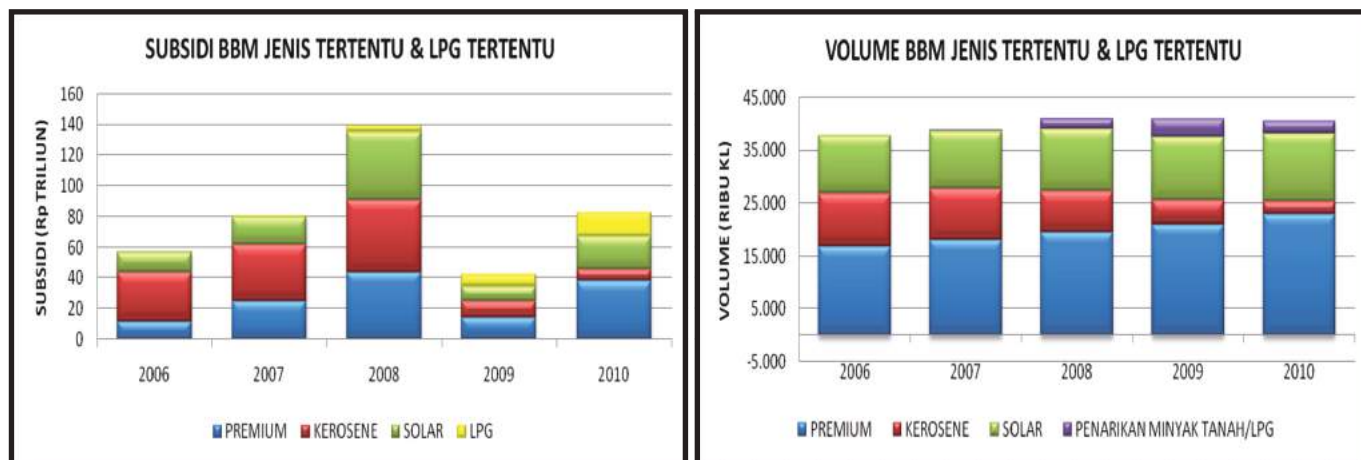
Perkembangan subsidi BBM/LPG dan Listrik pada lima tahun terakhir seperti grafik dibawah ini.



Grafik 5.26. Perkembangan subsidi BBM/LPG dan Listrik (2006-2010)

1. Subsidi BBM & LPG

Jumlah subsidi BBM, BBN, dan LPG di tahun 2010 ini mencapai Rp 82,35 Triliun atau 107,4% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena realisasi subsidi BBM, BBN dan LPG yang jauh dibawah kuota akibat penguatan nilai kurs rupiah. Jika dibandingkan dengan jumlah subsidi di tahun 2009, pada tahun 2010 ini jumlah subsidi mengalami peningkatan yang hampir 2 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah konsumsi BBM akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.



Grafik 5.27. Perkembangan Subsidi BBM

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan, dan beralih untuk pengembangan potensi Bahan Bakar Nabati (BBN), Pemerintah melalui Perpres 5 Tahun 2006 menetapkan target penggunaan BBN sebesar 5% dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Prospek pengembangan bahan bakar nabati sangat memungkinkan, terutama karena potensi ketersediaan lahan dan keanekaragaman bahan baku.

Upaya yang dilakukan Pemerintah, untuk mengurangi subsidi BBM adalah sebagai berikut:

- Pengalihan Subsidi Harga ke Subsidi Langsung melalui revitalisasi Program Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pengurangan Volume (Q) BBM tertentu, dengan cara: menghemat pemakaian BBM; mengembangkan energi pengganti (alternatif) BBM (BBG dan Bahan Bakar Lain), dan subsidi BBM hanya untuk target konsumen dilaksanakan dengan Penerapan Sistem Distribusi Tertutup
- Pemilihan Harga Patokan BBM yang tepat dengan cara: menekan biaya distribusi BBM, dan menghitung harga keekonomian penyediaan BBM

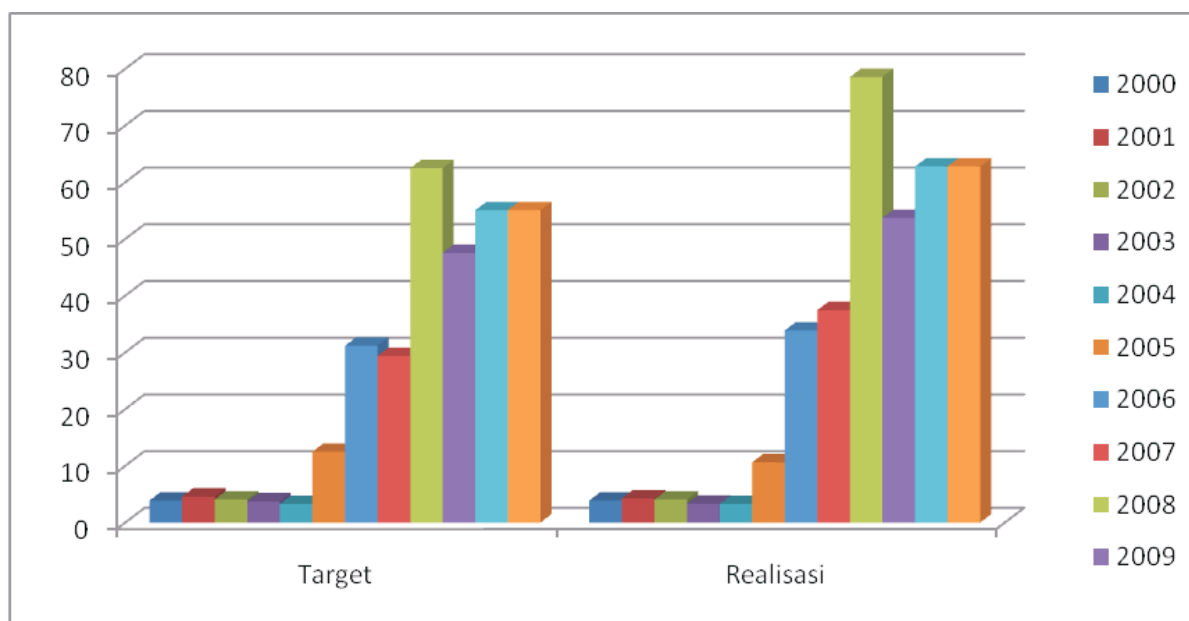
2. Subsidi Listrik

Realisasi subsidi listrik tahun 2010 lebih tinggi dari rencana yang ditargetkan, yaitu dari Rp 55,11 Triliun menjadi Rp 62,81 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14%. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Kenaikan penjualan tenaga listrik dari target 143,26 TWh menjadi 146,19 TWh;
- Kenaikan penggunaan BBM dari target 6.420.058 KL menjadi 9.392.894 KL, yang disebabkan antara lain: keterlambatan penyelesaian PLTU Batubara, program mengatasi pemadaman dalam tahun 2010, dan tidak tercapainya volume pasokan gas alam sesuai target.
- Adanya kekurangan pembayaran subsidi listrik pada tahun 2009 yang harus dibayar di tahun 2010.

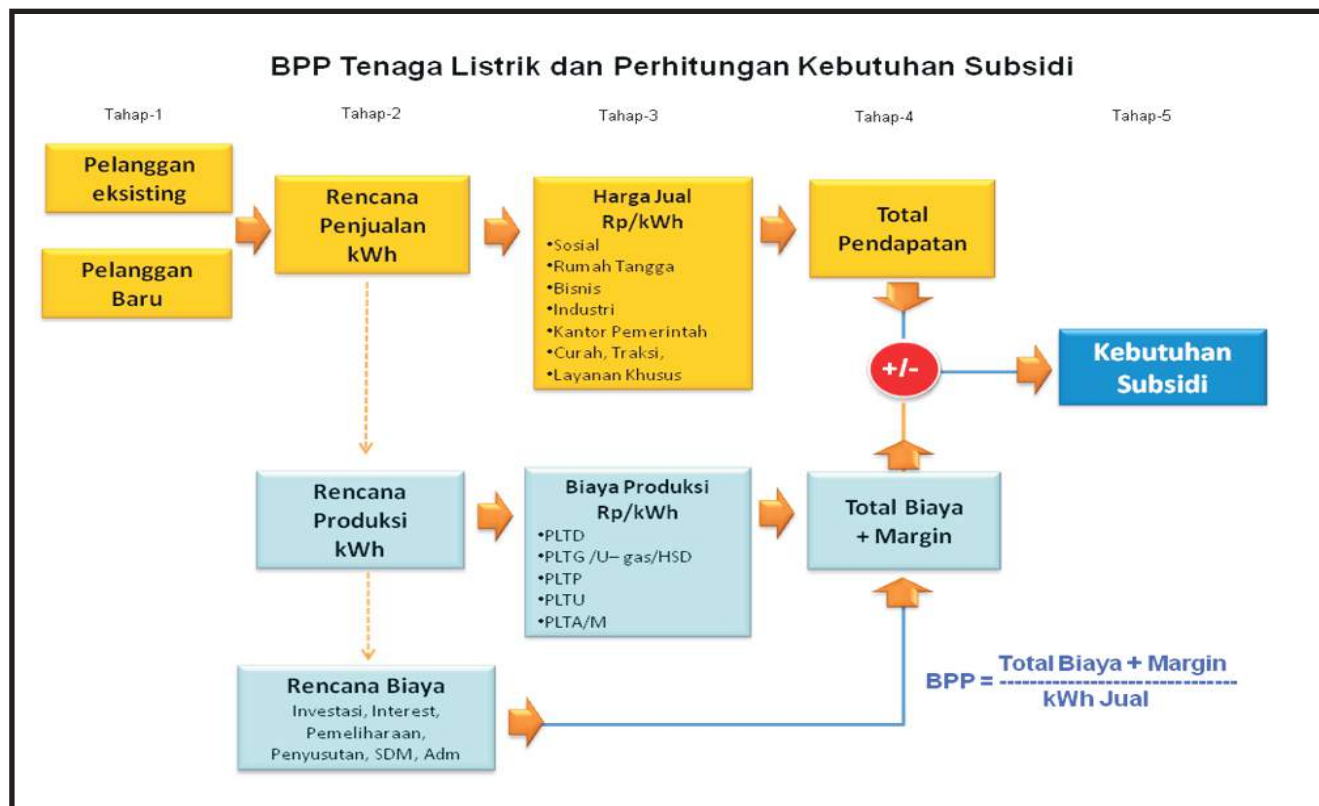
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI SUBSIDI LISTRIK

TAHUN 2000 - 2010



Grafik 5.28. Perkembangan Target dan Realisasi Subsidi BBM

Dasar penghitungan subsidi listrik diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 5.16. Dasar Penghitungan Subsidi Listrik

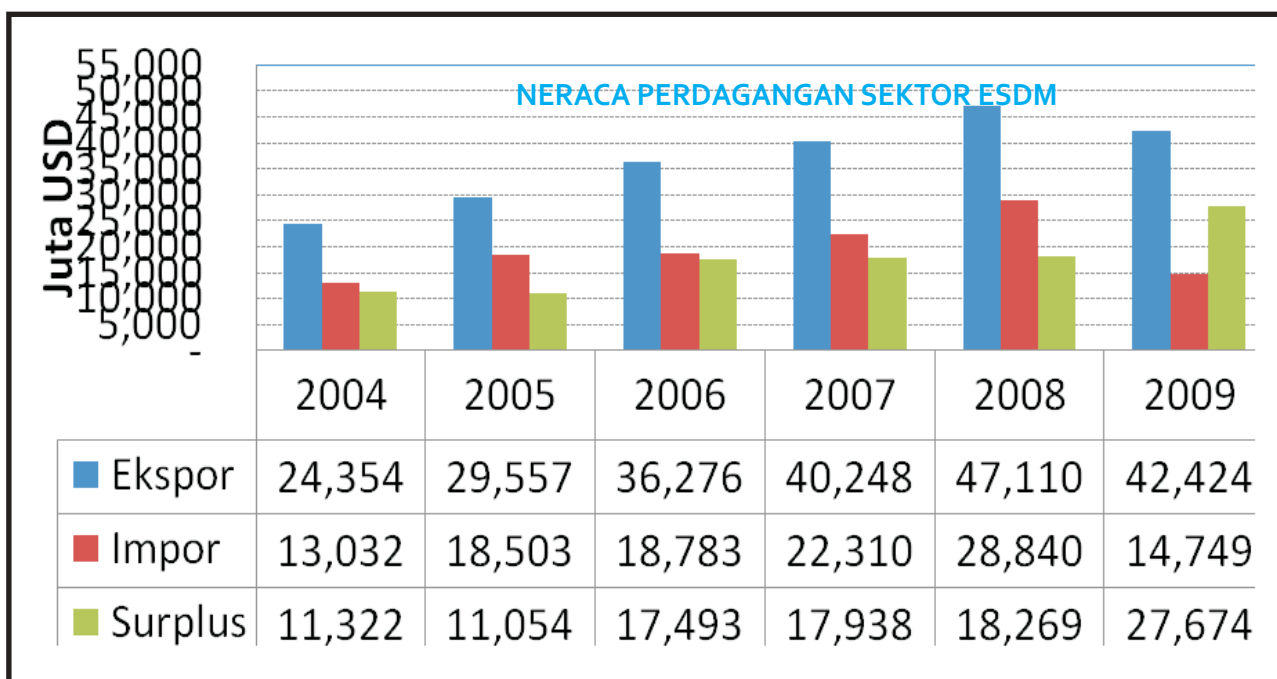


Tujuan VI : Terwujudnya Peran Penting Sektor ESDM Dalam Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan dengan Mengurangi Impor

Sekitar 60% produksi minyak Indonesia dipasok untuk dalam negeri dan sisanya sebesar 40% untuk ekspor. Terkait Neraca Minyak Mentah Indonesia, saat ini ekspor sebesar 399 ribu bph (61%) masih lebih besar dari impor sebesar 254 ribu bph (39%), atau ekspor lebih besar dari impor (net exporter). Namun, jika impor BBM sebesar 418 ribu barel/hari juga diperhitungkan, maka balance minyak berubah menjadi ekspor 399 ribu bph (37%) dan impor 672 bph (77%), sehingga impor lebih besar daripada ekspor (net importer).

Dengan produksi minyak sebesar 945 ribu bph saat ini, sementara konsumsi dalam negeri sebesar 1.038 ribu bph, maka impor BBM tetap diperlukan. Konsumsi terbesar terjadi pada sektor transportasi (56%) dan diikuti oleh pembangkit listrik (18%), industri (13,5%) dan rumah tangga (12,5%).

Sehubungan dengan resesi ekonomi global, dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ini masih positif, yaitu 5,5%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh dominasi konsumsi domestik, belanja pemerintah yang lebih tinggi, investasi yang relatif konstan dan pendapatan bersih ekspor (ekspor dikurangi impor) yang masih positif.



Grafik 5.29. Neraca Perdagangan Sektor ESDM

Grafik 5.29. Neraca Perdagangan Sektor ESDM Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu positif.

Sektor ESDM selalu mencatatkan surplus sejak tahun 2005 sampai dengan 2009. Nilai impor per tahun adalah antara 54 s.d. 64 persen dari nilai ekspornya, sehingga neraca perdagangannya selalu positif.

Pada tahun 2008, surplus dicapai pada angka yaitu sebesar US\$ 17,9 miliar, dimana ekspornya mencapai US\$ 50,1 miliar dan impornya US\$ 32,2 miliar. Demikian juga untuk tahun 2009 ini, dimana dampak resesi global masih kuat, meskipun nilai ekspor sektor ESDM menurun, namun nilai impornya juga menurun, sehingga surplus masih dapat dipertahankan.

Guna mewujudkan Peran Penting Sektor ESDM Dalam Peningkatan Surplus Neraca Perdagangan dengan Mengurangi Impor, maka dalam tahun 2010 ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 10. Optimalnya Ekspor dan Impor Sektor ESDM

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

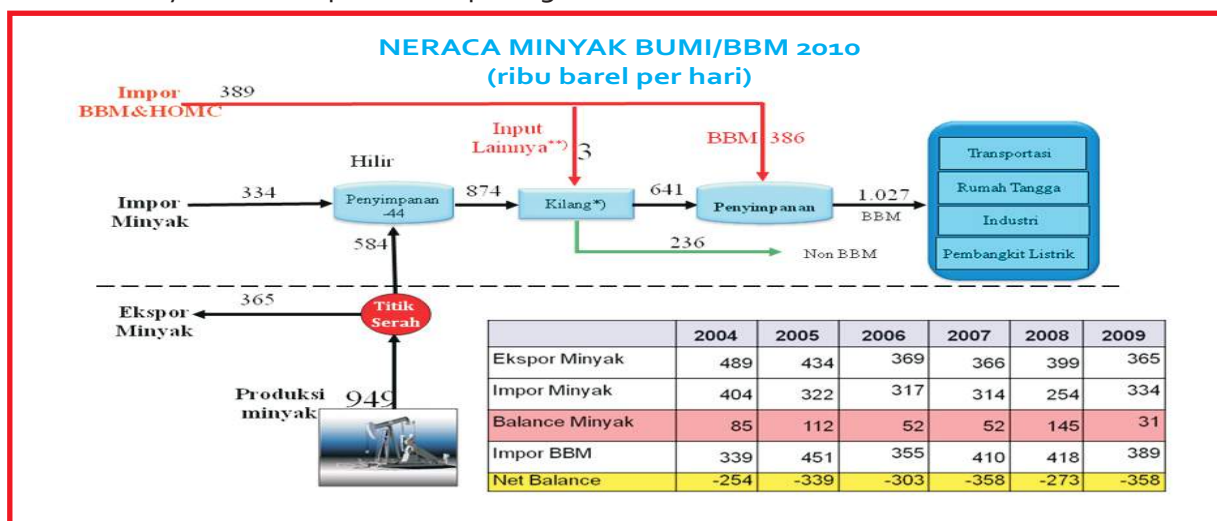
Tabel 5.35. Indikator Sasaran 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah ekspor minyak mentah	Juta barel	135	133.2	98,7%
2.	Jumlah ekspor gas	MMSCFD	4.153	4.848	116.7%
3.	Jumlah impor BBM	Juta KL	27.08	23.17	116.9%
4.	Jumlah impor minyak mentah	MBPD	254	344	64.6%

1. Jumlah ekspor minyak mentah

Realisasi ekspor minyak mentah pada tahun 2010 ini mencapai 365 MBPD atau sebesar 133,2 juta barel atau sedikit lebih kecil dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebesar 135 juta barel atau 98,7%. Namun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2009, realisasi ekspor minyak mentah menurun sebesar 8,5%, dimana pada tahun 2009 ekspor minyak mentah mencapai 145,6 juta barel atau 399 MBPD.

Neraca minyak bumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

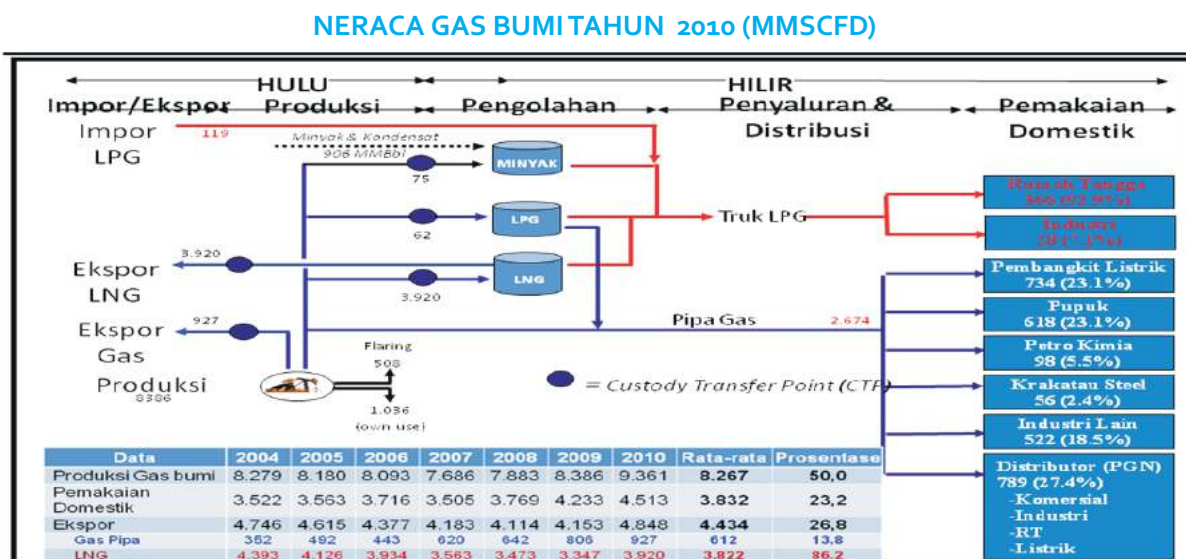


Gambar 5.17. Neraca Minyak Bumi/BBM Tahun 2010

2. Jumlah ekspor gas bumi

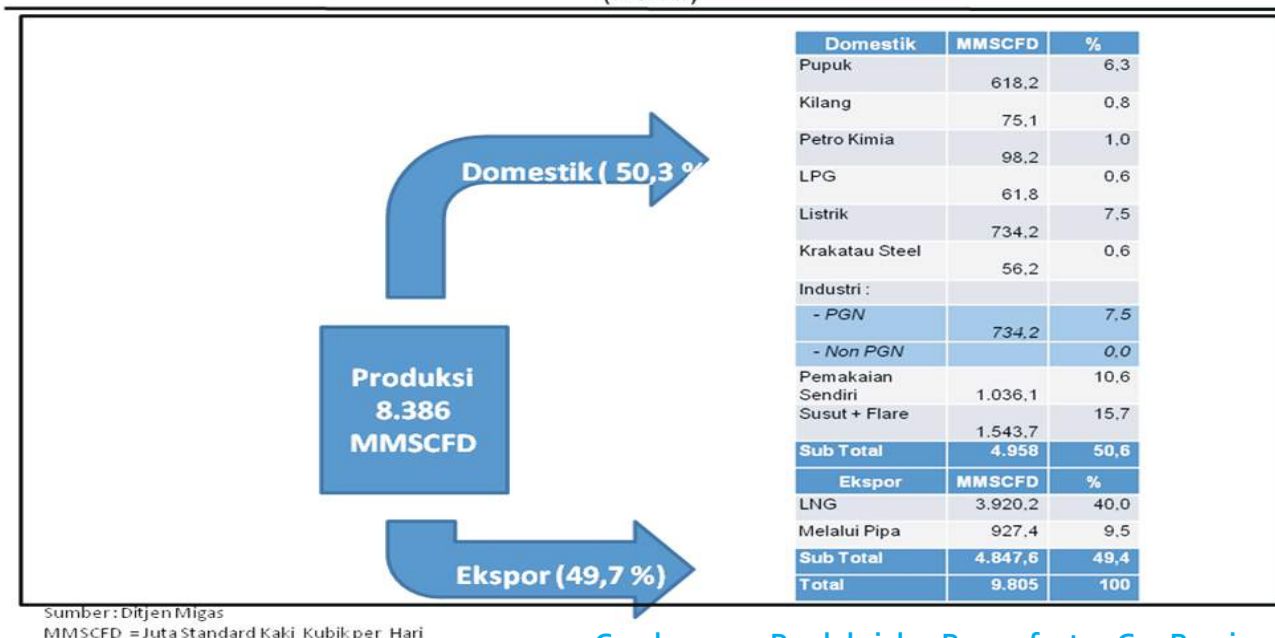
Dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional untuk menjamin ketersediaan gas bumi dalam negeri maka pasokan dapat dipenuhi dari dalam dan luar negeri. Permintaan gas bumi di dalam negeri meningkat dengan tajam antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak bumi dunia, pengurangan subsidi BBM, dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan pengembangan lapangan gas bumi membutuhkan investasi dan resiko yang tinggi serta waktu yang cukup lama hingga *on stream* dan lokasi lapangan gas saat ini dan potensi yang ada tersebar dan jauh dari pusat pengguna gas, sementara infrastruktur gas masih terbatas.

Realisasi ekspor gas bumi tahun 2010 meningkat sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu dari sebesar 4.153 MMSCFD menjadi 4.848 MMSCFD yang berasal dari Gas pipa sebesar 927 MMSCFD dan LNG sebesar 3.920 MMSCFD. Secara rinci produksi dan pemanfaatan gas bumi dapat di lihat pada neraca gas bumi, seperti di bawah ini.



Gambar 5.18. Neraca Gas Bumi Tahun 2010

PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI (2010)



Gambar 5.19. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi

3. Jumlah impor BBM

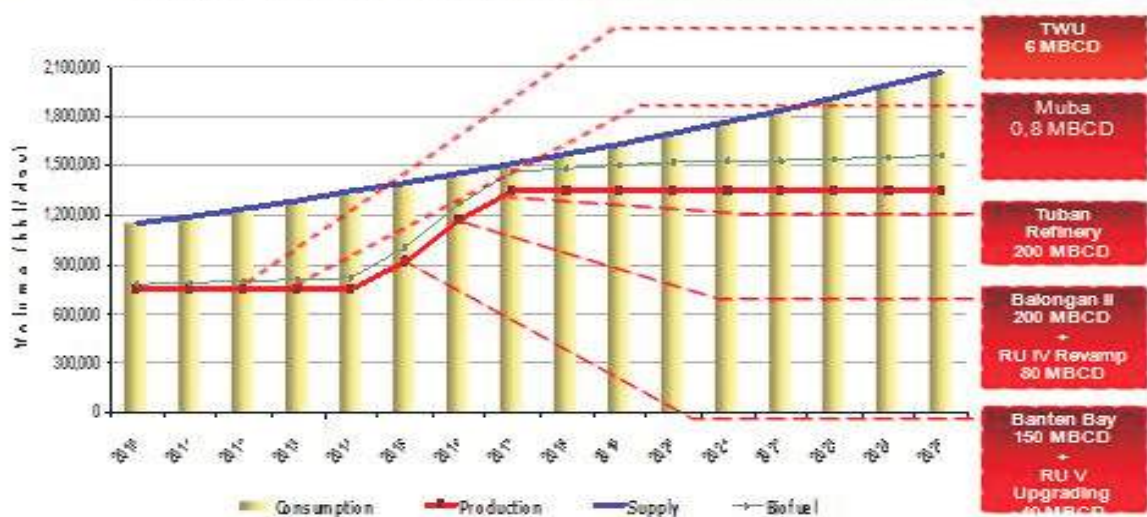
Realisasi impor BBM pada tahun 2010 mencapai 23,17 Juta KL, angka ini lebih rendah dari jumlah target yang ditetapkan yaitu sebesar 27,08 Juta KL, dengan demikian capai kinerja mencapai 116,9%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 10,75%.

Perkembangan impor BBM sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 disajikan pada table di samping.

Tabel 5.36
PRODUKSI, KONSUMSI, IMPOR BBM (KL)

Tahun	Konsumsi	Produksi Dalam Negeri	Impor
2005	62,059,433.10	40,652,695.00	25,221,428.06
2006	57,464,081.09	38,220,661.00	19,243,420.09
2007	63,838,500.00	39,513,674.00	24,324,826.00
2008	60,226,132.90	40,453,924.00	24,324,826.00
2009	64,070,640.00	43,144,431.22	20,926,208.78
2010	66,633,465.60	43,457,820.22	23,175,645.38

Supply – Demand BBM & Rencana Pembangunan Kilang



CATATAN:

-Pertumbuhan konsumsi 4% per tahun

-Konversi minyak mentah menjadi BBM untuk kilang yang akan dibangun diasumsikan 90%

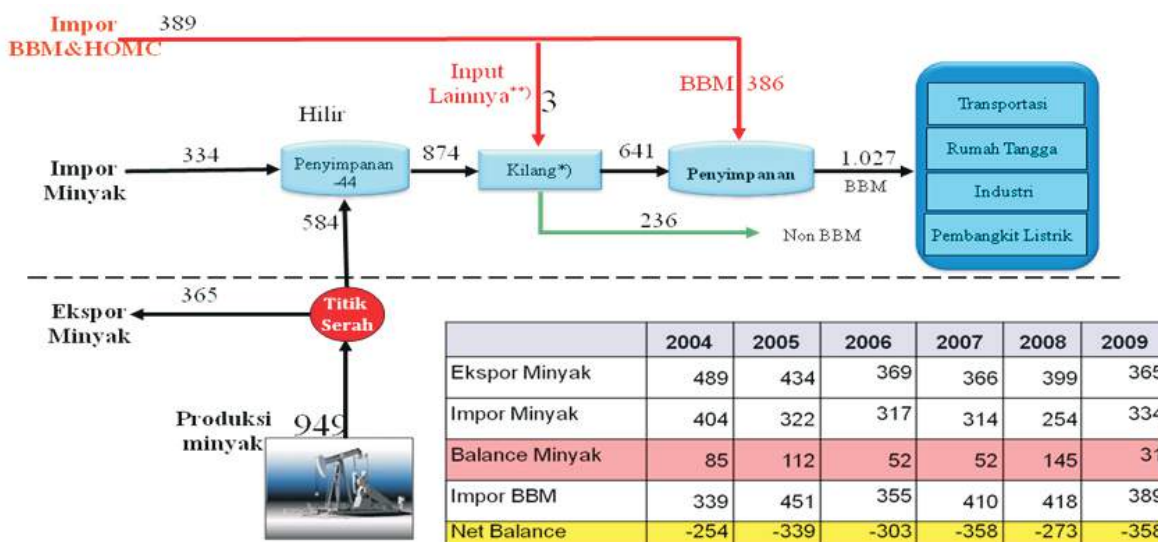
ES/UM/001/100

Grafik 5.30. Supply Demand BBM dan Rencana Pembangunan Kilang

4. Jumlah imporminyak mentah

Realisasi impor minyak mentah pada tahun 2010 ini mencapai 344 MBPD atau sebesar 125,6 juta barel, realisasi ini meningkat cukup tinggi dari capaian pada tahun 2009 yang sebesar 92,71 juta barel atau meningkat 35,4%. Demikian pula bila dibandingkan dengan targetnya. Neraca minyak bumi dan perkembangan impor minyak bumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

NERACA MINYAK BUMI/BBM 2010



Gambar 5.20. Neraca Minyak Bumi/BBM Tahun 2010

Tujuan VII: Terwujudnya Peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan

Sektor ESDM berkontribusi secara nyata sebagai penggerak utama pembangunan melalui efek berantai (*Multiplier Effect*). Disamping pembangunan daerah dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*), efek berantai tersebut dapat diidentifikasi dari kegiatan pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Sektor ESDM memberikan dampak *backward linkage* dan *forward linkage*. Keberadaan industri ESDM membentuk *backward linkage*, yaitu terciptanya industri yang mendukung kegiatan industri ESDM tersebut. Contoh dari industri tersebut antara lain industri material dan peralatan di Batam seperti pabrikasi pipa, platform, alat-alat berat dan lain-lain. Selain itu, adanya industri ESDM juga menghidupkan *forward linkage* dimana industri lain seperti pabrik pupuk, petrokimia, dan industri lainnya tumbuh dan berkembang karena keberadaan dan operasi industri ESDM.

Kebutuhan sektor ESDM terhadap tenaga kerja terdidik dan terampil banyak sekali membuka lapangan kerja, meskipun sifat dari industri ESDM adalah *capital intensive* atau memerlukan modal besar untuk beroperasi, bukan *labour intensive* atau memerlukan jumlah tenaga yang banyak sekali untuk memulai operasi industrinya. Upaya peningkatan keterampilan sumber daya manusia sektor ESDM sangat didukung melalui kerjasama yang intensif antara pemerintah dan industri.

Salah satu upaya nyata adalah Peningkatan Kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja migas tingkat terampil dan ahli dalam negeri yang memiliki kualifikasi dengan pengakuan nasional dan internasional, dalam rangka menjawab isu-isu strategis bidang migas, seperti: peningkatan cadangan dan produksi migas nasional, pembangunan/peningkatan kapasitas sarana pengolahan, distribusi dan transmisi migas, serta peningkatan jumlah dan kompetensi aparatur pusat maupun daerah di bidang pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha migas.

Berdasarkan data yang terkumpul, telah terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja langsung sebesar 167% dalam kurun waktu 3-4 tahun yaitu dari tahun 2005 sebesar 655 ribu tenaga kerja menjadi 1,7 juta tenaga kerja pada tahun 2008. Angka ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam kegiatan pendukung. Namun demikian, akibat dampak resesi global, pada tahun 2009 diperkirakan terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja langsung menjadi sekitar 1,6 juta tenaga kerja. Namun Dengan potensi yang sangat besar dan perkembangan sektor ESDM, maka di tahun 2014 ditargetkan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 3,3 juta tenaga kerja atau meningkat lebih dari dua kali lipat jumlah tenaga yang terserap tahun 2009.

KESDM juga berupaya terus membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional melalui langkah-langkah utama, yaitu, keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi; pengendalian impor barang operasi migas yang bertujuan untuk pemberdayaan produksi dalam negeri; disamping untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI); penyusunan dan menerbitkan ADP (*Appreciation of Domestic Product*) List, yang memuat perusahaan/pabrik yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan Usaha Migas; mewajibkan minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap pengadaan barang dan jasa dan penyiapan kebijakan untuk Perusahaan Migas Nasional yang mendominasi pada industri migas.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Efek Berantai/ Ketenagakerjaan ditetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 11. Terwujudnya Penyerapan Tenaga Kerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.37.
Indikator Kinerja Sasaran 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM	Orang	1.213.092	1.002.488	82.6%
1.	Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	Orang	304.412	295.725	97.2%
2.	Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	Orang	787.000	562,679	71.5%
3.	Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	Orang	121.680	144.084	118.4%

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengelolaan sektor ESDM umumnya masih menggunakan sumber daya asing, baik dari dalam bentuk produk maupun tenaga kerja asing. Namun demikian perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja nasional makin memegang peranan yang signifikan. Oleh sebab itu, sejalan dengan penambahan jumlah produksi maka seharusnya peran sumber daya manusia nasional juga harus semakin ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa sasaran ini menjadi salah satu prioritas yang ingin diwujudkan dalam tahun 2010.

Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja nasional yang berperan dalam berbagai kegiatan di sektor ESDM adalah sebanyak 1.002.488 orang atau 82,6% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1.213.092 orang. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja nasional dari tiga sub sektor yaitu sub sektor migas, ketenagalistrikan dan pertambangan umum.

Penjelasan rinci tentang capaian kinerja sasaran ini dijelaskan di bawah ini.

1. Jumlah tenaga kerja sub sektor migas

Realisasi penyerapan tenaga kerja pada sub sektor migas tahun 2010 adalah sebesar 295.725 orang dari 304.412 orang yang ditargetkan atau capaiannya sebesar 97,2%. Dalam rangka menunjang terwujudnya peningkatan efek berantai/ ketenagakerjaan, program yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 meliputi:

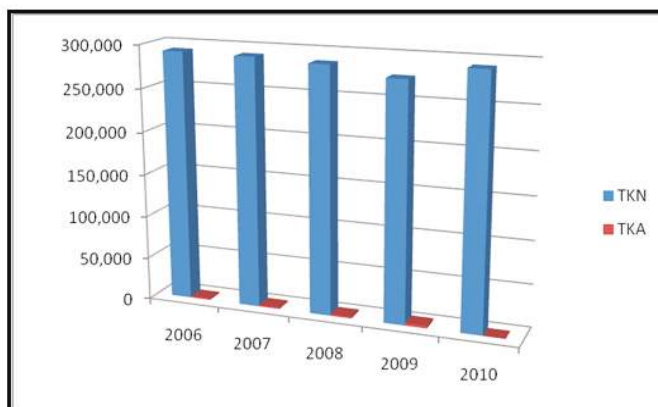
- Pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional di sub sektor migas dan mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing, melalui: Konsultasi teknis terhadap Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA); Pelayanan pembukaan, pembaharuan, dan penggunaan tenaga kerja asing Kantor Perwakilan usaha migas; dan Pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Nasional;

- Pengembangan Tenaga Kerja Nasional Sub Sektor Migas, melalui: Program Alih Teknologi/Mentoring pada perusahaan Migas; dan mengarahkan untuk pemberian magang bagi para lulusan sarjana baru (*fresh graduate*).

Berdasarkan hasil pemantauan, perbandingan jumlah tenaga kerja nasional (TKN) dan Tenaga Kerja Asing sub sector migas sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, seperti table dan grafik di bawah ini.

TABEL DAN GRAFIK
PERBANDINGAN TENAGA KERJA ASING DAN TENAGA KERJA LOKAL SUB SEKTOR MIGAS

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja		
	TKN	TKA	Jumlah
2006	291.758	1.598	293.356
2007	290.379	2.018	292.497
2008	286.770	2.105	288.368
2009	275.908	3.088	278.996
2010	291.455	4.270	295.725



Tabel 5.38. Tenaga Kerja Nasional dan Asing sector ESDM

Grafik 5.31. TKN dan TKA

2. Jumlah tenaga kerja sub sektor ketenagalistrikan

Pada tahun 2010 ini, realisasi penyerapan tenaga kerja sub sector ketenagalistrikan adalah sebesar 562,679 orang atau sebesar 71,5% dari jumlah target yang ditetapkan sebanyak 787.000 orang. Jumlah tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja asing dan tenaga kerja nasional yang berasal dari 3 perusahaan pemberi kerja yaitu : PT PLN (Persero); Listrik swasta dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Secara rinci jumlah tenaga kerja pada tiap-tiap perusahaan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.39
TENAGA KERJA SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN
TAHUN 2010

No.	Perusahaan/Pemberi Kerja	Jumlah (orang)
1.	PT PLN (Persero):	48,629
	• PT PLN (Persero) Holding	42,046
	• Anak perusahaan	6,583
2.	Listrik swasta/ <i>Independent Power Producer</i> (IPP)	14,050
3.	Usaha jasa penunjang tenaga listrik	500,000
	Total	562,679

3. Jumlah Tenaga Kerja Sub Sektor Pertambangan Umum

Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja pada subsektor pertambangan umum yang meliputi Mineral dan Batubara serta panas bumi telah melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PKP2B dan Kontrak Karya, maupun Sub Kontraktor. Dari data statistik, perbandingan penyerapan tenaga kerja tahun 2009 dan 2010, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 5.40.
TENAGA KERJA SUBSEKTOR PERTAMBANGAN UMUM

Perusahaan	2009		2010	
	TKI	TKA	TKI	TKA
Kontrak Karya	23.742	412	25.546	436
PKP2B	17.200	207	17.888	212
Sub Kontraktor	89.567	375	99.633	369
Jumlah	130.509	994	143.067	1.017

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah tenaga kerja pada sub sector pertambangan umum pada tahun 2010 ini meningkat sebesar 9% yaitu dari 131.503 orang di tahun 2009 menjadi 144.084 orang di tahun 2010.

Sasaran 12. Terwujudnya Pemberdayaan Nasional

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.41
Indikator Kinerja Sasaran 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	Rasio	100 : 1	80 : 1	80%
2.	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	%	55	57	104%
3.	Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sub sektor Pertambangan Umum	%	60	54	90%

Terwujudnya pemberdayaan nasional dapat diukur melalui 3 indikator kinerja seperti yang tercantum pada tabel di atas, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional

Realisasi penggunaan tenaga asing dengan penggunaan tenaga kerja nasional di Sektor ESDM pada tahun 2010 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5.42
Rasio Tenaga Kerja Nasional dan Tenaga Ketja Asing

Sub Sector	2009		2010	
	TKN	TKA	TKN	TKA
Migas	275.908	3.088	291.455	4.270
Pertambangan Umum	130.509	994	143.067	1.017
Jumlah	406.417	4082	434.522	5.287
Rasio	100	1	80	1

Dari table di atas, terlihat perbandingan pemakaian TKN dan TKA antara tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009 penggunaan TKN jauh lebih banyak dibandingkan dengan TKA dengan rasio 100 : 1. Pada tahun 2010, jumlah penggunaan TKN dan TKA meningkat, namun penggunaan TKA meningkat lebih besar dibandingkan dengan penggunaan TKN, sehingga rasio perbandingannya menjadi 80 :1.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung prioritas nasional dalam hal pemberdayaan TKN, diantaranya adalah:

- Dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan pada sub sector migas dilaksanakan pengembangan Tenaga Kerja Nasional melalui pelaksanaan Program Magang bagi *fresh graduates* pada perusahaan-perusahaan migas terutama perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan magang bagi fresh graduates untuk mendapatkan pengalaman bekerja pada perusahaan-perusahaan migas sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Bekal pengalaman kerja tersebut memberikan nilai tambah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan terutama pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sub sektor migas (KKKS Migas, Usaha Hilir Migas, dan Usaha Penunjang Migas).
- Dengan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dilakukan melalui pemberian rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan TKA) dan IMTA (Ijin Mempekerjakan TKA) berdasarkan hasil konsultasi teknis. Hasil pelaksanaan pengendalian penggunaan TKA pada tahun 2010 adalah pemberian rekomendasi persetujuan penggunaan TKA sebanyak 2.827 TKA serta penolakan sebanyak 198 posisi TKA.

2. Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi

Dalam rangka pengutamakan penggunaan produksi dalam negeri tersebut dilakukan kegiatan pengendalian impor barang operasi melalui mekanisme penilaian dan penandasahan Rencana Impor Barang.

Selama tahun 2010 telah ditandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang diajukan oleh Kontraktor KKS menjadi Rencana Impor Barang guna menunjang kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan kebutuhan operasi sebesar ± US\$ 4,846.38 milyar, dengan status barang sewa sebesar ± US\$ 3,504 milyar dan barang bukan sewa sebesar ± US\$ 1,343 milyar dengan rincian dalam bentuk barang jadi, sebesar ± US\$ 744,88 juta, dalam bentuk Manufaktur Batam sebesar ± US\$ 499.00 juta, dan dalam Fabrikasi Dalam Negeri sebesar ± US\$ 99,82 juta. Sehingga intervensi terhadap impor barang operasi sebesar USD 601,08 juta.

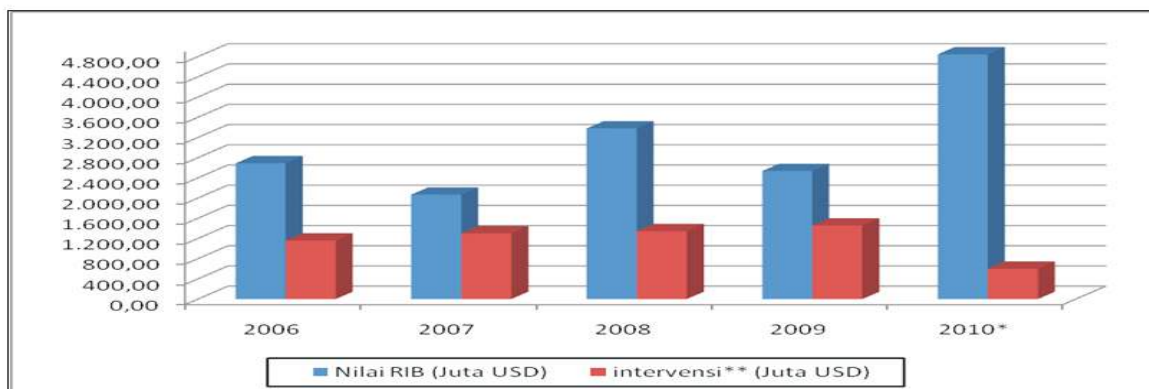
Peningkatan nilai rencana impor barang terjadi karena aktivitas KKKS melakukan eksplorasi sehingga banyak memerlukan barang dan/atau jasa disamping KKKS yang sedang melakukan pengembangan. Meningkatnya kesadaran KKKS dalam menggunakan produksi dalam negeri mengakibatkan terjadinya penurunan intervensi pada barang-barang yang terindikasi ADP (sudah dapat diproduksi dalam negeri)

Nilai investasi hulu migas tahun 2010 adalah USD 11,344.71 juta (11,34 milyar), apabila diasumsikan bahwa nilai dalam suatu pembelanjaan KKKS didapatkan dari pembelanjaan dalam dan luar negeri (dimana mekanisme pengadaan barang dari luar negeri/impor wajib melalui mekanisme RKBI/masterlist), maka persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dapat dilakukan pendekatan melalui nilai investasi dikurangi nilai barang luar negeri (nilai Rencana Impor Barang) dibagi dengan nilai investasi dikali dengan 100 persen, sehingga persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada sub sektor migas adalah 57%.

Tercapainya target pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha migas dapat disebabkan meningkatnya kesadaran KKKS dalam menggunakan produksi dalam negeri sehingga mengakibatkan meningkatnya persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha migas.

Tabel 5.43.
Rencana Impor Barang Operasi Migas dan Intervensi Verifikasi
Rencana Kebutuhan Barang Impor 2006-2010

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010
Nilai RIB (Juta USD)	2,689.00	2,068.00	3,379.82	2,536.30	4,846.00
MFG BATAM (Juta USD)	425.00	499.00	474.52	750.70	499.00
FAB LOKAL (Juta USD)	104.00	148.00	116.05	112.69	99.82
ADP (Juta USD)	631.00	652.89	754.29	619.54	2,26
intervensi** (Juta USD)	1,160.00	1,299.89	1,344.86	1,456.88	601,08



Grafik 5.32. Rencana kebutuhan barang impor

Selain mengendalikan barang impor pada kegiatan usaha migas, dalam rangka mendukung dan menumbuhkan kembangank produksi dalam negeri sehingga mampu mendukung kegiatan investasi migas juga dilakukan pembinaan terhadap industri barang dalam negeri dengan memberikan rating/peringkat sesuai hasil penelitian dan penilaian kemampuan meliputi aspek legal (status usaha dan finansial), teknis (kemampuan produksi dan sistem manajemen), jaringan pemasaran dan layanan purna jual.

3. Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor Pertambangan Umum

Sub sektor mineral, batubara dan panas bumi, Jumlah penggunaan produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sub sektor mineral, batubara dan panas bumi telah mencapai 54% atau dengan nilai capaian 90% dibandingkan dengan target sebesar 60%.

Perlu dijelaskan bahwa kebijakan penggunaan kandungan lokal bukan sebatas penggunaan sumber daya manusia atau barang lokal, namun harus lebih luas dan besar. Maksudnya produsen dan pasarnya harus dibawa ke Indonesia, sehingga *multiplayer effect* benar-benar dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini telah diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 106 yang secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan tambang harus mengutamakan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

Sasaran 13. Peningkatan Nilai Tambah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.44.
Indikator Kinerja Sasaran 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	%	60	60	100%

Pada beberapa sasaran strategis di bagian sebelumnya telah diinformasikan berbagai pengaruh positif (kontribusi) sektor ESDM terhadap perekonomian nasional, seperti: peran penting sebagai sumber penerimaan negara, peningkatan peran dalam pembangunan daerah, dan peningkatan surplus neraca perdagangan, serta efek berantai ketenagakerjaan.

Selain yang disebutkan di atas, sektor ESDM juga memberi peningkatan nilai tambah terhadap kemampuan nasional dalam bidang teknologi rekayasa (perancangan dan perakitan) instalasi peralatan migas. Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas, bahwa untuk tahun 2010 target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai seluruhnya atau 100%.

Pada tahun 2010 ini, Kementerian ESDM melalui Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan 2 buah paten dan 3 buah pilot plant di bidang migas yaitu:

Paten :

- Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas
- Rancang Bangun Pembuatan Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) untuk Penyimpanan Bahan Bakar Gas

Pilot Plant:

- Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas
- Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel
- Pengembangan Model Adsorben Konversi Gas Bumi

Selain itu tercatat beberapa produk dalam negeri yang telah digunakan untuk kegiatan usaha migas, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.45.
Kemampuan Produksi Dalam Negeri

No.	Hasil produksi	Rata-Rata TKDN	Jumlah perusahaan	Status Perusahaan		Rating		
				PMA	PMDN	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3
1.	Pipa	49.26%	5	2	3			5
2.	Casing - Tubing HT	27.51%	2	1	1			2
3.	Casing - Tubing Non HT	18.88%	8	3	5			8
4.	Casing Tubing Accessories	18.40%	14	3	11			14
5.	Wellhead	34.37%	5	4	1			5
6.	Chemical	44.17%	12	6	6	1	4	7

7.	Cementing Equipment	54.46%	2	2				2
8.	Sreen Equipment	35.16%	3	1	2		1	2
9.	Bolt & Nut	30.93%	2	1	1		1	1
10.	Valve	51.70%	1		1			1
11.	Industri Penunjang lainnya	12.50%	17	8	9		4	13
Total			71	31	40	1	10	60

Sasaran 14. Peningkatan industri jasa (*backward linkage*) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (*forward linkage*)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.46.
Indikator Kinerja Sasaran 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan industri jasa penunjang				
	• Jumlah industri jasa penunjang Migas	Perusahaan	1270	1239	97.5%
	• Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	Perusahaan	650	624	96%
	• Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum	Perusahaan	600	573	95.5%
2.	Terpenuhinya bahan baku industri pupuk				
	• Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk	%	100	100	100%



1. Peningkatan industri jasa penunjang

· Jumlah industri jasa penunjang pertambangan umum

Usaha Jasa Pertambangan adalah jenis usaha yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk: a) menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; b) mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.

Usaha jasa pertambangan dikelompokkan menjadi :

1. Usaha Jasa Pertambangan, yaitu usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan
2. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, yaitu usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan meliputi: bidang-bidang di luar usaha jasa pertambangan

Berdasarkan Direktori Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2010 tercatat 683 usaha jasa lokal dan nasional yang terdiri dari 429 usaha jasa nasional dan 254 usaha jasa lokal. Sebagai catatan usaha jasa lokal yang diinventarisir baru dari 4 Provinsi, sehingga jumlah usaha jasa lokal sebenarnya masih lebih banyak lagi. Dari target 600 jasa usaha pertambangan, realisasi yang dapat dicapai Kementerian ESDM tahun 2010 ini mencapai 683 usaha jasa lokal dan nasional di bidang pertambangan umum.

1. Terpenuhinya bahan baku industri pupuk

· Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk

Untuk menjamin pasokan gas baik untuk industri, transportasi dan pembangkit secara umum telah dijamin oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Gas bumi merupakan bahan baku dan pembuatan pupuk urea yang merupakan komponen terbesar biaya produksi pupuk urea yaitu mencapai 70%. Gas bumi juga merupakan bahan baku untuk industri manufaktur. Untuk menjaga kelangsungan produksi pupuk urea nasional dan industri manufaktur maka harus ada jaminan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar. Untuk menjamin tersedianya alokasi gas Menteri ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri tentang alokasi gas untuk pupuk. Untuk alokasi pasokan gas untuk transportasi, pemerintah (KESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.19/2010 tentang pemanfaatan gas bumi untuk transportasi. Untuk Pembangkit Listrik, telah membangun proyek FSRU untuk memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit di Jawa Barat Sumatera Utara, dan Jawa Tengah/Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah/Jawa Timur alokasi gas akan diperoleh setelah selesainya kajian kebutuhan gas.

Isu yang penting dalam rencana pengembangan pabrik pupuk adalah jaminan ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku dalam periode yang panjang. Bahan baku pabrik pupuk urea yang paling efisien selama ini adalah gas bumi. Sebagai alternatif pertama bahan baku diupayakan akan menggunakan gas bumi dengan jaminan pasokan paling tidak selama 20 tahun. Untuk itu perlu diadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam mengupayakan sumber-sumber gas yang diprioritaskan sebagai bahan baku pupuk.

Permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pupuk adalah sebagai berikut:

- Umur pabrik yang tua sudah di atas 30 tahun, dimana pada saat ini pemakaian gas buminya 25% lebih tinggi dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi baru yang hemat energi.
- Penggantian peralatan dalam jumlah besar akan menyebabkan membesarnya biaya investasi dan operasional; peralatan yang tidak diganti, memiliki potensi yang besar terjadi kerusakan secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan turunnya *on stream days* yang meningkatkan biaya pemeliharaan dan menurunkan keandalan pabrik.
- Suku cadang peralatan sulit diperoleh di pasaran dan jika bisa dipenuhi oleh *vendor* maka harganya akan sangat mahal.
- Sebagian besar pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku gas bumi belum mendapatkan alokasi jumlah gas yang cukup dalam jangka panjang.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri ke depan, maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab terhadap tersusunnya alokasi pasokan gas bumi untuk revitalisasi industri pupuk urea. Berdasarkan surat Menteri ESDM kepada Menteri perindustrian Nomor: 1418/15/MEM.M/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Pupuk, bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan program revitalisasi industri pupuk tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Kementerian perindustrian dan instansi terkait untuk perencanaan alokasi gas bumi, baik untuk revitalisasi pabrik pupuk maupun pabrik pupuk yang sedang berjalan. Dari hasil pembahasan tersebut dapat diinventarisasi potensi cadangan gas bumi yang direncanakan sebagai alternatif pasokan gas bumi dalam rangka revitalisasi.

Adapun alokasi pasokan gas bumi untuk pabrik Pupuk Kalimantan Timur (PKT)-5, pabrik pupuk diTangguh dan pabrik pupuk di Donggi Senoro adalah:

1. PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) – 5
2. Telah disetujui alokasi gas sebanyak 80 MMSCFD dari Lapangan KKKS Mahakam Total dan Inpex dan Lapangan Sebuku KKKS Pearl terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Pabrik Pupuk diTangguh
4. Untuk pengembangan pabrik pupuk dengan gas dari lapangan Tangguh telah diselesaikan Pre-FS oleh Tim Interdep pada April 2009. Dari hasil Pre-FS, terdapat cadangan uncommitted (2P *risked*) sebesar 2,9 TCF, yang tingkat kepastiannya sangat tergantung pada hasil uji produksi dan pemboran yang diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2014.
5. Pabrik Pupuk di Donggi Senoro
6. Kemampuan pasokan gas bumi dari lapangan Donggi Senoro sebesar 415 MMSCFD (2014-2027), dengan alokasi gas untuk domestik sebesar 115 MMSCFD (28% terhadap total produksi) yaitu untuk Panca Amara Utama (PAU) sebesar 55 MMSCFD dan 60 MMSFD untuk PLN.

Kebijakan Pemerintah dalam hal Pemanfaatan Gas Bumi diprioritaskan untuk peningkatan produksi, kebutuhan bahan baku pupuk, penyediaan tenaga listrik dan sektor industri lainnya. Dikarenakan sebagian besar pabrik pupuk yang menggunakan bahan baku gas bumi belum mendapatkan alokasi jumlah gas yang cukup dalam jangka panjang, disarankan pembangunan pabrik pupuk yang baru diarahkan mendekati sumber Gas Bumi yang besar.

Sasaran 1: Terwujudnya pengaturan & pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 7 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.47.
Indikator Kinerja Sasaran 1 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Waktu ketahanan stock Cadangan BBM Nasional	Hari	24	24	100%
2.	Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan	Ruas Transmisi WJD	2 4	2 4	100%
3.	Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa	Keluhan	0	0	100%
4.	Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa	Badan Usaha	2	3	150%
5.	Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha	Miliar Rp	433	459	106%

1. Waktu ketahanan stock Cadangan BBM Nasional

Terkait dengan salah satu misi Kementerian ESDM untuk meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral (*energy and mineral security*) dalam negeri, maka diperlukan adanya persediaan cadangan (*buffer stock*). Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, bahwa waktu ketahanan persediaan BBM nasional adalah 24 hari.

Secara ringkas, sesuai data hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa target tersebut dapat direalisasikan dengan nilai capaian kinerja 100% atau dengan kata lain target ini menunjukkan bahwa persediaan pasokan energi cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sampai dengan 24 hari ke depan.

2. Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD yang diberikan

Pada tahun 2010 BPH Migas telah menyusun dan menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa. Peraturan ini merupakan revisi Peraturan BPH Migas :

- Nomor 01/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Ruas Tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi.
- Nomor 02/P/BPH Migas/XII/2004 tanggal 10 Desember 2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Wilayah Tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi.

Sehubungan dengan peraturan tersebut di atas, ditetapkan Jumlah hak khusus untuk ruas transmisi dan WJD sebagai salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2010 BPH Migas telah berhasil merealisasikan indikator tersebut sesuai dengan targetnya atau capaian 100%. Pemberian Hak Khusus tersebut diberikan kepada:

- PT Krakatau Daya Listrik untuk ruas transmisi Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi (pipa *Dedicated* Hilir) Station Bojonegara - PT KDL, dengan Tie In di Trafo AMo4 - PT Krakatau Steel dan Tie In di Trafo AMo8 - PT Krakatau Utama, Kabupaten Cilegon, Banten.
- PT Pelangi Cakrawala Losarang untuk ruas transmisi Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi (Pipa *Dedicated* Hilir) Lapangan Cemara PT Pertama EP
- PT Chang Jui Fang Indonesia dan PT Tirta Bening Mulia, Indramayu, Jawa Barat.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan hak khusus tersebut, saat ini telah disusun rancangan kebijakan berikut:

- Draft Final Pedoman Akun Pengaturan untuk Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk pipa transmisi dan telah dilakukan koordinasi dengan Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Transmisi, yaitu PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas dan PT PGN (Persero) Tbk.; dan
- Draft Final Pedoman Biaya Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa *Dedicated* Hilir. Adapun yang melatarbelakangi adanya Biaya Hak Khusus adalah Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 Pasal 5 huruf h disebutkan bahwa "Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan biaya Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa".

1. Jumlah keluhan Badan Usaha di bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa.

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemangku kepentingan adalah mendapatkan umpan balik, baik berupa keluhan atau rekomendasi. Selama tahun 2010 hal ini telah dimulai, namun demikian sampai dengan akhir tahun belum ada keluhan formal yang diterima dari bidang usaha BBM dan Gas Bumi melalui pipa. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% atau tidak adanya keluhan (*zero complaint*) pelanggan.

2. Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa

Realisasi jumlah Badan Usaha yang memanfaatkan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa pada tahun 2010 ini adalah sebanyak 3 badan usaha, jumlah ini melampaui dari target yang ditetapkan sebanyak 2 badan usaha, dengan demikian capaian kinerja mencapai 150%.

Tiga badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa tersebut adalah:

- a. PT Transportasi Gas Indonesia, yang memanfaatkan ruas Ruas Grissik – Singapura
- b. PT Pertamina Gas, yang memanfaatkan Ruas Pagerungan – Porong – Gresik bersama Shipper PT KEIL di Jawa Timur
- c. Shipper Medco yang memanfaatkan ruas transmisi bersama PT Pertamina Gas di Sumatera Selatan.

3. Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPH Migas adalah penarikan iuran dari Badan Usaha, iuran ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2010 realisasi penerimaan iuran dari Badan Usaha sebesar Rp 459 Miliar, jumlah ini melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 433 Miliar atau capaian kinerja sebesar 106%.

Besarnya penerimaan iuran dari Badan Usaha yang melampaui target, dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- Adanya beberapa Badan Usaha yang membayar kewajiban iuran diatas rencana penetapan; dan
- Adanya beberapa Badan Usaha yang membayar kewajiban iuran tetapi belum ada penetapan dari BPH Migas.

Sasaran 2: Pengungkapan Potensi Geologi Indonesia Untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

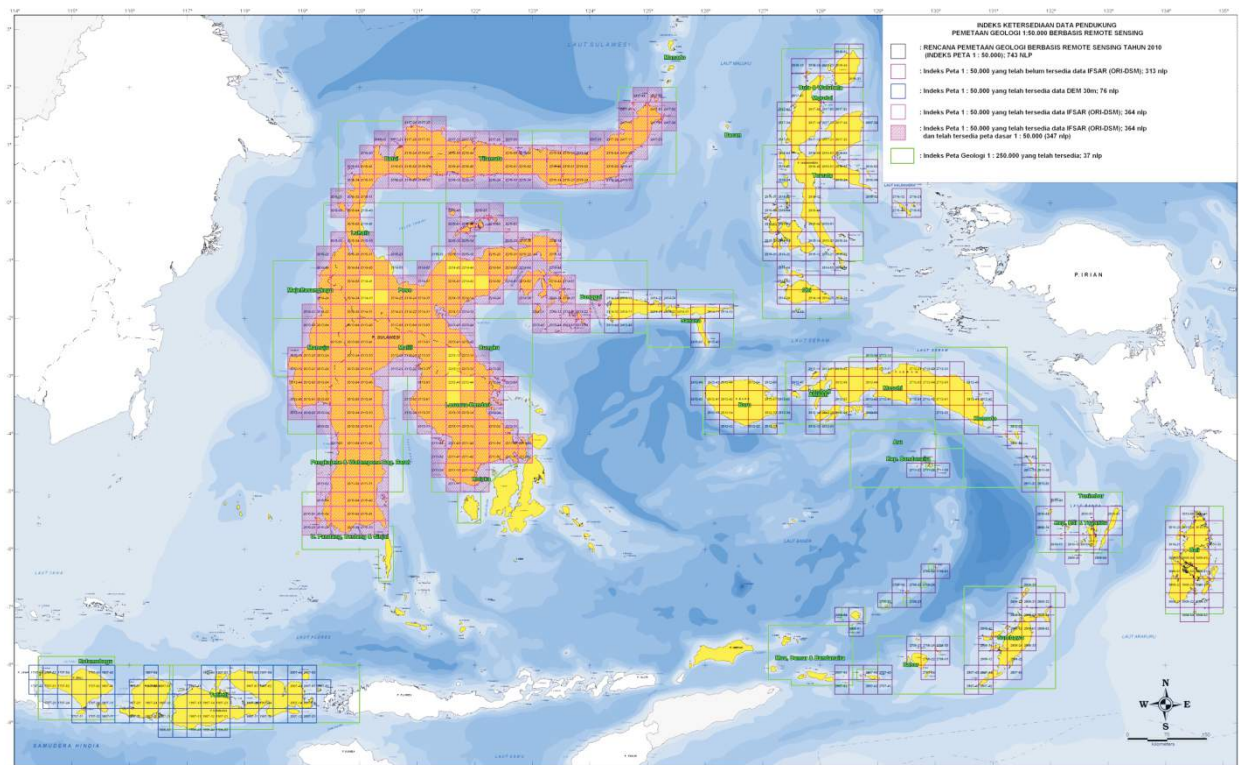
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah peta geologi berbasis indera skala 1:50.000 yang dihasilkan dan digunakan	Lembar	740	758	102%
2.	Jumlah sumur bor daerah sulit air	Titik bor	100	100	100%
3.	Jumlah usulan rekomendasi Wilayah Kerja pertambangan (WKP) dan WP	WKP	8	8	100%
		WUP	355	355	100%
		WPN	96	96	100%
		WIUP	-	165	
4.	Jumlah wilayah keprospection, potensi, dan status sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, Gambut, Bitumen padat, dan mineral)	Wilayah	73	72	98,63%
5.	Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi	Kegitan	15	23	153%
6.	Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000	Kawasan	2	2	100%
7.	Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur	Lokasi	13	13	100%
8.	Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	7	7	100%
9.	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	13	13	100%

10.	Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	Gunung Api	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	100 %
-----	---	------------	---	---	-------

1. Jumlah peta geologi berbasis inderaan skala 1:50.000 yang dihasilkan dan digunakan

Peta geologi skala 1 : 50.000 yang ditargetkan untuk dipetakan berjumlah 740 lembar (Gambar 1), yang meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, sebagian NTB. Realisasi peta geologi yang dihasilkan pada tahun ini dapat melebihi target, yaitu 758 lembar atau sekitar 102 %.

WILAYAH PEMETAAN GEOLOGI SKALA 1 : 50.000 BERBASIS REMOTE SENSING

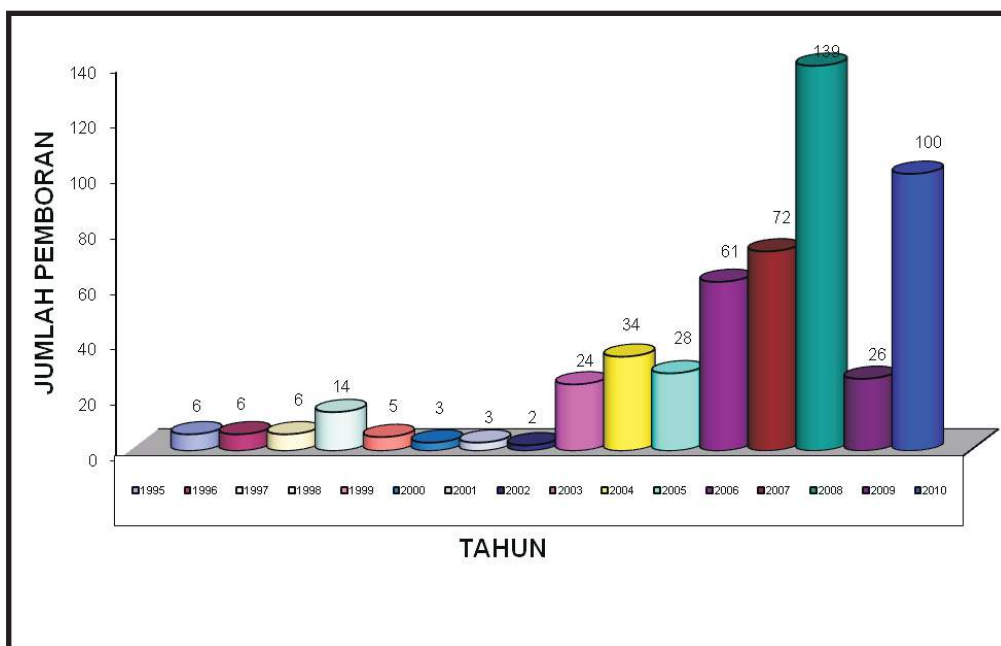


Gambar 5.21. Wilayah pemetaan Geologi Skala 1 : 50.000

2. Jumlah sumur bor daerah sulit air

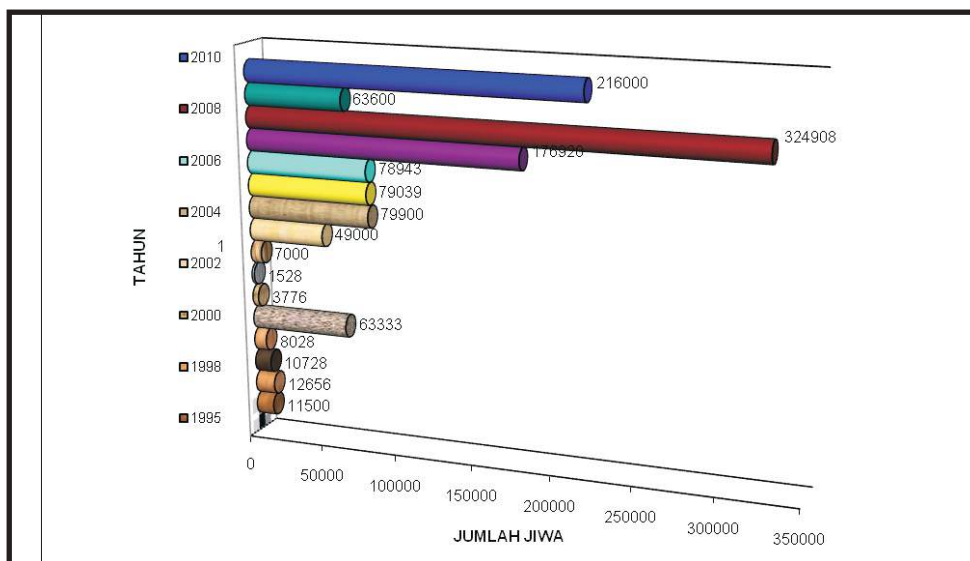
Realisasi capaian kinerja kegiatan penyediaan sumur bor daerah sulit air adalah dengan hasil berupa terkoordinasinya kegiatan penyediaan sumur bor dan prasarana air bersih dengan PEMDA setempat di 102 lokasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dan meningkatnya kemudahan penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air. Kegiatan pemboran air tanah ini sebanyak 100 lokasi tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia

JUMLAH TITIK PEMBORAN AIR TANAH



Grafik 5.33. Titik Pemboran Air Tanah

JUMLAH MASYARAKAT YANG DAPAT MENIKMATI AIR BERSIH



Gambar 5.34. Jumlah masyarakat yang dapat menikmati air bersih

3. Jumlah usulan rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP)

Keseluruhan usulan rekomendasi Penyiapan Data Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP) dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Usulan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- WKP baru panas bumi beserta potensi cadangan terduga menghasilkan peningkatan status WKP baru menjadi 26 WKP panas bumi dengan total potensi sebesar 2.951 MW.

Tabel 5.49.

Wilayah Kerja Panas Bumi

No.	Nama WKP	Provinsi	Potensi (MWe)
1.	Bonjol	Sumatera Barat	200
2.	Danau Ranau	Lampung	210
3.	Gunung Endut	Banten	80
4.	Lesugolo	NTT	55
5.	Lompio-Tambu	Sulawesi Tengah	25 & 14

- WUP, WPN, dan WIUP baru mineral logam beserta potensi cadangan terduga, disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.50.

WUP, WPN dan WIUP Baru Mineral Logam

No	Pulau	WUP	WPN	WIUP
1	Jawa	11	3	-
2	Sumatera	66	22	-
3	Kalimantan	43	5	165
4	Sulawesi	47	22	-
5	Nusa Tenggara	28	-	-
6	Maluku	27	2	-
7	Papua	28	4	-
Total		250	58	165

4. Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, Gambut, Bitumen padat, dan mineral)

Pada tahun 2010 ini jumlah pengungkapan potensi sumber daya geologi adalah sebanyak 23 wilayah keprospekan potensi panas bumi, 23 wilayah keprospekan potensi energi fosil (batubara, gambut, CBM dan bitumen padat) dan 17 wilayah keprospekan potensi mineral serta 10 wilayah keprospekan optimasi nilai tambah dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral.

5. Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi

Kegiatan mitigasi di kawasan Gunung Merapi pada tahun 2010 ini realisasi capaian kinerjanya melebihi target atau mencapai 147% karena pada bulan Oktober dan November 2010 terjadi krisis Gunung Merapi atau erupsi Gunung Merapi sehingga kegiatan pemantauan, mitigasi dan wajib latih di sekitar Gunung Merapi (4 Kabupaten) lebih diintensifkan.

Kegiatan tersebut antara lain Survei laharan dan pemasangan peringatan dini lahar dingin Gunung Merapi (2 kali), Pemasangan alat Optimalisasi Pemantauan Gunung Merapi (2 kali), Survei Kubah Lava (2 kali), Survei EDM dan Deformasi (6 kali), Survei Geofisika dan Seismik (3 lokasi), Survei Geokimia (3 lokasi), kegiatan tanggap darurat letusan Gunung Merapi dan wajib latih bahaya Gunung Merapi (4 kali). Sistem peringatan dini lahar merapi melalui AFM (Acoustic Flow Monitoring) dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 5.22. Dampak Letusan Gunung Merapi tanggal 26 Oktober 2010 (kiri) dan 3 November 2010 (kanan).

6. Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000

Pada tahun 2010 ini KESDM telah melaksanakan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang sebanyak 7 lokasi, yaitu pada daerah: Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi; Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jabodetabekpunjur; dan Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi

Pemantauan kegiatan gunung api aktif tipe A pada tahun ini mencapai 100 %, Seluruh gunungapi tipe A (68 gunung api) dipantau secara intensif dari Pos Pengamatan Gunung Api, 37 diantaranya selain dipantau melalui Pos Pengamatan Gunung Api juga dipantau melalui Regional Center (10 Regional Center). Seluruh data kegempaan tersebut ditransmisikan ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung melalui VSAT, khusus untuk Gunung Api Anak Krakatau data kegempaan ditransfer melalui VSAT tanpa melalui Regional Center. Transmisi data deformasi (tilt dan GPS) dari beberapa gunung api ke PVMBG melalui sistem SMS dan VSAT. Data tilt yang terpantau melalui sistem SMS meliputi Gunung Api Talang, Gunung Api Merapi, Gunung Api Kelud, Gunung Api Batur, dan Gunung Api Anak Krakatau. Sedangkan data GPS Gunung Api Lokon terkirim melalui sistem VSAT. Transmisi data gas dari Gunung Api Dieng dan Gunung Api Merapi dilakukan melalui sistem SMS.

Sasaran 3: Pemfasilitasian Yang Efektif Dan Efisien Untuk Menunjang Ketahanan Energi Nasional.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.51.
Indikator Kinerja Sasaran 3 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah rancangan kebijakan di bidang energi yang terselesaikan	Kajian	2	2	100%
2.	Jumlah daerah yang menyusun Rencana Umum Energi Daerah	Daerah	33	8	24.2%
3.	Jumlah penetapan dan review Rencana Umum Energi Nasional	Buah	1	-	0
4.	Jumlah wilayah rawan krisis dan darurat energi yang teridentifikasi	Wilayah	33	13	39.4%
5.	Persentase rekomendasi lokasi dan besaran (volume) cadangan penyangga energi	% (region)	100 5	100 5	100%

1. Rancangan Kebijakan Di Bidang Energi Yang Terselesaikan

Pada tahun 2010 ini telah disusun 2 kajian rancangan kebijakan di bidang energy atau sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan (100%), yaitu:

- Kajian mengenai survey pemetaan lokasi cadangan penyangga di Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut diharapkan adanya suatu konsep mengenai lokasi dan besarnya cadangan penyangga.



- Kajian mengenai survey pasokan dan kebutuhan energi pada 11 wilayah. Berdasarkan kajian tersebut diharapkan kemampuan pasokan dan kebutuhan energi pada wilayah tersebut dapat diketahui sehingga kondisi krisis dan darurat energi dapat ditanggulangi secara dini.

2. Daerah yang Menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk periode 5 tahun adalah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah (provinsi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Sampai dengan akhir tahun 2010 belum semua daerah menyusun RUED. Hal ini dikarenakan belum adanya Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi (RUE).

Sampai dengan saat ini terdapat 8 (delapan) provinsi yang telah melakukan penyusunan Perencanaan Energi Daerah, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua yang merupakan kerjasama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Casindo (Belanda).

3. Jumlah Penetapan Dan Review Rencana Umum Energi Nasional

Sesuai dengan UU Nomor 30/2007 Tentang Energi, Kementerian ESDM adalah unsur pemerintah yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) setiap 5 tahun sekali sebagai rencana jangka menengah dalam pengelolaan sumber-sumber dan penggunaan energi nasional.

Dalam tahun 2010 ditargetkan untuk menyelesaikan RUEN tahun 2010 -2014. Namun demikian sampai dengan akhir tahun 2010 target ini belum tercapai sebab menunggu ditetapkan Kebijakan Energi Nasional Periode 2010-2050 oleh Pemerintah.

4. Jumlah Wilayah Rawan Krisis Dan Darurat Energi Yang Teridentifikasi

Pada tahun 2010 telah dilakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Daerah, dan Pertamina di 13 Provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam; Sumatera Utara; Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB); Bangka Belitung; Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo; Sulawesi Selatan, Utara dan Barat (Sulselbar); Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng); Maluku dan Maluku Utara; Papua dan Papua Barat; Kepulauan Riau, Kalimantan Barat; Jawa Barat. Capaian ini belum meliputi seluruh wilayah rawan krisis dan darurat energi yang ada di 33 provinsi. Oleh sebab itu capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan atau 39,4%.

Namun demikian dalam rangka menjalankan tugas ke-3 Dewan Energi Nasional (DEN) yaitu menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah pada tanggal 20 Juli s.d. 7 Agustus 2010. Daerah yang dikunjungi adalah Papua, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Dari hasil kunjungan ditemukan hal-hal berikut:

- a. Usaha PLN untuk menghilangkan pemadaman bergilir dengan membangun/penyewaan PLTD sudah cukup baik, akan tetapi di lapangan masih banyak ditemukan keluhan terjadinya pemadaman listrik.
- b. Dari hasil kunjungan ke lapangan ditemukan banyak proyek pembangkit Percepatan I dan proyek PLN yang terlambat, bahkan baru akan selesai setelah tahun 2011, sehingga penggunaan PLTD berbahan bakar BBM akan berkepanjangan dan membebani APBN dengan subsidi yang besar.
- c. Penyewaan PLTD di atas, akan membebani Pertamina karena harus memasok BBM dalam jumlah yang sangat besar dan jangka waktu yang pendek.

- d. Di beberapa daerah yang dikunjungi rasio elektrifikasi masih sangat rendah, penyambungan listrik baru masih dibatasi, dan penggunaan minyak tanah untuk rumah tangga masih tinggi (penggunaan elpiji masih terbatas).
- e. Di beberapa daerah ditemukan pembangunan tenaga listrik yang terkendala karena masalah pembebasan tanah. Penyebabnya antara lain karena terjadinya tumpang tindih dengan daerah konservasi hutan dan tanah ulayat.
- f. Terdapat masalah sinkronisasi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan antara Pemerintah Daerah dan PLN.
- g. Konsep Program Desa Mandiri Energi (DME) dinilai cukup baik untuk menyelesaikan permasalahan energi di daerah pedesaan. Tetapi di lapangan ditemukan beberapa DME tidak dapat berjalan dengan baik (tidak sustainable).

Dari hasil koordinasi tersebut dan koordinasi dengan *stakeholders* bidang energi telah dihasilkan Rancangan Rumusan Kondisi Krisis dan Darurat Energi (Tenaga listrik, BBM, dan LPG). Rancangan ini belum selesai dan akan dilanjutkan pada kegiatan tahun 2011.

5. Rekomendasi Lokasi Dan Besaran (Volume) Cadangan Penyangga Energi

Salah satu misi utama Kementerian ESDM adanya menjamin adanya ketersediaan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri. Salah satu aktivitas penting terkait dengan misi adalah adanya lokasi dan besaran Cadangan Penyangga Energi (CPE). Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, realisasi capaian dalam tahun 2010 adalah 100%. Berbagai langkah kebijakan yang ditempuh untuk mendukung aktivitas ini adalah:

- 1) Pemilihan lokasi penempatan cadangan penyangga BBM didasarkan pada beberapa faktor, yaitu:
 - Kapasitas Penyimpanan Energi
 - Ketahanan Penyimpanan Energi (*Coverage Day*)
 - Waktu distribusi energi dan sumber (RTD)
 - Kapasitas Pelabuhan (DWT)
 - Konsumsi Energi per hari (DOT)
 - Laju Pertumbuhan Konsumsi Energi per tahun (LPK)
- 2) Berdasarkan hasil analisa, maka wilayah Indonesia dibagi menjadi 5 region, yaitu:
 - Region Sumatera, meliputi semua wilayah di Sumatera
 - Region Jawa bagian Barat dan Tengah, meliputi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta.
 - Region Jawa bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 - Region Kalimantan, meliputi semua wilayah di Kalimantan.
- 3) Perhitungan Penetapan Cadangan Penyangga Energi di Indonesia, meliputi:
 - Perhitungan Cadangan Penyangga BBM di Indonesia;
 - Perhitungan Cadangan Penyangga LPG di Indonesia;
 - Perhitungan Cadangan Penyangga Batubara di Indonesia

.Sasaran 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.52.
Indikator Kinerja Sasaran 4 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis	Dokumen	3	3	100%
2.	Persentase dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis	%	60	50	83,3%
3.	Pencapaian kinerja KESDM sesuai target	%	100	96.38	96.38%
4.	Persentase anggaran KESDM yang digunakan untuk menunjang Prioritas nasional	%	52	47,84	92%
5.	Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari, minggu, dll)	%	95	105	110.5 %
6.	Opini BPK terhadap LK	Jenis opini	WTP	WTP	100%
7.	Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan KESDM	%	90	80.74	89.7%
8.	Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	Buah	25	28	112%
9.	Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	Kasus	3	3	100%
10.	Rasio berita negatif, netral dan positif	%	10 : 85 : 5	6 : 89 : 5	88,24 %

1. Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis

Terciptanya sinergi dalam dokumen perencanaan merupakan tugas manajemen yang tidak mudah untuk dilaksanakan, apalagi jika mencakup sumber-sumber daya yang banyak dan beragam. Namun demikian dokumen perencanaan strategis yang telah berhasil disusun pada tahun 2010 ini oleh Kementerian ESDM berjumlah 3 dokumen, yaitu : Renstra KESDM 2010-2014; Dokumen Rencana Kerja Kementerian ESDM dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran KESDM. Ketiga dokumen tersebut merupakan rangkaian dokumen perencanaan yang saling terkait satu dengan lainnya serta selaras, dan merupakan acuan untuk pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dalam lingkungan organisasi KESDM. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, keseluruhan target kinerja tersebut dapat dicapai atau dengan nilai capaian sebesar 100%.

2. Persentase dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis

Pada tahun 2010 ini ditargetkan sebesar 60% dokumen kesepakatan kerja sama dapat diselesaikan dan diimplementasikan. Namun yang berhasil direalisasikan sebesar 83,3%, yaitu dari 6 dokumen (MOU) yang ditargetkan, sebanyak 5 MOU yang dapat ditandatangani dan diimplementasikan. Secara lengkap rincian dokumen MOU yang telah disepakati dapat dilihat dalam lampiran LAKIP ini.

3. Pencapaian kinerja KESDM sesuai target

Pada tahun 2010 ini, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menargetkan pencapaian kinerja Kementerian ESDM secara keseluruhan adalah 100%. Namun yang berhasil dicapai adalah 96,38% angka ini lebih rendah 2,58% dibandingkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 98,9%. Capaian kinerja tahun 2010 sesuai aspek tugas dan fungsi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.53.
CAPAIAN KINERJA KESDM TAHUN 2010

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
KINERJA BIDANG MIGAS					
1	Penandatanganan Wilayah Kerja	WK	43	21	48
2	Produksi Minyak Bumi	MBOPD	965	945	98
3	Lifting Minyak Bumi	MBOPD	965	954	99
4	Penerimaan Negara	Rp. Triliun	215	219,2	102
5	Volume BBM Bersubsidi	Juta KL	36,5	38,38	105

KINERJA BIDANG KETENAGALISTRIKAN					
6	Kapasitas Pembangkit	MW	1150	600	52
7	Jaringan Transmisi	Kms	1102	330	30
8	Kapasitas Gardu Induk	MVA	90	90	100
9	Kapasitas Gardu Distribusi	MVA	45	45	100
10	Jaringan Distribusi	Kms	2694	2694	100
11	Rasio Elektrifikasi	%	67,2	66,6	99,1
12	Investasi	US\$. Miliar	7,83	4,97	63,5
13	Subsidi	Rp. Triliun	55,1	62,8	114
14	Investasi	US\$ Miliar	2,119	3,186	150
KINERJA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA					
15	Produksi Batubara	Juta Ton	270	275	102
16	Batubara Domestik	Juta Ton	64,96	67	103
17	Produksi Mineral:				

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tembaga	Ton	930.000	989.953	106
	Emas	Ton	107	111	104
	Perak	Ton	355	323	91
	Timah	Ton	90.000	78.965	87
	Nikel Matte	Ton	77.000	78.336	101
	Ferronikel	Ton	15.000	17.970	115
	Bijih Nikel	Ton	6.200.000	6.561.404	106
	Bauksit	Ton	7.500.000	7.148.124	95
18	Penerimaan Negara:				
	PNBP	Rp. Triliun	15,2	18,29	120
	Pajak	Rp. Triliun	45,6	48,04	105
KINERJA BIDANG ENERGI BARU BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI					
19	Penandatanganan Wilayah Kerja Panas Bumi	WK	3	3	100
20	Produksi Panas Bumi	MWe	190	130	68
21	Investasi	Rp. Triliun	3,29	2,56	78
22	Penerimaan Panas Bumi	Rp. Miliar	244	282	116
23	Pembangunan DME	Desa	50	50	100
Rata-rata					96.38

Penjelasan tentang faktor penyebab dan langkah-langkah ke depan dari capaian kinerja di atas telah diuraikan pada tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing indikator kinerja.

4. Persentase penggunaan anggaran KESDM yang menunjang Prioritas nasional

Anggaran KESDM yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program nasional yang tercantum dalam RKP. Pada tahun 2010 ditargetkan bahwa 52% dari total anggaran yang ada digunakan untuk kegiatan sesuai prioritas nasional, namun yang berhasil dicapai tahun 2010 ini adalah sebesar 47,84%, sehingga capaian kinerja mencapai 92% dari yang ditargetkan. Hasil capaian kinerja ini memberikan implikasi bahwa lebih dari 50% anggaran KESDM digunakan untuk berbagai kegiatan yang bukan sebagai kegiatan prioritas dalam RKP Tahun 2010. Sebagai konsekuensi dari kondisi ini, maka perlu dilakukan penajaman fokus program/kegiatan dalam tahun-tahun mendatang yang mengacu pada prioritas nasional dalam RKP.

5. Persentase Penyajian LK tepat waktu (e.g hari, minggu, dll)

Pertanggungjawaban APBN melalui proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi syarat kualitatif (ukuran kualitas) supaya bisa memberi manfaat yang optimal dalam pembuatan keputusan oleh para penggunanya. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ukuran kualitas utama dari laporan keuangan adalah relevan dan ketersediaan dengan itikad baik (*faithful representation*). Salah satu faktor penunjang dari ukuran kualitas utama tersebut adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Terkait dengan ketepatan waktu, dalam tahun 2010, persentase realisasi penyajian laporan keuangan 105% dibandingkan yang direncanakan yaitu sebesar 95% dari batas waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya capaian kinerja sebesar 110% atau dengan kata lain, bahwa laporan keuangan dapat disediakan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, namun di tahun-tahun mendatang target pencapaian ini akan ditingkatkan untuk lebih memacu pencapaian sasaran di tahun 2011.

6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Salah satu komitmen utama pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2004-2009 adalah perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Keberhasilan hal ini dapat digambarkan melalui berbagai indikator antara lain dalam pengelolaan keuangan negara. Sejalan dengan hal ini salah satu sasaran strategik yang ingin dicapai oleh KESDM adalah terwujudnya laporan keuangan yang kredibel, yang diukur melalui opini hasil audit laporan keuangan oleh auditor external (BPK).

Tahun 2010 ini, Kementerian ESDM berhasil mewujudkan target capaian kinerja yaitu hasil opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini tidak terlepas dari kerja keras unit pengelolaan keuangan di KESDM.

Perlu dijelaskan bahwa capaian kinerja ini merupakan jawaban atau penyelesaian atas berbagai permasalahan pengelolaan keuangan selama ini, diantaranya: (1) Pencatatan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum sudah tertangani dengan baik; (2) Seluruh pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan; dan (3) Pencatatan dan pelaporan aset tetap juga telah memadai. Diharapkan di masa mendatang ukuran kredibilitas laporan keuangan yang telah tercapai ini dapat terus dipertahankan.

7. Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan KESDM

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara adalah tersiptanya efisiensi dan efektivitas anggaran. Efisiensi merupakan ukuran perbandingan antara output dengan input, dengan asumsi bahwa kuantitas dan kualitas output yang sama dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran perbandingan antara output dengan outcome atau dengan kata lain output yang ada dapat menciptakan outcome sebagaimana yang ditargetkan.

Secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran KESDM dalam tahun 2010 adalah sebesar 69% dari target sebesar 76%. Hal ini berarti bahwa dari segi penyerapan anggaran capaian kinerja ESDM adalah 90%. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai faktor. Dua faktor yang dominan dan membutuhkan perhatian di masa mendatang adalah masih adanya blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan dan adanya sejumlah pekerjaan yang gagal lelang karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

8. Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan

Pada tahun 2010 ini, jumlah rancangan peraturan per-UU-an sektor ESDM yang dapat diselesaikan sebanyak 28 buah. Hal ini melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebanyak 25 buah. Dengan demikian capaian kinerja untuk mencapai sasaran ini sebesar 112%. Rancangan peraturan perUndang-Undangan yang dapat diselesaikan di tahun 2010 ini sebanyak 28 buah, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.54.
Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan

No.	Bentuk Peraturan	Jumlah
1.	UU	-
2.	PP	6
3.	Perpres/Keppres	3
4.	Permen	19
Jumlah		28

Secara lengkap rincian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat diselesaikan dapat dilihat dalam lampiran.

9. Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan

Pada tahun 2010 ini, Sekretariat Jenderal KESDM melalui Biro Hukum dan Humas, telah berhasil menyelesaikan 3 perkara/kasus hukum yang terkait dengan sektor ESDM. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tiga perkara/kasus hukum yang dapat diselesaikan terkait dengan sektor ESDM adalah sebagai berikut:

Perlawanan Pihak Ketiga Pembatalan Putusan Arbitrase Pemerintah RI vs PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 31 Maret 2009, dengan Tergugat I: Menteri ESDM dan Tergugat II: PT Newmont Nusa Tenggara

Citizen Law Suit atas pemadaman bergilir Presiden RI, Tergugat I MESDM, Tergugat II PT PLN, Tergugat III

Uji Materiil UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Secara lengkap rincian perkara/kasus hukum yang dapat diselesaikan yang dapat diselesaikan dan dimenangkan dapat dilihat dalam lampiran.

10. Rasio berita negatif, netral dan positif

Salah satu ukuran keberhasilan suatu organisasi tergambar melalui citra (*image*) organisasi tersebut pada masyarakat. Salah satu sarana untuk mendapatkan citra tersebut melalui berbagai pemberitaan oleh media massa. Secara garis besar pemberitaan ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: negatif, netral dan positif.

Secara keseluruhan capaian kinerja rasio berita negatif, netral dan positif Kementerian ESDM pada tahun 2010 mencapai 88,24%, dengan komposisi:

Tabel 5.55.
Rasio Berita Positif, Negatif dan Netral

Jenis Berita	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Negatif	%	10	6	60%
Netral	%	85	89	104.7%
Positif	%	5	5	100%

Pemberitaan negatif di tahun 2010, yang fenomenal diantaranya adalah:

1. Banyaknya terjadi ledakan tabung gas elpiji 3 kilogram.
2. Kenaikan tariff dasar listrik (TDL) sebesar 10% yang diberlakukan pada bulan Juli tahun 2010.
3. Kerusakan *fuel pump* yang dikaitkan dengan penggunaan bahan bakar premium.
4. Pesimisme beberapa kalangan terhadap efektifnya rencana pengaturan penggunaan BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan pada bulan April tahun 2011.

Sedangkan pemberitaan positif 2010 diantaranya adalah:

1. Meningkatnya peran swasta dalam proyek pembangunan sektor kelistrikan 10.000 MW Tahap II.

2. Deklarasi “Indonesia Bebas Pemadaman Bergilir 2010” Oleh Presiden SBY di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
3. Semakin tegasnya kewajiban mementingkan kebutuhan batubara domestik atau disebut juga dengan *Domestic Market Obligation* (DMO) setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Pemerintah menyiapkan sekitar 3,82 juta paket elpiji ukuran tabung 3 kilogram (kg) yang akan didistribusikan pada 2011, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di beberapa wilayah yang belum mendapatkan program konversi minyak tanah ke elpiji pada tahun 2010.

Sasaran 5: Perwujudan KESDM Yang Bersih, Akuntabel Dan Transparan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.54.
Indikator Kinerja Sasaran 5 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyelesaian kasus atas kewajiban penyetoran kepada kas negara	US/Rp	Rp. 4.067.203.020,-	Rp. 4.067.203.020,-	100%
			US\$ 7,250,000.00	US\$ 7,250,000.00 -	100%
2.	Pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti	Pengaduan	15	15	100%
3.	Penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu	LHP/ MHP	160	163	100%
4.	Indeks kepuasan unit eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi	Unit Es. I	8	8	100%
5.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Obrik	115	115	100%
6.	Reviu laporan keuangan	Unit Es. I	8	8	100%
7.	Realisasi pelaksanaan PKPT	Obrik	160	163	101,90%
8.	Pegawai Itjen yang mentaati ketentuan jam kerja	Orang	198	198	100%



Salah satu langkah strategis untuk mendukung terciptanya institusi yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah melalui mekanisme pengawasan. Pada Tahun Anggaran 2010 pemeriksaan kinerja oleh Inspektorat Jenderal KESDM dilaksanakan terhadap 163 obrik atau 101,90 % dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 160 obrik. Realisasi di atas target ini terjadi karena ada pemekaran organisasi (pemecahan obrik).

Jumlah temuan pada Tahun Anggaran 2010 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 terdapat peningkatan temuan per obrik yaitu dari 4,93 temuan per obrik pada Tahun Anggaran 2009 menjadi 5,88 temuan per obrik pada Tahun Anggaran 2010. Rinciannya adalah 809 temuan dari 164 obrik pada Tahun Anggaran 2009 menjadi 788 temuan dari 134 obrik (dari 163 obrik yang telah diperiksa) pada Tahun Anggaran 2010.

Demikian juga nilai kewajiban penyetoran kepada kas negara pada Tahun Anggaran 2010 mengalami penurunan sebesar Rp.37.725.757.459,- sedang untuk nilai US\$ mengalami peningkatan senilai US\$.6,481,693.67 bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2009 yaitu Rp.41.792.960.479,- dan US\$.768,306.33 menjadi Rp.4.067.203.020,- dan US\$.7,250,000.00 di tahun 2010.

Temuan hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2010 yang menonjol adalah Kelemahan Administrasi (266 temuan/33,75%) dan Pelanggaran terhadap Prosedur dan Tata Kerja yang Telah Ditetapkan (168 temuan/21,32%). Sedangkan penyebab yang menonjol adalah Kelemahan dalam Pembinaan Personil (336 penyebab/50,15%) dan Kelemahan dalam Rencana (388 penyebab/39,59%).

Selanjutnya guna meningkatkan peran pengawasan intern maka fokus sasaran dan kegiatan di masa mendatang adalah terselenggaranya sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang

Sasaran 6: Perwujudan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.57. Indikator Kinerja Sasaran 6 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah usulan paten dan hak cipta	Paten	6	6	100%
		Hak Cipta	3	3	100%
2.	Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional dan laporan ilmiah	Makalah	109	115	105.5%
3.	Jumlah masukan/ rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	29	28	96.6%
4.	Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral	Pilot Plant	24	29	120.8%
5.	Jumlah peta geologi kelautan	Peta	10	9	90%

1. Jumlah usulan paten dan hak cipta

Pada tahun 2010 ini, Kementerian ESDM melalui Badan Litbang ESDM berhasil merealisasikan usulan paten dan hak cipta yang telah ditargetkan yaitu 6 buah paten di bidang minyak dan gas bumi, mineral dan batubara serta bidang ketenagalistrikan masing-masing menghasilkan 2 buah paten, serta 3 buah hak cipta di bidang geologi kelautan. Uraian ringkas terkait capaian kinerja di atas adalah sebagai berikut:

a. Bidang Minyak dan Gas Bumi

- Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas
- Rancang Bangun Pembuatan Tabung ANG (Adsorbed Natural Gas) untuk Penyimpanan Bahan Bakar Gas

b. Bidang Mineral dan Batubara

- Pembakar dan Proses Pembakaran Siklon menggunakan Tepung Batubara
- Kokas Pengecoran Dari Batubara Coking Indonesia

c. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Bilah Turbin PLT-Angin 100 kW

- Alat Pengering Multi Fungsi Dengan Menggunakan Energi Panas Bumi

d. Hak Cipta Bidang Geologi Kelautan

- Peta Anomali Magnet Total
- Peta Potensi Gas Biogenik Perairan Pemekasan-Sumenep Selat Madura, Jawa Timur Skala 1:250.000
- Buku Partikel Mikroskopis Dasar Laut Nusantara

2. Makalah Ilmiah yang dipublikasikan Melalui Jurnal baik di tingkat Nasional maupun Internasional dan Laporan Ilmiah.

Jumlah Makalah yang berhasil dipublikasikan di tahun 2010 ini melebihi dari target yang ditetapkan. Dengan kata lain capaian kinerja mencapai 105%, yaitu dari 109 makalah yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 115 makalah. Topik makalah ini terdiri dari makalah di bidang minyak dan gas bumi, Mineral dan batubara, Ketenagalistrikan dan energi baru, serta bidang geologi. Rincian dari 115 makalah tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Minyak dan Gas Bumi (51 makalah):

1. Pengembangan Metode Seismo Radio Nuklida Untuk Eksplorasi Migas
2. Evaluasi Lahan Migas Sub Cekungan Upper Kutai Bagian Utara
3. Paleogeografi Pre-Tersier dan Potensi Hidrokarbon Cekungan Sula, Maluku Utara
4. Pengembangan Atlas Sidikjari Minyak Bumi Kawasan Indonesia Barat
5. Kajian Pengembangan Sumber Daya Migas di Cekungan Indonesia Barat
6. Kajian Potensi Gas Metana Batubara di Kalimantan Timur
7. Perancangan Sistem Monitoring Sumur-Sumur CBM Secara On-Line

8. Penyusunan Database Data Fluida Reservoir Migas
9. Pembuatan Surfaktan Untuk Aplikasi Pendesak Minyak Dengan Injeksi Kimia
10. Studi Pencegahan dan Penanganan Penyumbatan Minyak Berat Berdasarkan Analisis Laboratorium
11. Pengembangan Lanjut Metoda Pemonitoran Profile Pendesak Fluida
12. Studi Eksperimental Desain Untuk Menentukan Parameter Ketidakpastian Dalam Perhitungan Cadangan
13. Penelitian dan Pengembangan Aditif Gas Block Dalam Kaitannya Dengan Desain Formulasi Semen Pemboran
14. Penelitian dan Pengembangan Oil Base Mud yang Berbasis Pada Penggunaan Base Oil Dari Minyak Nabati
15. Inventarisasi dan Analisis Data Cadangan Migas Indonesia
16. Kajian Sekuestrasi CO₂ Skala Laboratorium Pada Coal Bed Reservoir
17. Pengaruh Efisiensi Energi Terbarukan Terhadap Penurunan CO₂
18. Emisi CO₂ di Sektor Energi dan Efisiensi Energi Terhadap Penurunan Emisi CO₂
19. Perdagangan Carbon
20. Potensi Penyimpanan CO₂ di Formasi Geologi
21. Optimasi Proses Femanfaatan Hasil Pencairan Batubara
22. Pengembangan Katalis Sintesis Fischer-Tropsch Untuk Pembuatan Bahan Bakar Cair Dari Gas Sintetis
23. Konversi Katalitik Limbah Plastik Menjadi Senyawa Fraksi Gasoline
24. Konfigurasi Kilang Baru Berbasis Crude Oilx-Kkks Blended Fokus Pada Keekonomian
25. Unit Peralatan Pembuatan Membran Serat Berongga Untuk Keperluan Pemisahan Gas Asam Dari Gas Alam
26. Pengaruh Kegiatan Industri Migas Terhadap Sumber Daya Hayati Perairan
27. Purifikasi Produk Biosurfaktan Menggunakan Bakteri Hidrokarbon-oklasik Pada Reaktor
28. Proses De-Oiling Untuk Perolehan Kembali Minyak Dalam Slack Wax Dan Pemurnian Slack Wax
29. Desulfurisasi Bbm Dengan Metode Membran Dan Adsorpsi
30. Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik Pada Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) Sebagai Bahan Baku Biofuel (Optimalisasi Proses Produksi Biomassa)
31. Peningkatan Mutu Biodiesel Melalui Optimalisasi Proses Pilot Plan Biodiesel "LEMIGAS"
32. Optimalisasi Produksi Etanol Dan Butanol Sebagai Energi Alternatif Melalui Proses Fermentasi
33. Pembuatan Aditif Combustion Booster dan Pack Kolom Untuk Mengurangi Emisi Co dan CO₂ Pada Kendaraan Bermotor
34. Evaluasi Mutu Udara Ambien Kegiatan Industri Migas Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

35. Penelitian Pengaruh Fraksi Kerosin Dalam Minyak Solar Terhadap Karakteristiknya dan Kinerja Mesin
36. Perkembangan dan Prospek Bahan Galian Nonlogam Indonesia.
37. Benefisiasi Lempung Bogor untuk Katalis Padat dalam Sintesis Biodiesel.
38. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Penutupan Tambang Batubara PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PT. BA-UPO) di Kota Sawahlunto.
39. Pemanfaatan Gypsum Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk Pembuatan Papan Gypsum.
40. Penggunaan Tras Sukabumi untuk Bahan Bangunan Beton Jenis Paving dan Conblock.
41. Preparation Of Mesoporous Silica from Bentonite by Ultrafine Grinding and Selective Leaching.
42. Barium Concentration in Deep Sea Surface Sediments from Tomini Basin: Vertical Distribution and Occurrence.

C. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (14 Makalah)

1. Start-Up Control Using DC Power Supply for Isolated Mode Operation of 100 kW Wind Power Plant
2. Rekayasa dan Uji Kinerja Reaktor Biogas Sistem Colar Pada Pengolahan limbah Cair Industri Tapioka
3. Efisiensi Penjerab Sistem Bio-FGD LPTU Batubara Skala Pilot Plant
4. Perkiraan Nilai Medan Magnet di Bawah SUTT-150 kV dan SUTET-500 kV Dengan Metode Perhitungan Masih Aman
5. Methane Storage Pada Karbon Aktif Pada Temperatur 270C, 350C dan 650C
6. Estimasi Waktu dan Sudut Pemutus Kritis Pada Sistem Tenaga Listrik Dengan Metode Luas Sama
7. Campuran Karbondioksida dan Propane Sebagai Refrigeran Temperatur Rendah Ramah Lingkungan Pada Sistem Refrigerasi Cascade
8. Analisis Kinerja PLTS Pada Sistem Hibrida PLTS 2.5 kW dan PLTMH 100 Kw Dengan Kasus Instalasi di UMM, Malang, Jawa Timur
9. Desain Dan Pembuatan Prototipe Sistem Monitoring dan Kendali Pemanfaatan Energi Listrik untuk Pengisian Kartu Penggunaan Energi
10. Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta: Survei, Potensi dan Keekonomian
11. Analisis Kedip Tegangan Akibat Pengasutan Motor Induksi Pada Mesin Schuler dan Tanur Listrik
12. Dinamika Intensitas CO₂ Subsektor Kelistrikan Indonesia
13. Analisis Torsi Cogging Pada Prototipe Generator Magnet Permanen 1KW/220V/300RPM

14. Rancang Bangun Pencatat Data Kelistrikan Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

D. Bidang Geologi Kelautan (25 Makalah)

1. Comparison Of Major Elements Between Marine Sediments And Igneous Rocks: As A Basic Determination Of The Sediment Source At Ujung Penyusuk Waters, North Bangka, Bangka Belitung Province
2. Heavy Minerals In Placer Deposit In Singkawang Waters, West Kalimantan, Related To Felsic Source Rock Of Its Coastal Area
3. Reconstrution Of Seawater $\delta^{18}O$ Signal From Coral $\delta^{18}O$: A Record From Bali Coral, Indonesia
4. The Rate Of Sedimentation Estimation Of Tanjung Api-Api Estuary South Sumatera By Using ^{210}Pb Profile
5. Heavy Metal Contents In Marine Sediments And Seawater At Totok Bay Area, North Sulawesi
6. Submarine Mass Movement And Localized Tsunami Potentiality Of Mentawai Basin, Sumatera, Indonesia
7. Paleo-Channels Of Singkawang Waters West Kalimantan Its Relation With The Occurrences Of Sub-Seabottom Gold Placers Based On Strata Box Seismic Records Analyses
8. 3d Properties Modeling To Support Reservoir Characteristics Of W-Itb Field In Madura Strait Area
9. The Safety Factor Analysis Of The Marine Slope Stability Model On The Access Channel Of Marine Centre Plan Cirebon
10. The Seafloor Morphology Of Sunda Strait For Under Water Cable Laying
11. Hubungan Keberadaan Mineral Kasiterit Dengan Besar Butir Berdasarkan Data Sedimen Permukaan Di Perairan Kundurmendol
12. Model Penurunan Sedimen Permukaan Dasar Laut Pada Dasar Rencana Pemecah Gelombang Di Teluk Pancamaya Banyuwangi - Jawa Timur
13. Studi Potensi Migas Dengan Metode Gayaberat Di Lepas Pantai Utara Jakarta
14. Verifikasi Litologi Terhadap Nilai Kerentanan Magnetik Di Perairan Bangka Belitung
15. Karakteristik Pantai Di Kawasan Pesisir Timur Pulau Natuna Besar, Kabupaten Natuna, Propinsi Riau
16. Identifikasi Proses Tombolo Tanjung Gondol Dengan Perhitungan Energi Flux Gelombang Di Pantai Singaraja, Bali Utara
17. Penelitian Timah Plaser Melalui Analisis Sayatan Oles Dan Geokimia : Studi Kasus Perairan Teluk Pinang, Provinsi Riau
18. Karakteristik Pantai Kawasan Pesisir Larantuka Dan Sekitarnya, P. Flores Timur Dan Kawasan Pesisir P. Adonara Barat
19. Proses Sedimentasi Dan Erosi Pengaruhnya Terhadap Pelabuhan, Sepanjang Pantai Bagian Barat Dan Bagian Timur, Selat Bali

20. Identifikasi Sub-Cekungan Di Cekungan Tomini Bagian Selatan, Berdasarkan Penampang Seismik 2d Dan Anomali Gaya Berat
21. Studi Awal Pola Struktur Busur Muka Aceh, Sumatra Bagian Utara (Indonesia): Penafsiran Dan Analisis Peta Batimetri
22. Struktur Geologi Di Perairan Pasang Kayu, Sulawesi Barat
23. Pembentukan Undak Batugamping Dan Hubungannya Dengan Struktur Diapir Di Perairan Tanjung Awar-Awar Paciran Jawa Timur
24. Penelitian Potensi Energi Arus Laut Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Di Perairan Toyapakeh Nusa Penida Bali
25. Kajian Fisik Lingkungan Geologi Untuk Pengembangan Kawasan Pantai Utara Di Kabupaten/Kota Cirebon Jawa Barat

4. Jumlah masukan/rekomendasi kebijakan

Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan oleh Kementerian ESDM, pada tahun 2010 adalah sebanyak 29 rekomendasi. Realisasi pencapaian targetnya adalah sebanyak 28 buah rekomendasi atau dengan nilai capaian sebesar 96,6%. Rincian realisasi masukan/rekomendasi kebijakan tahun 2010 adalah seperti diuraikan di bawah ini:

A. Bidang Minyak dan Gas Bumi

1. Evaluasi Lahan Migas Sub Cekungan Upper Kutai Bagian Utara
2. Kajian Potensi Gas Metana Batubara di Kalimantan Timur
3. Inventarisasi dan Analisis Data cadangan Migas Indonesia
4. Emisi CO₂ di sektor Energi dan Efisiensi Energi Terhadap Penurunan Emisi CO₂
5. Perdagangan Carbon
6. Kelayakan Pemanfaatan Gas Metana Batubara Untuk Pembangkit Listrik Rumah Tangga
7. Konfigurasi Kilang Baru Berbasis Crude Oil-Kkks Blended Fokus Pada Keekonomian
8. Rancang Bangun Pembuatan ANG (Adsorben Natural Gas) Untuk penyimpanan Bahan Bakar Gas
9. Analisis Biaya Rancangan Bed Adsorben Gas Bumi (Impurities Removal and Storage)

B. Bidang Mineral dan Batubara

1. Pemantauan dan analisis problema terkini (current issues) bidang pertambangan mineral dan batubara tahun 2010.
2. Penelitian pemanfaatan abu batubara PLTU untuk penimbunan pada pra reklamasi tambang batubara
3. Evaluasi cadangan batubara untuk penentuan penambangan tambang dalam (underground).
4. Pemodelan penangkapan CO₂ pasca-pembakaran pada pltu berbahan bakar batubara

5. Meningkatkan nilai tambah batubara dengan teknologi membuat bahan pengikat pembuatan kokas dari batubara
6. Pengembangan proses UBC skala pilot sebagai pendukung operasional proses UBC skala percontohan dan persiapan UBC skala komersial
7. Penerapan Teknologi Coal Water Fuel pada Industri Pengguna Boiler
8. Memperbaiki rancangan tungku tradisional di sentra-sentra UMKM seperti diperkenalkan di daerah Kabupaten Ciamis.
9. Pembuatan ingot silikon kualitas metalurgi dari pasir silika pengembangan industri sel-surya berbasis silikon
10. Ekstraksi alumina dari residu bauksit skala bench
11. Pembuatan pupuk majemuk dengan bahan mineral
12. Pengembangan model mitigasi emisi gas rumah kaca di sektor pertambangan
13. Penelitian hidrogeologi tambang untuk perencanaan sistem drainase tambang batubara bawah tanah

C. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

1. Kajian Kebijakan Harga Listrik Nasional
2. Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
3. Penyusunan menteri standarisasi PLTMH

D. Bidang Geologi Kelautan

1. Potensi ESDM Dasar Laut Di Landas Kontinen Indonesia Di Luar 200 Mil Laut Di Perairan Aceh Barat
2. Site Survei Geologi Dan Geofisika Kelautan Di Perairan Blok Masela, Perairan Tanimbar Dalam Kaitan Dengan Pemilihan Teknik Eksploitasi Migas (Floating Refinery Atau Transportasi Pipa Bawah Laut)
3. Rekomendasi Pemanfaatan Potensi Energi Arus Laut sebagai Pembangkit Listrik.

4. Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2010 ini, jumlah pilot plant yang berhasil direalisasikan adalah sebanyak 29 buah pilot plant dari berbagai bidang. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 24 buah pilot plant atau dengan kata lain capaian kinerja adalah sebesar 120,8%. Rincian 29 pilot plant masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

A. Bidang Minyak dan Gas Bumi

1. Pengembangan Metode Seismo-Radio Nuklida untuk Eksplorasi Migas
2. Studi Produksi Biomassa Mikroba Chlorophyceae Aquatik pada Photobioreaktor Tabung (Skala Pilot) sebagai Bahan Baku Biofuel

3. Pengembangan Model Adsorben Konversi Gas Bumi

B. Bidang Mineral dan Batubara

1. Pengembangan Prototype Plant Kokas Dengan Bahan Bakar Batubara
2. Optimasi Produksi Karbon Aktif Berbasis Batubara
3. Pengembangan Proses UBC Skala Pilot Sebagai Pendukung Operasional Proses UBC Skala Percontohan & Persiapan UBC Skala Komersial
4. Pengembangan Konveyor Nyumatik Terintegrasi Dengan Preheated Udara Pembakar Untuk Pembakar Siklon
5. Rancangan Alat Untuk Mendeteksi Gas Metana Pada Tambang Batubara Bawah Tanah Dengan Teknologi Sinar Infra Merah
6. Penerapan Teknologi Rekonstruksi Citra Deformasi Batuan Dengan Metode Tomografi Waktu Tunda
7. Rancang Bangun Otomatisasi Sistem Pengambilan Data "Pumping Test"

C. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

1. Penelitian dan Pengembangan PLT-Angin Sekala Menengah (dilanjutkan 2011)
2. Desain teknis pemanfaatan gas metan dari sanitary landfill dan Rancang bangun peralatan Gasifikasi sistem unggun fluidisasi (gagal Lelang, blokir dan penurunan pagu)
3. Perancangan dan Pembuatan Sel Tunam Berbahan Dasar Polimer (PEMC)
4. Perancangan dan Pembuatan Sel Tunam Berbahan Dasar Polimer (PEMC)
5. Rancang bangun bilah turbin PLT-Angin 100 kW
6. Perancangan sistem termodinamika PLTP sistem binary
7. Rancang bangun peralatan Gasifikasi sistem unggun fluidisasi
8. Perancangan GRID CONNECTION PV INVERTER
9. Rancang bangun sistem mikroalga kolam terbuka
10. Optimasi proses fermentasi air limbah tapioka sebagai sumber biogas
11. Perancangan ELEKTRONIC LOAD CONTROLLER pada PLTH
12. Rancang bangun Aplikasi solar tracker pada PLTS
13. Implementasi Turbin Sistem Ulir SBG Pembangkit Listrik
14. Penelitian Boiler Mini Tekanan Rendah Berbahan Bakar Biomassa sebagai Pembangkit Listrik dan Pengering Hasil
15. Rancang bangun sistem Bio-FDG pada PLTU Batubara

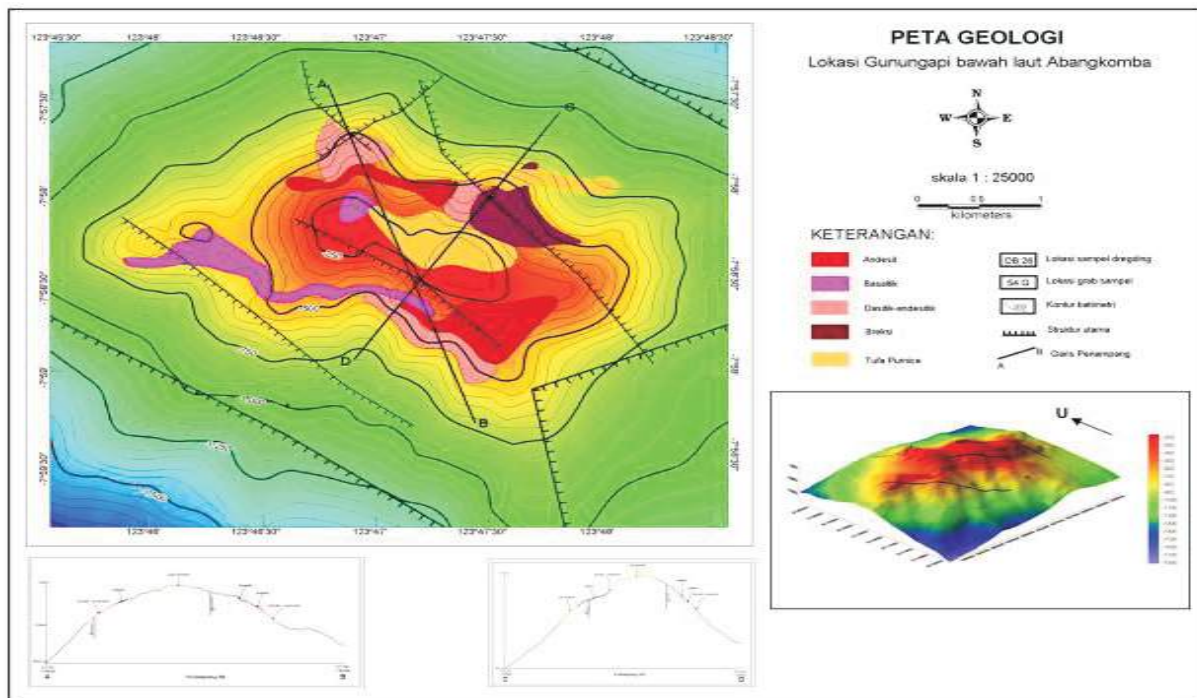
D. Bidang Geologi Kelautan

1. Echosounder Kalibrator
2. Bejana Tekan-Medium Pengkalibrasi Sensor Tekanan Massa Air
3. Penurun Alat Sound Velocity Profiler
4. Pembuatan Dua Benchmark Untuk Proses Kalibrasi Gyro Kompas Menggunakan Metode Pengamatan Matahari
5. Sistem Telemetri Untuk Penunjang Alat Pengamat Pasang Surut Digital

5. Jumlah peta geologi kelautan

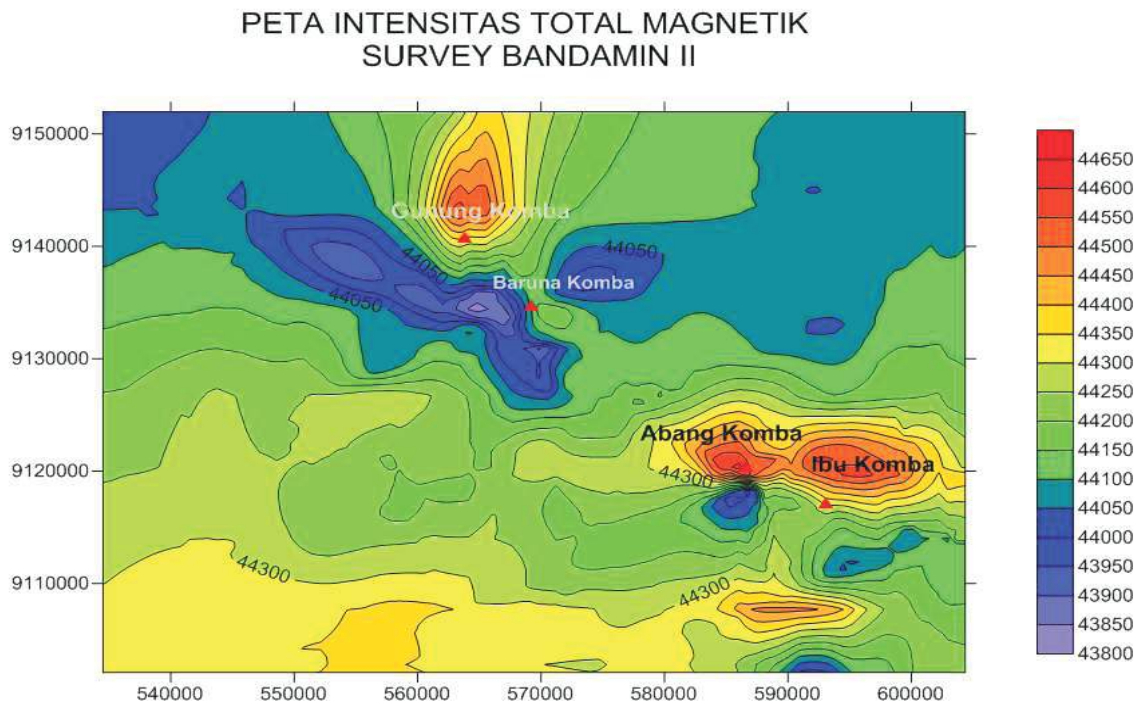
Kementerian ESDM ditahun 2010 ini menetapkan target pembuatan peta geologi kelautan sebanyak 10 buah peta, namun yang dapat direalisasikan adalah sebanyak 9 buah atau capaian kinerja sebesar 90%. Jumlah 9 peta tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Peta Geodinamika Gunung Bawahlaut Abang Komba di perairan Flores dan sekitarnya.



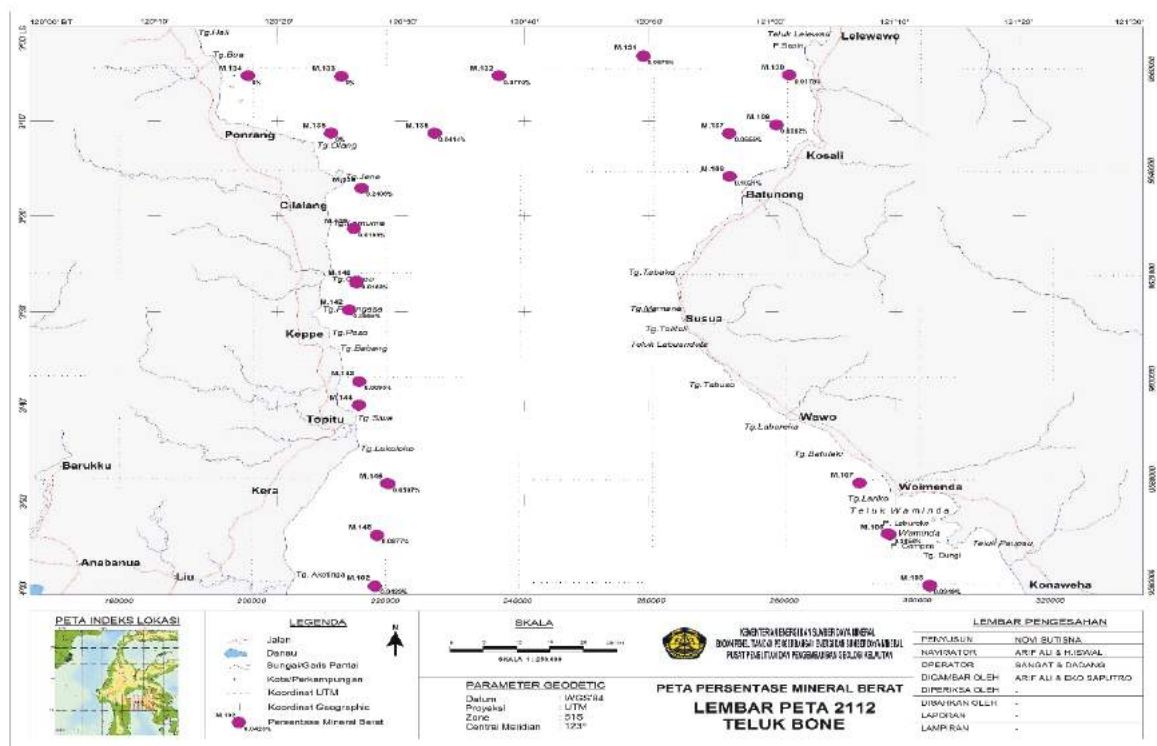
Gambar 5.23. Peta Geodinamika Gunung Bawahlaut Abang Komba

- Peta Anomali Geomagnetik Kelautan di Perairan Gunung Komba, laut Flores dan sekitarnya.

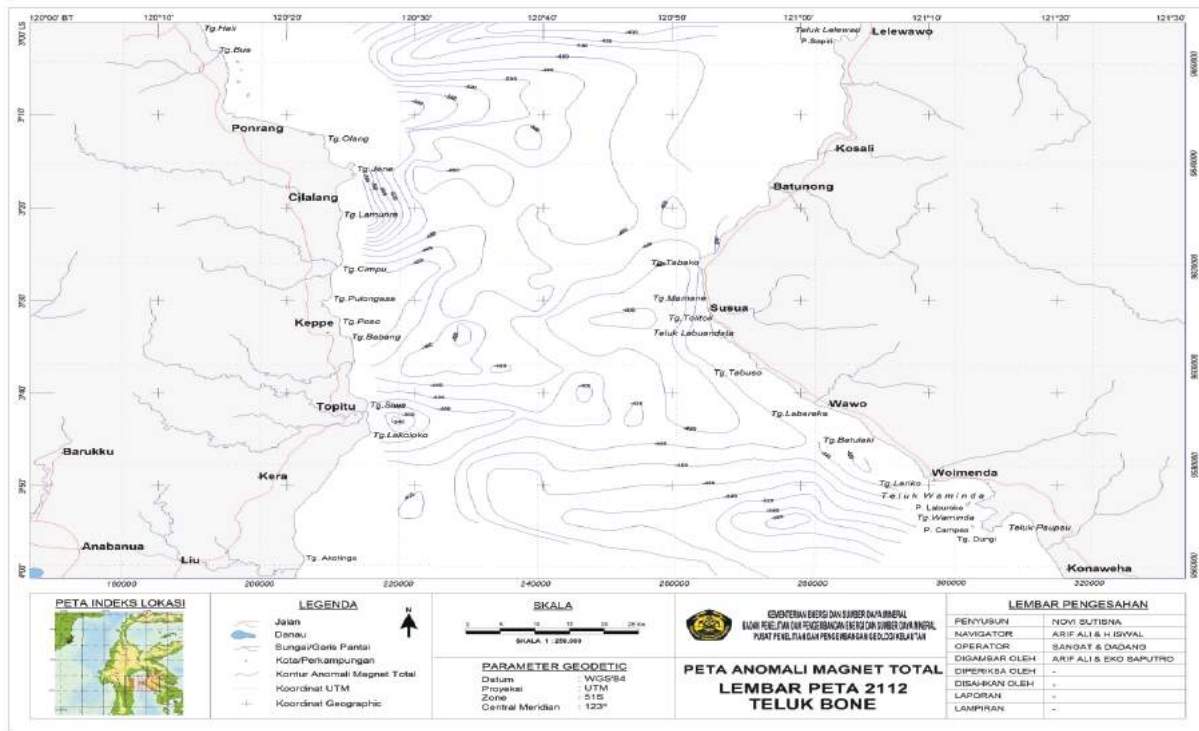


Gambar 5.24. Peta Anomali Geomagnetik Kelautan di Perairan Gunung Komba

- Peta Presentase Mineral Berat LP 2112, Teluk Bone

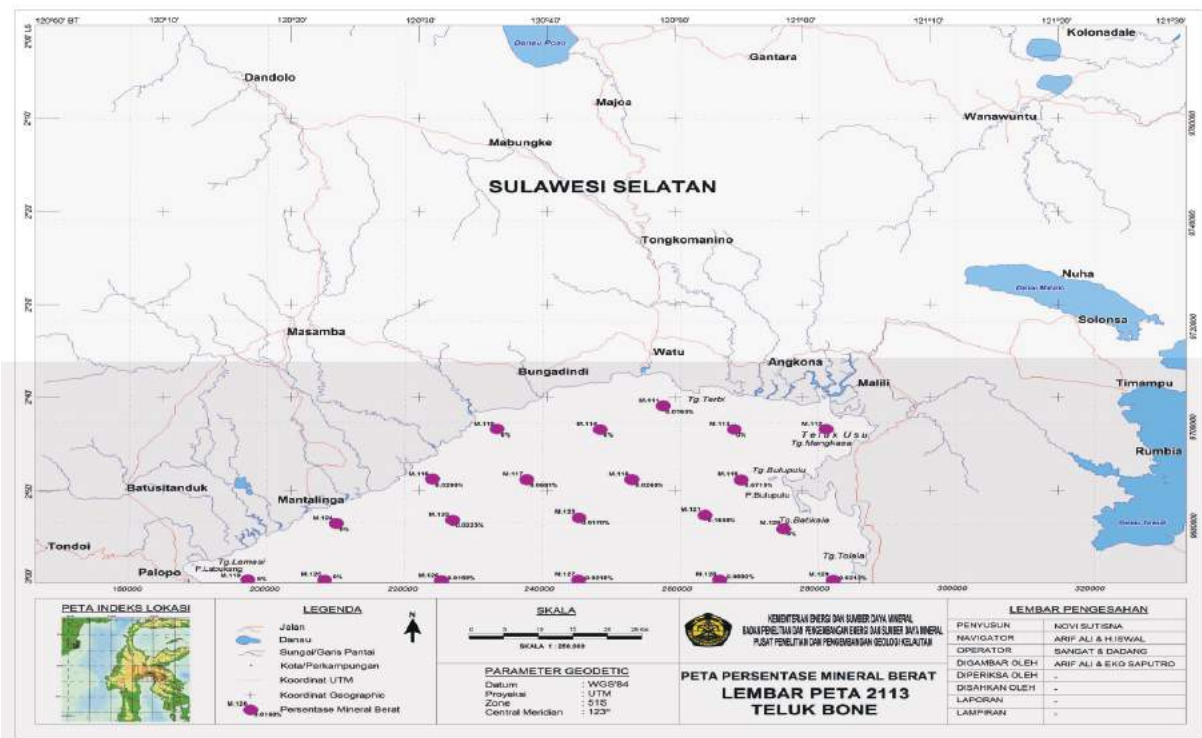


4. Peta Anomali Magnet total LP 2112, Teluk Bone



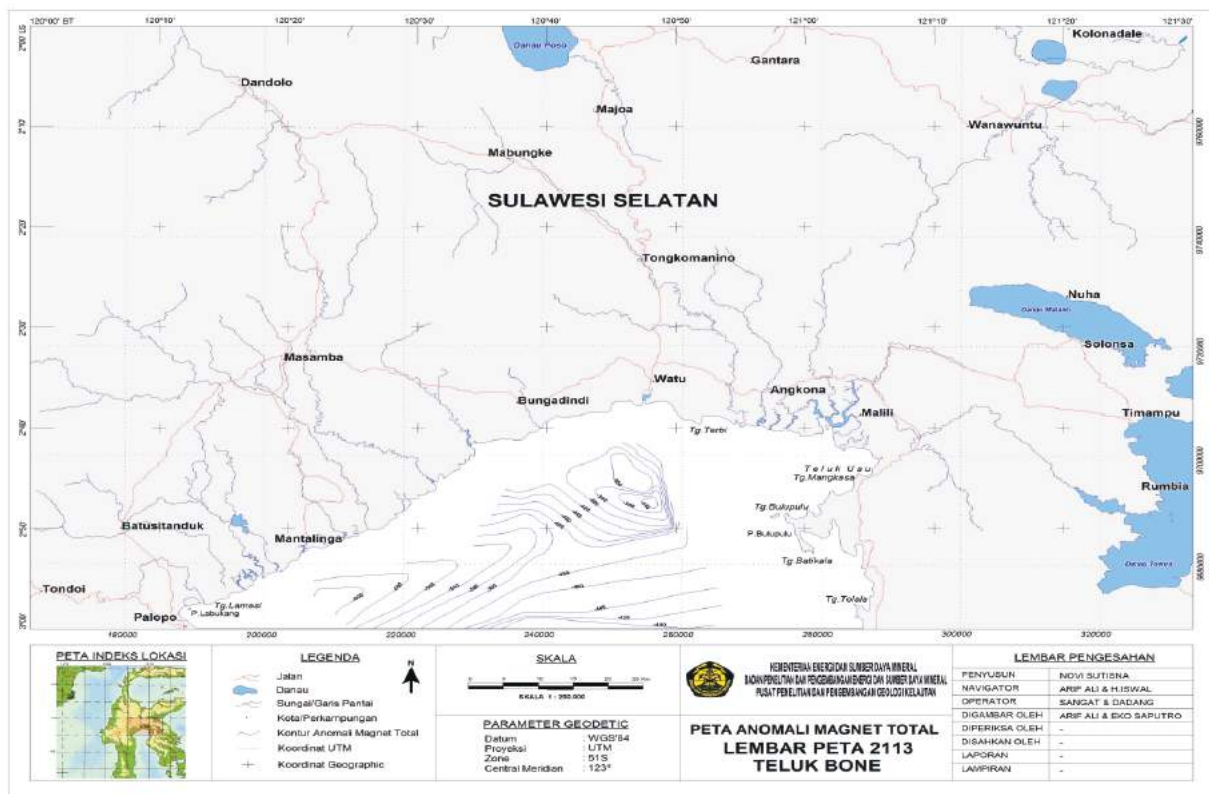
Gambar 5.26. Peta Anomali Magnet total LP 2112, Teluk Bone

5. Peta Presentase Mineral Berat LP 2113, Teluk Bone



Gambar 5.26. Peta Anomali Magnet total LP 2112, Teluk Bone

6. Peta Anomali Magnet total LP 2113, Teluk Bone



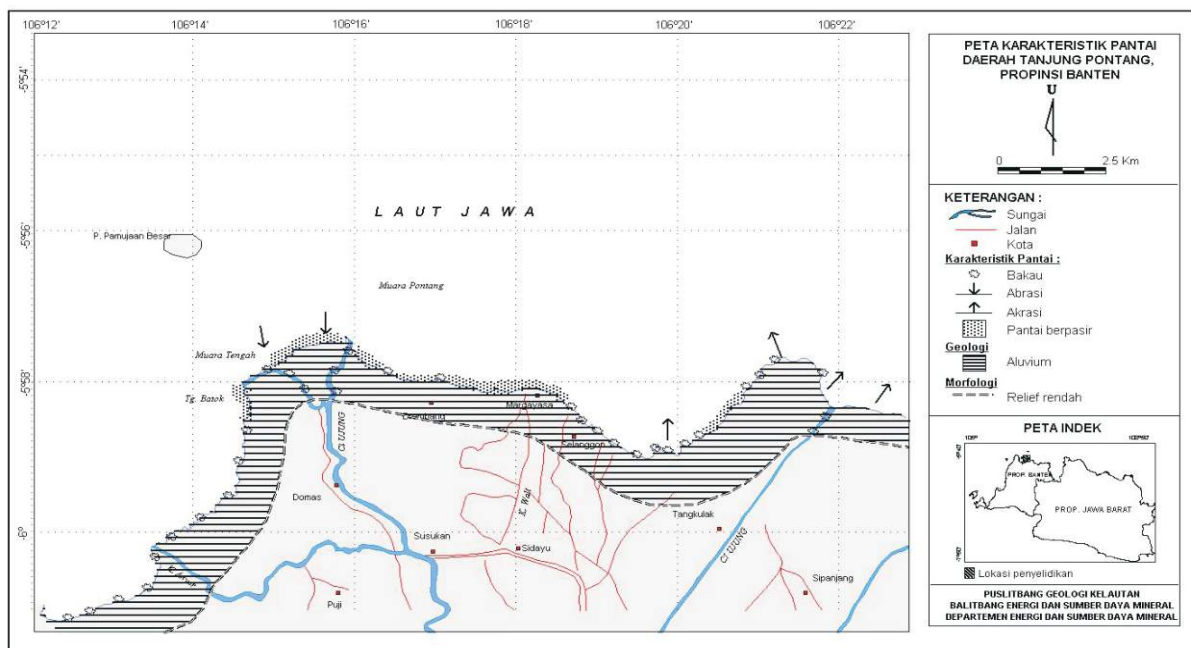
Gambar 5.28. Peta Anomali Magnet total LP 2113, Teluk Bone

7. Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut SA-49



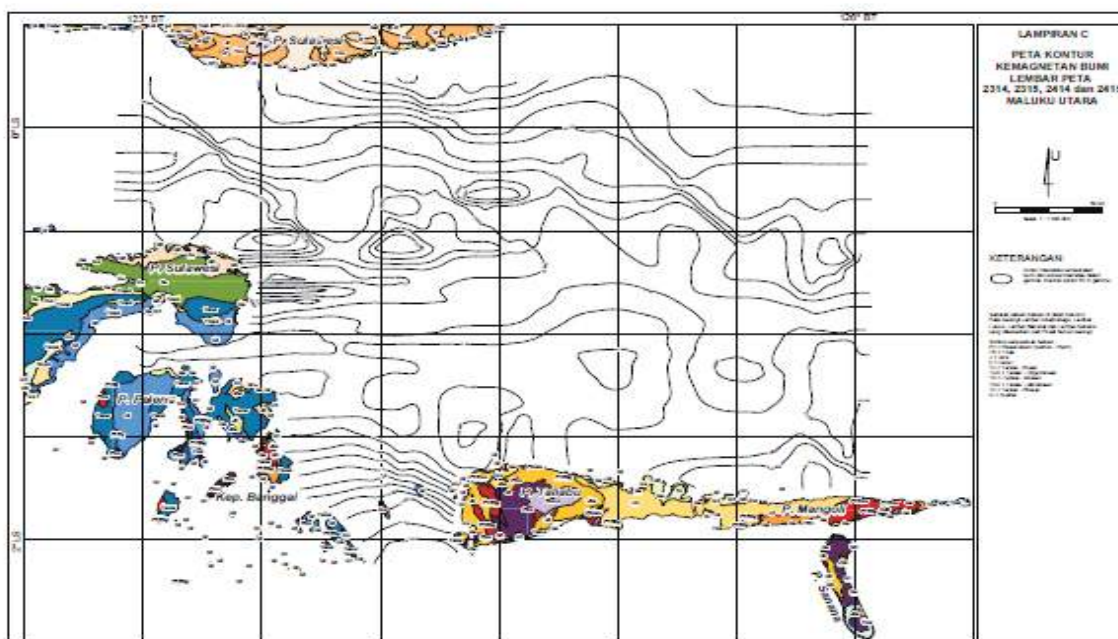
Gambar 5.29. Peta Sebaran Sedimen Permukaan Dasar Laut

8. Peta Karakteristik Pantai Daerah Tanjung Pontang, Banten



Gambar 5.30. Karakteristik Pantai Daerah Tanjung Pontang, Banten

9. Peta Kontur Kemagnetan Bumi LP. 2314,2315,2414 dan 2415 Maluku Utara



Gambar 5.31 Peta Kontur Kemagnetan Bumi LP. 2314,2315,2414 dan 2415 Maluku Utara

Sasaran 7: Perwujudan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM Yang Profesional, Berdaya Saing Tinggi Dan Bermoral

Keberhasilan dan/atau tidak tercapainya target sasaran ini diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2010. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.58.
Indikator Kinerja Sasaran 7 Penunjang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	Frekwensi	346	425	123%
2.	Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	Jenis	34	37	109%
3.	Jumlah peserta diklat yang selesai mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM	Orang	6.325	9.064	143%
4.	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	1.728	10.730	621%
5.	Jumlah NSPK (Standar, Pedoman, Bahan Ajar) diklat	Buah	477	1.254	263%
6.	Jumlah Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi (LDP) yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis	LDP	16	5	31%
7.	Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu	Unit	8	4	50%
8.	Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan	Buah	120	85	71%



1. Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun

Realisasi penyelenggaraan diklat pada tahun 2010 melebihi target dengan capaian sebesar 123%, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah diklat untuk Aparatur yang cukup tinggi yaitu mencapai 233 diklat serta diklat untuk industri/masyarakat sebanyak 192 diklat.

2. Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan

Pada tahun 2010 ini realisasi diklat yang diselenggarakan mencapai 109%, hal ini dikarenakan bertambahnya 3 jenis diklat, yaitu: Bimtek keuangan; Bimtek kepegawaian; dan Bimtek pengelolaan kearsipan.

3. Jumlah peserta diklat pada Badan Diklat ESDM

Jumlah peserta yang selesai mengikuti diklat mencapai 9.064 peserta atau 143% dari target yang ditetapkan.

4. Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ditingkatkan kemampuannya pada tahun 2010 mencapai 621% dari yang ditargetkan, ini disebabkan karena tingginya kegiatan penyertaan pada program pendidikan, pelatihan/kursus, seminar, workshop, dan sejenisnya baik di dalam maupun diluar negeri. Indikator ini adalah salah satu indikator strategis yang diprioritaskan karena sangat mendukung tugas fungsi Badan Diklat ESDM untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Jumlah NSPK (Standar, Pedoman, Bahan Ajar) diklat

Capaian NSPK (standar, pedoman, bahan ajar) adalah sebesar 263%. Peningkatan ini terjadi karena intensitas penyusunan NSPK oleh Pusdiklat pada tahun 2010 meningkat, khususnya NSPK diklat untuk bidang minyak dan gas bumi, serta geologi yang melebihi target yang direncanakan.

6. Jumlah Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi (LDP) yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

Realisasi akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah/Profesi di tahun 2010 ini berada jauh dibawah targetnya hanya mencapai 31%, hal ini disebabkan karena belum beroperasinya Komite Akreditasi LDP sektor ESDM (belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan pendukungnya), sehingga program akreditasi LDP untuk LDP selain lembaga diklat di lingkungan KESDM belum dapat dilakukan. Akreditasi yang direalisasikan yaitu proses akreditasi baru dan/atau re-akreditasi Pusdiklat Migas (manajemen mutu/ISO) dan Pusdiklat Mineral dan Batubara (untuk diklat manajemen oleh Lembaga Administrasi Negara/LAN).

7. Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

Demikian pula dengan sarana diklat yang terakreditasi belum dapat mencapai target (50%), karena sarana yang memenuhi syarat untuk diakreditasi hanya yang dimiliki oleh Pusdiklat Migas, sedangkan yang dimiliki oleh Pusdiklat lainnya belum memenuhi syarat akreditasi standar mutu.

8. Jumlah kerjasama Diklat yang diimplementasikan

Jumlah kerja sama diklat yang diimplementasikan adalah sebanyak 85 buah dari 120 buah yang ditargetkan, atau sebesar 71%. Hal ini dikarenakan sebagian kegiatan kerjasama, khususnya kegiatan implementasi kerjasama dengan mitra kerja yang pelaksanaannya di luar negeri tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan kebijakan pembatasan kunjungan ke luar negeri serta tidak dicapainya target kesepakatan kontrak kerjasama diklat dengan para pengguna jasa.

5.5. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59
Realisasi Anggaran KESDM Tahun 2010
Per Unit kerja Eselon I

Unit Eselon I	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat Jenderal	658,418,571,000	569.193.497.233	86,45
• BPH Migas	266,165,100,000	227.878.114.000	85,62
• Dekonsentrasi	33,000,000,000	23.857.739.356	72,30
Inspektorat Jenderal	111,310,200,000	92.558.145.635	83,23
Direktorat Jenderal Migas	563,323,900,000	485.505.857.131	86,19
Direktorat Jenderal LPE	873,248,238,000	347,351,818,422	39,78
• PT. PLN (Persero)	2,632,437,347,000	1.843.527.708.562	70,03
Direktorat Jenderal Minerba dan Pabum	619.161.379.000	331.273.833.437	53,51
Balitbang ESDM	735.592.300.000	579.013.062.790	78,75
Badiklat ESDM	797.801.282.000	383.508.960.501	48,08
Badan Geologi	719.575.381.000	622.785.974.653	86,65
Setjen DEN	51.148.800.000	37.205.707.906	72,75
Jumlah	8.061.182.498.000	5,543,660,419,626	68.77

Realisasi anggaran belanja tahun 2010 sebesar **Rp. 5,543,660,42 Juta** digunakan untuk membiayai 11 program. Realisasi anggaran per program KESDM selama periode tahun 2010 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6o
Realisasi Anggaran KESDM Tahun 2010
Per Program

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	691.418.571.000	593.051.236.589	85,77	98.367.334.411
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur KESDM				
3	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	111.310.200.000	92.558.145.635	83,23	18.752.054.365
4	Program Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	266.165.100.000	227.878.114.000	85,62	38.286.986.000
5	Program Pengelolaan Dan Penyediaan Minyak Dan Gas Bumi	563.323.900.000	485.505.857.131	86,19	77.818.042.869
6	Program Pengelolaan Listrik Dan Pemanfaatan Energi	3.505.685.585.000	2.190.879.526.984	62,50	1.314.806.058.016
7	Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Batubara, Panas Bumi Dan Air Tanah	619.161.379.000	331.273.833.437	53,51	287.887.545.563
8	Program Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya	735.592.300.000	579.013.062.790	78,75	156.579.237.210

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Mineral				
9	Program Pendidikan Dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral	797.801.282.000	383.508.960.501	48,08	414.292.321.499
10	Program Penelitian, Mitigasi Dan Pelayanan Geologi	719.575.381.000	622.785.974.653	86,65	96.789.406.347
11	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	51.148.800.000	37.205.707.906	72,75	13.943.092.094
TOTAL		8.061.182.498.000	5.543.660.419.626	68,77	2.517.522.078.374

Rendahnya penyerapan anggaran, disebabkan beberapa hal yaitu :

1. Adanya anggaran blokir yang tidak dapat dibuka blokirnya, sedangkan persentase realisasi pada laporan keuangan diperoleh dari jumlah realisasi dibandingkan dengan anggaran pada pagu awal dimana di dalamnya masih terdapat anggaran yang diblokir, sehingga hal ini turut memperkecil persentase realisasi.
2. Banyaknya pekerjaan yang gagal lelang karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Hal ini terutama terjadi pada belanja modal, sehingga menambah jumlah anggaran yang tidak dapat terealisasi.
3. Penyerapan DIPA yang bersumber dari PNBP kurang maksimal karena efektif pencairan baru mulai triwulan III.

BAB VI

PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 merupakan media perwujudan akuntabilitas terhadap keberhasilan capaian kinerja sesuai perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP Tahun 2010 merupakan permulaan dari pelaporan akuntabilitas terhadap Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014. Namun demikian, informasi kinerja yang disajikan tidak hanya untuk tahun berjalan saja tetapi juga mencakup periode-periode sebelumnya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa pengukuran kinerja ESDM dalam Tahun 2010 terbagi dalam 2 kategori, yaitu: (1) Capaian Kinerja Utama sesuai hasil pengukuran kinerja atas IKU; dan (2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Tahun 2010 – 2014.

Secara ringkas capaian kinerja dari masing-masing kategori dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

6.1. Capaian Kinerja Utama

Merujuk pada tabel di bawah ini yang berisi informasi ringkasan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja IKU dalam Tahun 2010 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan untuk beberapa IKU capaiannya melampaui target yang ditetapkan, yaitu: (1) Prosentase penerimaan negara sektor ESDM adalah 104% terhadap target APBN; (2) Jumlah produksi ESDM, yang antara lain berupa minyak bumi, gas bumi, batubara, dan mineral adalah 102,2%; (3) Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri adalah 106,4%.

Tabel 6.1.
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

1.	Prosentase penerimaan negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap target APBN	104%
2.	Jumlah investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	89%
3.	Jumlah Kontrak Kerja Sama Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditanda tangani	71.05%
4.	Jumlah produksi ESDM: • Minyak bumi • Gas bumi • Batubara • Mineral: ◦ Tembaga ◦ Emas ◦ Perak ◦ Timah ◦ Nikel Matte ◦ Ferronikel ◦ Bijih Nikel ◦ Bauksit • Listrik	102.2% 97.9% 106% 102% 102% 106% 104% 91% 88% 102% 120% 106% 95% 99.17%
5.	Jumlah Subsidi BBM dan Listrik	96.5%
6.	Prosentase pemanfaatan produk sektor ESDM : a. Prosentase hasil lifting minyak bumi yang diolah menjadi produk minyak b. Prosentase pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan domestik c. Prosentase hasil pemanfaatan mineral dan batubara untuk kebutuhan domestik: ◦ Mineral ◦ Batubara d. Elastisitas Energi	89,12% 101.8% 100.6% 64.4% 169% 136.3% 89,7%
7.	Prosentase peningkatan pemberdayaan kapasitas nasional	97.7%
8.	Prosentase Kemampuan pasokan energi (BBM) dalam negeri	106.4%

6.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sesuai dengan Renstra Tahun 2010 – 2014 Kementerian ESDM terdapat 14 sasaran strategis yang ditargetkan untuk diwujudkan dalam Tahun 2010. Hasil pengukuran terhadap kinerja sasaran strategis ini menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Merujuk pada tabel di bawah ini terdapat beberapa sasaran strategis yang capaian kinerjanya sesuai dan melampaui target, yaitu: (1) Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik dengan capaian kinerja 100%; (2) Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energy, dengan capaian kinerja 129,8%; (3) Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara, dengan capaian kinerja 104%; dan (4) Peningkatan nilai tambah dengan capaian kinerja 100%.

Sedangkan sasaran strategis yang capaian kinerjanya sedikit di bawah target (90%-99,5%) adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik dengan capaian kinerja 99,2%; (2) Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral dengan capaian kinerja 93%; (3) Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah dengan capaian kinerja 96,6%; (4) Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik dengan capaian kinerja 96,5%; (5) Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor dengan capaian kinerja 99,2%; (6) Terwujudnya pemberdayaan nasional dengan capaian kinerja 91,3%.

Tabel 6.2.
Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2010

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik	Jumlah Produksi ESDM:	99.2%
		• Produksi minyak bumi	98%
		• Produksi gas bumi	106%
		• Produksi batubara	102%
		• Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	89%
		• Produksi mineral	102%
		• Produksi BBM	105%
		• Produksi LPG	92%
		• Produksi LNG	99.9%

2.	Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestic	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Pupuk Dan Petrokimia	100%
3.	Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energy	Persentase pengembangan energy dalam rangka diversifikasi energy	129.8%
		• Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik:	109.5%
		o Pangsa Minyak Bumi	83.3%
		o Pangsa Gas Bumi	150.2%
		o Pangsa batubara	103%
		o Pangsa panas bumi	76.9%
		• Pangsa energi baru terbarukan lainnya	150%
4.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral	Persentase pembangunan infrastruktur energi dan mineral	93%
		• Jaringan pipa gas kota	109.7%
		• Rasio elektrifikasi	99.9%
		• Kapasitas Pembangkit listrik	68.4%
		• Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)	94%
5.	Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energy	Elastisitas Energi	88,9
		Penurunan Emisi CO ₂	70,3
6.	Meningkatnya investasi sektor ESDM	Jumlah Investasi Sektor ESDM	89%
		• Jumlah Investasi sub sektor migas	98%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)
		• Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi	57%
		• Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum	138,6%
7.	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	Total Penerimaan Negara Sektor ESDM	104%
		• Jumlah penerimaan negara sub sektor migas	103%
		• Jumlah PNBP dari subsektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi)	109.6%
		• Jumlah Penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)	113%
8.	Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Persentase peran sector ESDM dalam pembangunan daerah	96,6%
		• Jumlah dana bagi hasil sector ESDM	92.2%
		• Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum	108.4%
		• Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas	86.6%
		• Jumlah CSR sector ESDM	90.9%
		◦ Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum	72.8%
		◦ Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	100%
		◦ Jumlah CSR subsektor Migas	197.2%
		• Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik	100%
		• Jumlah desa mandiri energi (DME)	100%
		• Jumlah sumur bor daerah sulit air	100%
9.	Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Jumlah subsidi sector ESDM	96.5%
		• Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN)	107,4%
		• Jumlah subsidi Listrik	86.0%
10	Peningkatan peran penting		99.2%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)
	sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor	• Jumlah ekspor minyak mentah	98,7%
		• Jumlah ekspor gas	116.7%
		• Jumlah impor BBM	116.9%
		• Jumlah impor minyak mentah	64.6%
11	Terwujudnya peningkatan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM	82.6%
		• Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	97.2%
		• Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	71.5%
		• Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	118.4%
12	Terwujudnya pemberdayaan nasional	Persentase pemberdayaan nasional	91.3%
		• Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional	80%
		• Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	104%
		• Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sub sektor Pertambangan Umum	90%
13	Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	100%
14	Peningkatan industri jasa (<i>backward linkage</i>) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM, antara lain pupuk (<i>forward linkage</i>):		83.2%
	Peningkatan industri jasa penunjang	• Jumlah industri jasa penunjang sector ESDM	96.3%
		◦ Jumlah industri jasa penunjang Migas	97.5%
		◦ Jumlah industri jasa penunjang ketenagalistrikan	96%
		◦ Jumlah industri jasa penunjang Pertambangan umum	95.5%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)
	Terpenuhinya bahan baku industri pupuk	Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk	100%

6.3. Komitmen Langkah Perbaikan Ke Depan

Selanjutnya seluruh capaian IKU dan sasaran strategis di atas telah dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa-masa mendatang. Hal merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Kementerian ESDM untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai hasil analisis kami atas capaian kinerja 2010 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor ESDM guna mewujudkan Visi ESDM, yaitu: 'Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat'.
2. Meningkatkan komitmen antar unit-unit organisasi dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran langsung bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
4. Penetapan tujuan dan sasaran strategis harus mempertimbangkan berbagai isu strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional, seperti: konservasi energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional, pemanfaatan energi alternatif, dan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Meneruskan langkah strategis untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam lingkungan organisasi KESDM sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional maupun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014 guna mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia di lingkungan organisasi Kementerian ESDM.
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Hal ini dapat dicapai antara lain melalui koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi KESDM, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Konsisten melakukan pengkajian yang mendalam atas kuantitas dan kualitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran stratejik maupun cara-cara pengukuran dan evaluasi kinerja.

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
20.	Perwujudan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral	Realisasi pelaksanaan PKPT	Obrik	160	163	101,90%	Balitbang ESDM
		Jumlah usulan paten dan hak cipta	Paten	6	6	100%	
		Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional dan laporan ilmiah	Makalah	109	115	105.5%	
		Jumlah masukan/rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	29	47	162.1	
		Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral	Pilot Plant	24	21	87.5	
21.	Perwujudan sumber daya manusia sektor ESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	Frekwensi	346	425	123%	Badiklat ESDM
		Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	Jenis	34	37	109%	
		Jumlah peserta diklat yang selesai mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM	Orang	6.325	9.064	143%	
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	1.728	10.730	621%	
		Jumlah NSPK (Standar, Pedoman, Bahan Ajar)	Buah	477	1.254	263%	

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2010

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
SASARAN STRATEGIS							
1.	Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik					99.2%	
		Produksi minyak bumi	MBOPD	965	945	98%	Ditjen Migas
		Produksi gas bumi	MBOEPD	1.503	1.590	106%	
		Produksi batubara	Juta Ton	254	270	102%	Ditjen Minerbapabum
		Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	Juta Ton	75	84	89%	
		Produksi mineral:				102%	
		Tembaga	Ton	930,000	989,953	106	
		Emas	Ton	107	111	104	
		Perak	Ton	355	323	91	
		Timah	Ton	90,000	78,965	88	
		Nikel Matte	Ton	77,000	78,336	102	
		Ferromikel	Ton	15,000	17,970	120	
		Bijih Nikel	Ton	6,200,000	6,561,404	106	
		Bauksit	Ton	7,500,000	7,148,124	95	
		Produksi BBM	Juta KL	36.5	38.4	105%	Ditjen Migas
Produksi LPG	Juta Ton	2	2.44	92%			
Produksi LNG	Juta Ton	24,12	24,10	99.9%			
2.	Meningkatnya	Persentase Pemenuhan	%	100	100	100%	Ditjen Migas

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
	kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik	Kebutuhan Bahan Baku Pupuk Dan Petrokimia					
3.	Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik:				129.8%	Ditjen Ketenagalistrikan
		Pangsa Minyak Bumi	%	80,4	88	109,5	
		Pangsa Gas Bumi	%	30	25	83.3	
		Pangsa batubara	%	24,5	26	106.1	
		Pangsa panas bumi	%	23,3	35	103	
		Pangsa energi baru terbarukan lainnya	%	2,6	2	76.9	
4.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral						
		Jaringan pipa transmisi gas bumi	km	200		93%	Ditjen Migas
		Jaringan pipa gas kota	RT	12.000	13.166	109.7%	
		Rasio elektrifikasi	%	67.2	67.15	99.9%	Ditjen Ketenagalistrikan
		Kapasitas Pembangkit listrik	MW	1150.15	786.85	68.4%	
		Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP)	MW	1261	1189	94%	
5.	Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi					88.9%	Ditjen Ketenagalistrikan
		Elastisitas Energi	%	1,6	1.8	88.9%	
		Penurunan Emisi CO ₂	%	5,4			Ditjen Migas
6.	Terjaminnya pasokan					89%	

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
		Realisasi pelaksanaan PKPT	Obrik	160	163	101.90%	
20.	Perwujudan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor energi dan sumber daya mineral	Jumlah usulan paten dan hak cipta	Paten	6	6	100%	Balitbang ESDM
		Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional dan laporan ilmiah	Makalah	109	115	105.5%	
		Jumlah masukan/rekomendasi kebijakan	Rekomendasi	29	47	162.1	
		Jumlah pilot plant dan demo plant atau rancangan produk rancang bangun penerapan teknologi unggulan bidang energi dan sumber daya mineral	Pilot Plant	24	21	87.5	
		Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	Frekwensi	346	425	123%	
		Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	Jenis	34	37	109%	
21.	Perwujudan sumber daya manusia sektor ESDM yang profesional, berdaya saing tinggi dan bermoral	Jumlah peserta diklat yang selesai mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM	Orang	6.325	9.064	143%	Badiklat ESDM
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	1.728	10.730	621%	
		Jumlah NSPK (Standar, Pedoman, Bahan Ajar)	Buah	477	1.254	263%	

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
19.	Perwujudan KESDM yang bersih, akuntabel dan transparan	Prosentase efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan KESDM	%	90	80.74	89.7%	Inspektorat Jenderal
		Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	Buah	25	28	112%	
		Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan	Kasus	3	3	100%	
		Rasio berita negatif, netral dan positif	%	10 : 85 : 5	6 : 89 : 5	88,24%	
		Penyelesaian kasus atas kewajiban penyeteroran kepada kas negara	Rp	4.067.203.020	4.067.203.020	100%	
			US\$	7,250,000.00	7,250,000.00	100%	
		Pemantauan pengaduan masyarakat yang telah diproses/ditindak lanjuti	Pengaduan	15	15	100%	
		Penyelesaian LHP dan MHP yang tepat waktu	LHP/ MHP	160	163	100%	
		Indeks kepuasan unit eselon I atas pelaksanaan pendampingan dan konsultasi	Unit Es. I	8	8	100%	
		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Obrik	115	115	100%	
		Reviu laporan keuangan	Unit Es. I	8	8	100%	

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
	energi dan bahan baku domestik	Jumlah Investasi sub sektor migas	US\$ Juta	13.784,8	13.508,2	98%	Ditjen Migas
		Jumlah Investasi bidang listrik dan pemanfaatan energi	US\$ Juta	8.733,8	4.968,1	57%	Ditjen Ketenagalistrikan
		Jumlah investasi sub sektor pertambangan umum	US\$ Juta	2.502,2	3.467,9	138,6%	Ditjen Minerbapabum
						104%	
		Jumlah penerimaan negara sub sektor migas	Rp Triliun	215.02	220.99	103%	Ditjen Migas
7.	Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	Jumlah PNBp dari subsektor pertambangan umum (mineral, batubara dan panas bumi)	Rp Triliun	61.444.4	67.340,7	109.6%	Ditjen Minerbapabum
		Jumlah Penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)	Rp Triliun	629,6	711,9	113%	Balitbang, Badiklat, BPH Migas
						96.62%	Ditjen Minerbapabum
		Jumlah dana bagi hasil sector ESDM	Rp Triliun	38.9	35.8	92.2%	Ditjen Migas
		Jumlah dana bagi hasil subsektor Minerba Pabum	Rp Triliun	9.9	10,73	108.4%	Ditjen Ketenagalistrikan
		Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas	Rp Triliun	29	25,1	86.6%	
		Jumlah CSR sector ESDM	Rp Miliar	1.614	1.467,5	90.9%	
8.	Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR subsektor	Rp Miliar	1.308,2	952,2	72.8%	

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
		Minerba Pabum					
		Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi	Rp Miliar	90.3		100%	
		Jumlah CSR subsektor Migas	Rp Miliar	215.5	425	197.2%	
		Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik	Kms/MVA	2.694/45,17	2.694/45,17	100%	
		Jumlah desa mandiri energi (DME)	DME	50	50	100%	
		Jumlah sumur bor daerah sulit air	Titik Bor	100	100	100%	
9.	Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Jumlah subsidi BBM, LPG dan BBN)	Rp Triliun	88,89	82,35	92,6	Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan
		Jumlah subsidi Listrik	Rp Triliun	55,11	62,81	114,0	
10.	Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor	Jumlah ekspor minyak mentah	Juta barel	135	133.2	98,7%	Ditjen Migas
		Jumlah ekspor gas	MMSCFD	4.153	4.848	116.7%	
		Jumlah impor BBM	Juta KL	27.08	23.17	116.9%	
		Jumlah impor minyak mentah	MBPD	254	344	135.4%	
11.	Terwujudnya					82.6%	Ditjen Minerbapabum

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
	ketahanan energi nasional.	Jumlah daerah yang menyusun Rencana Umum Energi Daerah	Daerah	33	8	24.2%	
		Jumlah penetapan dan review Rencana Umum Energi Nasional	Buah	1	-	0	
		Jumlah wilayah rawan krisis dan darurat energi yang teridentifikasi	Wilayah	33	13	39.4%	
		Persentase rekomendasi lokasi dan besaran (volume) cadangan penyangga energi	% (region)	100	100	100%	
		Jumlah dokumen perencanaan yang sinergis	Dokumen	3	3	100%	
		Persentase dokumen kesepakatan kerja sama yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas rencana strategis	%	60	50	83,3%	
18.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Pencapaian kinerja KESDM sesuai target	%	100	96.38	96.38%	Sekretariat Jenderal
		Persentase anggaran KESDM yang menunjang Prioritas nasional sebesar 52%	%	100	92	92%	
		Persentase Penyajian LK tepat waktu (e-g hari, minggu,dll)	%	95	105	110.5%	
		Opini BPK terhadap LK		WTP	WDP		

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
		kawasan Bencana G. Merapi					
		Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000	Kawasan	2	2	100%	
		Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur	Lokasi	13	13	100%	
		Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	7	7	100%	
		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	13	13	100%	
		Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	Gunung Api	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	100 %	
17.	Pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang	Jumlah rancangan kebijakan di bidang energi yang terselesaikan	Kajian	2	2	100%	Setjen Dewan Energi Nasional

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
	peningkatan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM	Orang	1.213.092	1.002.488	82.6%	Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan
		Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	Orang	304.412	295.725	97.2%	
		Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	Orang	787.000	562,679	71.5%	
		Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	Orang	121.680	144.084	118.4%	
12.	Terwujudnya pemberdayaan nasional	Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional		100 : 1	80 : 1	91.33% 80%	Ditjen Minerbababum Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan
		Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	%	55	57	104%	
		Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sub sektor Pertambangan Umum	%	60	54	90%	
13.	Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	%	60	60	100%	Ditjen Migas
14.	Peningkatan industri jasa (backward linkage) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM,					83.15%	Ditjen Minerbababum

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
		kawasan Bencana G. Merapi					
		Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50.000	Kawasan	2	2	100%	
		Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur	Lokasi	13	13	100%	
		Jumlah lokasi yang telah dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	7	7	100%	
		Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100.000	Lokasi	13	13	100%	
		Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi	Gunung Api	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	68 gunungapi dipantau melalui pos PGA 37 gunungapi dipantau melalui 10 regional center	100 %	
17.	Pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang	Jumlah rancangan kebijakan di bidang energi yang terselesaikan	Kajian	2	2	100%	Setjen Dewan Energi Nasional

No.	Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Presentase Pencapaian	Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator					
	peningkatan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM	Orang	1.213.092	1.002.488	82.6%	Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan
		Jumlah tenaga kerja sub sektor migas	Orang	304.412	295.725	97.2%	
		Jumlah tenaga kerja sub sektor Ketenagalistrikan	Orang	787.000	562,679	71.5%	
		Jumlah tenaga kerja sub sektor pertambangan umum	Orang	121.680	144.084	118.4%	
12.	Terwujudnya pemberdayaan nasional	Rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional		100 : 1	80 : 1	91.33% 80%	Ditjen Minerbababum Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan
		Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi	%	55	57	104%	
		Persentase Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sub sektor Pertambangan Umum	%	60	54	90%	
13.	Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	%	60	60	100%	Ditjen Migas
14.	Peningkatan industri jasa (backward linkage) dan industri yang berbahan baku dari sektor ESDM,					83.15%	Ditjen Minerbababum

HASIL KEGIATAN PENGEBORAN AIR TANAH
DAN JUMLAH DEBIT TAHUN ANGGARAN 2010

No	Lokasi Pengeboran		Debit		Peruntukan	
1	Desa	: Medong	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Mekarjaya				
	Kabupaten	: Pandeglang				
	Provinsi	: Banten				
2	Desa	: Pasirtanjung	8.280	liter/jam	2.300	Jiwa
	Kecamatan	: Rangkasbitung				
	Kabupaten	: Lebak				
	Provinsi	: Banten				
3	Desa	: Sukamanah	7.560	liter/jam	2.100	Jiwa
	Kecamatan	: Baros				
	Kabupaten	: Serang				
	Provinsi	: Banten				
4	Desa	: Tanjungkerta	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Pagergunung				
	Kabupaten	: Tasikmalaya				
	Provinsi	: Jawa Barat				
5	Desa	: Cibunar	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Cibatuh				
	Kabupaten	: Garut				
	Provinsi	: Jawa Barat				
6	Desa	: Binangun	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Pataruman				
	Kabupaten/Kota	: Banjar				
	Provinsi	: Jawa Barat				
7	Desa	: Cikanyere	8.280	liter/jam	2.300	Jiwa
	Kecamatan	: Sukaresmi				
	Kabupaten	: Cianjur				
	Provinsi	: Jawa Barat				
8	Desa	: Manggahang	8.280	liter/jam	2.300	Jiwa
	Kecamatan	: Baleendah				
	Kabupaten	: Bandung				
	Provinsi	: Jawa Barat				
9	Desa	: Citalem	8.280	liter/jam	2.300	Jiwa
	Kecamatan	: Cipongkor				
	Kabupaten	: Bandung Barat				
	Provinsi	: Jawa Barat				

No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
10	Desa	:	Sukaslamet	8.280 liter/jam	2.300 Jiwa
	Kecamatan	:	Kroya		
	Kabupaten	:	Indramayu		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
11	Desa	:	Tegalpanjang	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Sucinaraja		
	Kabupaten	:	Garut		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
12	Desa	:	Cisampih	7.920 liter/jam	2.200 Jiwa
	Kecamatan	:	Dawuan		
	Kabupaten	:	Subang		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
13	Desa	:	Wanasaraya	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Kalimanggis		
	Kabupaten	:	Kuningan		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
14	Desa	:	Sidamukti	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Majalengka		
	Kabupaten	:	Majalengka		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
15	Desa	:	Karangsuwung	6.480 liter/jam	1.800 Jiwa
	Kecamatan	:	Karangsembung		
	Kabupaten/Kota	:	Cirebon		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
16	Desa	:	Gunung Endut	6.480 liter/jam	1.800 Jiwa
	Kecamatan	:	Klapanunggal		
	Kabupaten	:	Sukabumi		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
17	Desa	:	Mekarjadi	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Sadananya		
	Kabupaten	:	Ciamis		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
18	Desa	:	Neglasari	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Pamarican		
	Kabupaten	:	Ciamis		
	Provinsi	:	Jawa Barat		
19	Desa	:	Singkup	6.480 liter/jam	1.800 Jiwa
	Kecamatan	:	Cibeureum		
	Kabupaten/Kota	:	Tasikmalaya		
	Provinsi	:	Jawa Barat		

No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
100	Desa	:	Mangulewa	8.640 liter/jam	2.400 Jiwa
	Kecamatan	:	Golewa		
	Kabupaten	:	Ngada		
	Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur		
	JUMLAH			725.400 liter/jam	201.500 jiwa

No	Lokasi Pengeboran		Debit		Peruntukan	
	Provinsi	: Sulawesi Selatan				
90	Desa	: Lauwa	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	: Biringbulu				
	Kabupaten	: Gowa				
	Provinsi	: Sulawesi Selatan				
91	Desa	: Badak	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Badak				
	Kabupaten	: Pangkajene				
	Provinsi	: Sulawesi Selatan				
92	Desa	: Mahahe	5.400	liter/jam	1.500	Jiwa
	Kecamatan	: Tobadak II				
	Kabupaten	: Mamuju				
	Provinsi	: Sulawesi Barat				
93	Desa	: Wayamiga (Komp. Yonif TNI-AD)	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Bacan Timur				
	Kabupaten	: Halmahera Selatan				
	Provinsi	: Maluku Utara				
94	Desa	: Bumela	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	: Baliyobuto				
	Kabupaten	: Gorontalo				
	Provinsi	: Gorontalo				
95	Desa	: Batulayar	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Batulayar				
	Kabupaten	: Lombok Barat				
	Provinsi	: Nusa Tenggara Barat				
96	Desa	: Persiapan Keruak	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Keruak				
	Kabupaten	: Lombok Timur				
	Provinsi	: Nusa Tenggara Barat				
97	Desa	: Pungkit	5.400	liter/jam	1.500	Jiwa
	Kecamatan	: Moyo Utara				
	Kabupaten	: Sumbawa				
	Provinsi	: Nusa Tenggara Barat				
98	Desa	: Naitimu	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Tasifeto Barat				
	Kabupaten	: Belu				
	Provinsi	: Nusa Tenggara Timur				
99	Desa	: Oilnaineno	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	: Takari				
	Kabupaten	: Kupang				
	Provinsi	: Nusa Tenggara Timur				

No	Lokasi Pengeboran		Debit		Peruntukan	
20	Desa	: Buana Jaya	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Tanjungsari				
	Kabupaten	: Bogor				
	Provinsi	: Jawa Barat				
21	Desa	: Ciparungsari	8.280	liter/jam	2.300	Jiwa
	Kecamatan	: Cibatu				
	Kabupaten	: Purwakarta				
	Provinsi	: Jawa Barat				
22	Desa	: Sukawening	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Ganeas				
	Kabupaten	: Sumedang				
	Provinsi	: Jawa Barat				
23	Desa	: Wukirsari	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Imogiri				
	Kabupaten	: Bantul				
	Provinsi	: D.I. Yogyakarta				
24	Desa	: Karang Duwet	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	: Paliyan				
	Kabupaten	: Gunung Kidul				
	Provinsi	: D.I. Yogyakarta				
25	Desa	: Tuksono	7.920	liter/jam	2.200	Jiwa
	Kecamatan	: Sentolo				
	Kabupaten	: Kulonprogo				
	Provinsi	: D.I. Yogyakarta				
26	Desa	: Datar	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Mayong				
	Kabupaten	: Jepara				
	Provinsi	: Jawa Tengah				
27	Desa	: Sambiroto	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	: Sedan				
	Kabupaten	: Rembang				
	Provinsi	: Jawa Tengah				
28	Desa	: Pagerbarang	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Pagerbarang				
	Kabupaten	: Tegal				
	Provinsi	: Jawa Tengah				
29	Desa	: Mergoyoso	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	: Salaman				
	Kabupaten	: Magelang				
	Provinsi	: Jawa Tengah				

No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
30	Desa	: Gesit			
	Kecamatan	: Cluwak			
	Kabupaten	: Pati	5.400	liter/jam	1.500 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
31	Desa	: Tirtosworo			
	Kecamatan	: Giriwoyo			
	Kabupaten	: Wonogiri	6.480	liter/jam	1.800 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
32	Desa	: Songbledeg			
	Kecamatan	: Paranggupito			
	Kabupaten	: Wonogiri	7.200	liter/jam	2.000 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
33	Desa	: Pagerandong			
	Kecamatan	: Kaligondang			
	Kabupaten	: Purbalingga	7.200	liter/jam	2.000 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
34	Desa	: Gumelam Wetan			
	Kecamatan	: Susukan			
	Kabupaten	: Banjarnegara	6.480	liter/jam	1.800 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
35	Desa	: Bawukan			
	Kecamatan	: Kemalang			
	Kabupaten	: Klaten	8.280	liter/jam	2.300 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
36	Desa	: Kenteng			
	Kecamatan	: Susukan			
	Kabupaten	: Semarang	9.000	liter/jam	2.500 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
37	Desa	: Binangun			
	Kecamatan	: Banyumas			
	Kabupaten	: Banyumas	6.480	liter/jam	1.800 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
38	Desa	: Balapulang			
	Kecamatan	: Sesepan			
	Kabupaten	: Tegal	7.200	liter/jam	2.000 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			
39	Desa	: Kemukten			
	Kecamatan	: Kersana			
	Kabupaten	: Brebes	8.280	liter/jam	2.300 Jiwa
	Provinsi	: Jawa Tengah			

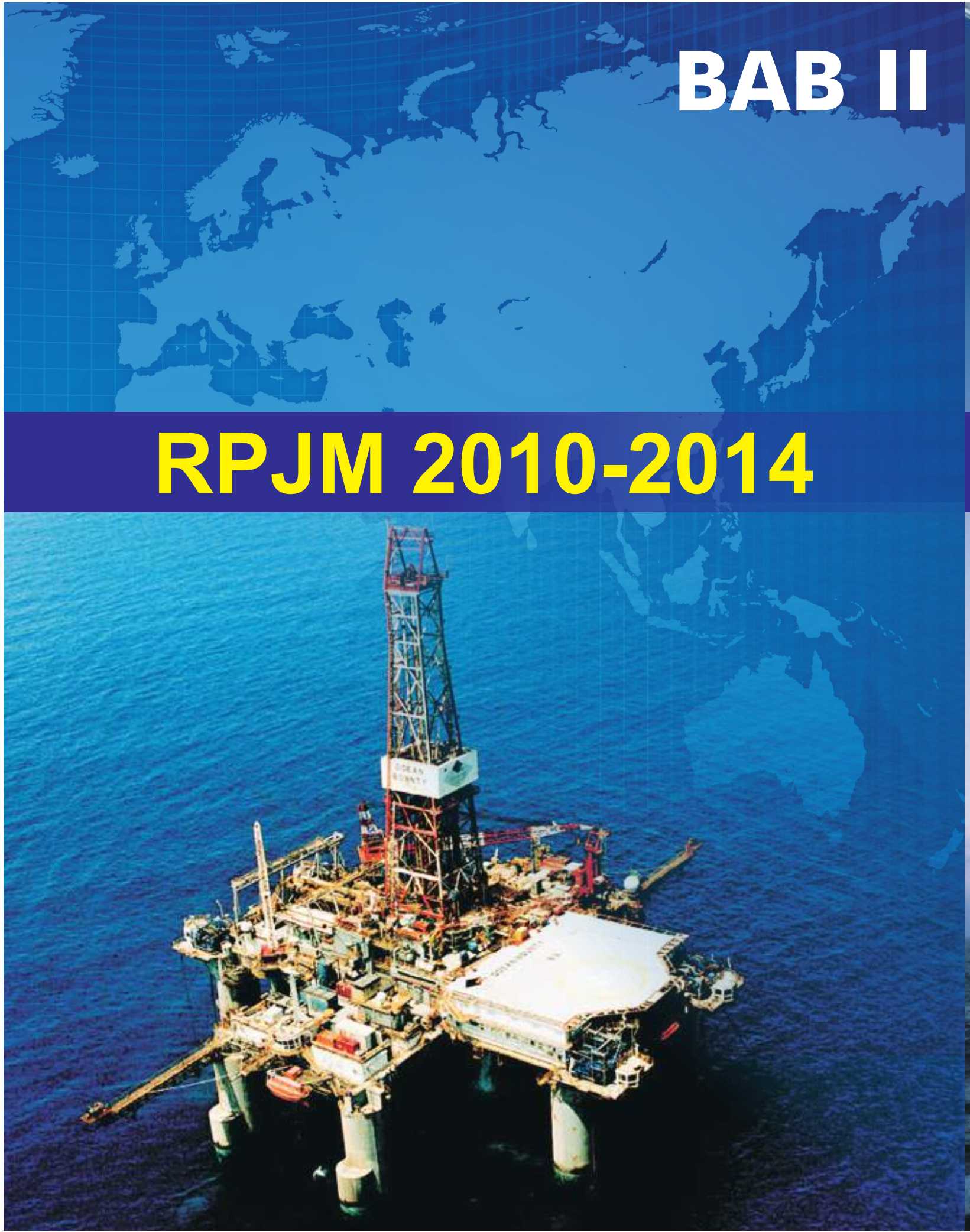
No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
	Provinsi	: Kepulauan Riau			
80	Desa	: Totokaton			
	Kecamatan	: Punggur			
	Kabupaten	: Lampung Tengah	8.280	liter/jam	2.300 Jiwa
	Provinsi	: Lampung			
81	Desa	: Pagardewa (RSUD Hasanuddin)			
	Kecamatan	: Kota Manna			
	Kabupaten	: Bengkulu Selatan	7.200	liter/jam	2.000 Jiwa
	Provinsi	: Bengkulu			
82	Desa	: Sengkubang			
	Kecamatan	: Sengkubang			
	Kabupaten	: Pontianak	5.400	liter/jam	1.500 Jiwa
	Provinsi	: Kalimantan Barat			
83	Desa	: Medan Jaya			
	Kecamatan	: Simpang Ilir			
	Kabupaten	: Kayong Utara	6.480	liter/jam	1.800 Jiwa
	Provinsi	: Kalimantan Barat			
84	Desa	: Pantai Cabe			
	Kecamatan	: Salam Babaris			
	Kabupaten	: Tapin	4.320	liter/jam	1.200 Jiwa
	Provinsi	: Kalimantan Selatan			
85	Desa	: Simpang Tiga			
	Kecamatan	: Mataraman			
	Kabupaten	: Banjar	5.400	liter/jam	1.500 Jiwa
	Provinsi	: Kalimantan Selatan			
86	Desa	: Landasan Ulin Utara			
	Kecamatan	: Liang Anggang			
	Kabupaten/Kota	: Banjarbaru	5.400	liter/jam	1.500 Jiwa
	Provinsi	: Kalimantan Selatan			
87	Desa	: Tendepura			
	Kecamatan	: Watubangga			
	Kabupaten	: Kolaka	6.480	liter/jam	1.800 Jiwa
	Provinsi	: Sulawesi Tenggara			
88	Desa	: Buke			
	Kecamatan	: Buke			
	Kabupaten	: Konawe Selatan	7.200	liter/jam	2.000 Jiwa
	Provinsi	: Sulawesi Tenggara			
89	Desa	: Pucak			
	Kecamatan	: Tompobulu			
	Kabupaten	: Maros	8.640	liter/jam	2.400 Jiwa

No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
70	Desa	:	Botohilitano	4.320 liter/jam	1.200 Jiwa
	Kecamatan	:	Panayama		
	Kabupaten	:	Nias Selatan		
	Provinsi	:	Sumatera Utara		
71	Desa	:	Bukit Limbuku	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Harau		
	Kabupaten/Kota	:	Lima Puluh Kota		
	Provinsi	:	Sumatera Barat		
72	Desa	:	Dadok Tunggul Hitam	8.460 liter/jam	2.350 Jiwa
	Kecamatan	:	Koto Tengah		
	Kabupaten/Kota	:	Padang		
	Provinsi	:	Sumatera Barat		
73	Desa	:	Wonosari	8.460 liter/jam	2.350 Jiwa
	Kecamatan	:	Kinali		
	Kabupaten	:	Pasaman Barat		
	Provinsi	:	Sumatera Barat		
74	Desa	:	Parit Malintang	8.280 liter/jam	2.300 Jiwa
	Kecamatan	:	Enam Lingkung		
	Kabupaten	:	Padang Pariaman		
	Provinsi	:	Sumatera Barat		
75	Desa	:	Paku	10.080 liter/jam	2.800 Jiwa
	Kecamatan	:	Simpang Mamplan		
	Kabupaten	:	Bireun		
	Provinsi	:	Nanggroe Aceh Darussalam		
76	Desa	:	Pante Bayam	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Madat		
	Kabupaten	:	Aceh Timur		
	Provinsi	:	Nanggroe Aceh Darussalam		
77	Desa	:	Bukit Sakai	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Kampar Kiri		
	Kabupaten	:	Kampar Kiri		
	Provinsi	:	Riau		
78	Desa	:	Giondai	8.460 liter/jam	2.350 Jiwa
	Kecamatan	:	Langgam		
	Kabupaten	:	Palelawan		
	Provinsi	:	Riau		
79	Desa	:	Sri Bintan	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Teluk Sebong		
	Kabupaten/Kota	:	Bintan		

No	Lokasi Pengeboran			Debit	Peruntukan
40	Desa	:	Prapagan	7.920 liter/jam	2.200 Jiwa
	Kecamatan	:	Jeruk Legi		
	Kabupaten	:	Cilacap		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
41	Desa	:	Kemanukan	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Bagelen		
	Kabupaten	:	Purworejo		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
42	Desa	:	Pagergunung	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Pringsurat		
	Kabupaten	:	Temanggung		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
43	Desa	:	Randublatung	7.560 liter/jam	2.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Randublatung		
	Kabupaten	:	Blora		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
44	Desa	:	Madu	5.040 liter/jam	1.400 Jiwa
	Kecamatan	:	Mojosongo		
	Kabupaten	:	Boyolali		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
45	Desa	:	Tarub	3.960 liter/jam	1.100 Jiwa
	Kecamatan	:	Tawangharjo		
	Kabupaten	:	Grobogan		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
46	Desa	:	Dempel	8.640 liter/jam	2.400 Jiwa
	Kecamatan	:	Kalibawang		
	Kabupaten	:	Wonosobo		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
47	Desa	:	Taman	6.480 liter/jam	1.800 Jiwa
	Kecamatan	:	Grujugan		
	Kabupaten	:	Bondowoso		
	Provinsi	:	Jawa Timur		
48	Desa	:	Simo	5.400 liter/jam	1.500 Jiwa
	Kecamatan	:	Kwadungan		
	Kabupaten	:	Ngawi		
	Provinsi	:	Jawa Timur		
49	Desa	:	Ngaglik	7.200 liter/jam	2.000 Jiwa
	Kecamatan	:	Paranggupito		
	Kabupaten	:	Magetan		
	Provinsi	:	Jawa Timur		

No	Lokasi Pengeboran			Debit		Peruntukan	
50	Desa	:	Jlubang	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	:	Pringkuku				
	Kabupaten	:	Pacitan				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
51	Desa	:	Bungur	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	:	Tulakan				
	Kabupaten	:	Pacitan				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
52	Desa	:	Sliwung I	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	:	Panji				
	Kabupaten	:	Situbondo				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
53	Desa	:	Sera Barat	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	:	Bluto				
	Kabupaten	:	Sumenep				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
54	Desa	:	Karangpenang	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Karangpenang				
	Kabupaten	:	Sampang				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
55	Desa	:	Gagah	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Kadur				
	Kabupaten	:	Pamekasan				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
56	Desa	:	Kalirejo	7.560	liter/jam	2.100	Jiwa
	Kecamatan	:	Kalipare				
	Kabupaten	:	Malang				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
57	Desa	:	Sukorejo	7.560	liter/jam	2.100	Jiwa
	Kecamatan	:	Wates				
	Kabupaten	:	Blitar				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
58	Desa	:	Clebung	8.640	liter/jam	2.400	Jiwa
	Kecamatan	:	Bubulan				
	Kabupaten	:	Bojonegoro				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
59	Desa	:	Gunungsari	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Umbulsari				
	Kabupaten	:	Jember				
	Provinsi	:	Jawa Timur				

No	Lokasi Pengeboran			Debit		Peruntukan	
60	Desa	:	Gilianyar	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	:	Kamal				
	Kabupaten	:	Bangkalan				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
61	Desa	:	Wongsorejo	6.480	liter/jam	1.800	Jiwa
	Kecamatan	:	Wongsorejo				
	Kabupaten	:	Banyuwangi				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
62	Desa	:	Mlawang	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Klakah				
	Kabupaten	:	Lumajang				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
63	Desa	:	Bucorwetan	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Pakuniran				
	Kabupaten	:	Probolinggo				
	Provinsi	:	Jawa Timur				
64	Desa	:	Kuwun	8.460	liter/jam	2.350	Jiwa
	Kecamatan	:	Mengwi				
	Kabupaten	:	Bangli				
	Provinsi	:	Bali				
65	Desa	:	Luwus	9.000	liter/jam	2.500	Jiwa
	Kecamatan	:	Batuniti				
	Kabupaten	:	Tabanan				
	Provinsi	:	Bali				
66	Desa	:	Pasar Sempurna	9.000	liter/jam	2.500	Jiwa
	Kecamatan	:	Marancar				
	Kabupaten	:	Tapanuli Selatan				
	Provinsi	:	Sumatera Utara				
67	Desa	:	Sungai	7.560	liter/jam	2.100	Jiwa
	Kecamatan	:	Siempat Nempu Hulu				
	Kabupaten	:	Dairi				
	Provinsi	:	Sumatera Utara				
68	Desa	:	Harianja	7.200	liter/jam	2.000	Jiwa
	Kecamatan	:	Pangaribuan				
	Kabupaten	:	Tapanuli Utara				
	Provinsi	:	Sumatera Utara				
69	Desa	:	Sukanalu	7.560	liter/jam	2.100	Jiwa
	Kecamatan	:	Barusjahe				
	Kabupaten	:	Karo				
	Provinsi	:	Sumatera Utara				



BAB II

RPJM 2010-2014

MATRIKS KESEPAKATAN KERJASAMA SEKTOR ESDM TAHUN 2010

No	Judul Mou	Penanda Tangan	Lingkup Mou	Jangka Waktu	Focal Point Unit Utama
1.	SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION IN THE FIELD OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES	1) Dr. R. SUKHYAR, Head Geological Agency Ministry of Energy and Mineral Resources, The Republic of Indonesia. 2) DATO YUNUS ABDUL RAZAK, Director General Minerals and Geoscience Department Ministry of Natural Resources and Environment, Malaysia.	a) Research and investigation of geological resources including mineral, fossil energy and geothermal; b) Research and survey on geology including environmental geology, hydrogeology, and geo-tourism; c) Geological impact assessment and geo-hazards mitigation; d) Development of geo-information systems; e) Capacity building; and f) Any other areas of co-operation in the field of geology and mineral resources to be mutually agreed upon by the Parties.	5 tahun	Badan Geologi
2.	SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN OIL AND GAS FIELD	1) RIDA MULYANA, Head of Research and Development Center For Oil and Gas Technology "LEMIGAS". 2) HO WAN CHANG, President of Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)	a) Geological and geophysical survey in Indonesia; b) Hydrocarbon information and data exchange; c) Co-research with conventional/unconventional oil and gas field management skills; d) Collaborative research on CO ₂ Capture and Storage Technology; e) Co-research with exploration and production of CBM and Gas shale resources in Indonesia; f) Exchange of specialists.	3 tahun dan di perpanjang secara otomatis selama 3 tahun bila tidak ada ketentuan lain	Badan Litbang ESDM c.q. puslitbangtek Migas "LEMIGAS"
3.	SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN COAL AND MINERAL DEVELOPMENT	1) BUKIN DAULAY, Head of Research and Development Center for Mineral and Coal Technology. 2) HO WAN CHANG, President of Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources.	a) Coal preparation and utilization b) Mineral processing and utilization c) Environment impact of coal utilization, especially climate change.	3 tahun dan di perpanjang secara otomatis selama 3 tahun bila tidak ada ketentuan lain	Badan Litbang ESDM c.q. Puslitbang Tekmira
4.	JOINT RESEARCH AND EXPLANATION IN THE	1) R. SUKHYAR, Head of Geological Agency (GA) of Ministry of Energy and Mineral Resources	a) Geothermal resources and geohazards; b) Geological science;	5 tahun	Badan Geologi

3. Peraturan Menteri

NO	NOMOR/TANGGAL	TENTANG
1.	01 Tahun 2010 22 Januari 2010 Berita Negara Nomor 22	Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	02 Tahun 2010 27 Januari 2010 Berita Negara Nomor 41	Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
3.	03 Tahun 2010 27 Januari 2010 Berita Negara Nomor 42	Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Dalam Negeri
4.	04 Tahun 2010 28 Januari 2010 Berita Negara Nomor 43	Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5.	05 Tahun 2010 29 Januari 2010 Berita Negara Nomor 49	Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
6.	06 Tahun 2010 2 Februari 2010 Berita Negara Nomor 58	Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
7.	07 Tahun 2010 30 Juni 2010 Berita Negara Nomor 314	Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
8.	08 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 321	Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
9.	09 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 322...	Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pebangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi
10.	10 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 323	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, serta Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
11.	11 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 324	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan perbaikan Mesin produksi dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
12.	12 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 325	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
13.	13 Tahun 2010	Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR ESDM
YANG DAPAT DISELESAIKAN
TAHUN 2010

1. Peraturan Pemerintah

NO	NOMOR/TANGGAL	TENTANG
1.	Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110	Wilayah Pertambangan
2.	Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3.	Nomor 55 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4.	Nomor 70 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
5.	Nomor 78 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010	Reklamasi dan Pasca Tambang
6.	Nomor 79 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010	Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

2. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

NO	NOMOR/TANGGAL	TENTANG
1.	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010	Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
2.	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3.	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010	Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

NO	NOMOR/TANGGAL	TENTANG
	5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 326	
14.	14 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Nomor 327	Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
15.	15 Tahun 2010 27 Agustus 2010 Berita Negara Nomor 419	Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
16.	16 Tahun 2010 27 Agustus 2010	Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
17.	17 Tahun 2010 23 September 2010 Berita Negara Nomor 463	Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
18.	18 Tahun 2010 22 November 2010 Berita Negara Nomor 552	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19.	19 Tahun 2010 2 Februari 2010 Berita Negara Nomor 599	Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi

No	Pemohon/ Penggugat	Pokok Perkara	Nomor Perkara	Nama & No. Surat Kuasa Mesdm	Tingkat Penyelesaian/Proses Hukum	
					Mahkamah/ Pengadilan	Status
3.	Serikat Pekerja PT PLN (Persero)	Uji Materiil UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	149/PUU- VII/2009 tanggal 8 Desember 2009	01 KU/06/MEM/2010 tanggal 12 Januari 2010 - Penerima Kuasa: - MESDM - DJLPE - StaSus Kemasy & Kelembagaan	Mahkamah Konstitusi	- ESDM telah menyerahkan Keterangan Pemerintah dan Kesimpulan - Putusan Makamah Konstitusi Menolak pemohon dengan putusan tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH BANTUAN HUKUM DAN KASUS YANG DIMENANGKAN DAN DISELESAIKAN

No	Pemohon/ Penggugat	Pokok Perkara	Nomor Perkara	Nama & No. Surat Kuasa Mesdm	Tingkat Penyelesaian/Proses Hukum	
					Mahkamah/ Pengadilan	Status
1.	PT Pukuafu Indah	Perlawanan Pihak Ketiga Pembatalan Putusan Arbitrase Pemerintah RI vs PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 31 Maret 2009 Tergugat I: Menteri ESDM Tergugat II: PT Newmont Nusa Tenggara	416/Pdt.G/2009/ PN. JKT.PST	18 KU/ 06/ MEM 2009 tanggal 23 November 2009 - Penerima Kuasa: - Sutisna Prawira - Bambang Gatot Ariyono - Fadli Ibrahim - Heri Nurzaman - Agus Salim - Adha Yuda Faturochman - Shanty Octora - Jeremia E Purba	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	- Mediasi dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2009 sampai dengan 5 Februari 2010 - Penyerahan Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 April 2010 - Penyerahan Duplik tanggal 2 Juni 2010 - Penyerahan Akta Pembuktian tanggal 22 Juni 2010 - Penyerahan Kesimpulan tanggal 3 Agustus 2010 - Pembacaan Putusan tanggal 11 Oktober 2010, Gugatan tidak diterima/NO - Penggugat mengajukan banding
2.	a. David Tobing b. Agus Moertopo	- Citizen Law Suit atas penadaman bergilir - Presiden RI, Tergugat I MESDM, Tergugat II - PT PLN, Tergugat III	476/Pdt.G/2009/PN.JKT. PST	- Penerima Kuasa: - Sutisna Prawira - Winsisma Wansya - Pamudji Slamet - Bastari - Supriadi - Slamet Riyadi - Shanty Octora - Jeremia E. Purba	Pengadilan Negeri	- Mediasi tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan 29 Maret 2010 - Penyerahan Eksepsi dan Jawaban: 21 April 2010 - Penyerahan Duplik: 12 Mei 2010 - Penyerahan Akta Pembuktian: 17 Juni 2010 - Penyerahan Kesimpulan: 28 Juli 2010 - Pembacaan Putusan tanggal1 September 2010 - Peggugat mengajukan banding

No	Pemohon/ Penggugat	Pokok Perkara	Nomor Perkara	Nama & No. Surat Kuasa Mesdm	Tingkat Penyelesaian/Proses Hukum	
					Mahkamah/ Pengadilan	Status
3.	Serikat Pekerja PT PLN (Persero)	Uji Materiil UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	149/PUU- VII/2009 tanggal 8 Desember 2009	01 KU/06/MEM/2010 tanggal 12 Januari 2010 - Penerima Kuasa: - MESDM - DJLPE - StaSus Kemasy & Kelembagaan	Mahkamah Konstitusi	- ESDM telah menyerahkan Keterangan Pemerintah dan Kesimpulan - Putusan Makamah Konstitusi Menolak pemohon dengan putusan tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH BANTUAN HUKUM DAN KASUS YANG DIMENANGKAN DAN DISELESAIKAN

No	Pemohon/ Penggugat	Pokok Perkara	Nomor Perkara	Nama & No. Surat Kuasa Mesdm	Tingkat Penyelesaian/Proses Hukum	
					Mahkamah/ Pengadilan	Status
1.	PT Indah Pukuafu	Perlawanan Pihak Ketiga Pembatalan Putusan Arbitrase Pemerintah RI vs PT Newmont Nusa Tenggara tanggal 31 Maret 2009 Tergugat I: Menteri ESDM Tergugat II: PT Newmont Nusa Tenggara	416/Pdt.G/2009/ PN. JKT.PST	18 KU/ 06/ MEM 2009 tanggal 23 November 2009 - Penerima Kuasa: - Sutisna Prawira - Bambang Gatot Ariyono - Fadli Ibrahim - Heri Nurzaman - Agus Salim - Adha Yuda Faturochman - Shanty Octora - Jeremia E Purba	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	- Mediasi dilakukan mulai tanggal 8 Desember 2009 sampai dengan 5 Februari 2010 - Penyerahan Eksepsi dan Jawaban tanggal 14 April 2010 - Penyerahan Duplik tanggal 2 Juni 2010 - Penyerahan Akta Pembuktian tanggal 22 Juni 2010 - Penyerahan Kesimpulan tanggal 3 Agustus 2010 - Pembacaan Putusan tanggal 11 Oktober 2010, Gugatan tidak diterima/NO - Penggugat mengajukan banding
2.	a. David Tobing b. Agus Moertopo	- Citizen Law Suit atas penadaman bergilir - Presiden RI, Tergugat I MESDM, Tergugat II - PT PLN, Tergugat III	476/Pdt.G/2009/PN.JKT. PST	- Penerima Kuasa: - Sutisna Prawira - Winsisma Wansya - Pamudji Slamet - Bastari - Supriadi - Slamet Riyadi - Shanty Octora - Jeremia E. Purba	Pengadilan Negeri	- Mediasi tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan 29 Maret 2010 - Penyerahan Eksepsi dan Jawaban: 21 April 2010 - Penyerahan Duplik: 12 Mei 2010 - Penyerahan Akta Pembuktian: 17 Juni 2010 - Penyerahan Kesimpulan: 28 Juli 2010 - Pembacaan Putusan tanggal1 September 2010 - Peggugat mengajukan banding

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional	Persentase penyusunan Kebijakan Energi Nasional	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	56.264,7 (11)

Jumlah Anggaran Tahun 2011 : Rp. 15.298.586 Juta

Jakarta, Maret 2011

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Darwin Zahedy Saleh

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Kementerian : Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik	Jumlah produksi (lifting) minyak bumi	970 MBOPD	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	858.181,7 (1)
	Jumlah produksi gas bumi	1.427 MBOEPD		
	Jumlah pasokan CBM untuk Listrik	5.5 MMSCFD		
	Prosentase jaminan pasokan bahan baku dan bahan bakar migas	70%		
	Jumlah produksi batubara	326,65 Juta Ton	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	416.024,1 (2)
	Jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	78,97 juta Ton		
	Produksi mineral:			
	• Tembaga	665.158 Ton		
	• Emas	102.562 Kg		
	• Perak	278.431 Kg		
	• Ni + Co in matte	70.500 Ton		
	• Timah	75,000 Ton		
	• Bijih nikel	8.500.000 Ton		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
	• Ferronikel	18.000 Ton Ni		
	• Bauksit	10.000.000 Mt		
	• Bijih besi	5.000.000 Mt		
	• Granit	2.500.000 M³		
	Jumlah produksi uap panas bumi	71 Juta Ton	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	708.251 (4)
	Jumlah produksi Bahan Bakar Nabati	604.000 KI		
	Jumlah produksi bio solar	14,5 Juta KI		
	Jumlah produksi biogas	100.000 M³		
Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku pupuk dan petrokimia untuk domestik	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia	100%	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1)
Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi	Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrik :		Pengelolaan Ketenagalistrikan	9.429.000 (3)
	• Pangsa minyak bumi	12%		
	• Pangsa gas bumi	30%		
	• Pangsa batubara	49%		
	• Pangsa panas bumi	4.24%		
	• Air	7%		
	• Biodiesel	0,08%		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
	Jumlah rancangan peraturan perUUan sektor ESDM yang diselesaikan	25 Buah		
	Persentase anggaran KESDM yang menunjang Prioritas nasional sebesar 52%	100%		
	Persentase penghapusan BMN yang dipindah-tangankan kepada pihak ketiga	75%		
	Persentase penyelesaian kewajiban penyetoran kepada negara	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	122.411 (9)
	Persentase penyelesaian MHP tepat Waktu	100%		
Terwujudnya sumberdaya manusia sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun	545 Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Energi Dan Sumber Daya Mineral	779.990,1 (10)
	Jumlah jenis diklat sektor ESDM yang diselenggarakan	14 Jenis		
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kemampuannya	2.379 Orang		
	Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan	636 NSPK		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
gas bumi dalam rangka meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam Negeri	Persentase volume gas bumi yang diniagakan melalui pipa	2% dari tahun 2010		
	Persentase volume gas bumi yang diangkut melalui pipa	6% dari tahun 2010		
Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat	Jumlah peta geologi yang dihasilkan dan digunakan	905 Peta	Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi	864.480,9 (6)
	Jumlah wilayah keprospekan, potensi, dan status sumber daya geologi (panas bumi, batubara, CBM, Gambut, Bitumen padat, dan mineral)	75 Wilayah		
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral	Jumlah Usulan Paten dan Hak Cipta	6 Paten	Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral	772.373 (7)
	Jumlah makalah ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal baik di tingkat nasional maupun internasional dan Laporan Ilmiah	96 Makalah		
	Jumlah Pilot Plant/Demo Plant/Rancangan Produk/Formula/Rancang Bangun Penerapan Teknologi Unggulan bidang ESDM	31 Pilot Plant		
Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di KESDM	Opini BPK terhadap laporan keuangan KESDM	WTP	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	812.753.4 (8)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
	Persentase pemanfaatan BBN pada BBM Transportasi	1,5%	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	(4)
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral	Jumlah sambungan rumah yang terpasang/teraliri jaringan gas bumi untuk rumah tangga	16.000 SR	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1)
	Jumlah kapasitas pembangkit listrik	5.066 MW	Pengelolaan Ketenagalistrikan	(3)
	Jumlah transmisi	2.826 Kms		
	Jumlah gardu induk	9.365 MVA		
	Panjang jaringan dan gardu distribusi	15.813 Kms/ 370 MVA		
	Rasio elektrifikasi	70,4%		
	Jumlah kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan	1.769,9 MW	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	(4)
	Jumlah digester biogas untuk rumah tangga	3.600 Unit		
	Jumlah lokasi fasilitas pembangkit listrik energi baru terbarukan	25 Lokasi		
Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi	Elastisitas energi	1,6%	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 3)
	Penurunan emisi CO ₂	5,9%		
	Jumlah industri dan bangunan gedung yang telah di audit energi	637 Objek	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	(4)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Meningkatnya investasi sektor ESDM	Jumlah investasi sektor ESDM	US\$ 25.291,17 Juta	• Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi • Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara • Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara	Jumlah penerimaan Negara dari sektor ESDM	Rp. 232,80 Triliun	• Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi • Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara • Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi • Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa • Penelitian dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral • Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	(1; 2; 4; 5; 7; 10)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Peningkatan industri jasa (<i>backward linkage</i>) dan industri yang berbahan baku dari □industri ESDM, antara lain pupuk (<i>forward linkage</i>)	Jumlah □industri jasa penunjang Sektor ESDM	1.880 perusahaan	• Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi • Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara • Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
	Prosentase jaminan pasokan bahan baku dan BBM untuk industri	70%	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1)
Sasaran Pendukung				
Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI	Jumlah Badan Usaha yang mendaftarkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas	10 Badan Usaha	Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	235.913,5 (5))
	Jumlah Badan Usaha Niaga Umum dan terbatas pemegang izin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM Non PSO	54 Badan Usaha		
	Jumlah daerah yang telah mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap	8 Provinsi		
Meningkatkan pengembangan infrastruktur jaringan pipa	Jumlah pemberian Hak Khusus pada kegiatan usaha Gas Bumi melalui Pipa	4 Ruas Transmisi dan 7 Pipa <i>Dedicated</i> hilir		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
	Jumlah ekspor batubara	247.68 Juta Ton	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	
	Jumlah impor minyak mentah	90.04 Juta Barel		
	Jumlah impor BBM	30.06 Juta KL		
Terwujudnya peningkatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sektor ESDM	164.875 Orang	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada sektor ESDM	44%	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
	Persentase penggunaan tenaga kerja nasional pada sektor ESDM	93.97%		
Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	65%	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sektor ESDM	Rp 1.679 Miliar	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	(1; 2; 3)
	Jumlah dana bagi hasil Sektor ESDM	Rp 38.391,4 Miliar	Pengelolaan Ketenagalistrikan	
	Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN	50 DME	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	(4)
	Jumlah pulau kecil terluar yang memanfaatkan energi baru terbarukan melalui pengadaan dan pemasangan peralatan energi terbarukan non listrik	2 Pulau		
	Jumlah sumur bor di daerah sulit air	180 Titik Bor	Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi	864.482,9 (6)
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Persentase pengurangan volume subsidi BBM	3,59%	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 3)
	Jumlah subsidi listrik	Rp 40,7 Triliun		
Optimalnya ekspor dan impor □ Industri ESDM	Jumlah ekspor minyak mentah	125 Juta Barel	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1; 2)
	Jumlah ekspor gas	355.956,8 BBTU		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
	Jumlah ekspor batubara	247.68 Juta Ton	Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	
	Jumlah impor minyak mentah	90.04 Juta Barel		
	Jumlah impor BBM	30.06 Juta KL		
Terwujudnya peningkatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja sektor ESDM	164.875 Orang	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
Terwujudnya pemberdayaan nasional	Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada sektor ESDM	44%	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 2; 3)
	Persentase penggunaan tenaga kerja nasional pada sektor ESDM	93.97%		
Peningkatan nilai tambah	Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas	65%	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp/Juta)
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah	Jumlah CSR sektor ESDM	Rp 1.679 Miliar	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara	(1; 2; 3)
	Jumlah dana bagi hasil Sektor ESDM	Rp 38.391,4 Miliar	Pengelolaan Ketenagalistrikan	
	Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN	50 DME	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	(4)
	Jumlah pulau kecil terluar yang memanfaatkan energi baru terbarukan melalui pengadaan dan pemasangan peralatan energi terbarukan non listrik	2 Pulau		
	Jumlah sumur bor di daerah sulit air	180 Titik Bor	Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi	864.482,9 (6)
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik	Persentase pengurangan volume subsidi BBM	3,59%	- Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi - Pengelolaan Ketenagalistrikan	(1; 3)
	Jumlah subsidi listrik	Rp 40,7 Triliun		
Optimalnya ekspor dan impor □ Industri ESDM	Jumlah ekspor minyak mentah	125 Juta Barel	Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	(1; 2)
	Jumlah ekspor gas	355.956,8 BBTU		